

HINDUTVA

Inspirasi Hindu dalam Pembangunan Dunia



Penerbit : Yayasan Wikarman
Alamat : Jl. Singasari Utara Gang Uma Punggul III
No.1, Br. Tagtag Kaja, Peguyangan Denpasar.
Toko Ditu, Jl. Tirta Geduh Bangli - Bali

ISBN 978-602-9038-07-1

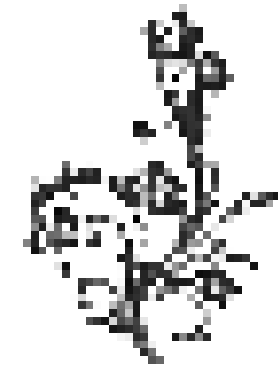
I GEDE SUTARYA
YAYASAN WIKARMAN
2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Prolog.....	1
<i>Amerta</i> , Bukan untuk Para Raksasa.....	5
Kerakyatan, Etika Ekonomi Menuju Jagadhita.....	8
Swadeshi, Merajut Moralitas dengan Ekologi.....	13
Renaissance <i>Pasuwakan</i> untuk Membangun Kemandirian.....	18
Materialisme di Bali, Sebuah Agama.....	23
Pariwisata Budaya, Renungan untuk Reklamasi teluk Benoa	28
Arthasastra, Senjata Rakyat.....	33
Bali Menuju Kultur Politik Pragmatis.....	38
Bedahulu, Membangun Bali “tanpa Negara”	43
Bedahulu, Sebuah Pembebasan.....	47
Pragmatisme Politik dalam Religiusitas Masyarakat Bali ..	52
Hasil Pilkada, Lorong Revitalisasi Kebudayaan.....	57
Desa Pakraman sebagai Mediasi Konflik	62
<i>Dharma Suaka</i> , Taktik Politik Menuju Pencerahan.....	66
Fenomena CPNS, Cermin Kultur Politik Bali.....	71
Kebangkitan Nasional Versus Komunalisme.....	75
Kebangkitan Spritual dan Nasional.....	80
Pilkada, Memilih Kharisma atau Kapital.....	84
<i>Satya Graha</i> , Cermin Kesadaran Politik.....	89
Menafsir Ulang, Mistifikasi Politik di Bali.....	93
<i>Money Politic</i> , Taruhan dan Pesta.....	98
<i>Rebuilding</i> Negosiasi Politik Masyarakat Bali.....	103
Megawati dan Pasar, dari Perspektif Kultur Bali.....	108
Pilihan Masyarakat Bali, sebuah Stagnasi Kultural.....	113
Pilkada Langsung, Ancaman Institusi Lokal?.....	118
Sakralisasi Perubahan dan Konservatisme Politik di Bali...	Tim
Teroris Lokal dan Budaya Politik “Teror” di Bali.....	Suk ses

HINDUTVA

Inspirasi Hindu dalam Pembangunan Dunia



I GEDE SUTARYA

dan Budaya Ketergantungan di Bali.....
Pilkada, Pentas Dunia
Pewayangan.....

123
128
132
136



YWK 2019

<i>Nyomya</i> Kekerasan Menuju Perdamaian.....	141
<i>Soroh</i> , Garis Genetika atau Garis Pembebasan.....	146
Cinta, Derita dan Pembebasan.....	151
Galungan, Semangat Kemenangan Menghadapi Krisis.....	156
Galungan, Sadisme dalam Semangat Pencerahan Sosial.....	161
Galungan dan Kuningan, Hari Kemenagan Dharma?.....	166
Kerancuan Nyepi, Kebingungan Manusia Bali?.....	172
Nyepi, Transformasi Kebudayaan Menuju <i>Jagadhita</i>	177
<i>Nyomya</i> , dari Ritual ke Pergerakan Sosial.....	181
<i>Nyupat</i> Dogmatisme, Menuju rasionalisme.....	186
Pendidikan Hindu, Gerakan Pembebasan.....	191
<i>Peneduh Jagat</i> , Awal atau Akhir Bencana.....	196
Shiwaratri, Gerakan Pembebasan Sosial.....	201
Cinta, Krisis Kemanusiaan dan Pembebasan.....	206
“Bali Rantau” Memimpin, Semangat Baru Kesejahteraan Bali.....	211
Perspektif Dharma dalam Penghapusan Subsidi BBM.....	216
Bom Bali, Lanjutan Teror Kultural.....	221
“Corby” dan “Tawan karang”, Dilema Bali.....	225
Keadilan Ekonomi, Resolusi Konflik Mpu kuturan.....	230
Gempa Pesisir, Kilas Balik Bali abad Ke -19?.....	234
Gyanendra, Reruntuhan Situs Raja Hindu Terakhir.....	238
Nazarudin, Relasi Kultural Pan Balang Tamak Vs Raja.....	243
Keraguan Purnama Kapat, Sebuah transisi Kultural.....	248
Polemik Uluwatu, Pergeseran Menuju Teologi “Semu”.....	253
Konflik Adat, Benang Kusut Politik Masa Lalu.....	258
Kekuasaan dan Mafia, Transisi Masyarakat Tradisional.....	263
Nyepi, Gerakan Kehidupan Menuju Kemuliaan.....	268
Kuningan, Puncak Kemenangan di Medan Kekalahan.....	273
Lebur Gangsa, reformasi “Kekerasan” ke persaudaraan.....	278
Epilog.....	283
Daftar Pustaka.....	287



YWK 2019

<i>Nyomya</i> Kekerasan Menuju Perdamaian.....	145
<i>Soroh</i> , Garis Genetika atau Garis Pembebasan.....	150
Cinta, Derita dan Pembebasan.....	155
Galungan, Semangat Kemenangan Menghadapi Krisis.....	160
Galungan, Sadisme dalam Semangat Pencerahan Sosial.....	165
Galungan dan Kuningan, Hari Kemenagan Dharma?.....	170
Kerancuan Nyepi, Kebingungan Manusia Bali?.....	176
Nyepi, Transformasi Kebudayaan Menuju <i>Jagadhita</i>	181
<i>Nyomya</i> , dari Ritual ke Pergerakan Sosial.....	185
<i>Nyupat</i> Dogmatisme, Menuju rasionalisme.....	190
Pendidikan Hindu, Gerakan Pembebasan.....	195
<i>Peneduh Jagat</i> , Awal atau Akhir Bencana.....	200
Shiwaratri, Gerakan Pembebasan Sosial.....	205
Cinta, Krisis Kemanusiaan dan Pembebasan.....	210
“Bali Rantau” Memimpin, Semangat Baru Kesejahteraan Bali.....	215
Perspektif Dharma dalam Penghapusan Subsidi BBM.....	220
Bom Bali, Lanjutan Teror Kultural.....	225
“Corby” dan “Tawan karang”, Dilema Bali.....	229
Keadilan Ekonomi, Resolusi Konflik Mpu kuturan.....	234
Gempa Pesisir, Kilas Balik Bali abad Ke -19?.....	239
Gyanendra, Reruntuhan Situs Raja Hindu Terakhir.....	243
Nazarudin, Relasi Kultural Pan Balang Tamak Vs Raja.....	248
Keraguan Purnama Kapat, Sebuah transisi Kultural.....	253
Polemik Uluwatu, Pergeseran Menuju Teologi “Semu”.....	258
Konflik Adat, Benang Kusut Politik Masa Lalu.....	263
Kekuasaan dan Mafia, Transisi Masyarakat Tradisional.....	268
Nyepi, Gerakan Kehidupan Menuju Kemuliaan.....	273
Kuningan, Puncak Kemenangan di Medan Kekalahan.....	278
Lebur Gangsa, reformasi “Kekerasa” ke persaudaraan.....	283
Epilog.....	288
Daftar Pustaka.....	292



Erolog Jatidiri Hindu, Guru & Pemburu Lupa

Tulisan ini merupakan kumpulan esai yang pernah muncul di koran dan media-media lainnya. Sebagian juga merupakan esai yang pernah dipublikasikan pada berbagai kesempatan. Untuk keperluan ini, esai-esai tersebut telah dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk buku ini. Semoga buku ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang Hinduisme.

Untuk menulis tulisan ini lahir, saya sangat dipengaruhi kaum intelektual yang pernah saya kenal dan kenal. Mereka lah yang membuat saya berpikir, mengapa saya sebagai orang yang pernah hidup di lingkungan yang kaya akan nilai-nilai masa lalu untuk menjawab masalah-masalah di dunia.

Salah satu yang membuat saya sangat tertarik adalah di lingkungan yang kaya akan nilai-nilai masa lalu yang pernah saya kenal dan kenal. Mereka lah yang membuat saya berpikir, mengapa saya sebagai orang yang pernah hidup di lingkungan yang kaya akan nilai-nilai masa lalu untuk menjawab masalah-masalah di dunia. Mereka lah yang membuat saya berpikir, mengapa saya sebagai orang yang pernah hidup di lingkungan yang kaya akan nilai-nilai masa lalu untuk menjawab masalah-masalah di dunia.

Salah satu yang membuat saya sangat tertarik adalah di lingkungan yang kaya akan nilai-nilai masa lalu yang pernah saya kenal dan kenal. Mereka lah yang membuat saya berpikir, mengapa saya sebagai orang yang pernah hidup di lingkungan yang kaya akan nilai-nilai masa lalu untuk menjawab masalah-masalah di dunia.

Salah satu yang membuat saya sangat tertarik adalah di lingkungan yang kaya akan nilai-nilai masa lalu yang pernah saya kenal dan kenal. Mereka lah yang membuat saya berpikir, mengapa saya sebagai orang yang pernah hidup di lingkungan yang kaya akan nilai-nilai masa lalu untuk menjawab masalah-masalah di dunia.

tersebut sebagai sumber energi. Hal ini berarti bahwa semua energi yang dimiliki oleh makhluk hidup berasal dari energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik yang merupakan makanan mereka. Selain itu, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik tersebut akan berpindah ke makhluk lain yang memakan mereka. Dengan demikian, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Oleh karena itu, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Oleh karena itu, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Oleh karena itu, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Oleh karena itu, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Oleh karena itu, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain.

Swadeshi, Prakrit, dan Bahasa: Ekologi dan Ekologi

Hal ini menunjukkan bahwa energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Oleh karena itu, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Oleh karena itu, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Oleh karena itu, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul organik berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain.

perubahan. Dengan demikian, baik perubahan yang sebenarnya maupun yang hanya sekedar perubahan bentuk, yang sebenarnya merupakan perubahan yang tidak dapat dipertahankan, akan dianggap sebagai perubahan yang tidak dapat dipertahankan. Undang-undang ini menjadi sangat penting karena ia menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain.

Undang-undang ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain. Undang-undang ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain.

Membaca Kembali

Undang-undang ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain. Undang-undang ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain.

Undang-undang ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain. Undang-undang ini menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah hukum yang berlaku secara umum dan tidak dapat diubah oleh kekuasaan yang lain.



संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को राष्ट्रपति के आदेशों पर कार्य करने के लिये अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों में से कुछ निम्नलिखित हैं—



भारत के नैतिक और राजनीतिक

इतिहास के अन्तर्गत हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों के लिये अनेक कारणों से अनेक प्रकार के राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है। इन परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है। इन परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है।

इतिहास के अन्तर्गत हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है। इन परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है। इन परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है। इन परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है।

इतिहास के अन्तर्गत हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है। इन परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है। इन परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है। इन परिवर्तनों के अभाव में हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तनों का अभाव हुआ है।

Praktik dan Budaya Remaja untuk Kebudayaan Baru

Remaja pada masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan-perubahan yang sangat pesat dalam aspek-aspek biologis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja sangat penting untuk diperhatikan dan dikembangkan.

Praktik dan budaya remaja dapat diartikan sebagai perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Praktik dan budaya remaja dapat diartikan sebagai perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Praktik dan budaya remaja dapat diartikan sebagai perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik dan budaya remaja yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakat.

bentuk bangunan bertingkat yang merupakan simbol dari kekuasaan, bahkan kekuasaan politik. Di era kolonial, bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah Belanda merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah. Di era kemerdekaan, bangunan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah. Di era reformasi, bangunan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah.

Salah satu bentuk bangunan bertingkat yang sangat terkenal adalah gedung pemerintahan. Gedung pemerintahan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah. Gedung pemerintahan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah. Gedung pemerintahan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah.

Gedung pemerintahan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah. Gedung pemerintahan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah. Gedung pemerintahan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah.

Salah satu bentuk bangunan bertingkat yang sangat terkenal adalah gedung pemerintahan. Gedung pemerintahan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah. Gedung pemerintahan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah. Gedung pemerintahan bertingkat merupakan simbol kekuasaan politik yang berpusat pada pemerintah.



Atta lebih halus dari gandum, karena sudah dikupas. Untuk penyalutannya, tepung terigu digunakan. Untuk adonan, garam dan mentega digunakan. Untuk pengembangannya, ragi instan digunakan.

Atta lebih kasar dari tepung terigu, sehingga untuk penyalutannya, tepung terigu digunakan. Untuk adonan, garam dan mentega digunakan. Untuk pengembangannya, ragi instan digunakan.

Atta lebih kasar dari tepung terigu, sehingga untuk penyalutannya, tepung terigu digunakan. Untuk adonan, garam dan mentega digunakan. Untuk pengembangannya, ragi instan digunakan.



Atta lebih halus dari gandum, karena sudah dikupas. Untuk penyalutannya, tepung terigu digunakan. Untuk adonan, garam dan mentega digunakan. Untuk pengembangannya, ragi instan digunakan.

Atta lebih kasar dari tepung terigu, sehingga untuk penyalutannya, tepung terigu digunakan. Untuk adonan, garam dan mentega digunakan. Untuk pengembangannya, ragi instan digunakan.

Atta lebih kasar dari tepung terigu, sehingga untuk penyalutannya, tepung terigu digunakan. Untuk adonan, garam dan mentega digunakan. Untuk pengembangannya, ragi instan digunakan.

Atta lebih kasar dari tepung terigu, sehingga untuk penyalutannya, tepung terigu digunakan. Untuk adonan, garam dan mentega digunakan. Untuk pengembangannya, ragi instan digunakan.

and the goal of education is to train a person to be able to do things that he or she will be able to do in the future. (Kilgore, 1997, p. 100)

Yang menjadi permasalahan pada hal tersebut adalah bagaimana yang harus dilakukan untuk bisa memahami dan bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari? Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari.

Menyebutkan hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah dipelajari sesuatu yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari.

Yang harus diperhatikan adalah bagaimana yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari.

yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari.

Yang harus diperhatikan adalah bagaimana yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari.

Yang harus diperhatikan adalah bagaimana yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari.

Yang harus diperhatikan adalah bagaimana yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari. Untuk itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk memahami yang sudah dipelajari agar bisa melakukan sesuatu yang sudah dipelajari.

tersebut yang akan berakibat buruk. Hal tersebut merupakan ancaman bagi umat manusia yang beragama Islam. Sebab kekuasaan Allah SWT. yang berkekuasaan penuh akan menghancurkan segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah-Nya. Oleh karena itu, umat manusia harus selalu ingat akan kekuasaan Allah SWT. yang berkekuasaan penuh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. yang berkekuasaan penuh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beramal saleh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berpuasa. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berzakat. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berhaji. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. yang berkekuasaan penuh.

Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. yang berkekuasaan penuh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beramal saleh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berpuasa. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berzakat. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berhaji. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. yang berkekuasaan penuh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beramal saleh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berpuasa. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berzakat. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berhaji. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. yang berkekuasaan penuh.

Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. yang berkekuasaan penuh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beramal saleh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berpuasa. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berzakat. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berhaji. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. yang berkekuasaan penuh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beramal saleh. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berpuasa. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berzakat. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu berhaji. Hal tersebut akan mengingatkan umat manusia untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. yang berkekuasaan penuh.

Antikolonialisme, Bangsa-Bangsa Berkembang

Antikolonialisme adalah gerakan yang bertujuan untuk membebaskan bangsa-bangsa yang terjajah dari kekuasaan kolonial. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kolonial terhadap bangsa-bangsa yang dijajah. Gerakan antikolonialisme ini bertujuan untuk membebaskan bangsa-bangsa yang dijajah dari kekuasaan kolonial, dan untuk membangun bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Gerakan antikolonialisme ini muncul sebagai respons terhadap penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kolonial terhadap bangsa-bangsa yang dijajah. Gerakan ini bertujuan untuk membebaskan bangsa-bangsa yang dijajah dari kekuasaan kolonial, dan untuk membangun bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat. Gerakan antikolonialisme ini bertujuan untuk membebaskan bangsa-bangsa yang dijajah dari kekuasaan kolonial, dan untuk membangun bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Gerakan antikolonialisme ini bertujuan untuk membebaskan bangsa-bangsa yang dijajah dari kekuasaan kolonial, dan untuk membangun bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat. Gerakan antikolonialisme ini bertujuan untuk membebaskan bangsa-bangsa yang dijajah dari kekuasaan kolonial, dan untuk membangun bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat. Gerakan antikolonialisme ini bertujuan untuk membebaskan bangsa-bangsa yang dijajah dari kekuasaan kolonial, dan untuk membangun bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat.

yang berwujud benda-benda yang baik menurut kultur mereka
dan adat istiadat.

Salah satunya, yaitu kebudayaan berwujud yang sudah
menjadi kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang ada di masyarakat
yang berwujud sebagai kebudayaan berwujud yang sudah
menjadi kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat.

Kepercayaan Berwujud

Kepercayaan berwujud adalah kepercayaan yang berwujud
dalam bentuk benda-benda yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat.

Kepercayaan berwujud adalah kepercayaan yang berwujud
dalam bentuk benda-benda yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat.

Kepercayaan berwujud adalah kepercayaan yang berwujud
dalam bentuk benda-benda yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat. Non-partai yang
tersebut adalah budaya berwujud yang sudah menjadi
kebudayaan yang ada di masyarakat.



Rajhi Menaip Kaitan Politik Prayudha

Perhelatan politik di Bali, mulai dari pemilihan bupati hingga pemilihan gubernur, diawali dengan kampanye politik yang berlangsung selama beberapa bulan. Dalam kampanye politik, para calon pemimpin politik melakukan berbagai kegiatan untuk menarik perhatian pemilih. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kampanye politik yang dilakukan di berbagai tempat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kampanye politik yang dilakukan di berbagai tempat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kampanye politik yang dilakukan di berbagai tempat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kampanye politik yang dilakukan di berbagai tempat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kampanye politik yang dilakukan di berbagai tempat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kampanye politik yang dilakukan di berbagai tempat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah-rumah penduduk, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menjelaskan program-program politik yang akan dijalankan jika terpilih.

ketika peran negara sangat lemah maka masyarakat Bali sebenarnya memiliki pengalaman sejarah untuk membangun dirinya “tanpa negara”. Jadi, masyarakat Bali sebenarnya memiliki kultur untuk menjadi masyarakat mandiri.

Akan tetapi, kemunculan negara kemudian tak dapat dihindari di Bali. Kerajaan Singamandawa muncul sekitar abad ke-8 Masehi, dilanjutkan kekuasaan Dinasti Warmadewa mulai abad ke-10 Masehi. Pada sekitar abad-abad itu, raja-raja dari dua dinasti ini banyak mengeluarkan prasasti tentang batas-batas desa. Hal ini berarti budaya *pasuwakan* telah diambilalih negara dalam rangka menentukan pembagian sumber daya alam. Jadi ketika negara semakin kuat maka *pasuwakan* menjadi sangat lemah. Namun, pada sekitar abad ke-12 Masehi, kekuasaan negara di Bali mulai semakin lemah. Mereka mendapatkan ancaman dari kerajaan di Jawa, yaitu Singasari, berikutnya Majapahit. Ketika negara berada dalam kondisi sangat lemah seperti itu, Kerajaan Bedahulu dibawah kepemimpinan Shri Astasura Ratna Bhumi Banten memperkuat tatanan-tatanan masyarakat ini. Sehingga ketika Majapahit menyerang Bali, mereka menghadapi perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dalam bentuk pemberontakan bersenjata terjadi dalam dua generasi pemerintahan, yaitu dari zaman Shri Kresna Kepakisan sampai zaman Semara Kepakisan, berkisar sekitar 100 tahun (dari abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi).

Pada abad ke-15 Masehi, kekuasaan raja mulai diterima di Bali. Sehingga kerajaan Bali kemudian mencapai puncak kejayaannya pada zaman Dalem Waturenggong, generasi ketiga dari pemerintahan Dinasti Kepakisan di Bali. Ketika itu, negara semakin menjadi kuat, sehingga tatanan rakyatpun semakin lemah. Keluarga-keluarga bangsawan mulai disebar ke desa-desa sejak zaman itu. Sehingga sistem feodalisme semakin mencengkrum sampai ke tingkat desa. Sistem ini kemudian membangun raja-raja kecil di Bali. Raja-raja kecil ini kemudian ditaklukan Belanda. Politik kolonialisme Belanda kemudian memelihara raja-raja kecil. Pemerintah Belanda kemudian mengangkat raja-raja kecil ini menjadi Kepala Daerah Swapraja. Sistem kolonialisme ini

berdasarkan kelas sosial, seperti yang terjadi di Eropa. Namun, masyarakat Bali tidak melahirkan hal ini. Sebab, kultur Bali sangat mengidolakan keharmonisan daripada pertentangan. Jadi, masyarakat Bali kerap mengharapkan perubahan, tetapi bagaimana perubahan tersebut tidak sampai mengganggu keharmonisan.

Prilaku seperti ini mengandung kecenderungan lebih memilih pemimpin *the God Father* daripada seorang demokrat yang selalu membuat ketidakstabilan. Sebab, demokrat sejati akan selalu menggalang akar rumput, sedangkan *the God Father* akan merangkul geng-geng untuk berkuasa. Penggalangan akar rumput berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan di bawah, tetapi pertarungan antar geng tidak akan sampai kepada akar rumput. Geng yang mati akan tersisih, dan yang menang akan berkuasa.

Cara pergantian kekuasaan seperti itu tampaknya lebih disukai, sebab tidak menimbulkan biaya sosial yang mahal. Pada perhelatan politik seperti ini, partisipasi rakyat hanyalah mendapatkan hiburan, makan, sedikit uang saku dan terus bubar. Partisipasi lainnya, tentu tidak diharapkan, sebab bisa mengganggu keharmonisan. Jadi, pragmatisme politik memang bisa menghasilkan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sejenisnya. Semua ini akan terasa cukup bagi sebagian besar masyarakat. Apalagi, agama telah mendapatkan tafsir bahwa pembebasan hanya ada di akhirat –tidak dalam kehidupan nyata ini.

Tafsir ini akan memberikan pembenaran terhadap berbagai ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Sebab, dunia memang tempatnya ketidakadilan, sedangkan keadilan hanya ada di sorga. Tafsir ini akan meruntuhkan semangat untuk menciptakan dunia yang adil. Mereka yang mengharapkan keadilan, akan memilih menyepi untuk mendapatkan keadilan di sorga. Dengan tafsir ini, meterialisme yang irrasional juga akan mendapatkan tujuan yang irrasional yang spekulatif. Karena itu, tafsir ini perlu mendapatkan pembalikan. Sebab, Gita mengatakan, mereka yang lari dari tugas menegakkan keadilan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, apalagi sorga. Jadi, Gita telah memberikan tafsir yang rasional dengan menempatkan pencapaian di dunia, adalah

pencapaian di akhirat. Jadi, keadilan dan pembebasan dari penderitaan mesti diperjuangkan di dunia ini. Jika tidak berhasil mendapatkannya di dunia ini, di akhirat pun tidak akan pernah.



Bedahulu, Membangun Bali “Tanpa Negara”

Pasca bom Kuta, Bali mengalami persoalan hebat. Pariwisata Bali terpuruk. Penganguran menjadi ancaman serius. Investasi di sektor lain juga sedang mengalami kelesuan. Pada kondisi seperti itu, negara sama sekali tidak mengambil peran maksimal. Negara hanya menjanjikan program pemulihan. Namun negara sama sekali tak bisa mencegah berbagai hal yang terjadi di Bali. Negara benar-benar tak berdaya menghadapi persoalan ini. Karena itu, keberthanan Bali terletak pada masyarakat Bali, bukan pada negara. Hanya masyarakat itu sendiri yang bisa membebaskan dirinya dari penderitaan. Karena itulah, *Weda- wedanta* menekankan disiplin setiap individu untuk mencapai pembebasan (*moksha*, lepas dari penderitaan). Kebenaran ini terbukti saat ini ketika negara memang benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan masyarakatnya.

Rsi Markendya yang datang ke Bali sekitar abad ke-7 Masehi, menyadari hal ini. Karena itu, beliau tidak mencoba untuk membangun kerajaan (negara) ketika menemukan Bali dalam kondisi “tanpa negara” ketika itu. Pada saat itu, beliau hanya membangun sebuah tatanan dialog sosial yang disebut dengan *pasuwakan*. Tatanan ini terutama digunakan dalam rangka mendialogkan distribusi sumber daya alam Bali secara adil. Ketika itu, sumber daya alam yang didistribusikan adalah air untuk tanah persawahan. Lembaga *pasuwakan* ini kemudian berkembang menjadi subak.

Kata *pasuwakan* tersebut berarti media berdialog. *Pasuwakan* ini berasal dari kata *suwaka* yang artinya dialog. *Suwaka* ini berasal dari akar kata *Su* dan *Wak* dalam Bahasa Sanskerta. *Su* artinya baik dan *Wak* artinya ucapan. Jadi, arti dasarnya adalah ucapan yang baik, atau sopan santun. Pada bahasa masa kini, ini bisa diartikan semacam tatanan dialog. Jadi, tatanan dialog yang dibangun pertamakali oleh Rsi Markendya di Bali, bukan negara. Karena itu,

Singamandawa sekitar abad ke-9 masehi¹. Penaklukan ini tidak diketahui dengan pasti ceritanya. Namun kuat dugaan jika panaklukan ini melalui peperangan. Kedua, penaklukan Singasari terhadap Kerajaan di Balingkang terjadi sekitar tahun 1284 Masehi. Ketika itu, Singasari mengirim seorang patihnya yang bernama Kebo Parud untuk menaklukan Kerajaan Balingkang yang dipimpin Putra Dewi Danu yang diberikan nama Danawa Raja. Nama Danawa tidak menunjukkan bahwa beliau seorang raksasa. Tetapi ini menunjukkan bahwa beliau berasal dari keluarga Danu, sehingga disebut Danawa. Hal ini biasa terjadi dalam khasanah kesusastraan Hindu, seperti halnya Keluarga Pandu yang disebut Pandawa dan Keluarga Kuru yang disebut Kurawa. Ketiga, penaklukan Majapahit terhadap Kerajaan Bedahulu yang dipimpin Raja Shri Astasura Ratna Bhumi Bantenterjadi sekitar tahun 1265 Caka atau 1343 Masehi². Dari tiga kali perlawanan ini, perlawanan Bedahulu yang paling monumental di Bali. Sebab perlawanan tersebut terus dilanjutkan oleh masyarakat Bali Pegunungan terhadap hegemoni pusat kekuasaan. Diantara tiga perlawanan tersebut, perlawanan manakah yang disebut dengan perang melawan Mayadanawa?

Cerita Mayadanawa terdapat dalam Usana Bali yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 1550 Masehi oleh Danghyang Dwijendra. Kisah ini lebih banyak bersifat mitologi yang menceritakan peperangan Bhatara Indra melawan Mayadanawa, Raja Atheis dari Bali. Mitologi ini yang melahirkan kisah tentang Tirta Empul, Tukad Pakerisan dan Kutukan untuk Tukad Petanu. Tetapi tidak ada yang berani memastikan, apakah cerita ini berlatarbelakang sejarah atau bukan. Tetapi timbul pertanyaan, tidakkah ini merupakan gambaran dari penaklukan Jawa terhadap Bali? Sebab raja ini juga disebut Bedahulu, tetapi diartikan sebagai

¹ Buku Bangli Tempo Doeloe hal 20 menyebutkan Kerajaan Singamandawa masih mengeluarkan prasasti sampai tahun 888 Caka, sedangkan Dinasti Warmadewa mengeluarkan prasasti pertama pada tahun 835 Caka di Blanjong, Sanur

² Bangli Tempo Doeloe

menancapkan sistem feodalisme di Bali. Bahkan kasta kemudian diatur dalam bentuk sistem permanen oleh Belanda melalui berbagai gelar yang di"SK" kan pemerintah kolonial Belanda. Ketika itu, peran-peran institusi kerakyatan semakin diperkecil. Rakyat Bali diperas melalui tangan-tangan jungjung-jungjung mereka.

Kondisi pada era kolonialisme Belanda ini sangat mirip dengan kondisi saat ini. Pada saat ini, rakyat seakan-akan selalu ditempatkan pada posisi lemah oleh kekuasaan pribumi yang dibentuknya sendiri. Sebab posisi kekuasaan negara sebenarnya sangat lemah ketika berhadapan dengan tangan-tangan kekuasaan global yang diatur entah oleh siapa dan dimana. Pada era seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi kita semua, kecuali membangun kekuatan sendiri. Kita harus mulai berani mengadakan renaissance pemikiran kepada situasi dimana Bali tanpa negara, yaitu ketika abad ke-7 Masehi. Yaitu membangun Bali Tanpa Negara melalui *pasuwakan* (negosiasi antara masyarakat sipil). Sebab negosiasi negara sudah harus "dicurigai" dalam berbagai hal. Sebab negosiasi negara kerap kali menempatkan masyarakat Bali berada pada posisi lemah. Seperti yang terjadi ketika Bali mengalami keterpurukan pada saat ini. Pada saat itu, masyarakat Bali yang mengalami penderitaan yang paling besar. Sedangkan ketika terjadi negosiasi-negosiasi yang menguntungkan di era-era sebelumnya, masyarakat sama sekali tidak dilibatkan.

Latarbelakang pemikiran seperti inilah yang kemudian mendorong saya untuk mendukung Gerakan Bedahulu ini. Sebab pusat dalam arti negara telah berada dalam kondisi sangat lemah. Jadi, kekuasaan negara harus kembali ditarik oleh masyarakatnya sendiri karena cepat atau lambat, negara pasti akan menyerahkan kedaulatannya kepada kekuasaan ekonomi global yang sangat kuat. Sebelum itu terjadi, rakyat harus mengambil kembali kekuasaannya. Bahkan rakyat harus berani sendiri melakukan negosiasi-negosiasi dengan siapapun, tanpa perantara negara. Pada era seperti itu, saya kemudian menawarkan renaissance pemikiran ketika Bali Tanpa Negara dalam konteks kekinian. Sistem

pasuwakan (negosiasi antara rakyat sipil) harus kembali dimaknai dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Daerah (Pemda) seperti halnya Kerajaan Bedahulu harus berani mendukung gerakan ini demi pembebasan masyarakat Bali.



Bedahulu, Sebuah Pembebasan

Abad ke-21 masehi ini adalah abad pemusatan berbagai hal. Pada tataran global, terjadi pemusatan kapital di negara-negara maju. Pada tataran nasional terjadi pemusatan sejenis di titik sentrum kekuasaan politik. Sehingga negara kemudian hanya dikendalikan segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi. Pemusatan-pemusatan ini semakin membelenggu masyarakat lokal. Mereka direncanakan pusat tergantung dalam berbagai hal dengan pusat melalui tangan-tangan pasar bebas dan berbagai regulasi yang mengikutinya. Hal ini terus membelit sampai ke pori-pori masyarakat lokal, Bali. Tanah yang menjadi tempat berpijak perlahan-lahan telah mulai berpindah akibat Undang-undang pokok agraria yang tidak mencerminkan aspirasi lokal Bali, dan tangan-tangan kekuasaan yang kemudian ikut bermain melalui undang-undang ini. Di tengah titik nadir pembelengguan, perlu ada gerakan pembebasan melawan berbagai bentuk sentralisasi yang membelenggu.

Dalam konteks sejarah dan mitologi masyarakat Bali terdapat sebuah cerita tentang gerakan perlawanan terhadap pusat kekuasaan politik yang disebut dengan Bedahulu. Bedahulu artinya berbeda dengan pusat. Walau perlawanan tersebut terkalahkan, spiritnya tetap menyala sampai saat ini. Orang-orang Bali pegunungan yang disebut dengan Bali Aga masih tetap melakukan perlawanan sampai saat ini, dengan menolak hegemoni penafsiran agama Hindu, Jawa-Majapahit. Bagaimanakah perlawanan tersebut? Dan, bagaimanakah kita harus memaknainya dalam konteks kekinian?

Kajian Sejarah

Pada rentang perjalanan sejarah masyarakat Bali terdapat tiga catatan sejarah yang memuat penaklukan Bali oleh kekuatan luar. Pertama, penaklukan Shri Kesari Warmadewa terhadap Kerajaan

Pragmatisme Politik dalam Religiusitas Masyarakat Bali

Gerakkan penolakan terhadap politisi busuk terus menggelinding. Tetapi banyak yang pesimis terhadap gerakan ini. Sebab jujur harus diakui, kesadaran seperti itu hanya lahir di kalangan intelektual. Sedangkan di tengah-tengah masyarakat berkembang pragmatisme politik yang sangat mengkhawatirkan. Terdapat kecenderungan yang mengemuka bahwa partai apa pun yang bisa memberikan bantuan dana akan didukung masyarakat. Sebab masyarakat – khususnya masyarakat Bali- menanggung beban pembangunan yang demikian besar, dari pembangunan balai banjar sampai pembangunan atau perbaikan pura yang menghabiskan dana tidak sedikit. Bagaimana kecenderungan ini bisa muncul? Bagaimanakah ini dipandang dari religiusitas masyarakat Bali? Bisakah agama dijadikan alasan untuk melakukan pragmatisme politik seperti itu?

Politik dalam sejarah masyarakat Bali, memang belum pernah memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Era perpolitikan pada tahun 1950-an menghasilkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali, terutama ketika terjadi gerakan “Logis” yang dilakukan sekelompok pejuang yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Perhelatan politik pasca Pemilu 1955, juga menimbulkan ketegangan yang sama. Ketegangan ini memuncak pada tahun 1965. Pada saat itu, terjadi pembunuhan besar-besaran di Bali. Pada masa Orba, perpolitikan seperti itu dikritik, kemudian rezim yang berkuasa menawarkan wacana pembangunan sebagai antitesis dari era perpolitikan seperti itu pada masyarakat Bali. Pada saat inilah, keamanan dan kenyamanan mendapatkan tempat di Bali. Pariwisata berkembang. Orang-orang kaya baru kemudian lahir di Bali.

Akan tetapi keadaan ini menimbulkan berbagai ketidakadilan sosial. Sehingga muncul gerakan politik pada tahun 1999. Gerakan

raja yang bermuka berbeda, yakni bermuka babi. Jika itu merupakan gambaran sejarah penaklukan ini, apakah itu sejarah penaklukan Singasari terhadap Bali atau sejarah penaklukan Majapahit terhadap Bali?

Pertanyaan ini sulit terjawab sebab penulis menyebutkan nama Raja Mayadanawa dan Kerajaan Bedahulu. Dua istilah tersebut merupakan dua istilah yang berbeda dalam kurun waktu yang berbeda. Nama Danawa dikenal dalam Kerajaan Balingkang yang ditaklukan Singasari. Sedangkan nama Bedahulu dikenal sebagai Kerajaan Bali Kuno terakhir yang berpusat di Bedahulu, Pejeng, Gianyar. Jadi, dua peristiwa tersebut dicampuraduk dalam Usana Bali ini. Namun, idenya tetap sama yaitu penaklukan terhadap Bali yang disebutkan memiliki raja yang tidak beragama sekaligus tidak beradab.

Memaknai Mitologi

Penyebutan identitas sebagai orang yang tidak beradab, tidak beragama dan jahat terhadap pihak yang kalah, biasa terjadi dalam cerita-cerita kemenangan sebuah peradaban. Pada zamannya, pengisahan seperti ini cukup efektif untuk menciptakan image negatif terhadap peradaban lama yang telah ditaklukan. Sehingga pencitraan ini akan sangat menguntungkan bagi kekuasaan politik baru yang bertumpu pada peradaban baru. Tetapi dalam rentang waktu yang panjang ini, kita tentunya tidak boleh turut campur dalam intrik politik lama yang tidak diketahui dengan pasti. Kita perlu memberikan penafsiran baru terhadap mitologi ini sesuai dengan konteks zamannya.

Berdasarkan uraian Usana Bali, Raja Mayadanawa disebutkan tidak percaya terhadap dewa-dewa dan melarang masyarakat melakukan upacara. Pada zamannya, sikap seperti ini sebenarnya merupakan bentuk perlawanan dari dominasi penafsiran agama dari Jawa. Sebab penafsiran agama Hindu Jawa di Bali telah menimbulkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Jawa. Pada saat itu, masyarakat Bali belum memiliki pendeta. Pendeta, pemimpin upacara biasanya didatangkan dari Jawa. Seperti

misalnya untuk upacara di Besakih, masyarakat Bali biasanya mendatangkan pendeta dari keluarga Sidhimantra untuk memimpin upacara. Karena itu, Raja Bedahulu ingin memutuskan rantai ketergantungan ini dengan memberikan tafsir baru terhadap agama Hindu. Tafsir baru tersebut disebut dengan *Bhujangga*. *Bhuja* berasal dari kata puja, yang artinya pemujaan dan *angga* artinya diri sendiri. Jadi, *Bhujangga* artinya melakukan pemujaan sendiri. Karena itu, masyarakat Bali tidak perlu lagi pendeta dari Jawa untuk memimpin upacara. Mereka bisa melakukannya sendiri. Tradisi ini masih berkembang di Bali Pegunungan yang sampai sekarang tidak menggunakan Pedanda untuk memimpin upacara.

Penafsiran baru ini membawa konsekuensi pada tatanan upacara. Ketika itu, masyarakat Bali belum memahami tatanan upacara yang menjelimet tersebut. Karena itu, Raja Bedahulu memberikan tafsir jika upacara tersebut tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah perubahan perilaku melalui pemujaan yang dilakukan sendiri. Penafsiran ini membuat kegalauan pada pendeta di Jawa. Sehingga mereka melakukan koalisi dengan kekuatan politik untuk menaklukkan Bali. Bali memang kalah. Penafsiran *bhujangganya* dipinggirkan menjadi *sungguhu* yang hanya bisa menyelesaikan upacara sampai tingkat *pacaruan*. Namun perlawanan masih terus berlanjut di Bali Pegunungan dengan menolak kehadiran Pendeta Jawa di daerah-daerah tersebut.

Bedahulu, Teologi Pembebasan

Dari sejarah perlawanan ini, perlawanan Bedahulu terhadap pusat kekuasaan merupakan perlawanan yang paling mendasar. Sebab perlawanannya sampai pada tingkat penafsiran agama, atau ideologi. Sehingga perlawanan ini tetap memberikan spirit bagi perlawanan-perlawanan sesudahnya. Karena itu, spirit perlawanan ini mesti terus dijadikan peringatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal, pembangunan identitas lokal dan pembangunan kesadaran lokal. Jadi, dalam konteks kekinian, gerakan Bedahulu merupakan gerakan yang relevan untuk diteruskan dalam melawan

pusat yang membelenggu ruang gerak masyarakat lokal. Bahkan teologi Bedahulu yang disebut dengan *bhujangga*, atau pemujaan yang dilakukan sendiri, pantas untuk sejajarkan dengan teologi pembebasan. Apalagi teologinya yang menolak upacara-upacara besar. Sebab upacara-upacara besar ini kini memang benar-benar telah menjebak masyarakat Bali dalam permainan uang yang dikendalikan perangkat pasar bebas kapitalisme global.

Akan tetapi, ini juga harus dimaknai dalam kerangka pencerahan. Artinya, umat boleh melakukan upacara besar asalkan dana dari upacara besar tersebut bukan berasal dari utang. Demikian juga, umat boleh membangun pura besar asalkan tidak berasal dari utang. Jika memang tidak memiliki uang maka penafsiran Danawa Raja pantas untuk di kedepankan, yaitu upacara tidak terlalu penting, yang penting adalah perubahan perilaku. Sedangkan mengenai pemujaan, itu bisa dilakukan sendiri di dalam hati tanpa perlu harus mengundang pendeta yang memerlukan dana yang tidak sedikit.

Dari uraian tersebut diatas, saya ingin merumuskan sebuah gerakan keagamaan dan kebudayaan untuk pembebasan masyarakat Bali. Yaitu pertama, menolak pelaksanaan upacara besar-besaran dengan menggunakan utang. Upacara atau yadnya merupakan persembahan hasil jerih payah (*subha karma*). Sedangkan persembahan yang berasal dari utang adalah persembahan yang membelenggu, bukan persembahan yang membebaskan. Kedua, menolak pembangunan atau perbaikan pura yang menggunakan dana utang terang-terangan atau dana utang terselubung dalam bentuk hibah dan sejenisnya. Ketiga, mengajak masyarakat Bali untuk bangkit melawan segala bentuk eksploitasi pusat terhadap lokal melalui gerakan berkelanjutan yang disebut dengan Bedahulu, Gerakan Bali Mandiri (Bali Swaraj).

pemerintahan. Sebab bagaimana mungkin mereka yang tidak bisa melenyapkan noda dirinya, bisa melenyapkan noda masyarakat?



politik ini sejalan dengan gerakan reformasi yang mengejala secara nasional. Gerakan ini mendapatkan puncaknya ketika simbol-simbol ketertindasan yang diwakili PDIP memenangkan Pemilu 1999 dengan sangat meyakinkan di Bali. Namun, gerakan ini ternyata dirasakan belum bermanfaat kepada masyarakat Bali. Sebab perekonomian masyarakat mulai merosot akibat berbagai tragedi di dunia pariwisata, seperti bom dan hal-hal lainnya.

Pada kondisi seperti itu, masyarakat kemudian melihat peningkatan taraf hidup kalangan politisi. Sehingga kefrustasian sosial terhadap gerakan politik kemudian semakin meluas. Mereka beranggapan jika gerakan seperti itu hanya akan menguntungkan sekelompok orang. Pada kondisi seperti inilah, lahir sebuah pragmatisme politik bahwa siapa pun yang bisa memberikan uang akan didukungnya. Sebab mereka tak yakin pasca Pemilu akan mendapatkan bantuan seperti itu. Tetapi, politik sebenarnya sebuah kenyataan dalam kehidupan bernegara. Proses pergantian kekuasaan pemerintahan negara harus terus terjadi. Proses ini, bagaimana pun juga, akan menampung dinamika masyarakat Bali. Jadi, perkembangan kesadaran masyarakat akan tercermin dari pilihan-pilihan politiknya.

Bagaimana pun juga, sebuah masyarakat tentulah mengharapkan perbaikan yang terus menerus. Setiap hari baru, haruslah melahirkan perbaikan. Sehingga proses pengulangan yang dalam kepercayaan masyarakat Bali disebut *punarbawa* (kelahiran berulang-ulang) menuju kepada perbaikan, yaitu tercapainya suatu keadaan yang dilukiskan sebagai *satyam* (kebenaran), *shiwam* (kesucian) dan *sundaram* (keharmonisan atau keindahan). Keadaan inilah yang dilukiskan oleh Bhagawad Gita sebagai *brahmastithi* (keadaan Brahman atau Tuhan). Keadaan inilah yang hendak diwujudkan oleh masyarakat Bali di dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang (alam setelah kematian).

Keadaan seperti ini tentulah tidak bisa diwujudkan dengan pragmatisme politik yang seperti itu. Apalagi pragmatisme politik tersebut jelas-jelas mengarah kepada kepentingan-kepentingan

material. Bhagavad Gita menyebutkan, ketertarikan kepada kepentingan-kepentingan material seperti ini akan menjerumuskan masyarakat kepada kehancuran sang diri. Karena itulah, Bhavagad Gita kemudian menawarkan jalan hidup dengan mengontrol obyek-obyek indria. Sehingga seseorang akan bisa melakukan meditasi untuk mencapai ketenangan atau kedamaian. Dengan ketenangan atau kedamaian, seseorang akan mencapai kebahagiaan.

Prinsip seperti inilah yang dianggap sebagai jalan hidup yang benar untuk mencapai kebahagiaan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengimplementasikan ide tersebut dalam realitas sosial yang berkembang, atau dalam pragmatisme politik yang terjadi? Pertanyaan ini kemudian akan semakin lengkap jika masyarakat bisa menjawab sebuah pertanyaan, apakah negara memang masih diperlukan untuk mengantarkan masyarakat mencapai kebahagiaan? Sampai saat ini, pola pikir masyarakat belum lepas dari keyakinannya terhadap sebuah institusi yang bernama “negara”. Jadi, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat Bali, kecuali mengimplementasikan prinsip hidupnya dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, masyarakat Bali perlu membangun kembali kesadarannya dalam bernegara, yaitu tercapainya tujuan-tujuan kemasyarakatan – yang secara gamblang dilukiskan dengan kata *jagadhita* (kebahagiaan dunia). Kebahagiaan dalam keyakinan masyarakat Bali tidaklah sama dengan terakumulasinya kekayaan. Kebahagiaan adalah sebuah kondisi batin dimana seseorang tidak merasakan ketertekanan, penderitaan dan sejenisnya. Dalam konteks ini, agama Hindu menawarkan pola hidup sederhana. Sebab hanya dengan pola seperti ini, sebuah masyarakat akan selalu ingat dengan tujuannya yang tertinggi, yaitu kebahagiaan. Jika mereka memenuhi indria-indrianya maka mereka akan terjebak pada *maya* atau keadaan seolah-olah yang semakin menjerumuskan masyarakat.

Dalam konteks pemikiran seperti ini, pragmatisme politik tergolong sebagai pemikiran yang dipengaruhi *maya* atau keadaan

seolah-olah. Bantuan keuangan seakan-akan telah memberikan kontribusi bagi masyarakat. Padahal kenyataannya, itu bisa sebaliknya. Sebab tuntutan seperti ini, bukan tidak mungkin akan menyuburkan budaya korupsi di kalangan penyelenggaraan pemerintahan. Sebab mereka memerlukan modal yang besar untuk duduk di pemerintahan. Korupsi seperti ini tentu akan mengurangi jatah bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada kondisi seperti ini, pragmatisme politik seperti itu tidak akan membawa kebahagiaan, tetapi malah sebaliknya.

Jadi, berkenaan dengan hal ini, masyarakat Bali perlu melakukan gerakan hidup sederhana dengan meminimalisasi keindahan-keindahan material pada berbagai aspek kehidupan. Bahkan masyarakat Bali perlu juga memformat sebuah kesederhanaan dalam pembangunan tempat-tempat suci. Sehingga ini tidak menjadi alasan untuk melakukan pragmatisme politik yang jelas akan menjerumuskan masyarakat. Agama Hindu terbangun untuk menyelamatkan masyarakat dari penderitaan, bukan sebaliknya untuk menjerumuskan masyarakat ke dalam lembah penderitaan. Karena itulah, tidak ada alasan agama apa pun yang bisa membenarkan sebuah pragmatisme politik seperti itu.

Agama Hindu justru menyemangati masyarakat Bali untuk membela kebenaran atau *nindihin kepatutan*. Jadi, proses politik yang terjadi semestinyalah digerakkan dalam semangat seperti itu. Sehingga mereka yang kemudian duduk di pemerintahan negara benar-benar orang yang tepat. Sebab mereka mengemban tugas untuk melenyapkan noda-noda masyarakat (*ksyanikang papa nahan prayojana* – menyitir Kakawin Ramayana). Dalam bahasa ritual masyarakat Bali, proses politik ini haruslah bisa menjadi proses “penyucian” atau *sudamala* bagi masyarakat Bali. Sebab dalam pandangan agama Hindu, *yuddha* (peperangan) juga dipandang sebagai proses “penyucian”. Jadi, segala aktivitas di dunia ini, bisa dipandang dalam khasanah penyucian tersebut – termasuk proses kerja. Karena itulah, proses politik yang terjadi mestilah dipandang sebagai proses penyucian, sehingga akhir dari proses ini tidak mendudukkan orang-orang yang ternoda dalam

Sejak berabad-abad yang lalu, masyarakat Bali telah percaya bahwa dirinya adalah atman yang merupakan percikan kecil dari Tuhan. Karena itu, dirinya sebenarnya adalah cahaya ketuhanan. Karena itu, setiap makhluk terlahir untuk membangun kesadaran ini dengan perjuangan yang keras. Dalam usaha membangun kesadaran ini, setiap makhluk mesti melakukan yoga yang artinya menghubungkan diri. Jadi, yoga bisa diartikan sebagai interaksi dengan Tuhan yang berada dalam dirinya, maupun pada diri orang lain. Bahkan kepada semua aspek kehidupan di alam semesta ini. Karena itu, melakukan yoga tidak sama artinya dengan pergi ke gua-gua untuk menutup diri. Tetapi, yoga bisa diartikan sebagai usaha untuk membuka diri terhadap hakikat ketuhanan yang ada pada setiap makhluk.

Oleh karena itu, yoga artinya mengadakan interaksi dengan Tuhan, untuk menumbuhkan kesadaran universal bahwa kita adalah satu. Jadi, semua makhluk adalah bersaudara (*wasudewa kutumbakam*). Karena itu, seorang yang melakukan yoga adalah seseorang yang senantiasa berbagi kepada setiap makhluk. Jadi, seseorang yang melakukan yoga mestilah seseorang yang mengembangkan daya cipta untuk membantu dirinya dan orang lain, menemukan hakikat dirinya sebagai cahaya ketuhanan. Jadi, keberhasilan seorang yogi (pelaku yoga) adalah jika ia bisa membebaskan dirinya dan masyarakatnya dari penderitaan. Karena itu, yoga sebenarnya berakar dari kesadaran sosial, bukan kesadaran individu.

Jadi, pembangunan masyarakat sebagai pembawa suara Tuhan, adalah pembangunan kesadaran sosial. Pembangunan kesadaran sosial artinya pembangunan masyarakat yang tidak hanya bisa membebaskan dirinya dari penderitaan, tetapi juga bisa membebaskan masyarakat lainnya dari penderitaan. Inilah “masyarakat kedewataan” atau masyarakat pembebas yang menjadi cita-cita agama dan kultur masyarakat Bali. Cita-cita ini mesti bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, yaitu dengan membangun kemandirian masyarakat. Jadi, masyarakat tidak bisa berharap terlalu banyak

Hasil Pilkada, Lorong Revitalisasi Kebudayaan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di lima kabupaten/kota, telah berakhir. Masyarakat Bali telah menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin di daerahnya masing-masing. Padahal, semua paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, belum memiliki program-program yang khusus. Mereka hanya berkutat pada program-program umum, seperti pembangunan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Bagaimanakah masyarakat Bali bisa menentukan pilihan? Apakah kepemimpinan hanya sebatas hadiah, atau balas jasa?

Masyarakat Bali seringkali melihat pemimpin sebagai seorang yang *amukti wibawa*. *Amukti wibawa* artinya, mereka yang menikmati kewibawaan. Jadi, pemimpin – bagi masyarakat Bali – adalah orang yang *amukti* (menikmati). Seseorang yang bisa menikmati, tentu adalah seseorang yang telah bekerja keras atau berjuang untuk masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Bali memang seringkali memandang bahwa memberikan kepercayaan kepemimpinan kepada seseorang adalah hadiah. Jadi, mereka yang mendapatkan hadiah, bisa melakukan apa saja terhadap hadiah tersebut.

Pemikiran seperti ini mendapatkan pengaruh dari kultur kultus “dewa raja” yang berlaku di Bali berabad-abad yang lalu. Ketika itu, masyarakat Bali menganggap raja sebagai dewa. Dewa adalah penikmat. Sedangkan masyarakat hanya mengharapkan yang terlempar dari tangan dewa. Bahkan, masyarakat hanya cukup dengan meminta *wangsuh pada* (air pembasuh kakinya). Saat itu, masyarakat Bali percaya betul bahwa dewa adalah penikmat yang bijaksana. Beliau suka bertapa, sehingga pasti akan berbagai kenikmatan dengan masyarakat. Jadi, jika raja nikmat, masyarakat

juga akan nikmat. Inilah konsep penyatuan (moksha) yang dalam kultur Jawa disebut *manunggaling kawula lawan gusti*.

Tanpa disadari, pandangan ini terwujud dalam perilaku masyarakat Bali. Sehingga pada setiap pemilihan, masyarakat Bali seringkali hanya memberikan cek kosong kepada pemimpinnya. Masyarakat Bali percaya begitu saja kepada pemimpinnya. Mereka percaya pemimpin akan bersedia berbagi kenikmatan dengan masyarakat. Perilaku ini tentu tidak sejalan dengan demokratisasi yang sedang berkembang. Demokratisasi berujung pada distribusi kekuasaan. Sedangkan perilaku masyarakat Bali yang seperti itu, akan berujung pada pemusatan kekuasaan. Karena itu, hasil-hasil Pilkada ini mestilah dimaknai sebagai lorong untuk melakukan revitalisasi kebudayaan. Sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang positif bagi pembangunan demokratisasi di Bali. Dapatkah perilaku seperti ini mengalami perubahan?

Perubahan seperti ini sangat mungkin terjadi apabila masyarakat Bali kembali merenungkan konsep *amukti wibawa* tersebut. Istilah *amukti wibawa* sebenarnya meminjam bentuk dari istilah *amukti palapa* yang terdapat dalam sejarah Majapahit yang ditulis dalam purana, babad dan karya sastra lainnya. Mahapatih Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpah *amukti palapa* ketika raja mengumumkannya sebagai mahapatih. Sumpah ini mengandung makna bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati apa-apa sebelum mempersatukan nusantara. Jadi, jabatan bagi Gajah Mada adalah wahana perjuangan untuk negaranya. Karena itu, beliau bertekad tidak akan menjadi penikmat, tetapi pejuang bagi negaranya. Jadi, istilah *amukti wibawa* sebenarnya mesti dimaknai sebagai perjuangan untuk mencapai kewibawaan, yaitu dengan membangun kesejahteraan masyarakat (*ksayanikang papa nahan prayojana*).

Oleh karena itu, menjadikan seseorang sebagai pemimpin tentu tidak sama artinya dengan memberikan kenikmatan. Tetapi menjadikan orang sebagai pemimpin artinya menjadikan orang sebagai pejuang. Sebagai pejuang, pemimpin tentu mesti diganggu. Tetapi sebagai penikmat, pemimpin tentu akan marah

bila diganggu. Jadi, jika masyarakat Bali ingin menjadikan pemimpinnya sebagai pejuang, mereka mesti menggangukannya dengan berbagai persoalan sosial. Sehingga pemimpin itu terus berpikir bagaimana mesti memecahkan berbagai persoalan sosial itu. Sebab semua itu memang merupakan tugas-tugas kepemimpinan.

Akan tetapi, masyarakat Bali seringkali membiarkan pemimpin sebagai penikmat. Sedangkan masyarakat hanya akan puas dengan *natak tiis*, artinya siap hanya menerima yang terlempar saja. Perilaku seperti ini mengandung potensi ketidakpuasan yang demikian besar. Sebab pemimpin bukan “dewa” yang bijaksana dengan kenikmatannya. Mereka adalah manusia yang memiliki ego seperti yang lainnya. Itu artinya, masyarakat Bali tidak bisa beranggapan bahwa menjadikan pemimpin sama dengan menjadikan “dewa” yang merupakan penikmat yang bijaksana – yang mau berbagi. Masyarakat Bali mesti mengubah pola berpikir bahwa pemimpin bukan “jungjungan” tetapi pelayan sosial.

Jadi, kutub pemikiran yang menjadikan pemimpin sebagai dewa mesti dibalik, yakni dengan menjadikan pemimpin sebagai pelayan, dan masyarakat sebagai “dewa”. Karena itu, pemimpinlah yang harus meminum *wangsuh pada* (air pencuci kakinya) masyarakat. Sehingga pemimpin bisa merasakan bahwa perjuangan masyarakat (tapak kaki masyarakat) untuk hidup sangat keras dan penuh penderitaan. Karena itu, pemimpin harus memberikan jalan yang baik bagi masyarakatnya untuk maju bersama. Tetapi menjadikan masyarakat sebagai dewa, tentu tidak sama artinya dengan menjadikan masyarakat sebagai penikmat yang pasif. Menjadi “dewa” artinya menjadi pribadi yang mandiri. Sebab, “dewa” adalah makhluk yang mandiri. “Dewa” bisa menciptakan makanan sendiri, menciptakan “bidadari” (pelayan) sendiri dan menciptakan semuanya sendiri. Jadi, menjadikan masyarakat sebagai “dewa”, adalah membentuk masyarakat yang kreatif. Demikianlah sebenarnya demokrasi yang menganut idiom “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Dapatkah masyarakat Bali membangun masyarakat seperti itu secara kultural?

Kelemahan ini membuat beberapa desa pakraman tidak bisa menyelesaikan konflik internalnya. Sebab perangkatnya tidak memiliki ketrampilan untuk menjadi mediasi. Oleh karena itu, masyarakat Bali perlu memikirkan gerakan pemberdayaan yang lebih berstruktur dengan mengadopsi teori-teori mediasi konflik modern dengan tanpa meninggalkan kearifan-kearifan lokal Bali. Contoh kongkretnya adalah mengadakan pelatihan untuk menjadi mediasi bagi bendesa adat misalnya.

Bendesa adat juga perlu mendapatkan pelatihan bagaimana bisa menjadi fasilitator yang baik bagi warganya. Sehingga mereka bisa menggali berbagai persoalan warganya. Penggalan ini akan memudahkan mereka dalam mencari solusi bersama bagi persoalan-persoalan tersebut. Kader-kader masyarakat adat juga perlu mendapatkan pelatihan serupa. Sehingga mereka dapat menyampaikan persoalan dan mengadakan telaah kritis tentang berbagai persoalan yang ada. Inilah ketrampilan sosial tambahan yang perlu didapatkan oleh mereka. Sehingga lembaga tradisional ini mampu menjadi mediasi bagi berbagai persoalan kehidupan.

Bagaimanapun juga usaha ini harus dilakukan secara sadar. Sebab, kehidupan negara ini sedang mencita-citakan suatu *civil society*, atau masyarakat madani. Masyarakat madani tersebut adalah masyarakat yang tidak terlalu tergantung pada perangkat-perangkat negara untuk menyelesaikan persoalan kehidupannya. Masyarakat seperti itulah yang sebenarnya hendak dibangun juga oleh Rsi Markendya ketika menginjakkan kaki di Bali lebih kurang abad ke-7 Masehi. Ketika itu, beliau tidak membangun kerajaan, tetapi justru membangun media dialog (subak). Sebab beliau ingin seluruh masyarakat Bali bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Sehingga mereka mampu menyelesaikan persoalannya sendiri.

Cita-cita seperti itu sangat sesuai dengan cita-cita kehidupan negara kita saat ini. Masyarakat sipil memang mesti lebih berdaya. Gerakan ini sebenarnya sempat mengemuka di India sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Inggris di negara tersebut. Mahatma Gandhi menyebut gerakan ini sebagai *Gram*

terhadap pemimpin. Masyarakat mesti membangun dirinya sendiri. Sedangkan pemimpin adalah pelayan dalam usaha pembangunan tersebut. Inilah masyarakat demokratis yang hendak dibangun. Inilah juga cita-cita kemasyarakatan agama dalam kultur masyarakat Bali. Cita-cita hanya akan bergantung di langit apabila tak diperjuangkan. Cita-cita juga akan lenyap apabila manusia dibingungkan dengan situasi-situasi sesaat. Jadi, menjadi masyarakat yang tegar dengan cita-cita adalah tantangan terbesar dalam sejarah umat manusia.



Desa Pakraman sebagai Mediasi Konflik

Tatanan sosial yang ada di Bali hadir sebagai mediasi dari konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Subak lahir karena konflik ekonomi, yaitu perebutan sumber daya air diantara petani lebih kurang sekitar abad ke-7 Masehi. Sedangkan desa pakraman lahir karena konflik agama (sekte) di Bali lebih kurang sekitar abad ke-10 Masehi. Akan tetapi kemudian, tatanan sosial ini tidak lagi bisa mengambil peran yang cukup banyak dalam hal ini. Bahkan terkadang tidak bisa menyelesaikan konflik intern, sehingga muncullah kasus-kasus adat yang kerap terjadi belakangan ini. Bagaimanakah kita kemudian mengadakan revitalisasi untuk mengembalikan peran tersebut?

Kelahiran desa pakraman sebagai mediasi konflik antar agama tidak terlepas dari kecerdasan Mpu Kuturan. Beliau mampu menjadi fasilitator yang baik bagi kepentingan berbagai agama ketika itu. Dari pertemuan di *Samuan Tiga*, beliau melahirkan konsep *Kahyangan Tiga* yang disepakati berbagai kalangan agama. Kecerdasan ini didukung juga oleh kecerdasan para *kubayan* (pemimpin desa) yang mampu menterjemahkan kesepakatan tersebut di wilayahnya masing-masing.

Demikian juga tentang kelahiran subak. Kelahiran tatanan sosial ini tidak terlepas dari kecerdasan Rsi Markendya yang mampu menciptakan budaya dialog dalam masyarakat Bali. Subak tersebut sebenarnya berarti dialog. Kata subak berasal dari kata *suwaka*, sehingga dalam prasasti dikenal dengan nama *pasuwakan*. *Suwaka* tersebut artinya berdialog. Kata ini berasal dari Bahasa Sanskerta, yaitu *Su* yang artinya baik dan *Wak* yang artinya ucapan atau percakapan. Jadi, percakapan yang baik (dialog). Budaya dialog ini kemudian berhasil menjadi mediasi bagi konflik kepentingan pembagian sumber daya air di Bali.

Lembaga ini memang terus bertahan sampai saat ini. Tetapi, lembaga-lembaga ini terasa sangat lemah. Mereka kurang mampu lagi menyelesaikan persoalan intern. Hal ini terjadi karena persoalan keseharian manusia Bali tidak lagi sederhana seperti pada masa kelahiran lembaga ini. Potensi konflik masyarakat Bali saat ini, tidak lagi hanya persoalan agama, tetapi juga etnis. Demikian juga, persoalan konflik ekonomi tidak lagi hanya karena persoalan air. Tetapi juga di berbagai kehidupan ekonomi lainnya. Seperti perebutan areal berjualan di Pantai Kuta misalnya dan yang lainnya.

Jadi, konflik ekonomi ini memang sudah semakin meluas. Sedangkan perangkat-perangkat lembaga tradisional ini masih berpola lama. Sehingga lembaga ini kemudian terlempar ke bidang sempit yakni hanya untuk menyelesaikan persoalan adat dan agama Hindu di wilayahnya. Seperti upacara adat dan sejenisnya. Padahal, di luar itu terdapat berbagai persoalan yang sama sekali tidak terjangkau tatanan sosial masyarakat Bali. Persoalan ini kemudian diatur lembaga-lembaga negara yang keputusannya seringkali tidak memberikan rasa adil bagi masyarakat.

Di tengah kondisi seperti itu ada harapan untuk memfungsikan kembali lembaga-lembaga adat seperti itu. Terlebih lagi ketika para penyelenggara pemerintahan di negeri ini menghadapi persoalan legitimasi. Sebab mereka diterpa berbagai isu negatif yang berkisar pada korupsi, kolusi dan nepotisme. Harapan ini bisa saja menjadi kenyataan jika terdapat gerakan pemberdayaan secara baik dan berstruktur. Gerakkan pemberdayaan yang dilakukan Pemprov Bali selama ini hampir tidak menyentuh inti persoalan. Pemberian bantuan misalnya, tidak menyentuh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bantuan ini banyak sekali mengalir ke pelaksanaan upacara-upacara adat dan pembangunan fisik. Sedangkan pemberdayaan SDM masih tetap terbengkalai. Sehingga perangkat-perangkat lembaga tradisional ini masih berpola lama. Mereka kurang memiliki pengetahuan untuk menjadi mediasi bagi penyelesaian konflik.

dialog (Upanisad). Tradisi dialog ini melahirkan zaman pencerahan pada 500 SM di India. Bahkan, pemerintahan-pemerintahan republik diperkirakan lahir setelah tradisi ini terbentuk. Kerajaan Kalingga yang berlangsung sekitar 200 SM diperkirakan memiliki tradisi pemerintahan rakyat. Setelah

kerajaan ini runtuh akibat ekspansi Asoka maka orang-orang Kalingga membangun kerajaan di Jawa yang bernama Kerajaan Kalingga yang terbangun sampai awal Masehi. Mereka mengembangkan pemerintahan rakyat di desa-desa. Tradisi inilah yang berkembang menjadi *kramani* pada masyarakat Bali, yang sekarang menjadi *pakraman* – sejenis pemerintahan bersama dimana kekuasaan tertinggi terletak pada *paruman* (rapat anggota).

Tradisi dialog ini juga melahirkan pengujian-pengujian terhadap berbagai keyakinan. Karena itu, tradisi ini telah menggeser pembentukan keyakinan masyarakat, dari masyarakat yang hanya mendengar menjadi masyarakat yang telah berani

menguji apa-apa yang didengar. Jadi, keyakinan yang semula dibentuk berdasarkan dogma kemudian bergerak menjadi keyakinan yang berdasarkan rasionalitas. Tetapi dalam praktiknya di masyarakat, dua tradisi ini saling tarik menarik. Pada suatu masa tradisi dogma yang mendominasi, tetapi pada masa berikutnya tradisi rasionalitas yang mendominasi. Tradisi dogma melahirkan istilah-istilah seperti *tulah*, *upadrawa* dan sejenisnya. Sedangkan

tradisi rasionalitas melahirkan *tatwa-tatwa* yang membangun keyakinan dengan berbasiskan rasionalitas.

Pada masa kini, tarik menarik keyakinan dogmatis dan keyakinan yang berdasarkan rasionalitas masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Bali. Pada masa-masa pemerintahan Orde Lama – Orde Baru, keyakinan yang berbau dogmatis mendominasi pemikiran politik kekuasaan. Sehingga pergeseran yang terjadi di tengah masyarakat, masih merupakan pergeseran dari feodalisme lama ke feodalisme baru. Tetapi era reformasi telah membuka ruang yang lebih luas terhadap dialog publik. Sehingga pembangunan keyakinan yang berdasarkan rasionalitas, memiliki peluang besar untuk mendominasi keyakinan publik. Peluang baru

Swaraj, atau gerakan desa mandiri. Gerakan ini merupakan pengejawantahan dari gerakan *swadeshi* yang dilakukan Mahatma Gandhi. Di Indonesia, Soekarno juga mengkampanyekan Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri). Gerakkan-gerakkan masyarakat sipil seperti ini memang layak untuk dimaknai dalam konteks Bali. Sehingga terbentuk sebuah masyarakat madani di Bali di tengah-tengah budaya ketergantungan yang mulai mengejala di hampir seluruh masyarakat dunia.

Gerakkan ini juga cukup relevan dalam konteks Bali. Masyarakat Bali sebenarnya adalah masyarakat religius yang masih menempatkan nilai-nilai pengendalian diri (*tapa*) pada tempat yang terhormat. Pada nilai seperti ini, terungkap bahwa hanya orang-orang yang hanya tergantung pada dirinya sendiri yang akan mencapai tujuan hidup, yaitu *moksha* dan *jagaddhita*. Karena itu, masyarakat Bali dengan lembaganya memang perlu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Tidak lagi tergantung pada lembaga-lembaga negara yang sebenarnya juga sudah kurang berdaya menghadapi kekuatan ekonomi global yang terus mengadakan ekspansi ke berbagai segi kehidupan, termasuk sumber daya vital ekonomi kita.



***Dharma Suaka*, Taktik Politik Menuju Pencerahan?**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) pada lima kabupaten/kota yang akan berlangsung pada 24 Juni 2005, telah memunculkan taktik politik lokal yang disebut dengan *dharma suaka*. Taktik ini sebenarnya adalah taktik lobi yang berkecenderungan budaya lokal (Bali). Bisakah taktik politik ini menjadi dasar pembentukan kultur demokrasi di Bali? Bisakah taktik politik ini mengangkat derajat masyarakat Bali ke tataran masyarakat yang lebih maju?

Dharma Suaka terdiri dari dua kata, yaitu *dharma* dan *suaka*. *Dharma* memiliki pengertian yang sangat luas. *Dharma* juga bisa berarti sopan santun, etika, atau bahkan kebudayaan. Sedangkan *suaka* berasal *Su* yang artinya baik dan *Wak* yang artinya ucapan. Sehingga *suaka* mengandung makna pembicaraan yang mengandung maksud baik. Jadi, *Dharma Suaka* memiliki makna dialog kebaikan yang berbasiskan kebudayaan. Bagaimanakah taktik ini diterapkan dalam kultur Bali? Adakah peristiwa sejarah yang melatarbelakanginya?

Secara historis, Raja Bali, Shri Kresna Kepakisan yang berkuasa pada sekitar abad ke-14 Masehi pernah melakukan strategi ini. Pada masa kekuasaan raja ini, pemberontakan berlangsung terus menerus di daerah pegunungan, terutama di daerah-daerah yang masyarakatnya terdiri dari orang-orang Bali Aga. Kekuatan senjata ternyata tidak bisa mematahkan pemberontakan orang-orang Bali Aga ini. Karena itu, raja mengadakan perjalanan ke daerah-daerah pegunungan untuk mengadakan dialog dengan masyarakat setempat. Dialog ini akhirnya berhasil menghasilkan rumusan kepentingan bersama (kepentingan masyarakat Bali pegunungan dan kekuasaan).

Rumusan kepentingan-kepentingan bersama tersebut adalah pertama, pemeliharaan tradisi yang baik -yang diwujudkan dengan pemeliharaan tempat suci. Kedua, pembangunan kesejahteraan bersama – yang diwujudkan dengan perlindungan terhadap kekuatan ekonomi lokal melalui subak. Ketiga, pemberian otonomi penuh terhadap pemerintahan rakyat yang berlangsung di desa-desa melalui *pakraman*. Perumusan kepentingan bersama ini akhirnya berhasil memadamkan pemberontakan. Dialog-dialog politik seperti ini selanjutnya diteruskan untuk menajemen konflik pada masa-masa berikutnya, seperti yang terjadi dalam usaha memadamkan pemberontakan Dalem Nusa dan pemberontakan lainnya. Peristiwa sejarah inilah yang mempopulerkan istilah *Dharma Suaka* dalam kehidupan politik masyarakat Bali. Pada era modern ini, istilah ini kembali muncul ke permukaan. Bagaimanakah kedudukan taktik ini dalam kultur masyarakat Bali? Dapatkah taktik ini membangun masyarakat yang lebih baik?

Pada masyarakat Hindu seperti di Bali, tradisi dialog adalah tradisi sekunder. Tradisi primernya adalah tradisi mendengar (*sruti*). Pada tradisi ini keyakinan terbentuk dari proses mendengar dari orang tua kepada anak-anaknya. Tradisi ini adalah tradisi satu arah, yakni orang tua menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya. Tradisi ini lahir sebagai perwujudan dari kebudayaan yang memuja leluhur. Pada perkembangannya, tradisi ini berkembang menjadi tradisi menjelaskan apa-apa yang telah didengar. Tradisi inilah yang disebut dengan *smerti* (penjelasan dari apa-apa yang telah didengar). Tradisi ini kemudian berkembang menjadi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya berisi etika dan upacara. Dalam khasanah Hindu, tradisi ini disebut dengan tradisi Brahmana. Sebab semua penjabaran tersebut dimuat dalam kitab Brahmana.

Tradisi ini akhirnya menimbulkan berbagai pengekangan-pengekangan, dari orang-orang yang mewakili tradisi lama terhadap generasi baru yang muncul. Generasi baru kemudian mulai mempertanyakan tradisi-tradisi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memunculkan tradisi sekunder, yaitu tradisi

dunia. Pandangan seperti ini rupanya mendapatkan bentuknya yang baru saat ini, seperti yang tergambar dalam rekrutmen CPNS.

Bagaimanapun juga PNS merupakan profesi yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, atau abdi kekuasaan. Karena itu, mereka sekaligus mendapatkan tempat sebagai abdi kebenaran. Sehingga mereka kemudian mendapatkan status sosial di Bali.

Sebab fenomena Bali sampai abad-abad terakhir ini memang masih dekat dengan pandangan pendewaan kekuasaan seperti itu. Masyarakat Bali masih yakin hanya kekuasaan yang akan mampu melindungi mereka dan memberikan kenyamanan hidup. Di luar kekuasaan, masih dianggap tidak stabil, atau akan dipinggirkan. Sebab masyarakat Bali tidak memiliki pengalaman sejarah menang melawan kekuasaan, dari zaman Raja Bedahulu sampai Indonesia merdeka. Kekalahan ini terus mengkristal di dalam setiap diri manusia Bali. Sehingga mereka takut sekali melawan kekuasaan, sebab trauma dengan kekalahan. Kalaupun dipaksakan untuk melawan, jelas akan menimbulkan gejolak sosial.

Masyarakat Bali sangat tidak menyukai gejolak. Karena itu, mereka kemudian lebih mudah untuk memilih rasa aman dengan berlindung kepada kekuasaan –dengan menjadi PNS. Kultur seperti ini sangat terasa pada masa-masa kerajaan, dimana puri masih memiliki kekuasaan. Pada era seperti itu, *parekan*, abdi setia raja mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat kebanyakan. Sehingga masyarakat Bali akan sangat bangga jika bisa menjadi *parekan*. Apalagi sampai bisa melayani raja siang dan malam. Hal itu merupakan anugrah yang begitu tinggi bagi seseorang di Bali ketika itu. Pengalaman seperti ini akan selalu dibanggakannya. Sehingga ketika era baru muncul, akhirnya ada seloroh “bangga menjadi *parekan*”. Pandangan seperti ini tentu saja masih hidup sampai saat ini meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sebab bentuk kekuasaan memang telah berubah, dari kekuasaan tradisional ke kekuasaan modern yang menggunakan manajemen modern.

Fenomena seperti ini sekaligus merupakan gambaran kultur politik masyarakat Bali yang memiliki ketergantungan yang cukup

ini membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat Bali untuk mencapai zaman pencerahan. Akan tetapi, kepentingan-kepentingan pragmatis bukan tidak mungkin akan menjerumuskan kembali masyarakat ini pada masa-masa dogmatis. Sebab dogma-dogma memberikan ruang yang besar pada masyarakat yang malas berpikir dan melakukan percobaan. Jadi, dogma-dogma memberikan ruang bagi pertumbuhannya tradisi penikmat (*tamasika*).

Masyarakat Hindu di India yang sempat mengalami masa pencerahan pada 500 SM, juga sempat mengalami kemunduran pasca abad-abad tersebut. Sebab masa pencerahan juga menimbulkan kelambatan dalam pengambilan keputusan. Apalagi jika keputusan tersebut mesti melibatkan dialog publik yang lebih luas. Di tengah-tengah kejemuan seperti itu, masyarakat Hindu akhirnya kembali kepada kekuasaan tunggal (*cakrawerti*) yang dipegang raja-raja besar. Mereka pun kemudian menghidupkan kembali tradisi zaman Brahmana dengan berbagai upacaranya sebagai simbol kemegahan dan kemakmuran. Tradisi ini hanya menghasilkan ketergantungan, selanjutnya pembodohan. Sehingga kebudayaan India yang besar berangsur-angsur mengalami kemunduran. Kemunduran ini mengalami puncaknya pada masa penjajahan Moghul yang mencapai 500 Tahun, dari abad ke-12 Masehi sampai 17 Masehi. Berikutnya, Bangsa Barat mendominasi dari abad ke-17 Masehi sampai abad ke-20 Masehi.

Masyarakat Bali pun bisa mengalami hal ini apabila mereka jemu menunggu berbagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan publik. Apalagi nuansa hormoni kerap juga terganggu ketika dialog-dialog publik dibuka. Keadaan ini memang bisa menjerumuskan kembali masyarakat Bali pada kekuasaan terpusat. Jika ini terjadi, ruang *dharma suaka* yang telah dibuka, tidak akan menghasilkan pencerahan. Oleh karena itu, masyarakat Bali mesti membiasakan dirinya dalam suasana dialogis yang harmonis. Suasana dialogis yang harmonis, sebelumnya di Bali, hanya berada dalam nuansa simbol *rwa bhineda*. Pada masa sekarang ini, masyarakat Bali memiliki tantangan yang besar untuk

mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, suatu masyarakat tidak akan mendapatkan kebahagiaan apabila tidak bisa membangun dialog-dialog yang harmonis.

Tradisi-tradisi dialog di Pakraman dan Subak, merupakan tradisi dialog-dialog harmonis. Tradisi ini lahir sebagai pengejawantahan dari simbol *rwa bhineda* menuju *ongkara merta*. *Rwa bhineda* adalah dialog yang harmonis, sedangkan *ongkara merta* adalah kebahagiaan. Jadi, tidak ada siapa pun yang bisa mencapai kebahagiaan tanpa melewati dialog-dialog yang harmonis. Bhagavad Gita memulainya dengan dialog antara Krishna dan Arjuna, selanjutnya barulah penampakan yang hakiki yaitu kebahagiaan. Jadi, ruang *dharma suaka* yang merupakan ruang dialog mestilah dilalui secara harmonis. Sehingga masyarakat ini bisa mencapai tujuannya, yaitu masyarakat yang mengalami pencerahan, atau masyarakat yang bahagia.



Fenomena CPNS, Cermin Kultur Politik Bali

Belakangan ini, terdapat perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di beberapa kabupaten. Peminat CPNS ini bahkan sampai ribuan. Sehingga terjadi banjir pelamar untuk menjadi CPNS. Diantara pelamar tersebut tak jarang terdiri dari mereka yang telah memiliki tingkat ekonomi yang mapan. Tetapi demi status PNS, mereka rela berpayah-payah untuk mencari CPNS. Sebab menjadi PNS dianggap memiliki status yang lebih pada masyarakat Bali. Benarkah pendapat seperti itu dalam kultur masyarakat Bali? Mengapa masyarakat Bali masih beranggapan seperti itu meskipun kesan miring PNS kerap didengarnya diberbagai media massa? Adakah dorongan kultural dalam hal ini?

Secara tradisi, masyarakat Bali mendapatkan pelajaran bahwa kekuasaan adalah perpanjangan tangan dewa di dunia. Sebab kekuasaanlah yang akan memberikan kemakmuran atau kesejahteraan kepada rakyat. Karena itu, penguasa sering dikatakan sebagai keturunan dewa. Cerita-cerita seperti itu terdapat dalam dunia *babad*. Misalnya Sri Angga Tirta, leluhur raja Bangli dianggap sebagai putra Dewa Wisnu. Ken Arok juga dianggap sebagai putra Dewa Brahma.

Ketika masyarakat Bali menghubungkan penguasa dengan dewa maka secara tak langsung, masyarakat Bali sebenarnya telah melekatkan nilai-nilai moralitas seperti kebajikan, kebenaran, kedermawanan, keagungan dan sejenisnya kepada kekuasaan. Karena itu, dekat dengan kekuasaan dianggap dekat dengan nilai-nilai moral seperti itu. Kebajikan dan sejenisnya tersebut merupakan ukuran moral tertinggi dalam masyarakat Bali. Jadi, mereka yang dekat dengan kekuasaan dianggap berkebudayaan, sehingga memang memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Sebab mereka dekat dengan keturunan dewa di

solidaritas manusia yang lebih luas, bukan sebaliknya – yakni membangun kebersamaan kelompok (komunalisme). Sejarah bangsa-bangsa, seringkali mengartikan kebangkitan nasional dalam kerangka seperti itu. Sehingga mereka kemudian terjebak dalam konflik etnis dan agama yang berkepanjangan.

Gerakkan-gerakkan politik di Indonesia kadang-kadang juga tergelincir dalam pemaknaan kebangkitan nasional seperti itu. Mereka kadang-kadang memaknai nasionalisme sebagai kebangkitan kelompok tertentu untuk berkuasa atas kelompok lainnya. Atau kebangkitan mayoritas melawan minoritas yang dinilainya telah berlaku tidak adil. Pemaknaan seperti ini, kemudian menjerumuskan bangsa ini pada konflik etnis dan agama. Walaupun di satu sisi, ada juga yang mendapatkan keuntungan politik (kekuasaan) dengan memainkan isu-isu ini. Tetapi keuntungan itu jelas bukanlah merupakan keuntungan semua pihak, apalagi kemanusiaan. Karena rasa kemanusiaan terkadang harus dikorbankan dalam kerangka tersebut.

Pada konteks Bali, para politisi kerap juga membangun isu-isu solidaritas *nyama dadia* dan sejenisnya untuk meraih dukungan. Namun kemudian, kebangkitan ini ternyata tidak menjadikan Bali kuat, tetapi justru melemahkan. Pertentangan-pertentangan di desa adat, kerap terjadi karena mobilisasi solidaritas seperti ini. Sehingga mereka kemudian melemahkan sendi-sendi solidaritas sosial yang dibangun dalam *pakraman*. Bahkan, sudah mulai tumbuh gejala fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya. Sehingga mereka kemudian merasa lebih tinggi dari kelompok lainnya. Karena merasa lebih tinggi, mereka selanjutnya merasa tidak perlu untuk membangun solidaritas dengan kelompok lainnya. Jadi, cukup dengan kelompoknya saja.

Pandangan-pandangan seperti itu jelas sangat bertentangan sekali dengan hakikat kebalian orang Bali. Ketika mereka membaca babad, mereka sering membaca hanya pada bagian bawahnya yang membedakan mereka atas dasar jabatan dan fungsinya dalam masyarakat pada zaman tertentu. Mereka jarang melihat ujung dari babad bahwa seluruh manusia Bali adalah

tinggi terhadap kekuasaan. Meskipun kenyataannya, mereka sering juga kecewa dengan kekuasaan. Tetapi, mereka ternyata tidak memiliki harapan lain untuk melakukan perubahan kecuali dengan kekuasaan. Pandangan seperti ini lahir dari feodalisme Majapahit yang dikembangkan di Bali sejak abad ke-15 Masehi. Pandangan seperti ini dilahirkan sebagai lawan dari pandangan sebelumnya yang mencoba untuk melawan pusat kekuasaan, seperti yang dilakukan Raja Bedahulu, Sri Asta Sura Ratna Bhumi Banten. Raja ini dianggap telah menyengsarakan rakyatnya dengan pandangannya yang seperti itu. Padahal, sesungguhnya pandangan sebelum Majapahit ini lebih berdemensi kerakyatan.

Salah satu pandangan kerakyatan tersebut adalah dibangunnya *Pura Pusering Jagat* (Pusering Jagat artinya pusatnya dunia) di Kerajaan Bedahulu. Pembangunan pura ini merupakan sebuah pernyataan bahwa Bali merupakan pusat dunia. Karena itu, Bali tak perlu tunduk kepada belahan dunia manapun. Sebagai pusat, masyarakat Bali bebas untuk melakukan manajemen ruangnya sendiri yang spiritnya dibangun melalui *Pura Pengukur -ukur* (Pengukur-ukur artinya membagi ruang). Selanjutnya, Bali juga bebas untuk melakukan manajemen waktu, yang spiritnya dibangun melalui *Pura Penataran Sasih* (Sasih artinya bulan atau waktu). Setelah menciptakan kebebasan seperti itu, masyarakat Bali harus berkeaktifan. Spirit dari kreativitas tersebut dibangun melalui *Pura Gunung Kawi* (Kawi artinya kreativitas). Demikianlah Kerajaan Bedahulu membangun kemandirian Bali dari pusat kekuasaan.

Akan tetapi, pusat kekuasaan melihat hal tersebut tidak benar alias miring. Pandangan yang miring itu dikatakan akan meracuni air suci yang ada di Bali. Sehingga air suci yang menyembul di Tampak Siring tersebut perlu dimurnikan lagi oleh Bhatara Indra agar bisa dinikmati masyarakat Bali. Mitologi seperti itu tertanam dalam diri masyarakat Bali sampai saat ini. Sehingga masyarakat Bali selalu memiliki harapan yang berlebihan terhadap kekuasaan, dan melupakan kekuatannya sendiri. Pandangan seperti ini jelas tidak searah dengan demokratisasi yang sedang dibangun. Sebab

demokrasi sebenarnya bersandar pada kemandirian masyarakat. Pada kemandirian tersebut terdapat unsur tanggungjawab dan keberanian untuk mengambil keputusan.

Era sekarang ini menuntut kemandirian seperti itu. Karena itu, masyarakat Bali harus berani mengadakan pentelaahan kembali terhadap pemikiran-pemikiran lama –seperti halnya Bangsa Barat yang melakukan pentelaahan kembali terhadap pemikiran-pemikiran Yunani Kuno sehingga bisa menghasilkan peradaban modern seperti sekarang ini. Jika itu tidak bisa dilakukan, demokratisasi yang akan berlangsung tidak akan mendapatkan landasan kultural yang memadai. Sehingga masyarakat Bali akan kembali terjerembab ke dalam pemujaan kekuasaan yang berpotensi untuk meminggirkannya. Sebab kekuasaan terkadang juga bisa menjadi alat eksploitasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) Bali. Pengabdian terhadap kekuasaan seperti ini jelas tidak akan memuliakan peradaban masyarakat Bali, tetapi justru akan sebaliknya.

Oleh karena itu, tradisi bangga menjadi *parekan* harus mulai dipertanyakan dan diperdebatkan dalam kerangka pembangunan Bali. Sehingga sikap-sikap kewirausahaan bisa mendapatkan status yang memadai. Kemajuan Eropa terbangun melalui sikap-sikap seperti ini. Bahkan kemajuan dimanapun di dunia ini terbangun melalui penghargaan terhadap keberanian-keberanian mereka. Jadi, sudah saatnya, masyarakat Bali merenungkan kembali pendapat Raja Bedahulu yang membangun kekuasaan atas dirinya sendiri, walaupun harus menerima resiko terpahit, yaitu kalah.

Kebangkitan Nasional Versus Komunalisme

Pada 20 Mei, kita memperingati hari kebangkitan nasional. Hari ini, merupakan hari bersejarah banggunya kesadaran nasionalisme Indonesia dengan pendirian Boedi Oetomo. Kesadaran tersebut tumbuh dari kesadaran universal bahwa Bangsa Indonesia juga merupakan manusia yang memiliki potensi yang sama dengan bangsa-bangsa lainnya untuk maju. Jadi, kebangkitan nasional lahir dari kesadaran solidaritas kemanusiaan. Namun saat ini, bangsa ini mengalami ancaman keretakan solidaritas sosial. Pergaulan-pergaulan sosial kerap didasarkan pada etnisitas, agamadan bahkan hanya karena satu *soroh (sub culture Bali)*. Bagaimanakah kita bisa memaknai Hari Kebangkitan Nasional di tengah-tengah kondisi seperti itu? Apakah yang bisa disumbangkan masyarakat tradisional Bali dalam hal ini?

Kebangkitan, merupakan sebuah kata yang dimunculkan Swami Vivekananda pada abad ke-19 Masehi. Beliau berkata “bangkit, bangun sampai tujuanmu tercapai”. Beliau menyemangati seluruh Bangsa Asia untuk bangun karena mereka sesungguhnya juga merupakan manusia. Sebagai manusia, mereka sebenarnya adalah cahaya (*devine*) dari Tuhan. Karena itu, mereka memiliki potensi yang sama untuk maju mencapai pencerahan, tak peduli bangsa barat atau timur. Kata-kata inilah yang kemudian menyemangati kebangkitan bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, kesadaran kebangkitan nasional, bukanlah kesadaran kebangkitan etnis atau kelompok agama tertentu, tetapi merupakan kesadaran kebangkitan kemanusiaan. Apalagi kemudian, Soekarno, Tokoh Nasionalis Indonesia, menegaskan kembali bahwa nasionalismenya adalah kemanusiaan. Jadi, kebangkitan nasional merupakan kebangkitan manusia yang sadar memiliki potensi yang sama dengan manusia lainnya. Karena itu, kebangkitan nasional mestilah dalam kerangka membangun

Kebangkitan Spiritual dan Nasional

“Bangun, Bangkit dan kejarlah tujuan sampai tercapai”, demikian Swami Vivekananda menyemangati setiap umat manusia untuk tetap terus berjuang mencapai tujuan hidupnya. Semangat ini mengalir dari semangat Weda-wedanta yang menyatakan pada hakikatnya setiap makhluk adalah cahaya mulia (atman) yang merupakan percikan terkecil dari Brahman (Tuhan). Karena itu, setiap makhluk sebenarnya memiliki potensi untuk bangkit mencapai tujuan akhirnya yaitu Tuhan yang terwujud dalam kebajikan, kedermawanan, kebenaran, keadilan dan sejenisnya. Sebab pada hakikatnya yang menuju dan yang dituju adalah satu. Semua makhluk bisa mencapai tujuannya. Demikianlah kesadaran mulia dari Weda-wedanta. Jadi, Weda-wedanta tidak mengenal diskriminasi. Apa yang bisa dicapai manusia satu tentu bisa dicapai manusia lainnya.

Kesadaran ini dilontarkan Swami Vivekananda pada abad ke-19 masehi. Kesadaran ini pula yang terus mengalir menginspirasi masyarakat Asia untuk bangkit. Mereka tidak perlu berkecil hati. Apapun yang bisa dihasilkan peradaban barat pasti bisa dihasilkan peradaban timur. Bahkan jauh sebelum Bangsa Barat mengenal huruf, orang-orang di Asia telah menulis prasasti. Karena itu, tidak ada alasan untuk menyatakan barat lebih unggul dari timur. Semua manusia memiliki potensi yang sama untuk bangkit dan merdeka. Kesadaran inilah yang memupuk sebuah kebangkitan nasionalisme di negara-negara Asia, apalagi setelah kemangan perang Jepang melawan Rusia tahun 1904. Sehingga muncul pula kesadaran yang sama di Nusantara dengan pendirian Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Kebangkitan ini didasari kesadaran sejarah yang besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar pada zamannya. Kerajaan Sri Wijaya sempat menjadi pusat peradaban di Asia Tenggara. Demikian pula Majapahit yang kebesarannya sampai

keturunan dari Sang Hyang Pasupati, atau putra-putra Tuhan. Sehingga mereka sesungguhnya bersaudara. Akhirnya, muncullah semacam prasangka terhadap babad bahwa babad memecah masyarakat Bali. Padahal kenyataan, babad justru yang menyatukan masyarakat Bali, karena mereka disadarkan sebagai manusia yang bersaudara. Karena itu, solidaritas yang dibangun mestilah solidaritas yang universal.

Lebih jauh lagi, Weda-wedanta mengungkapkan sebuah hakikat bahwa seluruh makhluk merupakan percikan terkecil dari Tuhan. Karena itu, seluruh makhluk sesungguhnya bersaudara. Mereka bersumber dari satu. Kesadaran ini merupakan kesadaran yang jauh lebih universal, melampaui kesadaran solidaritas kemanusiaan. Sebab kesadaran ini melampaui batas-batas manusia. Sebab binatang pun sesungguhnya juga saudara. Karena itu, binatang juga tidak boleh diperlakukan tidak adil.

Inspirasi Weda-wedanta ini terus mengalir dalam kepercayaan lokal masyarakat Bali yang percaya pada *nyama papat (kanda pat)*. Pada kepercayaan ini, *Anggapati* (badan), *Prajapati* (lingkungan), *Banaspati* (hutan, tumbuhan) dan *Banaspatiraja* (binatang) merupakan saudara-saudara manusia. Jadi, seluruh alam merupakan saudara. Jika manusia Bali bisa membangun rasa persaudaraan ini maka mereka akan selalu selamat. Pada tradisi ritual di Bali, kepercayaan ini dilaksanakan dengan memberikan *jotan* (hadiah) kepada keempat saudara tersebut agar mereka bisa membantu jika ada kesulitan. Kepercayaan ini, saat ini, mesti dimaknai secara lebih kontekstual dengan membangun solidaritas kesemestaan. Jadi, manusia Bali mestilah berbicara tentang kesemestaan, bukan sebaliknya berbicara fanatisme *soroh, kasta* dan sejenisnya. Sebab semua itu, hanya akan membuat manusia Bali tidak selamat dalam mengarungi kehidupan ini.

Dengan kepercayaan-kepercayaan ini, masyarakat Bali sebenarnya bisa berperan dalam membangun kembali nasionalisme Indonesia yang berdasarkan kepada kemajemukan (pluralisme). Pada nasionalisme seperti itu, manusia mestilah dihargai bukan karena kelahirannya di dalam etnis atau agama

tertentu. Manusia mesti dihargai karena kemampuannya untuk mengangkat derajat manusia-manusia lainnya. Sehingga masyarakat manusia tumbuh menjadi masyarakat yang lebih beradab –bukan sebaliknya. Masyarakat yang lebih beradab adalah masyarakat yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupannya dengan arif, bukan dengan cara-cara kekerasan. Sebab cara-cara kekerasan tidak mengangkat derajat manusia, tetapi justru menenggelamkan derajat manusia.

Boedi Oetomo lahir dalam semangat untuk pembangunan kesadaran seperti itu. Perkumpulan ini hendak membangun karakter (budi pakerti) bangsa. Sehingga bangsa ini bisa mengangkat derajatnya kepada kedudukan yang sejajar dalam pergaulan dunia yang beradab. Manusia yang berbudi pakerti tentu manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan. Mereka tentu harus bisa menghormati manusia-manusia lainnya. Sebab tanpa bisa menghormati manusia-manusia lainnya, mereka tentu tidak akan bisa mendapatkan kehormatan. Karena itu, kebangkitan Boedi Oetomo sebenarnya didasari kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya.

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa pada awal-awal masehi, bangsa ini telah mengenal aksara. Jadi, dalam sejarah dunia, bangsa ini bukanlah bangsa yang tertinggal. Tetapi bangsa yang bisa maju bersama-sama dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi jika bangsa Indonesia mau bangkit, mereka akan dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Kepercayaan diri seperti inilah yang hendak dibangun. Sehingga pemuda-pemuda Indonesia bisa bangkit dan maju. Kebangkitan ini sekali lagi, akan bisa terbangun jika ada solidaritas bersama untuk itu. Bila hanya ingin membangkitkan kelompoknya sendiri dengan mengencet kelompok lainnya, ini justru akan menenggelamkan mereka semua. Sebab generasi yang dilahirkan dalam suasana persaingan seperti itu, adalah generasi yang kerdil. Mereka tidak akan bisa maju. Sebab tak akan pernah bisa belajar dari orang lain, karena mereka kemudian akan menjadi kelompok yang tertutup.

Kelompok-kelompok seperti ini jelas akan tersisihkan dari pergaulan dunia. Sejarah bangsa-bangsa membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang menutup diri dalam pergaulan dunia akan menjadi bangsa yang tertinggal. Mereka akan menjadi bangsa yang beku, tak bisa berkembang. Bangsa yang beku berarti mati. Mati berarti tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan berarti tidak ada pembangunan peradaban. Tidak ada pembangunan peradaban berarti menenggelamkan kemanusiaan. Manusia yang tidak membangun peradabannya, akan menjadi seperti binatang yang hanya berjalan dengan naluri, tidak akan memiliki kreativitas apapun.



Pilkada, Memilih Kharisma atau Kapital

Masyarakat Bali akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota pada 24 Juni 2005 ini. Partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah mengajukan calonnya. Para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah inipun telah mulai menawarkan dirinya kepada masyarakat Bali, untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bagaimanakah nanti masyarakat Bali akan menyikapi hal ini? Bagaimanakah mereka akan menentukan pilihannya? Bagaimanakah kultur masyarakat Bali bisa mempengaruhi hal ini?

Secara kultural, pemimpin bagi masyarakat Bali, adalah mereka yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosialnya. Kakawin Ramayana mendefinisikan pemimpin sebagai orang yang mampu melenyapkan penderitaan masyarakat (*ksayanikang papa*). Sehingga tradisi sastra di Bali, sangat memuji pemimpin sebagai seseorang yang akan membebaskan masyarakat. Jadi, secara tidak langsung, sastra telah menempatkan pemimpin sebagai awatara (Sang Penyelamat atau Pembebas, titisan Tuhan). Awatara pada bahasa sehari-hari masyarakat Bali disebut sebagai *bhatara* yang berasal dari *watara* terus menjadi *bhatara*. Sehingga raja-raja juga mendapatkan gelar *bhatara*.

Oleh karena raja-raja (pemimpin) adalah pembebas masyarakat, maka sastra-sastra -seperti babad dan yang lainnya- biasanya akan menceritakan tanda-tanda gaib kelahiran seorang pemimpin. Misalnya ketika calon pemimpin lahir, langit cerah atau bulan sedang terang benderang. Pararaton dan Negara Kertagama adalah dua teks yang menceritakan bagaimana kelahiran Ken Arok, pemimpin tanah Jawa. Dua teks ini menceritakan tanda-tanda gaib kelahiran Ken Arok. Bahkan pendiri kerajaan Singasari yang kemudian menjadi leluhur raja-raja tanah Jawa ini, dipercaya adalah putra Dewa Brahma yang akan menyelematkan tanah Jawa.

menggegerkan negeri-negeri tetangga. Pada sekitar abad ke-4 masehi, Indonesia juga telah mengenal huruf yang tertulis dalam prasasti. Karena itu, bangsa ini sebenarnya bisa bangkit sejajar dengan bangsa-bangsa barat. Tetapi bangsa ini kenyataannya tetap tertinggal. Bagaimanakah bangsa ini harus bertindak, sehingga bangsa ini bisa bangkit? Apakah peran agama dalam hal ini?

Kalau kita mengkaji sejarah perjuangan Indonesia, kebangkitan nasional Indonesia sebenarnya tidak lahir dari kesadaran agama. Kebangkitan Indonesia sebenarnya lahir dari kesadaran budaya. Boedi Oetomo adalah organisasi yang tidak berdasarkan agama. Tetapi berdasarkan pada kebudayaan, yaitu budi pakerti yang luhur. Kebangkitan ini lahir sebab bangsa Indonesia merasa sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan yang besar. Agama-agama datang ke Nusantara tetapi mereka luluh dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Karena itu, bangsa Indonesia memiliki local genius yang cukup baik. Sehingga bisa mengembangkan berbagai hal dari luar untuk kepentingan dirinya.

Agama sebenarnya sangat berperan dalam pembangunan local genius tersebut. Di dalam agama Hindu terdapat ajaran *Desa, Kala* dan *Patra* yang sebenarnya bertumpu pada keharmonisan. Ajaran ini kemudian berkembang menjadi pepatah dimana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Ajaran ini lahir dari konsep Advaita dalam agama Hindu yang menyatakan hanya ada satu kebenaran yaitu Tuhan, sedangkan yang lainnya adalah *maya*. Jadi, bentuk bisa berubah sepanjang tidak mengingkari prinsip kebenaran. Karena itu, agama Hindu mengajarkan umat manusia untuk tidak terikat kepada bentuk. Mereka yang terikat kepada bentuk hanya akan mengalami kebingungan. Untuk tidak bingung, manusia harus melepaskan diri dari keterikatan kepada bentuk. Caranya dengan melaksanakan yama (pengendalian diri). Jadi, maya dan yama merupakan dua kata yang berhubungan untuk menciptakan keseimbangan.

Pada saat ini, seluruh umat manusia terikat kepada bentuk. Manusia misalnya mengidentikkan kemajuan dengan bangunan besar, industri besar dan sebagainya. Padahal kenyataannya, apa

yang mereka sebut sebagai kemajuan tersebut ternyata menimbulkan berbagai persoalan manusia. Sehingga manusia tetap menderita, tidak mengalami kebahagiaan. Karena itu, pencitraan kemajuan yang seperti itu harus mulai mendapatkan perlawanan. Bangsa ini harus mulai berani mencitrakan kemajuan sendiri, yaitu sebuah masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang manusia-manusianya berbudi pakerti yang luhur, bukan manusia kaya namun memilikikerakusan ekonomi yang tak terkendali. Jadi, agama Hindu memiliki peranan untuk menumbuhkan kesadaran pada ketidakterikatan kepada bentuk (*maya*) dan pengendalian diri (*yama*) untuk melepaskan diri dari keterikatan ini.

Ajaran seperti itulah yang melandasi pemikiran Swami Vivekananda untuk memompa semangat orang-orang terpinggirkan untuk maju sampai tujuannya tercapai. Semangat seperti itu pulalah yang telah melahirkan peradaban besar di bumi Nusantara ini. Karena itu, bangsa Indonesia ini harus mulai membangun kesadaran kebudayaannya kembali. Mereka harus memiliki kesadaran bahwa mereka bukan bangsa lemah. Mereka adalah bangsa kuat yang mampu menyebrangi Samudra India sampai ke Madagaskar. Mereka adalah bangsa kuat yang mampu membangun kerajaan besar Majapahit. Namun untuk mencapai hal ini, bangsa ini memerlukan perjuangan yang panjang dan terus menerus. Salah satunya dengan melawan hegomoni-hegomoni pencitraan tentang segala hal.

Perlawanan seperti ini hanya akan lahir apabila setiap manusia Indonesia memiliki kemampuan intelektualitas yang memadai. Mereka mesti menjadi bangsa yang cerdas. Sehingga mereka bisa merumuskan tujuan-tujuan hidupnya sendiri. Tanpa harus menunggu rumusan-rumusan kebahagiaan dari barat yang kenyataan malah makin membelenggu bangsa ini. Jadilah, Gajah Mada yang menciptakan pusat peradaban sendiri di Tanah Jawa. Atau jadilah Shri Asta Sura Ratna Bhumi Banten yang menciptakan pusat peradabannya di Bedahulu dengan menentang hegomoni pusat-pusat kerajaan di Jawa ketika itu dengan membuat

tafsir agama baru di Bali. Sadarilah engkau adalah cahaya Ketuhanan sehingga memang dapat menyatu dengan sumber cahaya itu sendiri tanpa melalui cahaya-cahaya yang lainnya. Mari bangkit, jangan ragu! Lepaskan diri dari *maya* dengan *yama*.



dari sisi buruk kapital. Jadi, kapital bukanlah penyelamat. Karena

itu, apakah perlu bergantung kepada benda seperti itu? Tidakah ini justru akan menjadi penyebab penderitaan masyarakat?

Pada suasana keraguan seperti itu, tak ada pilihan lain, masyarakat mestilah hanya bergantung pada dirinya sendiri, untuk mengubah nasibnya sendiri. Jadi, manusia Bali mestilah mulai meninggalkan dunia magis (yang cepat-cepat) menuju dunia rasional yang terukur dan terarah pada tujuan utama, yaitu pembebasan dari segala penderitaan. Bagaimanapun, pijakan ini mestilah bisa direnungkan dalam rangka Pilkada ini. Sehingga masyarakat tidaklah perlu menempatkan harapan-harapan besar pada proses yang berlangsung, tanpa melakukan usaha sendiri. Mengharapkan pemimpin, benda gaib atau benda-benda lainnya untuk melakukan perubahan tanpa melakukan usaha sendiri adalah sia-sia. Perbuatan sia-sia seperti itu hanya akan mengulang *samsara* (penderitaan yang berulang-ulang). Bhagavad Gita menyatakan itu sebagai kegiatan yang meninggalkan kerja (kewajiban). Kegiatan seperti itu tidak akan membawa kebahagiaan di dunia ini, apalagi di sorga.

Teks-teks ini -secara turun-temurun berpengaruh pada teks-

teks berikutnya, seperti babad, kidung, gaguritan dan yang lainnya. Bahkan kesenian-kesenian yang memasyarakat seperti Arja, Topeng dan yang lainnya banyak menyampaikan hal ini ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam rentang waktu yang panjang, telah tercipta sebuah citra yang sulit dikikis. Yaitu bahwa pemimpin adalah penjelmaan dewa (awatara). Tradisi sastra seperti ini, telah menjadikan pemimpin sebagai tumpuhan harapan seluruh masyarakat.

Masyarakat yang dipengaruhi tradisi seperti ini mengharapkan, pemimpin bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan cepat.

Karena pemimpin adalah penjelmaan Tuhan yang memiliki kekuatan magis, yang bisa mengubah segala sesuatunya dengan cepat. Kepercayaan masyarakat inilah yang menempatkan pemimpin sebagai seorang yang magis. Sehingga masyarakat akan percaya sekali, bila pemimpin memiliki berbagai kekuatan luar biasa. Seperti yang dipercayai masyarakat Bali terhadap Soekarno yang konon memiliki benda gaib seperti keris. Pada kondisi ini, pemimpin hampir berada pada posisi seperti dukun (balian) yang dipercaya bisa mengobati masyarakat dengan kekuatan magisnya.

Kepercayaan inilah yang membuat pemimpin menjadi berkharisma. Pemimpin yang berkharisma ini memegang harapan masyarakat yang besar, sehingga jika gagal, masyarakat akan sangat membencinya. Bahkan bisa menyebutnya sebagai penjelmaan setan, bukan Tuhan – seperti yang dialami Mayadanawa yang disebutkan sebagai penjelmaan raksasa. Hal ini terjadi karena pesona magis pemimpin seperti itu lahir dari rasa sastra yang menggoda perasaan cinta dan benci. Apabila pemimpin memenuhi harapan masyarakat, mereka akan mendapatkan cinta. Tetapi bila mereka tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, mereka akan mendapatkan kebencian. Hubungan masyarakat Balidengan pemimpinnya kurang lebih berjalan seperti ini sampai belakangan ini. Apakah kini masyarakat Bali masih memiliki pandangan seperti itu?

Kepercayaan terhadap kekuatan magis memang telah semakin memudar di tengah-tengah masyarakat Bali. Tetapi kultur magis masih menguasai perilaku masyarakat. Kultur tersebut antara lain terlihat dari ketidaksabaran masyarakat dalam melakukan perubahan. Kultur ini adalah kultur masyarakat magis yang menginginkan segala sesuatunya dengan cepat, tanpa kerja keras. Masyarakat ingin perekonomian membaik dengan cepat tanpa melakukan usaha apapun. Sehingga mereka pun berharap pemimpin mampu berbuat seperti ini. Jika ini tidak terjadi, masyarakat kemudian akan putus asa. Pada keputusan ini, mereka biasanya akan lari kepada kehendak gaib (*embang, niskala*) yang memang menginginkan demikian. Misalnya karena masyarakat sudah layak menerima hukuman dan sejenisnya. Inilah perilaku patal dari kultur magis yang menguasai masyarakat.

Pada masyarakat seperti ini, walaupun mereka mau melakukan usaha maka usahanya adalah mencari cara yang cepat. Cara yang cepat itu adalah uang (kapital). Sehingga kemudian mereka menjadi sangat mengagungkan benda gaib baru yang bernama “kapital”. Mereka percaya benda ini akan bisa mengubah segala sesuatunya dengan cepat. Sehingga pilihannya pun tidak akan pernah jauh-jauh dari mereka yang dekat dengan “kapital”. Apakah akan seperti itu pilihan masyarakat Bali? Dapatkah benda gaib baru ini menyelamatkan masyarakat? Bagaimana agama Hindu yang mengemban misi pembebasan menjawab fenomena ini?

Agama Hindu yang menjadi jiwa dari budaya Bali bukanlah agama yang larut dalam pesona magis seperti itu. Walaupun nuansa-nuansa magis mewarnai tradisi Hindu di Bali, itu hanya praktek keagamaan yang dilakukan masyarakat yang masih bernuansa magis. Agama Hindu adalah agama yang menempatkan tujuannya pada tempat yang sangat jauh, yaitu pembebasan dari semua penderitaan (moksha). Agama ini menceritakan bagaimana susahnyanya mencapai tujuan utama (paramartha) tersebut. Pada perjalanan ini, umat bisa saja menemukan sesuatu yang dikira kebahagiaan, ternyata tidaklah demikian (*maya*). Jadi, untuk mencapai tujuan, umat memerlukan kesabaran dan usaha yang

terus menerus. Dalam usaha ini, manusia hanya bergantung pada dirinya sendiri (*swayambu*), karena manusia juga merupakan Atma, percikan-percikan Tuhan yang mandiri (*swayambu*).

Oleh karena itu, manusia sendirilah yang menentukan pembebasan, bukan orang lain. Walaupun manusia memiliki guru spiritual, mereka hanya membimbing, tak akan bisa membebaskan. Namun meskipun demikian, Hindu juga mempercayai awatara (penjelmaan Tuhan) yang akan membebaskan manusia. Tetapi awatara ini adalah peran Tuhan yang sangat langka. Weda -weda mewanti-wanti umat Hindu untuk berhati-hati dalam mempercayai awatara, bisa-bisa umat akan bertemu dengan awatara palsu –yang mengaku penyelamat tetapi penyamun. Karena itu, akan lebih baik, manusia mempercayai awatara kecil yang berada dalam dirinya, yaitu atman. Karena atman juga merupakan percikan-percikan Tuhan.

Pada titik ini, Hindu jelas mengajarkan manusia menjadi pembebas bagi dirinya sendiri. Sebab mengharapkan sesuatu pada awatara sempurna, penuh dengan ketidakpastian, karena kehadirannya tidak bisa diprediksikan. Walaupun awatara sempurna itu lahir, manusia belum tentu mengenaliNya. Jadi tak ada pilihan lain, manusia mesti hanya bergantung pada dirinya sendiri, yaitu awatara yang berada di dalam dirinya. Dalam usaha sendiri ini, manusia memerlukan kesabaran dan kerja keras. Demikianlah ajaran Bhagavad Gita yang menyatakan, lakukan kewajibanmu (*karmaneva dhikaraste*). Jadi, manusia hendaknya tidak berharap kepada orang lain atau benda apapun untuk mengubah nasibnya sendiri.

Manusia juga tidak bisa berharap uang (kapital) bisa menyelamatkan atau membebaskannya. Kapital pada berbagai kasus seringkali juga menyebabkan keterpinggiran penduduk lokal. Sehingga kapital -di satu sisi- memang bisa menciptakan kemakmuran yang begitu besar pada masyarakat yang memiliki kapital itu. Akan tetapi di sisi lain, kapital telah menciptakan kemiskinan yang juga begitu besar. Bencana alam, kekurangan air bersih, penyakit dan yang sejenisnya, merupakan contoh-contoh

mencapai kemakmuran dan keadilan. Sebagai wadah perjuangan bangsa, negara tentu mesti diisi dengan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, para politisi mengemban tanggungjawab untuk membangun kesadaran bahwa bernegara adalah perjuangan untuk merubah nasib. Jika kesadaran ini terbangun, partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara tentu akan menjadi semakin besar.

Saat ini yang ada di benak masyarakat adalah sikap pisimis terhadap negara. Negara kerap diartikan hanya bisa memberikan sesuatu kepada pejabat, pegawai negeri dan mereka yang dekat dengan kekuasaan. Masyarakat lainnya, harus pontang-panting sendiri mencari rezeki. Bahkan setelah payah pontang-panting, mereka dipunguti pungli lagi oleh para preman. Pandangan ini kemudian menurunkan tanggungjawab mereka terhadap negara. Bahkan negara sangat “dicurigai” hanya akan dimanfaatkan kelompok tertentu. Sehingga masyarakat lainnya kemudian tak mau peduli alias *ngambul*. Pandangan seperti ini tentu mesti diluruskan bersama dengan memanfaatkan negara sebagai wadah perjuangan untuk memperbaiki nasib bersama –bukan wadah untuk memperbaiki nasib sekelompok orang. Inilah tantangan para politisi jika mereka ingin terus didengar dan dipilih.

Pada konteks ini, prinsip politik tentu mesti diletakkan pada kepentingan bersama. Jadi, berpolitik mesti diartikan sebagai usaha untuk menjalankan kepentingan bersama. Sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Karena itu, berpolitik tentu tidak sama artinya dengan membentuk “klik” atau jaringan kekuasaan. Bahkan politik mesti tidak diartikan semata-mata untuk berebut kekuasaan, tetapi untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Inilah sebenarnya inti dari Satya Graha yang dijadikan prinsip oleh Mahatma Gandhi. Prinsip ini kemudian dibuktikan sendiri oleh Mahatma Gandhi dengan menolak jabatan politik begitu kemerdekaan India dicapai. Sikap Mahatma Gandhi seperti ini perlu menjadi tauladan kita bersama.

Satya Graha, Cermin Kesadaran Politik

Memasuki masa kampanye Pemilu 2004 ini, berbagai pelanggaran dan tindak kekerasan mulai tampak. Mulai dari pelanggaran pemasangan atribut partai sampai pembakaran, seperti yang terjadi di Tabanan. Fenomena ini merupakan sebuah bukti bahwa pencaturan politik di Indonesia terkadang tidak mengindahkan norma dan aturan, meskipun para politisi yang mengikutinya sering menyuarakan penegakkan supremasi hukum. Sehingga perhelatan politik benar-benar nyaris tanpa etik, sebab tidak adanya keselarasan antara pelaksanaan dan ucapan. Mengapa fenomena itu bisa terjadi? Adakah kebijakan lokal yang bisa dikembangkan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar bisa berpolitik dengan memperhatikan norma?

Jika ingin menggugah sebuah moralitas politik, rasanya tidak akan lengkap bila tidak melihat Mahatma Gandhi. Sebab beliau adalah seorang politisi yang berjuang untuk negaranya, tetapi sangat beretika. Gandhi dengan sangat sederhana menerangkan fenomena-fenomena kerusakan masyarakat yang disebabkan oleh tujuh dosa. Ketujuh dosa sosial itu, salah satunya adalah “politik tanpa prinsip”. Sebagian masyarakat kita sangat gandrung dengan dunia politik tetapi tanpa memegang prinsip. Sehingga mereka terombang-ambing di tengah jalan. Akhirnya, mereka pun terjebak dalam permainan politik uang, hura-hura dan sejenisnya. Pada fenomena seperti ini, kesengsaraan rakyat akan hanya menjadi wacana politik. Tetapi pada kenyataannya, para politisinya hanya akan sibuk menimbun kekayaan. Politisi seperti ini hanya akan sibuk berwacana tentang penderitaan masyarakat sambil mengisi pundi-pundi mereka dengan uang. Jika sebuah masyarakat menghadapi fenomena seperti ini, mereka akan menuju jurang kehancuran.

Sebagai pelajaran sejarah, kita bisa menyimak tentang kekalahan Bali atas penjajah yang dimulai dengan fenomena

seperti ini pada sekitar abad 17-18 masehi. Ketika itu, para bangsawan Bali memang sangat paham dengan konsep-konsep *nindihin gumi*. Tetapi mereka tanpa sadar meneriakkan konsep ini sambil menjual candu kepada masyarakatnya. Mereka juga tanpa sadar telah terlibat dalam perdagangan budak. Sehingga orang-orang Bali yang kuat “dijual” untuk dijadikan budak. Sehingga yang tinggal, orang-orang yang secara fisik tak begitu kuat. Kalau pun ada yang kuat, mereka mengisap candu dan bersenang-senang. Sehingga pertahanan kemudian menjadi lemah. Bali pun selanjutnya satu persatu runtuh. Pada saat ini, kita bisa bercermin dari kejadian sejarah itu. Tidakkah kita seperti itu saat ini?

Siapa pun juga tentu tidak ingin mengulang sejarah, apalagi sejarah kekalahan. Karena itu, setiap orang memiliki kewajiban moral untuk mengusung kembali prinsip-prinsip dalam berpolitik. Prinsip tersebut tentu adalah pengabdian (*ngayah*) kepada negara (Ibu Pertiwi). Sehingga Ibu Pertiwi bisa memberikan kemakmuran kepada seluruh warga negara. Jadi, prinsip berpolitik adalah mengabdikan kepada negara, bukan menggrogoti atau merusak negara. Prinsip seperti ini disebut oleh Mahatma Gandhi sebagai Satya Graha (kesetiaan kepada negara). Kesetiaan ini tentu mesti ditunjukkan dengan perilaku pengabdian kepada negara. Mengabdikan kepada negara berarti mentaati peraturan-peraturan negara dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan negara –bukan sebaliknya. Dalam mengemban prinsip ini, para politisi tentu harus berhati-hati, sehingga tak terjebak hanya dalam wacana politik, tidak bergerak dalam tataran aksi. Wacana tanpa aksi tentu tidak akan berarti apa pun juga. Bahkan bisa disebutkan sebagai satu bentuk “penipuan politik” kepada rakyat.

Satu kekuatan dari Mahatma Gandhi yang bisa membuatnya tidak terjebak dalam politik wacana adalah *tapa*. Beliau benar-benar seorang politisi yang melakukan disiplin diri yang ketat. Beliau selalu berusaha berkata benar, dan mewujudkan kata-katanya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mewacanakan *ahimsa* (tanpa kekerasan) sebagai sarana perjuangan untuk membebaskan negaranya, itu dipraktikkannya dalam kehidupan

sehari-hari. Beliau sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan cara-cara kekerasan untuk berjuang, meskipun penjajah Inggris telah memulainya dengan menembaki ribuan demonstran di Amritsar. Kekerasan ternyata tidak perlu dilawan dengan kekerasan. Demikian juga kecurangan, tak perlu dilawan dengan kecurangan. “Tujuan harus sebaik cara,” demikian Mahatma Gandhi dalam sebuah tulisannya.

Ucapan Mahatma yang seperti ini, perlu menjadi perhatian kita. Sebab semua tahu, tujuan dari partai politik sangat bagus, yaitu membangun kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tujuannya baik, mereka tentu harus mencapainya dengan jalan yang baik. Jalan yang dianggap baik itu adalah demokrasi. Jadi segala sesuatunya diserahkan kepada penilaian publik. Karena itu, biarkan publik memberikan penilaian dengan jernih. Jangan mengiming-imingi mereka dengan uang atau janji-janji kosong. Biarkan masyarakat melihat hati nuraninya untuk memilih jalan yang akan mereka tempuh. Apa pun pilihan rakyat dengan segala plus-minusnya, tentu mesti dihormati.

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat seperti itu, partai politik tentu memiliki tanggungjawab untuk mengadakan pendidikan politik. Pendidikan politik tersebut pada dasarnya tentu menggali partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara –bukan sebaliknya yaitu meminimalkan partisipasi masyarakat. Atau bahkan membuat masyarakat mabuk, sehingga mereka lupa berpartisipasi. Partisipasi masyarakat tersebut dapat tumbuh bila mereka memiliki kesadaran untuk hidup bernegara secara baik. Kesadaran seperti inilah yang mesti ditumbuhkan. Sehingga mereka mengerti tentang tujuan-tujuan kehidupan bernegara, atau untuk apa negara didirikan.

Masyarakat sering menganggap negara hanya keharusan sejarah. Sehingga menjadi warga negara Indonesia kemudian diartikan sebagai nasib, bukan perjuangan untuk memperbaiki nasib. Padahal pendiri negara ini, Soekarno mengatakan kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mencapai kemakmuran. Jadi, negara tentunya adalah wadah perjuangan bangsa untuk

mobil itu pasti akan menabrak bebatuan, atau akan berhenti di pinggir jalan.

Atma tersebut adalah cahaya atau pelita hati. Karena itu, jika manusia ingin berjalan maka ia harus menghidupkan pelita hatinya. Cahaya atau pelita adalah dewa yang juga artinya cahaya. Karena itu, para dewa atau pelita hati memang harus dilibatkan dalam persoalan dunia. Tetapi bentuknya tentu bukan bisikan-bisikan kosong, tetapi bisikan-bisikan hati nurani. Berdasarkan penafsiran seperti ini maka pelibatan dewa dalam persoalan politik, mesti ditafsirkan pada pelibatan hati nurani rakyat. Sehingga konsep dasar demokrasi yang menyatakan “suara rakyat adalah suara Tuhan” mendapatkan tempat dalam kultur Bali.

Namun bertanya pada hati nurani memiliki kesulitan tersendiri. Hindu dalam ajaran yoganya mengatakan bahwa *atma* diselubungi selubung yang bernama *maya*, atau keadaan seolah-olah. *Maya* tersebut hadir dalam pikiran manusia. Sehingga manusia memang sering terjebak dalam *maya* atau ilusi pikiran ketika ingin mengetahui keadaan hati nuraninya. Pikiran sering mengatakan, sesuatu itu membahagiakan padahal kenyataannya bisa menjerumuskan. Karena itu berhati-hatilah dengan *maya*. Yoga mengajarkan, cara untuk melawan *maya*, yaitu kebalikan dari kata *maya* itu, tiada lain adalah *yama*, artinya pengendalian diri. Karena itu, jika seseorang ingin bertanya pada hati nurani, ia harus mengendalikan diri dengan tidak marah, tidak membenci dan sejenisnya.

Oleh karena itu, pelibatan para dewa dalam urusan politik di Bali, mesti didahului dengan proses pengendalian diri (*yama*). Sehingga masyarakat bisa bertanya pada hati nuraninya masing-masing, siapa yang harus dipilih. Penafsiran seperti inilah yang relevan untuk menghadapi kondisi kekinian. Sedangkan penafsiran yang semata-mata percaya pada tanda-tanda alam, akan menjerumuskan masyarakat Bali pada irasionalitas dalam berpolitik. Atau bahkan panafsiran seperti itu sangat berpotensi untuk mendewakan kekuasaan. Sebab kekuasaan dianggap lahir dari dewa. Jika ini terjadi, masyarakat Bali akan terus terkungkung

Menafsir Ulang Mistifikasi Politik di Bali

Masyarakat Bali, saat ini, menghadapi kegelirahan untuk menjadi calon legislatif pada berbagai parpol. Antrean, ketika mencari surat keterangan di kantor polisi, kemudian di Pengadilan Negeri membuktikan hal itu. Sehingga hampir semua parpol peserta pemilu memiliki calon legislatif di Bali. Bahkan ada juga calon legislatif yang mencoba mengadu untung pada parpol-parpol yang baru dikenal masyarakat. Diantara para calon legislatif, ada yang memasuki parpol tertentu karena membaca tanda-tanda alam, akan adanya perubahan –bukan berdasarkan hitung-hitungan konstituen dan hitung-hitungan rasional lainnya. Adakah latarbelakang kultural yang mendorong pilihan-pilihan politik seperti ini? Bagaimanakah memberikan tafsir kembali cultural terhadap fenomena politik seperti itu, dalam rangka membangun demokrasi di Bali?

Setiap menghadapi pemilu, hampir sebagian besar masyarakat Bali memperhatikan tanda-tanda alam. Gempa enam skala richter yang baru saja terjadi, tak luput dari berbagai ramalan. Demikian juga, *hujan raja* (hujan yang bersamaan dengan terangnya sinar matahari), menjadi pembicaraan serius. Bahkan perkelahian *pemangku* di Besakih yang dilatarbelakangi cekcok soal ayam aduan mengundang berbagai ramalan politik. Apakah hubungannya semua itu dengan politik? Terasa jauh memang dari akal sehat, tetapi kalau menelaah lebih lanjut tentang kebudayaan Bali, maka itu akan memiliki hubungan yang sangat dekat. Semua penjelasan akan menjadi sangat masuk akal.

Secara umum, masyarakat Bali memiliki kepercayaan bahwa *bhuwana agung* (makro kosmos) dan *bhuwana alit* (mikro kosmos) adalah satu kesatuan. Apapun yang terjadi di *bhuwana agung* merupakan pengejawantahan dari dalam diri manusia.

Karena itu, ruas-ruas di langit, keadaan perut bumi dan sebagainya, merupakan cerminan dari kondisi manusia. Kepercayaan ini kemudian menimbulkan ramalan-ramalan keadaan social kemasyarakatan yang didasarkan pada tanda-tanda bumi.

Pada masa lalu, ramalan tersebut sering dikaitkan dengan raja dan keluarganya. Sebab, sosial kemasyarakatan Bali pada zamannya memiliki titik pusat, yaitu raja beserta keluarganya. Sehingga ada semacam kepercayaan bahwa perasaan raja menyatu dengan perasaan alam sekitarnya. Apalagi dalam *babad-babad*, raja Bali satu keturunan dengan Hyang Putrajaya yang berstana di Gunung Agung. Jadi, penguasa alam *niskala* dan *sekala* di Bali, merupakan satu keluarga. Sehingga mereka sesungguhnya bisa saling berkomunikasi, seperti halnya sebuah keluarga.

Komunikasi inilah yang berbentuk pada tanda-tanda alam. Misalnya ketika Gunung Agung meletus pada tahun 1963, dua tahun kemudian terjadi pembunuhan besar-besaran di Bali. Jadi panasnya perut Gunung Agung memang searah dengan panasnya hati masyarakat Bali ketika itu. Pengalaman-pengalaman ini kemudian membuat masyarakat Bali percaya bahwa persoalan politik atau kekuasaan, merupakan kehendak *niskala* –bukan kehendak *sekala*. Sehingga pendekatan politik yang muncul dari fenomena ini adalah “menduga-duga kehendak *niskala*”. Pilihan politik yang muncul kemudian adalah “coba-coba”, siapa tahu para dewa bersedia memilihnya.

Sastra-sastra Jawa Kuno, seperti Pararaton misalnya, memang mewariskan tentang hal ini. Kenaikan Ken Arok menjadi raja misalnya, diceritakan merupakan hasil persidangan para dewa di sebuah gunung di Jawa. Jadi, raja tidak lahir dari pilihan rakyat, tetapi lahir dari pilihan para dewa. Kepercayaan ini terus diwariskan hingga saat ini. Sehingga masyarakat Bali menerima siapapun yang menjadi pemimpin, meskipun tidak disukai rakyat. Karena pada titik itu, bukan rakyat yang memilih tetapi para dewa. Hal inilah yang selanjutnya, melahirkan irasional politik di Bali. Program partai menjadi tidak penting, tetapi adu nasib, coba-coba dan berdo'a, itu yang lebih penting.

Fenomena ini terlihat sekali ketika masyarakat Bali *matajen* (mengadu ayam). Pada permainan ini, Bali memiliki sebuah lontar yang namanya *pangayam ayaman*. Pada lontar tersebut terdapat perkiraan-perkiraan ayam menang pada hari tertentu. Pada hari senin misalnya, ayam yang menang contohnya adalah ayam kuning. Pada lontar tersebut tidak pernah dijelaskan kenapa ayam tersebut menang. Kalaupun ada penjelasan, penjelasannya pasti terkait dengan para dewa di sorga. Jadi pada persoalan adu ayam saja, masyarakat Bali harus melibatkan dewa, apalagi pada persoalan politik. Irasional memang, tetapi begitulah Bali.

Namun demikian, hal ini didasari juga oleh pandangan-pandangan yang sesungguhnya sangat rasional. Tetapi pada tingkat tafsir, ia mendapatkan tafsir yang irasional. Karena itu memang diperlukan tafsir-tafsir kebudayaan baru, untuk menghadapi realitas yang sedang berkembang sehingga landasan kultural masyarakat Bali tetap sesuai dengan konteks kekiniannya. Jika tidak mendapatkan tafsir kembali, Bali akan terus terjebak pada mistifikasi politik. Sehingga masyarakat Bali tak akan pernah bisa rasional dalam memilih partai atau pemimpin di masa mendatang.

Penafsiran Kembali

Pada dasarnya, menyertakan para dewa pada berbagai persoalan dunia berlandaskan pada teologi Hindu. Agama Hindu mengajarkan seluruh alam semesta merupakan bagian dari Tuhan (Brahman). Alam yang terlihat ini adalah penampakan luarnya, sedangkan alam yang tidak terlihat adalah hal yang terhalus atau terdalam dari Tuhan. Pada diri manusia, hal yang terluar adalah badan ini. Sedangkan hal yang terdalam adalah *atma*, atau hakikat terdalam. Jadi jika seseorang ingin mengetahui lapisan terdalam dari Tuhan maka ia harus mengetahui *atma*. *Atma* inilah yang merupakan percikan terkecil dari Tuhan. *Atma*lah yang menghidupkan badan. *Atma* jugalah yang mengontrol badan untuk mencapai cita-cita kehidupan. Jika badan lepas control dari *atma*, dia akan seperti mobil yang lepas kontrol dari sopirnya. Suatu saat,

segala dosa dihilangkan. Sehingga yang kemudian muncul adalah seorang raja suci yang telah dilahirkan kembali melalui proses upacara. Karena itu, proses politik bagi masyarakat Bali merupakan proses pemurnian bagi calon-calon pemimpin. Proses pemurnian tersebut memerlukan upacara yang didalamnya ada pesta dan taruhan. Hal ini sebagai bentuk pengejawantahan dari pemurnian diri dan keberanian untuk melepaskan kepemilikan. Salah satu bentuk yang keluar kemudian adalah buang-buang duit.

Jadi, tradisi upacara seperti itu yang berlangsung bertahun-tahun kemudian mengendap dalam bawah sadar manusia Bali. Saat ini, keadaan alam bawah sadar tersebut kemudian mendapatkan tempat dalam pandangan bahwa Pemilu adalah upacara yang didalamnya berisi pesta. Kalau ada pesta, maka akan kurang lengkap bila tanpa taruhan. Karena itu, wajar jika calon-calon pemimpin mengeluarkan uang dalam pesta seperti itu. Bahkan pengeluaran uang tersebut lebih dianggap sebagai bentuk taruhan untuk memperebutkan sesuatu yang lebih besar bila berkuasa. Pada konteks ini, tradisi taruhan di Bali mendapatkan media dalam perhelatan politik, sehingga *money politik* tidak mendapatkan sorotan tajam pada sebagian masyarakat Bali.

Pemaknaan Kembali

Kecenderungan seperti itu jelas akan menjeremuskan masyarakat Bali pada sebuah irasionalitas dalam berpolitik. Hal ini akan berdampak pada lepasnya kedaulatan dari tangan rakyat, beralih ke elite. Bila ini terjadi, masyarakat Bali akan semakin menjauh dari semangat demokratisasi yang sedang dibangun. Karena itu, perlu ada penafsiran ulang terhadap pemaknaan pesta dan taruhan dalam konteks politik. Tetapi ini mesti tetap mengacu pada nilai universalnya dalam tradisi upacara di Bali, yakni proses pemurnian dan pelepasan diri dari kepemilikan pribadi. Sebab pemimpin memang memerlukan proses itu agar bisa mengabdikan diri sepenuhnya kepada masyarakat.

Tradisi pesta, misalnya, kini mesti dimaknai sebagai perhelatan ide-ide untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sedangkan

dalam tafsir kebenaran sang penguasa. Jadi, akan terus terhegemoni, bahkan sampai pada hal-hal terkecil sekalipun. Hal ini hanya akan melahirkan masyarakat yang terpasung, bukan masyarakat yang terbebaskan. Yoga -yoga kuno mengatakan, seorang yang tidak terbebaskan (terpasung), tidak akan mendapatkan “pencapaian”, yaitu kebahagiaan abadi (*suka tanpa wali duka*).



Money Politic, Taruhan dan Pesta

Money politic seringkali menjadi isu di Bali belakangan ini. Bahkan masyarakat Bali seringkali menerima fenomena tersebut sebagai fenomena biasa, seakan-akan tidak merupakan aib. Sehingga hampir sebagian besar masyarakat Bali tidak memperlakukan sebuah proses politik yang diwarnai *money politic*. Bahkan, itu dianggap wajar seperti yang kecenderungannya menjejal pada kasus pengerahan massa –yang mana sebagian masyarakat Bali sering menyanak uang sakunya. Apakah yang melatarbelakangi fenomena ini? Sampai kapankah fenomena ini akan berlangsung di Bali? Bagaimanakah kita harus mengurai benang kusutnya ini?

Pelibatan masyarakat kecil dalam percaturan politik di Bali tergolong baru sejak abad ke-15 Masehi (ketika Majapahit berkuasa di Bali). Dari abad ke-15 Masehi ini, persoalan politik (ketatanegaraan) hanya menjadi persoalan elite politik. Pada masa kerajaan, peran ini dimainkan para bangsawan. Sedangkan pada masa penjajahan sampai Orde Baru, peran ini digantikan elite militer dan birokrasi. Karena itu, persoalan politik seringkali masih jauh di angan-angan masyarakat kecil di Bali. Sehingga mereka terkesan tidak memiliki kepentingan langsung dengan percaturan politik. Jadi, siapapun yang berkuasa, tidak akan berperan besar bagi masyarakat kecil di Bali. Paling-paling, itu hanya perebutan uang. Dalam perebutan uang, para pemain sudah tentu wajar mempertaruhkan uangnya. Toh, akan mendapatkan yang lebih besar.

Pada konteks seperti itu, fenomena taruhan kemudian yang mendominasi wacana perhelatan politik di Bali. Apalagi fenomena ini sangat akrab di Bali. Dalam sejarah perhelatan politik di Bali ketika abad ke-15 Masehi terdapat sebuah gambaran yang sangat menarik. Pada saat itu, Raja Bali, Shri Kresna Kepakisan mempunyai tiga orang putra. Putra pertamanya adalah seorang

pesolek, bernama Shri Agra Samprangan, putra keduanya adalah seorang pertapa bernama Dalem Taruk sedangkan putra ketiganya adalah seorang penjudi bernama Dalem Ketut Semara Kepakisan.

Ketika terjadi perhelatan politik, para pembesar di Bali lebih memilih Dalem Ketut yang berkarakter penjudi sebagai raja. Sehingga judi, terutama sabungan ayam menjadi permainan para bangsawan dan populer di masyarakat. Fenomena ini menggambarkan pandangan sebagian masyarakat Bali bahwa perhelatan politik adalah judi, karena berada di luar rasionalitas manusia Bali. Karena itulah, raja juga mestinya penjudi yang ulung.

Gambaran seperti itu berasal dari Mahabharata. Pada kisah tersebut, Yudistira (Maharaja Astina) dikenal sebagai pemain dadu. Tak ada satu rajapun yang bisa mengalahkannya dalam permainan yang jujur. Dia hanya dikalahkan dengan kecurangan. Fenomena ini menggambarkan bahwa judi adalah bagian dari seni politik. Sebab hanya dalam perjudian, raja bisa melepaskan dirinya dari keterikatannya kepada miliknya. Sehingga ia akan menjadi seorang yang dermawan –bisa menyumbangkan uang kepada masyarakat yang membutuhkannya. Image seperti itu memberikan tempat bagi *money politic* dalam perilaku politik di Bali.

Dalam lontar-lontar di Bali, juga dikenal sebutan *tatebusan* yang biasa berupa uang dan upacara tertentu. Upacara *tatebusan* ini dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan –biasanya terkait dengan dosa masa lalu yang dilakukan ketika penjelmaan sebelumnya. Tradisi upacara ini menunjukkan bahwa penyerahan uang merupakan salah satu bentuk penyucian diri. Pada peristiwa penobatan raja, tradisi ini juga berlangsung. Raja biasanya mengadakan pesta makan-makan, tarian dan sejenisnya, selain melakukan ritual utama. Pada pesta tersebut tak jarang terdapat judi sabungan ayam dan sejenisnya. Upacara yang rumit tersebut dilakukan untuk penyucian diri.

Setelah proses penyucian ini, seorang raja biasanya melakukan *amati aran*, menghilangkan nama sehari-hari yang kemudian diganti dengan nama baru. Jadi, setelah upacara besar tersebut,

pembodohan kepada masyarakat. Dimana masyarakat dianggap bodoh, pemerintah pandai. Sehingga rakyat wajib berguru kepada pemerintah dengan mematuhi semua perintahnya. Penafsiran ini menimbulkan ketergantungan yang demikian besar kepada pemerintah, sehingga negosiasi politik masyarakat melemah.

Kondisi ini masih terbawa sampai era reformasi, padahal era ini sebenarnya membuka peluang supremasi sipil atau penguatan negosiasi politik rakyat. Dengan pengalaman pemerintahan modern yang melemahkan sendi negosiasi politik masyarakat Bali, dapatkah masyarakat Bali bangkit pada era reformasi? Pengalaman masa pemerintahan modern dari era kolonial-Orde baru sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil dari rentang waktu sejarah masyarakat Bali. Sebelum pemerintahan kolonial, masyarakat Bali sempat menjadi masyarakat yang mampu melakukan negosiasi politik dengan kekuasaan. Pada sekitar abad ke-14 Masehi misalnya, ketika Gajah Mada membentuk pemerintahan di Bali -setelah kalahnya Kerajaan Bedahulu-masyarakat melakukan penolakan. Desa-desa tradisional tidak mau mengakui kekuasaan *dalem* (raja) di Bali.

Mahapatih Gajah Mada kemudian mengirim utusan ke Bali untuk melakukan negosiasi politik dengan masyarakat Bali. Pada negosiasi itu, masyarakat Bali akhirnya bersedia menerima kekuasaan Majapahit di Bali, namun kekuasaan baru ini mesti mengusung Pura Besakih dan pura-pura penting lainnya di Bali. Pengusung pura-pura penting ini sebenarnya hanya merupakan simbol. Pada hakikatnya, yang diinginkan masyarakat Bali adalah pengakuan terhadap eksistensinya sebagai masyarakat yang berbudaya. Masyarakat yang berbudaya jelas merupakan masyarakat yang kreatif. Masyarakat kreatif adalah masyarakat yang merdeka. Jadi, kekuasaan Majapahit di Bali diakui sepanjang menghormati kemerdekaan masyarakat Bali dalam membangun identitasnya sebagai sebuah masyarakat yang mandiri. Bahkan kekuasaan politik mesti menghormati eksistensi tersebut dengan cara mengadakan upacara di pura-pura penting di Bali.

pertaruhannya, mesti dimaknai sebagai bentuk pertaruhan mutlak bahwa ide-ide tersebut dapat dijalankan. Jika salah satu ide misalnya, tidak dapat dijalankan, maka pemimpin yang terpilih tersebut harus rela meninggalkan kursinya dengan pengakuan yang jantan bahwa mereka gagal. Pada konteks ini, nilai pertaruhan yang pada intinya adalah keberanian untuk melepaskan kepemilikan akan mendapatkan tempat.

Penafsiran seperti ini jelas akan mendudukkan kembali nilai-nilai ritual masyarakat Bali ke dalam sistem yoga. Pada sistem yoga, seseorang akan bisa mencapai tujuan tertinggi bila melakukan pengendalian diri yang disebut dengan *yama-nyama*. Pada disiplin ini terdapat sebuah disiplin yang disebut dengan *anresangsa* yang artinya tidak mementingkan diri sendiri. Jadi memang mesti ada sebuah proses yang disebut dengan keberanian untuk melepaskan nafsu kepemilikan pribadi untuk kepentingan umum. Proses inilah yang disebut dengan pemurnian atau penyucian. Jika seseorang melakukan proses ini, barulah akan bisa menginjak pada tahap pencapaian.

Masyarakat Bali yang tradisi ritualnya mengadaptasikan sistem yoga, mesti bisa menafsirkan nilai-nilai ritualnya ke dalam perhelatan politik dalam makna seperti itu. Sehingga benar-benar bisa menemukan pemimpin yang akan mengantarkan masyarakat Bali ke tujuan tertinggi, yaitu *jagadhita* (kebahagiaan bersama). Jadi, pemaknaan nilai dalam bentuk hura-hura, atau bahkan judi mesti dikikis habis. Sebab pemaknaan seperti itu akan menjauhkan masyarakat dari pencapaian tujuan utamanya. Seperti yang dialami Yudistira (dalam kisah Mahabharata) yang terpaksa harus kehilangan kerajaan dan kekayaannya karena perjudian.

Oleh karena itu, perlu sebenarnya tahapan yang disebut *wana parwa* (kontemplasi) setelah melalui proses *sabha parwa* (perjudian) ini. Sebab hanya dengan melalui tahapan inilah, seorang manusia baru akan bisa mendapatkan kesaktian untuk mengadakan revolusi sosial, yakni dengan menunjukkan keadaan dirinya yang sesungguhnya. Itulah masa yang di dalam Mahabharata yang disebut dengan masa berakhirnya penyamaran.

Pada saat itulah, terlihat siapa sesungguhnya dia yang setiap harinya bermain dadu, menjadi tukang masak (Belawa), penari dan pemelihara kuda. Mereka itu ternyata adalah kesatria-kesatria pandawa yang bisa menggerakkan revolusi untuk menggulingkan segala bentuk penindasan, ketidakadilan dan sejenisnya di muka bumi. Inilah sebenarnya perjalanan sang yogi yang dilukiskan dalam kisah Mahabharata dimana kisahnya sangat dekat dengan kenyataan sehari-hari.

Demokrasi yang sebenarnya bisa dimaknai sebagai terbangunnya kekuatan-kekuatan rakyat (sipil) mendapatkan tempat dalam pemaknaan seperti itu. Karena itulah, proses kontemplasi (*wana parwa*) yang sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai proses pendidikan masyarakat, mesti mendapatkan perhatian yang memadai. Pada konteks ini, apa yang dilakukan Hatta dkk pada masa pergerakan nasional (sekitar tahun 1927-an) sangat relevan pada saat ini. Pada saat itu, Hatta dkk membentuk organisasi yang disebut dengan PPNI (Partai Pendidikan Nasional Indonesia). Jadi, ketika itu, Hatta mendengungkan pendidikan rakyat untuk membangun kekuatan rakyat dalam rangka revolusi nasional. Karena itulah, pemaknaan ritual yang mengadaptasikan sistem yoga, bisa dijadikan landasan kultural untuk melakukan revolusi sosial. Sehingga tercapai sebuah masyarakat yang bebas dari segala bentuk penindasan. Itulah kondisi kebahagiaan bersama (*jagadhita*) yang digambarkan dalam sastra-sastra di Bali.

***Rebuilding* Negosiasi Politik Masyarakat Bali**

Proses politik, pemilihan presiden dan wakil presiden, memasuki masa-masa puncak. Tetapi masyarakat Bali belum melakukan negosiasi politik yang berarti dalam percaturan politik ini. Bahkan, masyarakat Bali terkesan pasif, kurang aktif untuk menegosiasikan berbagai kepentingannya. Mengapa masyarakat Bali bersikap seperti itu? Apakah pengalaman politik masyarakat Bali, menempatkan mereka pada posisi pasif? Bagaimanakah budaya lokal Bali berbicara pada kondisi ini?

Sejarah politik di Bali, kelihatan memang sepi dari hiruk-pikuk negosiasi sejak Indonesia merdeka. Pada persiapan kemerdekaan, Mr I Goesti Ketoet Poeja memang sempat menegosiasikan kata “allah” agar diubah menjadi kata “Tuhan Yang Maha Esa” dalam teks kenegaraan. Negosiasi ini mendapatkan perhatian dan dukungan berbagai kalangan untuk sebuah Indonesia bersatu. Tetapi pasca kemerdekaan, hampir tidak ada negosiasi yang berarti. Sehingga hasil dari proses politik seperti ini menimbulkan ketidakpuasan yang bermuara pada kekerasan. Pengalaman kekerasan politik tahun 1965-an sampai tahun 1999 berbicara tentang hal itu.

Kelemahan negosiasi politik masyarakat Bali ini dipengaruhi sistem pemerintahan di Bali selama ini. Sistem pemerintahan kolonial Belanda-Orba memberikan perlindungan yang berarti bagi eksistensi masyarakat Bali. Sebab pemerintah melihat peluang untuk mengembangkan industri pariwisata dengan keunikan Bali. Sehingga masyarakat Bali terbiasa sangat berharap kepada “budi baik” pemerintah. Kenyataan ini akhirnya melemahkan sendi-sendi negosiasi politik rakyat Bali. Sebagian agamawan dan budayawan Bali turut memberikan andil kepada hal ini dengan menafsirkan konsep *guru wisesa* sebagai sebuah bentuk

Megawati dan Pasar, dari Perspektif Kultur Bali

Megawati Soekarnoputri akan berkunjung ke Pasar Badung berkaitan kampanye Pilpres di Bali. Kunjungan Megawati ini merupakan pola pendekatan baru dengan masyarakat Bali. Sebelumnya, putri proklamator ini biasanya mengunjungi pura atau puri untuk menjalin ikatan dengan masyarakat Bali. Bagaimanakah pola pendekatan ini jika dilihat dari kultur Bali? Akan efektifkah ini secara politis?

Sebelumnya, Megawati kerap mengunjungi pura dan juga puri untuk mengadakan pendekatan dengan masyarakat Bali. Pura dan puri, secara tradisional, merupakan pusat-pusat kekuasaan pada masyarakat Bali. Pura merupakan simbol kekuasaan spiritual, sedangkan puri merupakan simbol kekuasaan politik pada zamannya. Namun sejalan perkembangan waktu, puri tidaklah lagi menjadi simbol kekuasaan politik. Sebab kekuasaan telah berubah. Kantor-kantor Gubernur, Bupati dan kantor pemerintahan lainnya telah menjadi simbol kekuasaan baru di Bali pasca Indonesia merdeka.

Pendekatan-pendekatan ini sebelumnya, memang berhasil mencitrakan Megawati sebagai bagian dari masyarakat Bali. Bahkan, sebagian masyarakat Bali memandang Megawati sebagai “keluarga”, sehingga suara PDIP pada Pemilu tahun 1999 sangat fantastik di Bali. Tetapi pendekatan ini, terutama dengan berkunjung ke pura, menjadi persoalan di waktu-waktu lalu. Sehingga Megawati kemudian mengubah polanya dengan mengunjungi pasar. Bagaimanakah makna pasar bagi masyarakat Bali? Akankah ini bisa mendekatkan Megawati dengan masyarakat Bali?

Pura, puri dan pasar sebenarnya sama-sama merupakan tempat pertemuan. Pura merupakan pertemuan *bhakti* manusia dengan

Pada sekitar abad ke-17 Masehi, terjadi juga peristiwa serupa di sekitar Kerajaan Mengwi-Badung. Ketika kerajaan baru ini hendak membangun kekuasaannya, mereka mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal yang disimbolkan oleh figur Ki Pasek Badak. Perlawanan ini juga menimbulkan negosiasi politik yakni, KiPasek Badak mendapatkan *palinggih* pada Pura Kerajaan di Taman Ayun. Mendapatkan *palinggih* di tempat suci kerajaan merupakan simbol dari pengakuan terhadap eksistensi masyarakat lokal. Jadi, rentang sejarah sebelum kolonial, memberikan catatan-catatan tentang perlawanan masyarakat lokal Bali terhadap kekuasaan baru yang melahirkan negosiasi politik yang menguntungkan masyarakat. Sebab negosiasi ini menghasilkan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat lokal.

Pendidikan Rakyat

Kemampuan negosiasi seperti itu tidak lahir begitu saja. Kemampuan ini lahir dari proses panjang rekayasa sosial para mpu di Bali. Para mpu ini yang meletakkan pondasi kultur masyarakat Bali yang mandiri. Diantara para mpu dari zaman Rsi Markendya sampai Danghyang Nirartha, Mpu Semeru yang datang ke Bali sekitar abad ke-10 Masehi pantas mendapatkan catatan penting. Sebab beliau yang pertama membangun pendidikan rakyat dengan mendidik masyarakat lokal untuk berdaya. Pada babad-babad, ini disimbolkan dengan cerita menjadikan akar-akaran sebagai manusia. Sehingga manusia pertama tersebut disebut sebagai *kamareka* (pembuatan bibit manusia unggul). Akar-akaran adalah simbol dari penduduk asli Bali. Jadi, ketika itu, Mpu Semeru sebenarnya melakukan pendidikan terhadap penduduk asli, sehingga mereka bisa *survive* menghadapi berbagai tantangan ke depan. Inilah yang sebenarnya bisa disebut sebagai pendidikan rakyat atau pemberdayaan dalam istilah modern.

Pendidikan rakyat ini menanamkan pemberdayaan pada masyarakat lokal Bali. Sehingga mereka terus dapat mengadakan perlawanan. Usana Bali dan Usana Jawa mengisahkan bagaimana perlawanan masyarakat Bali menghadapi serangan Gajah Mada.

Masyarakat Bali ketika itu membangun “gelar perang” yang disebut *sagaraukir* (gunung-lautan). Jadi, sebelum Gajah Mada dapat mencapai pusat kerajaan (gunung), mereka harus menghadapi pergolakan masyarakat (lautan) yang terjadi dimana-mana. Inilah yang sebenarnya disebut pertahanan rakyat semesta. Sehingga ketika gunung di samudra itu tenggelam, samudra bukan malah menjadi tenang, tetapi menjadi semakin bergolak. Akhirnya Gajah Mada pun harus berhati-hati bersaman di samudra yang bergolak ini.

Perlawanan masyarakat Bali yang tiada habisnya ini tidak terlepas dari usaha pendidikan rakyat (*kamareka*) Mpu Semeru. Spirit seperti ini dengan pemaknaan baru mesti bisa dimunculkan pada masa kini untuk menghadapi tantangan yang semakin besar. Spirit pendidikan rakyat ini sebenarnya lahir dari pengalaman sejarah Hinduisme. Pada sekitar 1500-500 SM, Hinduisme mengalami kemerosotan. Sebab Bangsa Arya mengembangkan pendidikan yang sangat elitis. Pola ini menimbulkan oligarki kaum Brahmana yang menghasilkan perbudakan. Sebab dengan sistem upacaranya, kaum Brahmana telah menjadi sangat berkuasa, karena bisa memindahkan kapital masyarakat ke tangannya. Masyarakat lainnya kemudian hanya menjadi budak-budaknya. Kondisi ini menimbulkan pembodohan, sehingga kalangan kelas menengah yang dipelopori Sidharta Buddha dan Mahavira mengadakan koreksi terhadap ketidakadilan ini dari sekitar 600 SM.

Kedua pembaharu ini lebih menekankan pada usaha sendiri untuk mencapai pembebasan. Sedangkan para brahmana tidak akan terlalu banyak bisa menolong tanpa usaha sendiri. Karena itu, seluruh masyarakat mesti membangun kesadarannya sendiri, tak peduli latarbelakang sosialnya. Bahkan wanita yang sebelumnya sangat dijauhkan dari weda-weda juga mesti membangun kesadarannya sendiri. Kehadiran pembaharu ini yang kemudian mengawali gerakan pendidikan rakyat yang lepas dari sekat-sekat sosial. Bibit-bibit pembaharuan ini sebenarnya telah lahir sebelum Buddha dengan kemunculan Bhagawad Gita. Shri Krishna dalam

Gita mengatakan jika Beliau merupakan sumber segalanya, termasuk semua makhluk. Karena itu, semua makhluk memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan pembebasan. Jadi, semua makhluk mesti melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertinggi secara mandiri, atau hanya bergantung kepada Tuhan –bukan tergantung kepada penyelemat-penyelemat palsu.

Inspirasi Gita ini yang menjadi semangat kemandirian. Rsi Markendya, Mpu Kuturan dan Mpu Semeru mengambil inspirasi ini untuk membangun pondasi kultur masyarakat Bali mandiri. Dalam usaha membangun kemandirian ini, Gita berbasiskan pada latihan untuk hidup sederhana. Sebab jika manusia senantiasa memikirkan obyek-obyek indrya, mereka akan terikat. Keterikatan akan menimbulkan nafsu. Nafsu menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan akan melahirkan kemarahan. Kemarahan akan menyebabkan kebingungan. Dalam kebingungan, seluruh kebijaksanaan akan sirna. Jika kebijaksanaan sirna, sang diri pun akan hancur. Jadi, kehidupan sederhana menjadi kunci utama untuk membangun eksistensi diri dan masyarakat.

Mahatma Gandhi menerjemahkan sistem yoga kuno ini dalam pergerakan sosial di India. Sehingga masyarakat India menjadi tidak begitu tergantung dengan industri Inggris. Pergerakan ini berhasil membangkitkan negosiasi politik masyarakat India menghadapi kekuasaan kolonial. Sehingga India menjadi negara merdeka tanpa harus menggunakan cara kekerasan. Inspirasi ini mesti menjadi perhatian untuk meningkatkan negosiasi politik masyarakat Bali. Jadi, ketergantungan dalam berbagai hal mesti dikurangi, sehingga bisa melakukan negosiasi politik yang berarti. Dalam negosiasi politik tersebut, minimal masyarakat Bali mendapatkan ruang untuk membangun identitasnya sebagai masyarakat merdeka seperti dalam negosiasi dengan Majapahit. Atau, masyarakat Bali minimal bisa mendapatkan *palinggih* (tempat) dalam tamansari Negara Indonesia ini seperti peristiwa negosiasi politik Ki Pasek Badak dengan Raja Mengwi.

sebaliknya, yakni pemanjaan terhadap keinginan-keinginan badan. Jika tidak ada pemanjaan seperti itu, pasar akan sepi.

Kedua orientasi ini membawa resiko masing-masing. Karena itu, masyarakat Bali menghendaki keseimbangan. Tetapi kenyataan hidup, tidak bisa senantiasa seimbang. Ada kecenderungan manusia yang mempengaruhi keseimbangan, sehingga menjadi tidak seimbang. Karena itu, keseimbangan masih menjadi sesuatu yang idial yang jarang terjadi. Demikian pula keharmonisan. Keharmonisan kerap hanya menjadi semacam ideologi yang jauh dari kenyataan. Karena itulah, keharmonisan atau keseimbangan ditempatkan pada tujuan akhir. Sedangkan kita saat ini, berada dalam proses panjang ke arah itu. Jadi, hasil dari pola pendekatan ini akan menjadi cermin dari keberadaan masyarakat Bali saat ini.



dengan penguasa. Sedangkan pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. Secara tradisional, masyarakat Bali senantiasa menghargai tempat-tempat pertemuan. Seperti misalnya pertemuan beberapa sungai yang disebut dengan *campuhan* dan sebagainya. Tempat-tempat pertemuan ini dipercaya merupakan sumber kemakmuran. Karena itu, masyarakat Bali sebenarnya sangat tergantung dengan tempat-tempat pertemuan ini.

Akan tetapi, beberapa tempat pertemuan ini memiliki rasa yang berbeda bagi masyarakat Bali. Pura merupakan tempat pertemuan yang paling suci. Sebab ini merupakan pertemuan batin manusia dengan Tuhan. Karena itu, tempat pertemuan ini memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Puri merupakan tempat pertemuan masyarakat dengan penguasa. Ada kepentingan-kepentingan duniawi yang cukup besar dalam pola hubungan ini. Tetapi di dalamnya juga ada jalinan ikatan batin, karena ada perasaan yang sama untuk mengabdikan diri kepada kepentingan-kepentingan sosial. Pada hubungan ini, ada hubungan yang memerintah dan diperintah. Ada ketidaksetaraan dalam hubungan ini. Sedangkan pasar merupakan tempat pertemuan dimana di tempat tersebut terjadi transaksi “jual-beli” atau “tukar-menukar”, sehingga ikatan di dalamnya merupakan ikatan kesetaraan.

Pada pertemuan di pasar, masyarakat Bali biasanya memanggil sesamanya dengan setara, memakai istilah *jro*. Berbeda halnya, jika mereka bertemu dengan penguasa di *puri*. Mereka akan menggunakan bahasa *ratu* yang berarti tuan. Bahasa *jro* biasanya digunakan untuk orang yang tidak dikenal secara dekat, bukan sekeluarga. Kalau sekeluarga, masyarakat Bali biasanya akan memanggilnya dengan nama depannya saja. Jadi, pertemuan di pasar merupakan pertemuan yang didasari kepentingan ekonomi semata. Setelah satu barang dibayar maka penjual dan pembeli tidak lagi memiliki ikatan batin. Semua diperlakukan dengan sama, penghormatannya pun sama dengan menggunakan sapaan *jro*.

Oleh karena itu, pertemuan di pasar, merupakan pertemuan manusia yang didasari kepentingan-kepentingan ekonomi. Sehingga transaksi yang terjadi di pasar tidak akan menimbulkan

utang budi dan sebagainya. Semuanya akan berlalu begitu pasar itu selesai. Meskipun demikian, pasar tetaplah memiliki makna yang cukup penting bagi masyarakat Bali. Bahkan keberadaannya bisa mengesampingkan hal-hal lainnya. Upacara-upacara besar bisasaja tergeser karena pasar. Karena bahan-bahan upacara mesti didapatkan di pasar. Jadi, pasar merupakan mata rantai kehidupan yang sangat penting juga bagi masyarakat Bali.

Upacara yadnya misalnya, bisa sangat tergantung kepada keberadaan hari pasaran. Di Bali Timur, seperti Bangli dan Klungkung misalnya, pada hari *pasah* masyarakat tidak akan melaksanakan upacara besar. Semua *sulinggih* (orang suci) di dua daerah ini tidak akan memberikan *dewasa* (hari baik untuk upacara) pada hari *pasah*, karena merupakan hari pasaran yang paling besar di daerah itu, yakni pasaran di Klungkung. Jadi pada hari ini, masyarakat di daerah itu diminta meliburkan kegiatan-kegiatan besar. Mereka harus berkonsentrasi untuk pengisian-pengisian yang bersifat lahiriah. Bahkan *balian*(dukun) pun tidak akan buka praktek pada hari *pasah*. Karena mereka juga perlu waktu untuk ke pasar, membeli berbagai sarana pengobatan. Jadi, pasar memiliki kekuasaan yang demikian kuatnya.

Kekuatan ini memang tidak menyentuh batin, hanya menyentuh fisik. Sebab ketergantungan kepada pasar hanya karena kepentingan fisik. Jadi, kekuatan pasar hanya karena kebutuhan fisik masyarakat Bali. Apakah ini akan bermakna secara politis? Jawabannya adalah pada 5 Juli 2004. Sebab pilihan masyarakat Bali sangat sulit diduga, karena masyarakat terus mengalami dinamika (perubahan). Jika mereka tidak dinamis, mereka tentu tidak bisa dianggap hidup. Jadi, pendekatan-pendekatan politik tentu mesti mempertimbangkan dinamika masyarakat. Politisi yang tidak memperhatikan ini, pastilah akan ditinggalkan para pemilihnya. Dinamika ini mesti bisa dibaca dengan penuh ketelitian.

Dinamika ini yang menyebabkan pergeseran pola pendekatan. Pada masa-masa sebelumnya, masyarakat Bali mengedepankan *rasa*. Karena itu, pilihannya tergantung kepada kedekatan *rasa*.

Misalnya kedekatan karena merasa berkeluarga atau merasa senasib sepenanggungan. Jika masyarakat Bali masih seperti itu, pola pendekatannya akan sulit melalui pasar. Sebab menyentuh *rasa* mestilah melalui hubungan batin. Tetapi jika masyarakat Bali saat ini, telah mulai mengedepankan rasio maka pendekatan pasar, bisa jadi efektif.

Rasio biasanya berdekatan dengan realitas. Realitas sehari-hari manusia adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Dalam usaha memenuhi kebutuhan fisiknya ini, pasar merupakan tempat pertemuan yang menjadi perhatian manusia. Masyarakat Bali pun akan memperhatikan pasar bila dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia. Hal seperti ini tidak pernah dicampakkan dalam kultur masyarakat Bali. Bahkan pada pura tertentu, selalu ada pelengkap Pura Pasar Agung. Bagian ini merupakan sesuatu yang penting dalam tingkatan spiritual manusia. Sebab di pasar, *tri guna* (sifat-sifat manusia) bercampur. Meminjam istilah Buddha, tingkatan ini disebut sebagai *kamadatu* (tingkatan beradunya berbagai keinginan). Diatas tingkatan ini, merupakan alam Saguna Brahman, atau Rupa Datu dalam istilah Buddha (pencitraan kebajikan). Di tingkatan inilah, pura utama diletakkan. Sedangkan diatas dari itu, adalah alam Nirguna Brahman (alam kelepasan). Alam ini merupakan tempat bagi mereka yang telah bebas dari berbagai wujud atau pencitraan. Jadi, keefektifan pendekatan pasar, secara spiritual, akan menjadi cermin bagi kondisi masyarakat Bali saat ini.

Oleh karena itu, keefektifan pola pendekatan ini sangat tergantung dari kondisi masyarakat Bali saat ini. Apakah mereka masih berada pada tingkatan keinginan-keinginan badan (*kamadatu*), atau telah berada pada tingkatan pencitraan (pengembangan *rasa*)? Pola ini juga merupakan ujian bagi masyarakat Bali dalam memandang sebuah fenomena. Apakah mereka lebih memilih berpihak kepada kekuatan-kekuatan pasar, atau memilih berkuat pada usaha-usaha untuk mengembangkan *rasa*? Mengembangkan *rasa* menuntut penyederhanaan terhadap kenikmatan-kenikmatan badan (*tapa*). Sedangkan pasar menuntut

kembali dalam bentuk *babad*, yang kira-kira ditulis dari sekitar abad ke-16 Masehi. Jadi, revolusi pemikiran –dari era *purana* yang dogmatis ke upanisad yang rasional- belum pernah tuntas di Bali. Karena kehendak perubahan ini, tidak lahir dari masyarakat Bali, tetapi didorong dari luar, yakni oleh Gajah Mada.

Perubahan Sosial

Sampai saat ini, masyarakat Bali masih terpengaruh oleh citra-citra dalam dunia *babad* yang lahir dari sekitar abad ke-16 Masehi tersebut. Sehingga citra pemimpin, mestilah seseorang yang berani (prajurit) atau berasal dari keluarga dan lingkungan pemimpin. Pencitraan ini lahir dari keinginan untuk mendapatkan perlindungan dan untuk menjaga keharmonisan. Pencitraan ini selanjutnya melahirkan kecenderungan-kecenderungan putra-putra Bali untuk masuk ke dalam lingkungan seperti itu jika ingin menjadi pemimpin. Mereka tidak tertarik untuk mengolah pikiran, sebab mereka tidak mendapatkan tempat di masyarakat. Bahkan jika seseorang sering menyampaikan pemikiran, kerap disebut sebagai orang yang suka membingungkan masyarakat. Sehingga cap *mereng* kerap melekat pada orang-orang seperti ini sebagai sebuah pembunuhan karakter.

Jika masyarakat Bali masih tetap seperti ini, jelas akan mengalami sebuah kemandegan atau stagnasi kultural. Tradisi-tradisi Bali yang bagus, tidak akan pernah bergerak menjadi pergerakan pemikiran. Tetapi hanya akan terhenti pada sebuah ketrampilan. Masyarakat yang seperti ini akan sulit tampil di antara masyarakat dunia sebagai sosok pelopor. Mereka cenderung hanya akan menjadi pengekor. Karena itu, masyarakat Bali mesti melakukan revolusi kebudayaan. Seorang pemberani (*vira*), tidak mesti hanya untuk mereka yang memegang senjata, tetapi mestinya juga untuk pemikir yang bisa membebaskan masyarakat dan dirinya sendiri dari penderitaan. Bila masyarakat Bali bisa seperti ini, niscaya pemikir-pemikir besar seperti yang pernah lahir pada zaman Buddha dan Upanisad di India, akan lahir di Bali.

Pilihan Masyarakat Bali, Sebuah Stagnasi Kultural

Perhitungan suara Pemilu Pilpres 2004 di Bali, hampir selesai. Pasangan Megawati-Hasyim mendapatkan sekitar 60 persen lebih suara, sedangkan pasangan Soesilo B. Yudhoyono -Jusuf Kalla meraup lebih kurang 30 persen suara. Jadi, pilihan masyarakat Bali, sebagian besar terletak pada figur dari keluarga Soekarno dan figur yang berlatarbelakang militer. Mengapa masyarakat Bali menentukan pilihan pada dua figur ini? Apakah yang melatarbelakanginya?

Pemimpin negara, dalam pandangan masyarakat Bali, termasuk *ksatria*. *Ksatria*, pada pandangan tradisional, adalah keturunan pemimpin atau prajurit. Jadi, dalam pandangan masyarakat Bali, dua kelompok inilah yang pantas untuk menjadi pemimpin. Karena mereka termasuk kelas *ksatria* yang layak untuk memimpin. Pandangan seperti ini dipengaruhi dunia *babad* yang cukup memasyarakat di Bali. Pada *babad*, pemimpin kerap kali diceritakan lahir dari keluarga pemimpin, atau berasal dari prajurit berani yang berjasa kepada masyarakat. Kedua pencitraan ini mewakili figur Megawati yang berasal dari keluarga presiden dan Soesilo B. Yudhoyono yang berlatarbelakang militer. Pencitraan ini jelas belum memberikan titik terang bagi terpilihnya intelektualdi Bali. Bahkan mereka terkadang dicap sebagai orang-orang yang membingungkan. Sebab sering melemparkan ide atau gagasanyang berlawanan dengan rutinitas kehidupan bernegara.

Pencitraan dunia *babad* ini tidak berdiri sendiri dalam kultur masyarakat Bali. Pencitraan ini dipengaruhi cerita-cerita *purana* dalam khasanah Hindu. Purana-purana ini menceritakan bahwa pemimpin mestilah berasal dari keluarga yang memimpin secara turun-temurun (bangsawan), atau prajurit yang gagah berani. Karena hanya merekalah yang mendapatkan kekuatan para dewa

untuk melindungi umat manusia. Pencitraan dalam *purana* dan *babad* ini memang sepatasnya lahir pada masyarakat Bali pada zaman dahulu. Masyarakat Bali ketika itu, adalah masyarakat yang berada di pulau kecil dan berpenduduk sedikit. Karena itu, mereka tentu merasa terancam dengan komunitas besar di pulau besar. Jadi, mereka memerlukan pemimpin yang berani. Ataupun kalau tidak demikian, mereka memerlukan kestabilan dengan memilih keluarga-keluarga bangsawan, sehingga tidak terjadi pergeseran kekuasaan yang menyebabkan ketidakharmonisan atau bahkan perpecahan yang bisa menceraiberaikan komunitas kecil tersebut.

Hinduisme di India, juga melahirkan citra seperti itu, karena mereka adalah masyarakat yang berada di dataran subur. Mereka memerlukan pemimpin yang berani bertempur, atau pemimpin yang bisa menjaga tradisi kestabilan mereka. Sehingga mereka tetap hidup harmonis dan makmur. Masyarakat ini percaya hanya keluarga pemimpin dan para prajurit berani yang bisa menjaga keharmonisan dan tradisi mereka yang bagus. Sedangkan pemikir atau filosof cenderung membuat pertentangan dan mengancam tradisi. Tetapi pencitraan seperti ini hanya bertahan di India sampai abad 600 SM. Sebab keberanian pemimpin-pemimpin mereka kemudian ternyata membelenggu mereka dengan berbagai peraturan yang menguntungkan golongan penguasa. Masyarakat kemudian memerlukan sebuah terobosan untuk membebaskan dirinya dari belenggu ini.

Gejolak masyarakat ini melahirkan zaman Buddha dan Upanisad. Sang Buddha menunjukkan penderitaan rakyat di mana-mana. Sedangkan raja mengurung dirinya di dalam istana, untuk membelakangi penderitaan rakyat. Sang Buddha kemudian terjun ke tengah-tengah masyarakat, bersama masyarakat lainnya, menghadapi penderitaan. Beliau tidak mau mengurung diri di dalam istana, sebagai orang yang takut menderita. Inspirasi Sang Buddha ini terus berpengaruh pada tokoh-tokoh lainnya. Ada seorang tokoh lagi yang keberaniannya menghadapi penderitaan seperti Siddharta Gautama. Beliau mendapatkan gelar *mahavira*, yang kemudian menjadi mahaguru para pengikut Jaina.

Jadi, pada masa itu, kata *mahavira* yang artinya Sang Maha Pemberani mulai dilekatkan pada sosok filosof atau pemikir yang berjuang bersama-sama masyarakat untuk melawan berbagai bentuk penderitaan. Sebab mereka juga tergolong berani (*vira*) untuk meninggalkan kegembiraan semu demi kebahagiaan masyarakat. Revolusi pemikiran ini, pada masa berikutnya, melahirkan dinasti baru yang berasal dari kalangan pemikir. Kauntilya atau Chanakya yang berasal dari pemikir jalanan – karena keintelektualannya tidak diakui kerajaan- selanjutnya berhasil mendirikan dinasti Gupta sekitar 200 SM. Beliau berhasil menggalang kekuatan rakyat untuk menjatuhkan penguasa lama yang korup.

Pada masa-masa inilah, lahir pemikiran kenegarawanan pada masyarakat Hindu di India. Zaman purana yang dogmatis selanjutnya berganti menjadi zaman pencerahan pemikiran. Sebab dogma-dogma yang mengatakan raja adalah keturunan dewa ternyata bisa diruntuhkan melalui gerakan rakyat. Kauntilya pun kemudian mengajarkan rasionalitas dalam kehidupan berpolitik. Salah satu karyanya yang agung yang berbicara tentang politik kenegaraan adalah *Arthashastra*. Rasionalitas ini berkembang ke berbagai aspek kehidupan, sehingga karya-karya besar Hindu diperkirakan lahir dalam rentang waktu 600-200 SM ini. Zaman inilah yang melahirkan kumpulan-kumpulan filsafat Hindu yang dikagumi dunia sampai saat ini.

Masyarakat Bali, sebenarnya juga mengalami fase-fase seperti itu. Pada sekitar abad ke-14 Masehi, Mahapatih Gajah Mada telah menempatkan seseorang yang bukan berasal dari keluarga raja atau prajurit untuk menjadi raja di Bali. Pemimpin yang ditempatkan di Bali, berasal dari keluarga Brahmana (pemikir). Gajah Mada jelas memiliki visi dalam menempatkan pejabat seperti ini. Beliau ingin masyarakat Bali bisa memiliki tradisi berpikir yang baik, sehingga pemikiran-pemikiran Hindu bisa berkembang di Bali. Namun pada masa-masa berikutnya, Bali mengalami pergolakan antara para penguasa-penguasa kecil. Sehingga pencitraan *purana* muncul kembali dalam masyarakat Bali. Pencitraan ini selanjutnya lahir

memperebutkan jabatan kepala daerah. Pengalaman di India menunjukkan bahwa ada satu partai yang berani memainkan isu persentase pengangkatan pegawai negeri untuk golongan masyarakat tertentu. Sebab isu-isu yang memanfaatkan sentimen etnis, agama dan golongan tradisional lainnya ini ternyata memang efektif untuk mengangkat salah satu partai politik ke permukaan wacana publik. Dalam masalah ini, institusi lokal bisa menjelma menjadi kekuatan politik non-formal (di luar partai politik) untuk menyokong kekuatan politik dari partai tertentu.

Pengalaman masyarakat Bali menunjukkan bahwa kondisi seperti itu kerap menimbulkan keretakan pada institusi lokal. Sebab, institusi lokal masih berpolakan kebersamaan. Sehingga mereka belum dewasa dalam mengelola perbedaan. Sehingga ketika terjadi perbedaan, mereka biasanya memanfaatkan kekuasaan tradisional, seperti mengucilkan dan sejenisnya, untuk memaksa anggotanya. Pendekatan seperti ini bisa melemahkan institusi lokal tersebut. Bahkan pendekatan ini bisa memecah kekuatan institusi lokal tersebut ke dalam berbagai kelompok kepentingan. Karena itu, keretakan-keretakan pada institusi lokal akan semakin mengejala. Dapatkah institusi lokal ini keluar dari masalah seperti itu?

Secara teks, institusi lokal ini memang tergambar bisa mengatasi masalah seperti ini. Sebab mereka lahir dalam suatu masa untuk mengelola berbagai perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Seperti pakraman yang lahir dari konflik berbagai keyakinan dan Subak yang lahir dari konflik distribusi sumber daya air di Bali. Tetapi pada kenyataannya, mereka seringkali terjebak pada pragmatisme kepentingan institusi lokal tersebut. Seperti dalam kerangka membangun pura, bale banjar, upacara dan sejenisnya. Pragmatisme ini memang bisa menyelesaikan sebagian masalah di permukaan, seperti masalah keuangan. Tetapi mereka menisakan masalah masa depan yang sangat besar, yaitu tidak terbangunnya kemandirian masyarakat. Padahal kemandirian inilah yang menjadi kekuatan institusi lokal tersebut. Dari kemandirian inilah, institusi lokal sebenarnya telah melahirkan

Pada sastra-sastra *kadyatmikan* di Bali, memang mereka yang bisa membebaskan dirinya, disebut sebagai pemberani. Tetapi pandangan seperti itu masih bersifat individual. Artinya, hanya untuk mereka yang telah mencapai *kalepasan* (pembebasan) untuk dirinya sendiri. Pemikiran *kadyatmikan* ini semestinyalah kini diterjemahkan dalam sebuah gerakan sosial. Sehingga kata *kalepasan* semestinya tidak hanya dilekatkan sebagai pencapaian individu, tetapi sebagai pencapaian dari sebuah gerakan sosial untuk membebaskan penderitaan masyarakat. Sehingga kemudian kata *Sang Siddha* (Yang Berhasil), mestilah bisa dilekatkan pada pelopor gerakan-gerakan sosial yang berusaha membebaskan masyarakatnya dari berbagai belenggu yang menyebabkan penderitaan. Kondisi seperti ini, akan lahir bila masyarakat Bali mulai berani meletakkan pencitraan pemberani pada sosok pemikir yang terus-menerus berusaha melakukan perubahan sosial.

Sebagai masyarakat yang lahir dari tradisi pemikiran Hindu, perubahan tentunya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Kenyataan yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Karena itu, dunia disebut *maya* (terus berubah). Perubahan apa pun di dunia ini, mestilah diarahkan kepada substansi yang bersifat kekal, yaitu *satyam* (kebenaran), *shiwam* (kesucian) dan *sundaram* (keindahan). Karena itu, arah perubahan ini mestilah dipimpin oleh mereka yang mengerti sesuatu yang bersifat substansial. Atau oleh mereka yang berani mengadakan revitalisasi nilai menuju sesuatu yang bersifat substansial yang kekal. Tanpa itu, perubahan hanya akan berputar bolak-balik, dari penderitaan satu menuju penderitaan selanjutnya. Hal inilah yang disebut *samsara* (lingkaran penderitaan). Pemimpin tentulah bukan mereka yang mengajak masyarakatnya untuk berputar-putar dalam *samsara*. Pemimpin haruslah merupakan sosok yang bisa mengajak masyarakatnya untuk berani memotong lingkaran penderitaan, menuju sesuatu yang substansial dan abadi, yakni kebahagiaan bersama.

Pilkada Langsung, Ancaman Institusi Lokal?

Genderang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, mulai ditabuh setelah DPR menyetujui Undang-undang Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam Pilkada ini, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15 persen suara atau kursi pada DPRD yang bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah. Mekanisme ini menjadikan partai politik sebagai satu-satunya jalur dalam rekrutmen kepemimpinan daerah, tanpa melibatkan institusi lainnya. Tetapi, partai politik ternyata tidak bisa hanya mengandalkan instrumen partainya untuk memenangkan pilihan rakyat. Pemilihan presiden langsung membuktikan bahwa mereka tidak memiliki massa loyal secara langsung, tetapi hanya berbasiskan massa mengambang. Pada kondisi seperti itu, institusi lokal seperti desa pakraman, dadya (kelompok klan) dan peguyuban lainnya yang bermassa loyal bisa menjadi lirikan para politisi untuk memenangkan calonnya. Tidakkah ini menjadi ancaman bagi institusi lokal ini? Mungkinkah secara sosial kultural, institusi ini menjadi alat politik dalam Pilkada nanti?

Secara umum, partai politik di Indonesia berbeda corak dengan partai-partai politik di negara-negara barat. Partai politik di negara-negara barat berbasiskan kepada kepentingan kelas dan ideologi yang menjadi cerminan dari masyarakat mereka. Tetapi partai-partai di Indonesia, tidaklah berbasiskan kepada kelas dan ideologi seperti itu. Karena partai-partai politik ini lahir dari sebuah pergerakan nasional pada masa kolonial. Pada pergerakan nasional itu tidak ada kelas sosial atau ideologi yang dipertentangkan. Sebab semua rakyat Indonesia ketika itu berada pada satu kelas, yaitu kelas rakyat yang terjajah. Jadi, semangat yang dibangun adalah semangat nasionalisme (kebangsaan) untuk

melawan penjajahan. Karena itu, ideologi pergerakan nasional ini hanyalah satu yaitu nasionalisme. Demikian juga kelas yang diperjuangkan juga cuma satu, yaitu kelas kaum terjajah.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, pergerakan nasional ini terdiri dari berbagai sayap perjuangan. Ada yang berbasiskan nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler. Sayap-sayap pergerakan nasional inilah yang berkembang menjadi partai politik di Indonesia sampai saat ini. Sehingga memang tidak ada partai politik yang berbasiskan kelas atau ideologi, seperti misalnya kelas buruh dan kelas pemodal. Bahkan, secara ideologi, partai-partai politik yang ada, menjadi sangat mirip. Corak partai politik seperti ini mirip dengan corak partai politik di Amerika karena memiliki latarbelakang yang sama, yaitu partai politik yang lahir dari pergerakan nasional melawan Inggris. Kesamaan ideologi ini akhirnya mendorong partai-partai politik hanya berbasiskan kepada massa mengambang. Partai-partai politik seperti ini tentu mesti bisa “bermain isu” untuk memenangkan pilihan rakyat.

“Permainan isu” ini terkadang bisa memanfaatkan sentimen-sentimen kelompok agama, etnis dan yang lainnya. Pengalaman partai-partai politik di India yang juga memiliki latarbelakang yang sama dengan Indonesia, menunjukkan hal itu. Kemenangan *Bharatya Janata Party* (BJP) tidak akan bisa dilepaskan dari isu Ayodya yang merupakan isu agama yang telah berlangsung berabad-abad. Partai-partai politik di Indonesia, bukan tidak mungkin akan terjebak pada permainan isu-isu seperti itu. Apalagi Indonesia belumlah secara jelas memisahkan ranah politik dan agama sebagai sesuatu yang terpisah. India yang telah tuntas dalam melakukan sekularisasi politik terkadang juga terseret dalam isu-isu seperti itu. Sehingga kondisi Indonesia yang belum tegas untuk melakukan sekularisasi politik, berpotensi untuk terseret dalam isu-isu agama dan etnis dalam perhelatan politik.

Posisi Indonesia secara umum seperti itu, akan berpengaruh sampai ke daerah-daerah. Sehingga pada konteks Bali, isu-isu sub-

Tuhan atau kebenaran. Berdasarkan pandangan seperti ini, tentu sangat tidak meyakinkan bila orang Hindu takut kepada perubahan. Tetapi pada kenyataannya, perilaku masyarakat Bali yang berkembang justru sangat takut kepada perubahan. Mengapa itu bisa terjadi?

Ketakutan, kecemasan dan sejenisnya, merupakan hal yang wajar ada pada setiap manusia atau masyarakat. Hal itu terjadi karena mereka tidak memegang spirit. Sehingga mereka larut dalam gerak materi. Gerak materi ini menimbulkan berbagai kecemasan dan kekhawatiran. Tetapi itu memang harus terjadi. Sebab *pradhana* – meminjam filsafat *samkya* dari Rsi Kapila – memang harus terus bergerak mengelilingi *purusha* (spirit). Gerak materi ini akan melahirkan *ahamkara* (kepemilikan). Jika manusia memasuki alam *ahamkara* (kepemilikan), mereka akan takut dengan perubahan. Sebab perubahan dikhawatirkan bisa menghilangkan “milik”, seperti menghancurkan badannya dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang takut kepada perubahan, seperti mereka menakuti “kematian”. Padahal, perubahan atau bahkan kematian, sebenarnya justru akan melahirkan sesuatu yang baru dan penuh harapan. Fenomena ini kemudian melahirkan sebuah bentuk sikap yang dalam istilah politik disebut dengan “konservatif”.

Prilaku politik yang seperti itulah yang terjadi saat ini di Bali. Walaupun Bali terkenal sebagai pelopor bagi perubahan di tahun 1999, yang memenangkan PDI Perjuangan secara meyakinkan di Bali. Dari dua kejadian ini, kita dapat melihat bahwa masyarakat Bali memiliki dua sifat yang bertentangan, yakni sangat konservatif, tetapi terkadang sangat revolusioner. Jika ada momentum, masyarakat Bali bisa menjadi begitu revolusioner. Namun bila kejadiannya biasa-biasa saja, mereka sangat konservatif. Kedua sifat yang saling bertentangan ini terjadi karena belum adanya kemandirian sikap di kalangan masyarakat. Masyarakat Bali cenderung untuk memilih pendapat banyak orang. Mereka tak terbiasa untuk berpendapat sendiri. Hal ini terjadi karena mereka tidak memegang spirit. Mereka sangat terikat

berbagai kreativitas budaya yang mengagumkan, baik secara kebersamaan maupun individual yang dilahirkan anggotanya. Karena itu, pragmatisme yang terkadang terjadi ini merupakan pragmatisme yang destruktif – bukan pragmatisme yang konstruktif – dari institusi-institusi lokal tersebut. Sebab pragmatisme ini telah menjadi kekuatan pembelenggu proses kreativitas di tengah-tengah masyarakat.

Mahatma Gandhi, tokoh pergerakan India yang membasiskan perjuangannya kepada nilai-nilai Hindu mengatakan “jangan tukar kebebasanmu dengan apapun”. Artinya, Gandhi sangat mengusung kebebasan sebagai nilai yang tertinggi. Sebab Hinduisme sebenarnya juga mengusung kebebasan (*moksha*) sebagai nilai yang tertinggi. Tradisi, upacara, keluarga, adat dan ikatan-ikatan lainnya dapat ditinggalkan. Kalau pada kehidupan ini tidak bisa meninggalkan itu, kematian akan memaksa manusia untuk meninggalkannya. Tetapi semangat untuk mencapai pembebasan (*moksha*) hendaklah tidak pernah ditinggalkan dalam setiap kelahiran dan kematian. Demikianlah Weda-weda menempatkan pembebasan sebagai tujuan tertinggi (*paramartha*). Institusi lokal Bali yang berbasiskan nilai seperti ini sebenarnya juga memiliki tujuan tertinggi tersebut. Karena itu, institusi ini mesti *ambek paramartha*, artinya berperilaku sebagai institusi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertinggi.

Institusi lokal di Bali, dapat diibaratkan seperti sebuah perguruan. Mereka mengangkat derajat para anggotanya setahap demi setahap untuk mencapai pembebasan. Kelompok dadya misalnya, pada masa terakhirnya berkaitan erat dengan *kajang* yang digunakan pada saat kematian. Isi daripada *kajang* tersebut adalah aksara-aksara pembebasan yang merupakan intisari dari filsafat kehidupan di dalam Hinduisme. Aksara-aksara ini merupakan penjabaran dari Filsafat Samkya yang menerangkan sejarah kelahiran manusia sampai mencapai pembebasan. Jadi, inti pembebasan ini hendaknya tidak dimaknai pada saat kematian saja, tetapi juga dimaknai pada saat kehidupan ini. Sehingga kelompok

ini haruslah menjadi kekuatan pendorong bagi kebebasan anggotanya untuk berkeaktivitas di dunia ini.

Desa pakraman dan subak sebenarnya juga intitusi yang meletakkan tujuan akhirnya pada sebuah keharmonisan. Keharmonisan adalah proses peleburan (*nyomya*). Peleburan ini adalah proses penghilangan identitas keduniawian menuju sebuah keadaan spiritual yang tanpa identitas. Keadaan tanpa identitas adalah sebuah keadaan yang digambarkan secara filosofis sebagai keadaan pembebasan. Sebab roh yang mencapai keadaan ini akan terbebas dari berbagai bentuk dan identitas. Mereka akan melebur pada kenyataan yang abadi. Jadi, desa pakraman dan subak juga meletakkan cita-citanya pada pembebasan. Karena itu, tentulah akan sangat bertentangan jika mereka menjadi sebuah lembaga yang membelenggu kebebasan warganya.

Pada konteks pembangunan demokrasi sekarang ini, jelas institusi-institusi lokal ini mesti berada pada titik untuk mendukung sebuah demokratisasi yang lebih hakiki. Yaitu terbangunnya kebebasan masyarakat dari semua belenggu -bukan sebaliknya menjadi kekuasaan baru yang membelenggu warganya. Sehingga lahir suatu kreativitas yang abadi. Mitologi dalam Adiparwa Mahabharata menggambarkan ini sebagai perjalanan Garuda untuk mendapatkan *Tirta Amerta* untuk membebaskan ibunya dari perbudakkan. Demikianlah hendaknya institusi lokal di Bali. Mereka mesti bisa menjadi Garuda yang bisa membebaskan masyarakat Bali dari perbudakkan.

Sakralisasi Perubahan dan Konservatisme Politik di Bali

Perolehan suara Pemilu 2004 di Bali –walau masih sementara– menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih mendominasi. Data-data ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali ternyata belum menghendaki perubahan yang begitu besar. Atau, masyarakat Bali mungkin masih memberikan kesempatan kepada partai yang berkuasa sambil menunggu momentum perubahan. Tetapi bagaimana pun juga, kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali tidak ingin cepat-cepat untuk mengambil kesimpulan untuk berubah, atau mengubah keadaan. Apakah yang melatarbelakangi hal itu? Bagaimanakah sebuah masyarakat seperti itu dapat mengubah dirinya?

Secara tradisi, perubahan memang memiliki makna yang *tenget* (angker) bagi masyarakat Bali. Sehingga masyarakat Bali harus membuat upacara tertentu setiap kali terjadi perubahan. Misalnya pada setiap perubahan bulan (purnama-tilem) atau perubahan hari (*sandyakala*). Masa-masa perubahan seperti ini juga kerap mendapatkan mistifikasi, sehingga memang benar-benar seramdan menakutkan. Secara tak sadar, perilaku ini kemudian membuat masyarakat Bali sangat takut dengan perubahan. Sebab perubahan dikhawatirkan bisa menimbulkan “disharmoni” dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan sikap seperti ini tentu saja merupakan bentuk degradasi nilai dari Hinduisme. Agama Hindu sebenarnya mengajarkan tentang keabadian. Keabadian tersebut sebenarnya adalah perubahan. Jadi, perubahanlah yang abadi. Karena itu, Tri Murti (tiga manesfestasi Tuhan) dipersonifikasikan sebagai bentuk perubahan, yaitu *utpeti* (penciptaan, Brahma), *stithi* (pemeliharaan, Wisnu) dan *pralina* (peleburan, Shiwa). Teologi seperti itu jelas didasari dari pandangan filsafat Hindu yang menyatakan bahwa perubahan adalah keabadian. Dan, keabadian tersebut adalah

Teroris Lokal dan Budaya Politik “Teror” di Bali

Kasus bentrokan massa antar pendukung parpol di Buleleng dan Tabanan memanaskan suhu Bali akhir-akhir ini. Yang lebih menarik lagi, pernyataan Kapolda Bali, Mangku Pastika yang menyebut tindakan-tindakan seperti itu sebagai teroris lokal. Dengan demikian berarti, Bali juga ternyata memiliki potensi teroris. Benarkah masyarakat Bali memiliki kultur teroris seperti itu? Jika ya, apakah penyebab dan langkah antisipasinya yang berdemensi kultur Bali?

English Dictionary, Collins Cobuild menjelaskan arti kata *terrorist* sebagai berikut “*A terrorist is a person who uses violence, especially murder, kidnapping and bombing, in order to achieve political aims*”. Artinya, teroris adalah seseorang yang menggunakan kekerasan, terutama pembunuhan, penculikan dan pemboman untuk mencapai tujuan politiknya. Pada pengertian ini, setiap tindakan kekerasan, apalagi pembunuhan, untuk mencapai tujuan politik adalah merupakan tindakan teroris. Pada konteks pendekatan seperti ini, apa yang dikatakan Mangku Pastika memang benar adanya. Tetapi, untuk menuntut pelaku tindakan kekerasan tersebut dengan Undang-undang teroris tentu memerlukan kajian hukum lebih jauh lagi.

Terlepas dari kajian hukum seperti itu, yang jelas, telah muncul suasana mencekam sebagai akibat teror, untuk mencapai tujuan-tujuan politik di tengah-tengah masyarakat Bali. Dalam kultur politik masyarakat Bali, hal ini memang kerap terjadi. *Geoffrey Robinson* dalam bukunya *Dark Side of Paradise* banyak mengulas tentang hal ini. Pada revolusi kemerdekaan Indonesia, dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu kekuatan pro NICA dan pro Republik sama-sama mengadakan teror di tengah-tengah masyarakat. Pada siang harinya, kelompok pro NICA dengan pasukannya mendatangi warga dengan senjata lengkap. Sedangkan

dengan bentuk-bentuk materi. Sehingga kemudian terjebak dalam keadaan *maya* atau keadaan seolah-olah. Inilah sesungguhnya gambaran masyarakat Bali yang terlihat seolah-olah harmonis, namun kenyataannya menyimpan sejuta konflik.

Demokratisasi

Era demokrasi saat ini, sebenarnya memberikan peluang kepada masyarakat Bali untuk berani berpendapat sendiri (mandiri). Sehingga konflik-konflik seharusnya sudah mulai bisa dibicarakan secara terbuka. Sehingga proses *utpeti*, *stithi* dan *pralina* berjalan secara wajar. Sehingga sebuah masyarakat tidak mengalami terlalu lama “kebusukkan” karena proses *pralina* yang sangat lambat. Ketiga proses perubahan abadi ini harus berlangsung secara wajar. Sehingga sebuah masyarakat bisa terus bergerak dinamis, tidak diam di tempat. Weda-weda sebenarnya juga membuka ruang tersebut. Perubahan memang harus mendapatkan tempat. Karena itulah, Weda menekankan lima keyakinan yang disebut dengan Panca Sradha, yang terdiri dari Brahman (kebenaran), Atman (realisasi atau pancaran kebenaran), Karmaphala (hukum sebab akibat), Punarbhawa (kelahiran berulang-ulang) dan Moksha (pembebasan).

Kelima hal itu sebenarnya merupakan sebuah putaran. Brahman terpancar ke dalam setiap makhluk menjadi *atman*. Pancaran ini kemudian terjebak dalam hukum perbuatan yang ada dalam dunia setiap makhluk (*karmaphala*). Jebakkan ini akan melahirkan penjelmaan yang berulang-ulang (*punarbhawa*). Tetapi, sang jiwa bisa akan terbebas dari penjelmaan ini bila mendapatkan pembebasan. Pembebasan itu dapat tercapai bila mereka menyadari tentang kebenaran (Brahman). Kelima keyakinan ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa perubahan pasti terjadi. Manusia harus mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang benar, yaitu pembebasan. Jika mereka terjebak dalam rutinitas, atau konservatisme politik, hanya akan melahirkan fenomena yang berulang-ulang, tidak akan melahirkan kemajuan.

Oleh karena itu, masyarakat Bali perlu mengarahkan perubahan kepada spirit (hakikat atau kebenaran). Sehingga mereka bisa menemukan pembebasan, bukan kenyataan yang berulang-ulang yang juga disebut *samsara* atau penderitaan. Jadi, kalau diibaratkan berada dalam putaran lingkaran, manusia Bali perlu mengadakan usaha untuk memotong lingkaran, sehingga bisa meluncur ke tengah (hakikat, kebenaran). Usaha seperti ini, baru bisa disebutkan sebagai progresivitas yang akan melahirkan pembebasan masyarakat dari penderitaan. Sehingga mereka bisa mendapatkan sebuah kondisi yang disebut dengan *jagaddhita* (kebahagiaan dunia).

Dalam realita sosial, dasar pemikiran ini mesti diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial-politik yang dilandasi sebuah prinsip politik yang berpijak kepada kebenaran, dan mengarah kepada tujuan untuk mencapai *jagaddhita* (kesejahteraan bersama). Secara historis, masyarakat Bali terbiasa melakukan gerakan sosial-politik seperti ini. Sehingga mereka bisa melahirkan sebuah institusi pakraman yang mengemban tujuan kesejahteraan bersama (*jagaddhita*). Gerakan seperti ini perlu dikembangkan lagi secara lebih luas lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga gerakan ini melahirkan sebuah bentuk perlawanan terhadap kekuatan penindas yang sering tampil dengan wacana keharmonisan dan juga kesejahteraan. Padahal kenyataannya, mereka hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat.

Sebuah gerakan pembebasan seperti itu, tentunya harus lahir dari sebuah kesadaran terhadap kebenaran. Seseorang tidak akan pernah mencapai “moksha” atau pembebasan bila tidak memiliki kesadaran terhadap kebenaran. Gerakan tanpa kesadaran seperti itu, hanya akan melahirkan pengulangan-pengulangan (*samsara*, atau penderitaan). Tetapi gerakan yang berawal dari kesadaran, akan membebaskan masyarakat dari penderitaan. Karena itu, yang pertama perlu dibangun dalam diri manusia adalah kesadaran. Kesadaran tersebut tentu lahir dari *widya* (pengetahuan). Karena itu, perlu ada proses pencerdasan untuk mencapai usaha ini. Usaha ini pada kenyataannya, tentu akan berlawanan dengan usaha

pembodohan yang kerap juga dilakukan kekuatan penindas. Jadi, perlawanan pertama yang harus dilakukan adalah melawan usaha-usaha pembodohan. Sehingga melahirkan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan sosial-politik yang berpegang kepada prinsip kebenaran, sehingga mengarah kepada sasaran yang benar yaitu *jagaddhita* (kesejahteraan bersama).



Tim Sukses dan Budaya Ketergantungan di Bali

Memasuki bulan Juni 2004, masyarakat Bali akan diramaikan berbagai kegiatan Tim Sukses Capres dan Cawapres. Tokoh-tokoh masyarakat Bali, sebagian terlibat dalam tim-tim ini. Masyarakat juga mulai ikut-ikutan, nimbrung bareng. Mengapa ini bisa terjadi, padahal, di satu sisi, masyarakat Bali tidak tergolong pemuja figur, seperti terlihat ketika mereka melihat para bintang di Kuta atau Ubud? Begitu berharapkah mereka pada figur presiden dan wakil presiden untuk menyelematkan mereka?

Masyarakat Bali memang kerap memandang politik merupakan panglima bidang-bidang lainnya. Sehingga masyarakat menempatkan pemerintah sebagai salah satu guru, yakni *guru wisesa*. Guru, bagi masyarakat Bali, adalah sosok yang bisa memberikan keselamatan. Sebab Tuhan juga mendapatkan julukan guru, yakni *guru swadyaya*. Penempatan Tuhan sebagai guru, karena Beliau bisa memberikan keselamatan. Karena itu sebagai guru, pemerintah memang diharapkan bisa memberikan keselamatan kepada masyarakatnya, seperti halnya guru-guru yang lainnya.

Tetapi sejarah mencatat, pemerintahan belum pernah bisa memberikan keselamatan kepada masyarakat Bali. Pada rentang sejarah masyarakat Bali, memang ada pemerintahan yang bisa memberikan rasa aman, seperti zaman Masula-Masuli (sekitarabad ke-12 Masehi) dan Dalem Waturenggong (sekitar abad ke-14 Masehi), namun itu hanya sekejap. Rentang sejarah berikutnya, adalah berbagai catatan tentang kekecauan politik sebagai akibat perebutan kekuasaan. Jadi, rasa aman itu hanya sekejap. Jika rasa aman hanya sekejap, kesejahteraan apalagi kemakmuran tentunya belum pernah bisa diwujudkan oleh pemerintahan. Padahal, pemerintahan telah mendapatkan kehormatan yang demikian besar di tengah-tengah masyarakat Bali. Sampai-sampai masyarakat Bali

pada malam hari, giliran para pemuda yang bergerilya mendatangi perkampungan untuk mencari apa yang mereka sebut pengkhianat. Dua gerakan ini menimbulkan ketakutan pada warga kebanyakan. Sehingga mereka hampir tidak berani mengambil sikap.

Pada tahun 1950-an, ada gerakan Logis yang tidak puas dengan pemerintahan Indonesia menimbulkan suasana teror di Bali. Tahun 1965-1967, suasana tersebut semakin menggila dengan ada tindakan pembunuhan di pulau yang damai ini. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Gestok. Tahun 1971, juga muncul suasana teror dalam pertarungan politik antara kekuatan lama dengan kekuatan baru. Pada akhir-akhir ini, suasana menakutkan juga terlihat dimana-mana. Mulai dari pergerakan reformasi yang mengorbankan Kantor Bupati Badung dan yang lainnya. Apakah penyebab munculnya budaya teror dalam kultur politik masyarakat Bali ini?

Secara umum, masyarakat Bali memiliki dua budaya yangkerap menghambat perubahan. Budaya tersebut adalah feodalismeyang menghasilkan budaya paternalistik –dalam praktiknya kemudian berkembang menjadi budaya *nantkil*. Yang kedua, terdapat budaya kolektivitas yang berlebihan, sehingga menghambat kreativitas pribadi warga masyarakatnya. Kedua budaya ini kemudian menutup saluran perubahan. Sehingga seluruh energi pembaharuan dan perubahan tersumbat. Energi ini kemudian menjadi ledakan-ledakan emosional manakala momentum perubahan tersebut terjadi. Hal inilah yang kemudian menumbuhkan suasana teror pada setiap momentum perubahan.

Suasana teror tersebut ditumbuhkan untuk mencitrakan bahwa kehendak perubahan tersebut merupakan kehendak seluruh masyarakat. Jika itu kehendak seluruh masyarakat maka setiap warga harus mengikutinya. Pola pikir seperti ini lahir dari semangat kolektivitas yang berlebihan tersebut. Semangat ini telah menyebabkan manusia Bali tidak berani berpikir sendiri untuk merencanakan masa depan masyarakat. Sehingga mereka memerlukan pendapat umum untuk mendukungnya. Dalam usaha untuk mendapatkan pendapat umum tersebut dilahirkan suasana

teror, sehingga sebagian besar warga terdiam karena ketakutan. Diam ini kemudian diartikan mendukung perubahan. Padahal kenyataannya, belum tentu demikian. Tetapi mereka seringkali menyerah dengan mengatakan bahwa ini sudah kehendak zaman (*aab gumi*). Fenomena-fenomena seperti inilah yang kemudian menumbuhkan kultur teroris dalam percaturan politik di Bali.

Mencari Solusi

Meskipun demikian, masyarakat Bali sebenarnya menyimpan juga budaya yang demokratis. Budaya ini tumbuh pada masa-masa sebelum pengaruh Jawa-Majapahit datang ke Bali. Budaya seperti itu adalah budaya *paruman* dan *pasuwakan* yang artinya kurang lebih adalah dialog. Budaya ini sangat kental sekali pada orang-orang pegunungan yang sedikit sekali mengadopsi pengaruh Majapahit. Budaya seperti memang lahir pada masa-masa Bali belum memiliki kerajaan, sekitar abad ke-7 Masehi, dimana Maharsinya adalah Rsi Markendya. Budaya seperti ini masih tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Cuma pada praktiknya, tirani mayoritas dan pengaruh kekuasaan politik seringkali bermain di dalamnya. Sehingga mekanisme *paruman* kerap juga menjadi alat untuk mempertahankan status quo –atas nama keharmonisan dan lain sebagainya. Pada konteks ini, wacana-wacana perubahan memang seringkali tersumbat.

Namun demikian, harapan pemurnian masih bisa dilakukan. Misalnya melalui pemurnian *paruman* dalam wajah yang sebenarnya. Sehingga wacana-wacana pembaharuan juga bisa berkembang dan mendapatkan apresiasi yang cukup dalam *paruman* seperti ini. Tetapi hal seperti ini, biasanya akan terhambat pada kualitas SDM para tetua adat. Karena itu, pemerintah sudah semestinya bisa memberikan bantuan pendidikan SDM bagi calon-calon tetua adat ini –jangan hanya pintar memberikan bantuan uang semata. Jadi, pemerintah juga perlu memberikan pendidikan demokrasi bagi masyarakatnya. Pendidikan seperti ini akan mudah terserap dalam kebudayaan Bali, sebab secara tradisi, Bali masih memiliki wadah untuk itu (melalui *paruman*). Sisial-sialnya Bali,

masyarakatnya ternyata masih memiliki perangkat untuk berdemokrasi.

Pada perangkat seperti itulah, seharusnya ditumbuhkan kemandirian dalam berpikir. Semangat kolektivisme seharusnya ditempatkan dalam menghargai keputusan bersama, bukan dalam rangka mencapai keputusan. Jika hal tersebut dilakukan, budaya Bali akan bergerak dinamis sejalan perkembangan zamannya. Dan jelas, ini tidak akan memunculkan budaya teror kembali untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Sebab, wacana-wacana perubahan telah mendapatkan tempat dan apresiasi yang memadai. Sehingga pada setiap perubahan, sekelompok orang tidak perlu untuk menumbuhkan suasana ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Jadi, kultur masyarakat Bali mesti sudah mulai membuka katup-katup pembaharuan, sehingga tidak meledak di kemudian hari. Sudah saatnya, masyarakat Bali harus belajar dari sejarah, sehingga tidak mengulang kembali sejarah yang kelam.



Pilkada, Pentas Dunia Pewayangan?

Beberapa bulan lagi, tepatnya 24 Juni 2005, masyarakat Bali yang berada di lima kabupaten/kota akan menghadapi perhelatan politik lokal, yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan ini akan menjadi pengalaman pertama bagi masyarakat Bali. Sebagian besar masyarakat berharap pemilihan langsung ini akan berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat di segala bidang, terutama dalam pelaksanaan aspirasi masyarakat Bali pada berbagai sektor pembangunan. Bagaimanakah harapan itu bisa direalisasikan? Bisakah harapan itu akan terwujud? Bagaimanakah sebaiknya masyarakat Bali membangun dirinya dengan berbasiskan pada kultur lokal yang ada?

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung memang memberikan harapan baru bagi masyarakat. Masyarakat setidaknya bisa berharap aspirasi mereka akan semakin mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan. Sehingga semboyan demokrasi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan semakin mendekati kenyataan. Rakyat benar-benar akan menjadi penentu. Kalau pun tidak Tuhan, rakyat bolehlah disebut akan menjadi raja di negerinya sendiri. Sehingga mereka bisa berharap akan mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintahan yang dibentuknya. Benarkah ini akan bisa diwujudkan?

Pemilihan langsung memang bisa berdampak positif seperti itu bila berbagai syarat terpenuhi. Syarat pertama adalah bila masyarakat cerdas memilih pemimpinnya. Syarat kedua adalah bila masyarakat tidak mengembangkan tindakan-tindakan pragmatis dalam memilih pemimpinnya. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, pemilihan langsung juga bisa berdampak negatif. Sebab pemilihan langsung membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi para calon. Sehingga mereka bisa saja akan mencari pemodal baik lokal

menyebutkan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan Dewa Wisnu di dunia (*Wisnu Sekala*).

Rasa aman yang beberapa saat bisa diwujudkan, tentunya tidak cukup bagi sebuah masyarakat. Pada masa pemerintahan Belanda di Bali dari sekitar tahun 1910-1942, terdapat juga fase-fase aman bagi masyarakat Bali. Sekitar tahun 1930-an misalnya, masyarakat Bali konon merasakan rasa aman. Namun kemudian, mereka lagi merasakan kekacauan politik pada tahun 1942-1945 dan 1945-1950-an. Setelah Indonesia merdeka (1950-1965), Bali juga diwarnai berbagai kekacauan. Dari tahun 1975-1995, Bali memang merasakan rasa aman. Tetapi ketika mereka membutuhkan lebih dari sekedar rasa aman, mereka kembali mendapatkan berbagai kemerosotan. Jadi, pemerintahan benar-benar belum pernah bisa memberikan keselamatan, apalagi kesejahteraan yang permanen kepada masyarakat Bali. Karena itu, penempatan pemerintah sebagai “guru” yang berarti bisa memberikan keselamatan, perlu mendapatkan pemaknaan atau penafsiran lain yang lebih mendekati kenyataan. Sehingga masyarakat Bali tidak perlu harus berharap banyak kepada pemerintahan.

Akan tetapi, pemaknaan baru tersebut, belum muncul. Desa-desa adat yang diformat sebagai masyarakat mandiri oleh Mpu Kuturan, ternyata juga menyimpan budaya-budaya ketergantungan yang demikian besar kepada pemerintah. Pada berbagai acara dan kesempatan, pemimpin-pemimpin adat kerap kali mengharapkan uluran tangan pemerintah untuk membantu mereka. Bahkan mereka dengan antusias sekali menyambut sebuah bantuan dari pemerintah, seakan-akan bantuan tersebut bukan berasal dari uang rakyat. Harapan-harapan seperti ini, kini mengemuka dalam bentuk-bentuk tim-tim sukses. Setelah Pilpres dan cawapres, nanti akan berkembang menjadi tim sukses Gubernur atau Bupati.

Secara kultural, masyarakat Bali memang memiliki benih-benih mentalitas seperti itu. Pertunjukkan-pertunjukkan tradisional misalnya, menempatkan sosok *parekan* sebagai sesuatu yang meriah. Mereka selalu bergembira, bahkan merekalah yang pertama *nigtig tangkah* (memegang dada) mengaku sebagai orang

yang paling bahagia. Jadi, *parekan* (orang dekat) juga memiliki status sosial dalam masyarakat Bali. Fenomena ini terjadi dalam sebuah masyarakat yang stratifikasi sosialnya bersifat tertutup. Artinya, hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa memegang pemerintahan. Sehingga bagi masyarakat banyak, menjadi orang dekat saja sudah merupakan kehormatan.

Dalam lembaran-lembaran sejarah, stratifikasi sosial yang tertutup biasanya terjadi pada masyarakat yang terjajah. Stratifikasi sosial seperti itu, sengaja dikembangkan untuk memelihara status quo golongan penguasa yang biasanya datang dari luar. Bali yang dari sekitar abad ke-15 Masehi dikuasai Bangsawan Jawa, akhirnya kemudian mengenal stratifikasi sosial seperti itu. Pada saat ini, semuanya telah terbuka. Namun masyarakat Bali masih mengalami gejala mental seperti itu. Karena mereka berada dalam posisi minoritas secara nasional. Sehingga akan sulit orang Bali untuk menjadi presiden atau wakilpresiden. Karena itu, gejala mental, ingin menjadi orang dekat, mencuat kembali.

Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa masyarakat Bali masih berada dalam posisi pandangan, bahwa hanya orang lain yang bisa mengangkat derajat kehidupan mereka. Fenomena ini tentu saja berbanding terbalik dengan tradisi spiritual yang berkembang di Bali. Dalam tradisi spiritual, seorang murid hanya akan bisa mencapai keselamatan atas usahanya sendiri. Guru hanya akan memberikan tuntunan, selanjutnya usaha muridlah yang menentukan. Kakawin Ramayana menuliskan *Utsaha ta larapana* yang artinya usaha sendirilah yang menyebabkan keberhasilan.

Pada era ini, tradisi spiritual seperti itu, mestinya bisa dimaknai secara duniawi. Jadi, kesejahteraan atau kemakmuran (Jagadhita) hanya akan bisa diperoleh melalui usaha masyarakat itu sendiri. Kalau pemerintahan masih bisa dianggap memiliki peran, makanya perannya sebatas memberikan *guide line* (petunjuk) yang mestinya diterjemahkan sebagai perencanaan bersama. Jika demikian halnya, masyarakat Bali tentunya tidak perlu harus tergantung kepada pemerintah. Sebab tugas pemerintahan hanya

menterjemahkan keinginan masyarakat dalam bentuk perencanaan yang aplikatif.

Negara-negara modern sebenarnya mengacu kepada hal itu, yakni pembangunan *civil society* atau masyarakat sipil yang berdaya. Sebab itu merupakan suatu syarat dari negara demokrasi, yang berarti bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi negara demokrasi sebenarnya adalah negara dimana masyarakat harus mandiri. Jika masyarakatnya tidak mandiri maka negara itu lebih akan seperti kerajaan walaupun pemerintahan dipilih secara langsung. Paling-paling negara itu akan berkembang menjadi semacam Negara Aristokrat, yang orang-orang pemerintahannya hanya dipegang dari kelompok-kelompok tertentu, atau bahkan keluarga tertentu. Jadi, negara yang masyarakatnya tidak mandiri sangat berpeluang untuk menghasilkan sebuah dinasti penguasa.

Masyarakat Bali, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia telah memilih sebuah negara demokrasi. Karena itu, kemandirian masyarakat harus terus dipupuk, apalagi secara tradisi, masyarakat Bali juga menyimpan tradisi-tradisi kemandirian. Pada era ini, tradisi-tradisi kemandirian yang tersudut dalam tradisi spiritual masyarakat Bali, mesti dimaknai kembali. Jadi, masyarakat Bali mesti dibangun dari tradisi spiritualnya. Sehingga akan muncul sebuah keyakinan diri bahwa manusia Bali sesungguhnya adalah *atman* atau Cahaya Tuhan. Jadi, manusia Bali memiliki potensi yang besar untuk maju bersama-sama manusia lainnya di bumi ini. Karena itu, manusia Bali tentunya tidak perlu harus berebut lagi untuk menjadi *parekan* atau orang dekat, untuk lebih cepat mendapatkan manfaat. Tetapi manusia Bali harus bangkit mandiri sampai tujuan tercapai. “Kita sudah terlalu lama menangis, berhentilah menangis. Bangun dan bangkit sampai tujuanmu tercapai,” demikian kalimat Swami Vivekananda yang perlu menjadi penyemangat kita untuk bangkit mandiri sebagai cahaya-cahaya Ketuhanan.

Karena itu, masyarakat Bali bisa saja mengikuti pertunjukan Pilkada ini dengan baik. Tetapi jika mereka setelah itu berdiam diri, tidak melakukan perubahan maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Kakawin Ramayana mengajarkan masyarakat Bali dengan satu syair *utsaha ta larapana* yang artinya usahalah yang menjadi penyebab perbaikan.

Prinsip ini adalah prinsip *karmayoga*, yaitu jalan kerja untuk membebaskan diri dari penderitaan. Prinsip ini adalah prinsip yang dikembangkan dalam tafsir Hindu modern yang dipelopori Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi dan yang lainnya. Prinsip ini mengajak masyarakat untuk meninggalkan segala bentuk praktek pragmatis yang dikembangkan penganut magik untuk mencapai tujuan-tujuan sesaat. Manusia mesti senantiasa melakukan usaha sadar untuk mencapai tujuan-tujuannya yang mulia. Mahatma Gandhi mengatakan, cara mestilah sebaik tujuan. Artinya tujuan-tujuan baik mesti dicapai dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik itu adalah usaha-usaha yang sadar dan rasional, bukan perilaku yang pasrah dan menyerahkan segala sesuatunya pada *niskala*. Kemukjizatan atau kesaktian itu mungkin bisa ada, tetapi semua itu lahir dari proses kerja yang rasional. Karena itu, tidaklah tepat untuk menyerahkan segala sesuatunya hanya pada citra kebaikan dari pertunjukan wayang di dunia ini. Manusia mesti mengembangkan citra itu dalam perilaku sehari-hari, yaitu perjuangan yang terus menerus.

maupun nasional untuk mendanai aktivitas politiknya. Prilaku ini akan menimbulkan ikatan antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pemodal. Bila mereka terpilih bukan tidak mungkin, mereka akan melayani kepentingan pemodal, bukan kepentingan rakyat. Pelayanan ini akan dilakukan dengan melakukan bisnis yang menggunakan dana publik. Pada bisnis yang berwarna KKN seperti ini, hanya pejabat dan pengusaha dekat saja yang akan mendapatkan keuntungan. Masyarakat tetap akan terpinggirkan.

Pada sisi lainnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga mesti melayani kepentingan pemerintah pusat. Sebab daerah kabupaten/kota masih bergantung kepada anggaran pemerintah pusat. Karena itu, mereka mesti melayani kepentingan pemerintah pusat. Apalagi bila mereka (kepala daerah dan wakil kepala daerah) menginginkan proyek-proyek pembangunan untuk mencarikan kerja bagi para pemodalnya. Keinginan-keinginan kepentingan sempit ini bisa saja dicapai dengan berbagai cara yang hanya bisa menguntungkan kelangan pejabat pusat. Karena itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah akan terjepit oleh dua kepentingan, yaitu pemodal dan pejabat pemerintah pusat. Jadi, dua kekuatan inilah yang bisa menjadi dalang bagi permainan yang akan diperankan kepala daerah dan wakil kepala daerah –yang bisa saja hanya menjadi wayang-wayang. Sehingga mereka kemudian bisa terjerumus untuk melayani kepentingan pemodal dan pejabat pemerintah pusat, atau bahkan bisa terjerumus pada pelayanan kepentingan pejabat-pejabat di atasnya. Rakyat selanjutnya bisa menjadi nomer sekian dari proses ini. Adakah kekuatan rakyat Bali secara kultural yang bisa digunakan untuk menghadapi dampak negatif ini? Bisakah rakyat bangkit secara kultural untuk menghadapi hal ini?

Secara tradisi, wayang memang memiliki makna yang cukup besar pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali seringkali hanya memuaskan dirinya dengan pertunjukan wayang. Bahkan kepuasan ini menimbulkan mistifikasi wayang. Sehingga menurut kepercayaan Bali, wayang dipercaya bisa “ngeruwat”

(membebaskan) masyarakat dari segala dosa dan penderitaan. Sebab pada pertunjukan wayang, pertarungan besar antara kebaikan dan kejahatan dipertontonkan. Pada pertarungan ini, masyarakat mendapatkan keyakinan bahwa kebaikan akan menang. Proses pertunjukan ini saja sudah bisa dikatakan akan bisa “ngeruwat” (membebaskan) masyarakat.

Mistifikasi seperti ini kini hampir menjadi kenyataan pada kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat Bali seringkali hanya puas dengan melihat pertunjukan semata. Bahkan terjadi mistifikasi dari sebuah pertunjukan bahwa pertunjukan tersebut akan membebaskan masyarakat dari penderitaan. Padahal kenyataannya, penderitaan-penderitaan sehari-hari terus berulang. Pertunjukan satu dan pertunjukan lainnya ternyata tidak berakhir dengan kebahagiaan bagi masyarakat, tetapi selalu penderitaan dan penderitaan yang berulang-ulang. Semula masyarakat berharap pertunjukan reformasi akan berakhir pada kebahagiaan, tetapi ternyata tidak. Pertunjukan lainnya juga tidak, kenapa hal itu bisa terjadi?

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang seringkali terjebak dalam dunia mistifikasi seperti itu. Kelemahan dari mistifikasi adalah cara-cara yang tidak rasional. Misalnya melaksanakan ritual tertentu untuk kekayaan dan sejenisnya. Setelah melaksanakan ritual tersebut, mereka kemudian diam menunggu hasil dari *niskala*. Mistifikasi ini berpengaruh pada perilaku sosial masyarakat Bali. Sehingga mereka sering berharap pertunjukan yang bernama “pemilihan langsung” atau “reformasi” akan mengubah segalanya. Setelah itu mereka diam tidak melakukan apa-apa sambil menunggu anugrah dari alam gaib. Anugrah ini kemudian tidak pernah datang.

Perilaku mistifikasi ini memang membawa ketenangan pada masyarakat. Kegundahan-kegundahan masyarakat bisadihilangkan dengan kepasrahan. Tetapi pada ambang tertentu mistifikasi ini bisa mengembangkan praktek-praktek keagamaan yang *tamasika* (mengembangkan kemalasan). Sehingga masyarakat kemudian menjadi pasif, tidak bisa bergerak untuk

melakukan perubahan. Sebab mereka berharap perubahan akan datang dari *niskala* (alam tak berwujud). Padahal agama Hindu yang menjadi dasar dari kebudayaan Bali telah mewaspadai praktek-praktek yang *tamasika* (kemalasan) seperti ini. Bahkan pada pandangan keagamaan yang bersifat elitis, seperti *Dharmasunya*, Tuhan ditempatkan di luar batas-batas intelektual manusia. Sehingga Tuhan tidak turut campur lagi pada dunia ini. Dunia digerakan oleh hukum karma, yaitu bisa diartikan usaha setiap makhluk. Jadi, nasib manusia ditentukan oleh karmanya, bukan oleh Tuhan.

Pada konteks ini, kecenderungan mistik atau alam gaib ditentang oleh pandangan seperti ini. Tuhan tidak akan mungkin memberikan kekayaan bila manusia tidak berusaha. Tuhan juga tidak akan memberikan sorga jika manusia tidak berusaha untuk itu. Tuhan juga tidak akan mengubah apapun jika manusia tidak berjuang untuk melakukan perubahan. Jadi perilaku menyerahkan segala sesuatunya pada *niskala* adalah usaha yang sia-sia. Demikian juga, bila masyarakat hanya mengharapkan perubahan dari sebuah pertunjukan besar di dunia ini, juga akan sia-sia. Wedanta menyebutkan hal itu sebagai *maya*, yaitu keadaan seolah-olah. Pada pertunjukan wayang, manusia diajak berseolah-olah bahwa kebaikan akan menang di dunia ini karena Tuhan memang menghendaki hal itu. Padahal pada kenyataannya, memperjuangkan kebaikan bukanlah perjuangan mudah. Jadi, menyerahkan diri untuk mendapatkan pembebasan hanya pada pertunjukan seperti ini adalah keadaan yang dipengaruhi oleh *maya*.

Demikianlah wayang memberikan gambaran bahwa pertunjukan yang sederhana tidaklah sesederhana itu pada kenyataannya sehari-hari. Manusia memang akan bisa mendapatkan *pangruwatan* (pembebasan) dengan melihat pertunjukan wayang. Tetapi itu akan terjadi jika manusia memperlakukan wayang sebagai inspirasi bagi perilakunya. Namun jika manusia menjadikan pertunjukan itu sebagai dewa yang akan membebaskan mereka walau pun tanpa usaha, itu adalah sia-sia.

nyomya mestilah dimaknai sebagai pembangunan kesadaran untuk melenyapkan berbagai penderitaan masyarakat ini. Tanpa ini, manalah mungkin ada *jagaddhita* (kebahagiaan bersama).

Penafsiran seperti ini akan sangat relevan pada konteks Indonesia. Negara Indonesia ini dibangun berdasarkan cita-cita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan prikemusiaan dan keadilan. Pendiri negara ini sangat menyadari jika perdamaian juga menjadi tujuan utama. Sebab tanpa perdamaian, bagaimana mungkin ada kebahagiaan? Pada titik inilah, cita-cita luhur negara ini bertemu dengan cita-cita kemasyarakatan di Bali, yakni untuk mencapai *jagaddhita*. Dalam usaha ini, perlu ada disiplin moral, pendidikan dan usaha pembebasan.

Dalam usaha ini, yoga mengajarkan musuh utama dalam pencarian. Musuh tersebut adalah *maya* (kesemuan). *Maya* memberikan berbagai hal yang bersifat sementara, tetapi berakhir pada penderitaan. *Maya* sama dengan keadaan seolah-olah baik, tetapi kenyataannya tidak baik. Seorang yogi yang paling agungpun kerap terjatuh karena *maya*, keadaan seolah-olah yang disebabkan ilusi pikiran. Karena itulah, para yogi biasanya membangun kebijaksanaan untuk menembus *maya*. Kebijakan itu akan terbangun melalui proses pendidikan. Jadi, hanya dengan pendidikanlah, suatu masyarakat akan bisa menembus *maya*, sehingga mereka tetap bisa melihat tujuannya yang tertinggi.

Oleh karena itu, perlu ada proses pendidikan untuk menembus keadaan seolah-olah yang menjadi kenyataan manusia. Sehingga masyarakat tidak bisa lagi dibohongi dengan janji-janji kosong kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang luhur, yang hanya dapat dicapai melalui jalan yang baik. Kebahagiaan tidak akan bisa dicapai dengan cara yang kurang baik, seperti kekerasan. Jadi, perdamaian merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan.

Menyongsong tahun baru 2004 ini, masyarakat Bali perlu merenungkan hal itu. Bahkan pengujung tahun ini, mesti dijadikan

Nyomya Kekerasan Menuju Perdamaian

Bali pada Tahun 2003, bernuansa berbagai persoalan moral. Tindak kekerasan, politik tanpa moralitas dan berbagai hal lainnya, mewarnai pulau yang damai ini. Kecenderungan ini diramalkan semakin mengganas pada tahun 2004. Sebab pada tahun itu terdapat beberapa peristiwa penting, yaitu Pemilu dan Pilpres. Pengalaman sejarah masyarakat Bali membuktikan bahwa kekecewaan politik di Bali sangat berpotensi untuk melahirkan kekerasan. Tetapi sebagai masyarakat yang memiliki kebudayaan yang cukup tua, masyarakat Bali memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk menyelesaikan persoalan dengan cara damai. Sebagian besar dari kebiasaan tersebut adalah upacara. Bagaimanakah itu bisa dimaknai dalam menyambut tahun 2004 yang sangat mengkhawatirkan itu?

Apabila masyarakat Bali mengalami suatu tragedi besar, biasanya mengadakan suatu upacara yang disebut dengan *pacaruan*. Ketika peristiwa bom di Kuta, masyarakat Bali mengadakan *pacaruan keripu bhaya*. Begitu juga, jika ada peristiwa yang memilukan di setiap desa di tanah Bali ini. Akhir dari upacara *pacaruan* ini adalah sebuah proses ritual yang disebut dengan *nyomya*, yakni mengembalikan sesuatu ke titik awal (asal mula). Titik awal atau asal mula, sesungguhnya adalah Hyang Widhi. Karena itu, proses *nyomya* adalah proses kesadaran terhadap hakikat seluruh alam semesta.

Proses kesadaran ini, pada tradisi di Bali, diawali dengan pengorbanan binatang. Sehingga proses kesadarannya, selalu diawali dengan darah dan daging. Tradisi ini seakan-akan membenarkan sebuah proses kebaikan yang mesti selalu diawali dengan korban darah dan bangkai seperti yang digambarkan dalam kisah Mahabharata. Kisah ini menyiratkan makna bahwa untuk mengajegkan kebajikan, mesti diawali dengan peperangan

(*yudha*). Ritual *pacaruan* atau bahkan kisah Mahabharata sebenarnya tidaklah mengandung makna yang seperti itu. Mahabharata mengusung sloka *ahimsa paramo dharma* (tanpa kekerasan adalah dharma yang tertinggi). Sedangkan *pacaruan* mengusung pembebasan manusia dari sifat-sifat kebinatangan.

Proses pengorbanan darah dan daging dalam *pacaruan* atau bahkan dalam *yudha* merupakan bentuk penyucian. Darah, daging dan tulang yang suci merupakan wadah bagi cahaya ketuhanan. Sebab darah, daging dan tulang ini, tidak lagi digerakkan oleh insting-insting kebinatangan, tetapi telah digerakkan oleh sifat-sifat ketuhanan. Setelah melalui proses inilah, seseorang baru akan mencapai kesadaran diri (*nyomya*). Jika seseorang menemukan kesadarannya maka ia akan menyadari tentang hakikat asal mula alam semesta beserta isinya.

Proses pencapaian ini dilakukan secara tradisi oleh *tri sadaka* di Bali. *Brahmana Sengguhu*, membersihkan darah, daging dan tulang (*butha*). *Brahmana Buda* membersihkan pikiran (*budhi*), sedangkan *Brahmana Shiwa* membangunkan kesadaran jiwa (*atma*). Proses pembangunan kesadaran jiwa inilah yang disebut dengan *nyomya*. Jika seseorang telah mencapai kesadaran ini, maka ia akan mencapai *moksha* (pembebasan). Jadi, proses kesadaran tersebut mesti diawali perubahan perilaku, kemudian manajemen pikiran dan terakhir pembangunan kesadaran tentang hakikat sang diri.

Pada sistem yoga, proses kesadaran ini mesti diawali disiplin moral (*yama-nyama*), kemudian manajemen pikiran (*pratyahara-dhyana*) dan terakhir pembangunan kesadaran jiwa (*samadhi*). Tanpa disiplin moral, tak akan mungkin ada manajemen pikiran. Tanpa manajemen pikiran tidak akan ada pembangunan kesadaran. *Pacaruan*, sesungguhnya merupakan pembangunan disiplin moral, dengan mengorbankan sifat-sifat kebinatangan. Salah satu dari sifat itu adalah penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan (*himsa karma*). Dalam *yama-nyama brata*, ini disebutkan sebagai *ahimsa*. Jika seseorang tak bisa melakukan hal ini, dia tidak akan berhasil mencapai tujuan tertingginya, yaitu *moksha*.

Sistem yoga ini sebenarnya lebih bernuansa pencapaian individual. Tetapi, sistem ini juga sangat berdemensi sosial. Penafsiran sistem yoga kuno ini ke dalam realita sosial dikembangkan Swami Vivekananda dan Mahatma Gandhi. Kedua tokoh Hindu ini menafsirkan yoga sebagai pergerakan sosial untuk menuju kesejahteraan bersama. Penafsiran seperti ini sangat dekat sekali dengan konteks Bali yang lebih menekankan kesejahteraan bersama (*jagaddhita*). Konsep *pacaruan* sampai *nyomya* di Bali, lebih kepada usaha pembebasan masyarakat daripada pembebasan individu. Karena itu, konsep ini mesti mendapatkan pemaknaan yang memadai dalam usaha untuk membebaskan masyarakat Bali dari belenggu penderitaan. Demikian juga, konsep *tri sadaka* mesti lebih dimaknai sebagai tiga gerakan besar dalam usaha pembebasan masyarakat, yakni gerakan moral, pendidikan dan pembebasan.

Pada konteks ini, *nyomya* (proses terakhir) mesti dimaknai sebagai pembangunan kesadaran bahwa Tuhan berada pada setiap makhluk (*sarwam idam kalu Brahman*). Karena itu, setiap manusia pada hakikatnya adalah bersaudara (*vasudaiva kutumbhakam*). Dalam hal ini, setiap manusia mesti mengembangkan perasaan kasih sayang kepada sesama. Sehingga pendekatan manusia, mestinya merupakan pendekatan kasih sayang, bukan pendekatan kekerasan. Jadi, konsep *nyomya*, mesti dimaknai sebagai pembangunan rasa persaudaraan di antara umat manusia. Karena itu, jika masyarakat *Balinyomya*, mereka mesti menghilangkan berbagai ketidakadilan social yang berlawanan dengan persaudaraan umat manusia.

Memandang semua manusia bersaudara, berarti menolak segala jenis eksploitasi manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sebab mereka yang terpinggirkan, tereksploitasi dan teraniaya adalah juga pancaran dari Tuhan. Jadi, mereka yang berbhakti kepada Tuhan, haruslah mengabdikan untuk mereka, bukan malah sebaliknya –semakin meminggirkan mereka. Mahatma Gandhi menyebut mereka yang terpinggirkan ini sebagai *Daridra Narayana* (Tuhan yang berada pada orang-orang yang miskin). Pada konteks ini,

Samkya mengatakan, *pradhana* lahir dari *maya* (mimpi)nya *Purusha*. Jadi, seluruh makhluk di alam semesta ini sebenarnya lahir dari *maya* nya *Purusha*. Karena itu, manusia sebenarnya adalah bagian dari *maya*. Jadi, manusia sebenarnya adalah bagian dari *pradhana* (ibu). Akan tetapi, masyarakat Hindu tetap saja mengambil garis *purusha* karena Samkya mengajarkan manusia haruslah bisa lepas dari *maya*. Karena itu, *purusha* adalah kerinduan abadi manusia. Manusia harus mencari *purusha*. Penunggalan dengan *purusha* adalah *moksha* (pembebasan). Sedangkan penyatuan dengan *maya* adalah *samsara* (penderitaan). Ajaran inilah yang menjadi inspirasi pemujaan terhadap *purusha*. Pemujaan ini berkembang menjadi patriarkhi dalam masyarakat Hindu di Bali.

Perkembangan ke arah patriarkhi ini sebenarnya adalah penyimpangan, seperti halnya kasta yang merupakan penyimpangan dari ajaran *varna*. Samkya sebenarnya tidak mengajarkan demikian. Ajaran ini menekankan bahwa manusia hendaknya tidak terikat kepada fisik, tetapi harus mencari esensi. Esensi tersebut adalah nilai-nilai luhur (dharma). Jadi mengikuti garis *purusha* sebenarnya bukanlah berarti patriarkhi, tetapi berarti mengikuti nilai-nilai luhur yang merupakan spirit ajaran agama Hindu. Semua itulah yang disebut dengan dharma. Karena itu, mengikuti garis *purusha* sebenarnya berarti mengikuti garis dharma. Jadi, siapa pun yang berada dalam garis dharma, sebenarnya mengikuti garis *purusha*. Mereka ini jelas akan mencapai pembebasan. Oleh karena itu, garis *purusha* sebenarnya garis pembebasan, bukan garis genetika.

Secara tersamar, *babad-babad* (cerita-cerita leluhur di Bali) menempatkan *Hyang Pasupati* sebagai leluhur universal. Beliau konon berstana di Mahameru. Beliau kemudian mengirim tiga putranya yang bernama Hyang Putrajaya, Hyang Gnijaya dan Dewi Danuh ke Bali. Putrajaya berstana di Gunung Agung, Gnijaya berstana di Gunung Lempuyang dan Dewi Danuh berstana di Ulundanu. Hyang Gnijaya kemudian menurunkan Saptarsi (tujuh pendeta) yang menjadi leluhur masyarakat Bali. Jadi,

proses akhir dari ritual kemanusiaan. Proses itu adalah proses *nyomya*, yang berarti terbangunnya kesadaran sang diri terhadap hakikatnya. Ini berarti, masyarakat Bali mesti membangun rasa persaudaraan, kasih sayang dan kemanusiaan. Inilah proses ritual yang disebut dengan *nyomya* kekerasan menuju pada perdamaian. Hanya, melalui ritual kemanusiaan inilah, manusia Bali akan mendapatkan kebahagiaan. Tanpa hal ini, manusia Bali akan semakin terpuruk ke dalam berbagai persoalan kemanusiaan. Selamat menyongsong Tahun Baru 2004. Semoga damai selalu.



***Soroh*, Garis Genetika atau Garis Pembebasan**

Para ahli ilmu pengetahuan telah berhasil membaca catatan sejarah manusia yang tercantum di dalam gen manusia. Pembacaan catatan gen ini menunjukkan bahwa manusia memiliki satu leluhur (*universal ancestor*). Bahkan para ahli ilmu pengetahuan mengatakan, manusia masih terhormat bila disebutkan memiliki leluhur “monyet”. Sebab, gen manusia ternyata mengandung satu protein yang terdapat dalam binatang bersel satu. Jadi, leluhur manusia bisa jadi adalah amuba. Amuba terus berkembang dari zaman ke zaman (berevolusi) sesuai dengan teori Darwin. Apakah kemudian, *kawitan* manusia adalah monyet, atau amuba? Bagaimanakah fenomena kultural masyarakat Bali yang memuja *Bhatara Kawitan* dalam kelompok *soroh* menghadapi perkembangan ini?

Masyarakat Bali percaya bahwa mereka memiliki *kawitan* yang berbeda. Sehingga mereka pun mengaku berasal dari *soroh* yang berbeda. Ada yang mengaku *soroh pasek*, *soroh pande*, *soroh arya*, *soroh dalem* dan *soroh ida bagus*. *Soroh* ini, bahkan sempat berkembang menjadi kasta (lapisan sosial masyarakat) pada zamannya dahulu. Pada saat ini, kalangan agamawan menolak kasta. Bahkan Sabha Pandita Parisada Pusat sampai mengeluarkan Bhisama Nomer: 03/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 yang menyatakan bahwa kasta adalah penyimpangan dari ajaran *catur varna*. Sehingga Sabha Pandita menugaskan pengurus harian untuk kembali meluruskan penyimpangan ini.

Meskipun demikian, masyarakat Bali masih terdiri dari berbagai *soroh*. Bahkan isu-isu politik seringkali juga menyerempet persoalan-persoalan *soroh*. *Soroh-soroh* ini sangat kuat mengakar pada masyarakat Bali. Sebab pura kawitan (tempat

suci) dan prasasti yang biasanya memuat bhisama leluhur menyatukan mereka. Sehingga sekat-sekat *soroh* masih saja menjadi kenyataan sosial di Bali. *Soroh-soroh* ini akan tetap diwariskan mengikuti garis laki-laki (*purusha*). Apakah kemudian ini akan tetap bertahan sejalan semakin kuatnya bukti bahwa manusia sebenarnya memiliki leluhur universal? Bagaimanakah mestinya masyarakat Bali memaknai pemujaan *Bhatara Kawitan* dalam menghadapi perkembangan ini?

Secara meyakinkan, para ilmuwan telah menjelaskan bahwa manusia secara fisik sebenarnya lebih mewarisi gen ibunya daripada ayahnya. Bahkan, Steve Olson dalam bukunya “Mapping Human History” menceritakan bahwa leluhur manusia kemungkinan adalah seorang perempuan dari Afrika. Sebab pada suatu zaman hanya mitokondria DNA hawa (perempuan) yang bertahan sedangkan mitokondria DNA lainnya musnah. Jika cerita ini benar, maka ini akan menjadi tantangan besar bagi penganut patriarkhi –seperti pada masyarakat Bali yang menganut garis *purusha*. Sebab dalam benak masyarakat Bali, *Bhatara Kawitan* mereka pastilah laki-laki. Para perempuan, bahkan kerap menghilang dalam deretan silsilah keluarga. Karena masyarakat Bali mengambil garis laki-laki (*purusha*), sehingga perempuan kerap menjadi tidak penting dicatat dalam silsilah keluarga. Apabila teori yang menyatakan leluhur universal manusia adalah perempuan benar maka garis keluarga akan berujung pada perempuan (matrilineal, *pradhana*).

Filsafat Samkya yang menceritakan tentang 25 Tatwa sebagai perkembangan manusia, menempatkan *purusha* (benih pria) dan *pradhana* (benih perempuan) sebagai ujung dari pembahasannya. Tetapi, Rsi Kapila, pengajar ajaran Samkya menyatakan bahwa *purusha* sebenarnya adalah Tuhan. Sehingga Tuhan dalam Upanisad seringkali disebutkan sebagai *Purushatama* atau *Mahapurusha*. Jadi, *Purusha* adalah Tuhan sedangkan *pradhana* adalah benih pertama. Karena itu, kalau mempersoalkan benih pertama, benih itu sebenarnya adalah *pradhana* (benih perempuan). Bagaimana benih ini lahir? Apakah lahir dari ayah?

mengidungkan kembali kisah cinta Rada dan Krishna dalam Gita Gowinda, demikian seterusnya.

Pujangga-pujangga Indonesia juga tak luput dari tradisi seperti ini. Sekilas, bila kita mengamati pujangga Indonesia, kita akan menemukan nama Mpu Tanakung, yang artinya Tanpa Cinta. Tetapi beliau sesungguhnya merupakan pemuja keindahan. Dalam Shiwaratri Kalpa, beliau sangat mengharapkan *digjayeng lango*, yang artinya dapat menikmati keindahan. Dalam Wrettasancaya, Mpu Tanakung menulis:

“Nimitangku yan layat aninggal I sang ahayu nguni ring tilam
ndatan lali si langening sayana
saka ring harepku lalita ngurit lango”

Artinya:

Aku meninggalkan Si Juwita di peraduan,
Bukan karena lupa merasakan keindahan peraduan,
Namun karena hasrat yang tak tertahankan untuk melukiskan
keindahan alam

Jadi, Mpu Tanakung meninggalkan istrinya bukan karena tidak tertarik lagi pada cinta. Namun, beliau sebenarnya ingin merasakan cinta yang lebih luas lagi, yaitu cinta terhadap alam melalui pesona gunung dan pantainya. Dari keindahan ini, beliau kemudian menanjak lagi pada cinta yang lebih tinggi, yaitu bhakti terhadap Shiwa. Penunggalan inilah yang disebut dengan *lango*, keindahan yang merupakan hakikat dari Tuhan, yakni *sundaram*.

Dang Hyang Nirarta juga mendapatkan Tuhan melalui proses seperti ini. Suatu hari, beliau juga meninggalkan istrinya. Beliau mencoba menikmati keindahan pantai dan gunung, seperti menikmati pesona istrinya. Sehingga beliau dalam Rasmi Sancaya kemudian menulis:

“Nusanya ramya kinasut ing jalada yaya samir ing apum
panghren ing alit tan waspada saren i renih dalem ing sayana

leluhur tunggal masyarakat Bali sebenarnya adalah Hyang Pasupati. *Pasupati* sebenarnya adalah nama lain dari Shiwa, Tuhan. Karena itu, leluhur universal manusia Bali sebenarnya adalah Tuhan. Jadi, kalau mengikuti garis *purusha*, manusia Bali mestinya kembali kepada Tuhan (mencapai pembebasan).

Oleh karena itu, fenomena kultural pemujaan *Bhatara Kawitan* sebenarnya bukanlah fenomena genetika. Fenomena ini sebenarnya adalah ritual menuju pembebasan (*moksha*). Sehingga secara tradisi, hampir setiap *soroh* memiliki uraian-uraian simbol-simbol pembebasan (kelepasan) yang disebut dengan *kajang*. *Kajang* ini memuat aksara-aksara *kelepasan* yang sebenarnya adalah ajaran-ajaran pembebasan. Karena itu, kelompok-kelompok *soroh* ini adalah kelompok-kelompok yang berusaha mencapai pembebasan, menunggal dengan *Bhatara Kawitan* yang tak lain adalah *purusha* (Tuhan). Jadi dengan demikian, manusia Bali sebenarnya mestilah melenturkan kembali sekat-sekat *soroh* tersebut. Manusia Bali mestilah mulai memaknai bahwa manusia berada dalam garis yang sama, yaitu garis *purusha* atau garis dharma. Garis ini adalah milik semua makhluk. Setiap makhluk harus berada pada garis ini jika ingin mencapai pembebasan. Karena itu, semua makhluk sesungguhnya adalah bersaudara. *Vasudaiwaya kutumbakam* (semua makhluk bersaudara) dan *Brahman paramapita* (Tuhan, leluhur universal). Demikianlah Weda-weda bersabda. Sabda suci ini mestilah membawa manusia Bali pada garis *purusha* yang benar, bukan berada pada garis patriarkhi dimana laki-laki mesti senantiasa dominan dalam berbagai hal. Jadi, fenomena pemujaan *Bhatara Kawitan* adalah fenomena kelompok pemujaan yang sama-sama ingin mendaki jalan Ketuhanan.

Dengan demikian, solidaritas para pemuja ini seharusnya bukanlah solidaritas fanatisme kelompok. Sebab, *soroh* adalah kelompok pemuja yang memiliki tujuan yang sama dengan kelompok pemuja lainnya. Karena itu, diantara *soroh-soroh* ini haruslah bekerjasama, bukan bersaing secara tidak sehat untuk memperebutkan tujuan-tujuan material. Pemaknaan yang seperti

ini jelas akan menempatkan masyarakat Bali sebagai masyarakat universal. Sebab mereka akan mendapatkan ajaran bahwa mereka mesti menghormati yang lainnya –yang juga saudara. Pemaknaan ini jelas akan lebih membuka pintu masyarakat Bali dalam menghadapi globalisasi. Sebab, dengan pemaknaan ini, masyarakat Bali akan menghilangkan perasaan curiga dan yang lainnya, kepada sesama. Ini jelas akan menempatkan masyarakat Bali pada pergaulan dunia. Jika masyarakat Bali masih memiliki fanatisme kelompok yang berlebihan, ini justru akan menyisihkan masyarakat ini dari pergaulan dunia. Alangkah tidak bebasnya menjadi orang tersisih sebab sulit kemana-mana. Bahkan setiap mata akan memandang penuh curiga.



Cinta, Derita dan Pembebasan

Ada suatu kisah ketika para dewa diserang Raksasa Nilarudraka. Saat itu, para dewa mengadakan pemujaan terhadap Shiwa (Tuhan). Mereka mendapatkan petunjuk hanya Putra Shiwa yang akan dapat membunuh raksasa ini. Tetapi bagaimana Shiwa dapat berputra? Beliau senantiasa tenggelam dalam semadhinya di Gunung Kailasha. Karena itu, para dewa mengutus Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih untuk menggoda tapanya Shiwa. Mereka melakukan godaan-godaan seksual di Gunung Kailash, sehingga Shiwa menjadi marah. Beliau membakar Dewa Kamajaya yang telah memanahnya dengan panah asmara. Dewi Ratih kemudian menangis tersedu-sedu. Dia merasa tidak bisa hidup tanpa Dewa Kamajaya. Tangis ini kemudian menjadi kidung Semaradahana yang menyentuh bathin Shiwa. Karena itu, Shiwa kemudian mempersatukan kedua dewa ini. Mereka diminta menjelma pada hati setiap makhluk di dunia, sehingga mereka bisa merasakan keindahan seperti yang dirasakan kedua dewa ini.

Sejak saat itu, Dewa Cinta sebenarnya telah menjelma ke dalam hati setiap manusia. Cinta ini akan selalu tumbuh di dalam hati setiap manusia untuk menemukan manusia terhadap keindahan. Tanpa cinta, tidak akan ada keindahan. Karena itu, tanpa cinta, dunia hanya akan dipenuhi penderitaan. Jadi, cinta adalah pembebas manusia dari penderitaan. Seperti halnya cinta Kamajaya dan Ratih yang membebaskan para dewa dari kekuasaan Raksasa Nilarudraka. Karena itulah, pujangga-pujangga besar Hindu senantiasa memuja cinta untuk mendapatkan kebebasan. Maharsi Walmiki memuja cinta Rama dan Sita. Bhagawan Wyasamemuja cinta Rada dan Krishna. Pujangga-pujangga belakangan menghidupkan lagi pemujaan ini dalam bentuk-bentuk syair yang sesuai dengan zamannya. Tulsidas menghidupkan kembali kisah cinta Rama dalam Ramacaritamanas dan Sita, Jayadeva

Galungan, Semangat Kemenangan Menghadapi Krisis

Hari raya Galungan diperingati sebagai hari kemenangan *dharma* melawan *adharma*. Sebagai hari kemenangan, ini diperingati dengan sangat meriah meskipun masyarakat sedang mengalami berbagai krisis, sehingga Bali seakan-akan tanpa masalah. Padahal, setelah peringatan kemenangan ini, kekalahan-kekalahan lagi menghadang di depan mata. Bagaimanakah memaknai Galungan di tengah-tengah badai krisis seperti ini? Apakah yang harus dimenangkan, dan bagaimana caranya?

Kemenangan (*jaya*) adalah cita-cita setiap manusia. Apalagi kemenangan *dharma* (kebenaran) selalu menjadi cita-cita manusia. Tetapi cita-cita ini ternyata hanya pada cerita-cerita masa lalu (*purana*). Pada kenyataannya, *adharma* (ketidakbenaran) ternyata memang tidak pernah mati. Ia selalu datang pada diri manusia dalam bentuk ketidakadilan sosial, kesewenang-wenangan dan yang lainnya. Hal ini terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi dan sosial budaya.

Dalam bidang politik, telah terjadi berbagai bentuk kekerasan, politik uang dan sebagainya. Sehingga politik telah terdorong kepada sebuah keadaan –meminjam istilah Mahatma Gandhi- yang disebut dengan *politic without morality* (politik tanpa moral). Dalam bidang ekonomi, telah terjadi ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya alam yang sesungguhnya merupakan anugerah bagi seluruh umat manusia. Sumber daya alam yang seharusnya dibagikan secara adil, mulai terakumulasi pada sekelompok elite. Sehingga pendistribusiannya “dicurigai” akan menjadi tidak adil. Pada bidang sosial budaya, telah terjadi pencitraan-pencitraan budaya baru yang konsumtif. Sehingga budaya ini mengikis habis budaya-budaya lama yang memberikan tempat terhormat pada ketulusan, kesederhanaan dan kejujuran.

*janganyangol ing taru angayuh padapa minguh tinub ing angin
lwir pangaseh ing dyah wahwakayuh rinajasan ing kakung”*

Artinya

Pulau-pulau yang indah diselimuti embun bagaikan tirai di tempat tidur

Dengungan kumbang bunga sungguh tiada lain bagaikan rayuan di dalam peraduan

Pohon gadung yang membelit kayu, membelit pucuk-pucuk daun yang berputar karena ditiup angin bagaikan desahan wanita yang baru pertama kali dipeluk sang perjaka

Jadi, Mpu Nirarta juga mencari Tuhan melalui cinta. Beliau mengandaikan keindahan pesona alam dengan keindahan di tempat tidur. Sehingga beliau sesungguhnya telah berangkat dari cinta terhadap istrinya ke cinta terhadap alam, selanjutnya cinta kepada Tuhan yang terwujud dalam bhakti. Pada hubungan seperti itulah, akan lahir *lango* (keindahan), atau sundaram yang merupakan hakikat Ketuhanan. Demikianlah Hindu yang membebaskan umatnya untuk mendefinisikan tentang Tuhannya. Mereka yang memuja keindahan akan melukiskan Tuhan dengan keindahan yang merupakan puncak dari cinta, yakni pertemuan antara *purusha* dan *pradana*. Tuhan adalah *purusha*, manusia adalah *pradana*. Hubungan cinta antara keduanya dilukiskan dalam bhakti yang digambarkan di *balai paselang* pada setiap upacara besar di Bali. Cinta ini juga dilukiskan dalam gambaran Rada dan Krishnadalam pelaminan bhakti yang indah. Itulah cinta yang benar-benarakan membebaskan manusia dari penderitaan, bukan cinta yang membelenggu yang menyengsarakan umat manusia. Demikianlah cinta sejati yang bisa membebaskan para dewa dari cengkaman Raksasa Nilarudraka. Namun mengapakah ada orang yang mengatakan cinta adalah derita?

Cinta sesungguhnya adalah sifat kedewataan (Madawa). Salah satu ciri dari sifat kedewataan adalah “menyelematkan”. Dia mengangkat derajat seseorang ke tempat yang lebih tinggi. Jadi,

demikianlah sebenarnya cinta. Jadi, jika cinta tidak berfungsi sebagai penyelamatan, maka ia sebenarnya telah dibumbui oleh sifat keraksasaan (Danawa). Sifat-sifat keraksasaan tersebut antara lain, nafsu, keegoan, kemalasan dan sejenisnya. Apabila cinta telah dibumbui perasaan seperti itu, dia tidak akan lagi menjadi cinta. Dia akan berkembang menjadi nafsu atau keinginan belaka. Nafsu atau keinginan jelas akan menyengsarakan seperti yang disampaikan Bhagavad Gita:

*“Dhyayato visayan pumsah sangas tesupajayate
sangat samjayate kamah kamat krodho bhijayate
artinya:*

selama seseorang merenungkan obyek-obyek indria, ikatan terhadap obyek-obyek indria akan berkembang. Dari ikatan seperti ini berkembanglah hawa nafsu, dan dari hawa nafsu timbullah amarah

*Krodhad bhavati sammohah sammohat smrti-vibramah
Smrti-bhramasad buddhi-naso buddhi-nasat pranasyati*

Artinya:

Dari amarah, timbullah khayalan. Khayalan menyebabkan ingatan bingung. Bila ingatan bingung, kecerdasan hilang, bila kecerdasan hilang, maka seseorang akan jatuh.

Demikianlah proses penderitaan yang dilukiskan bhagavad gita. Bila seseorang memikirkan objek indria, mereka akan terbelenggu. Dari belenggu ini maka akan berkembang hawa nafsu. Hawa nafsu hanya akan menyebabkan kekecewaan atau kemarahan. Kemarahan hanya akan menyebabkan khayalan. Khayalan hanya menyebabkan kebingungan. Dalam kebingungan, kecerdasan akan hilang. Bila kecerdasan hilang, sang diri akan hancur. Jadi, cinta yang berkembang menjadi hawa nafsu jelas hanya akan menghancurkan sang diri. Karena itu, carilah cinta

yang sejati, yakni cinta yang mengandung sifat kedewataan. Dialah cinta yang menyelematkan. Dialah cinta yang membebaskan.



ketidakbenaran dan kejahatan menguasai bumi. Siapapun juga yang mengaku dirinya Hindu semestinya berkomitmen terhadap hal ini. Sehingga mereka sudah seharusnya bangkit dan melawan segala bentuk ketidakadilan sosial. Jadi, Galungan sudah sepantasnya dimaknai sebagai langkah awal untuk mengadakan perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial, ketidakbenaran, kejahatan dan sejenisnya. Semoga Hyang Widhi memberikan anugerahnya bagi kita semua. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan.



Agama dalam menghadapi realita seperti ini, bahkan cenderung hanya memuji-muji keindahan tradisi-tradisinya. Kalaupun dihadapkan pada berbagai persoalan, agama kemudian hanya bisa menjelaskan tentang *rta* atau hukum alam yang menyatakan, segala sesuatu yang bertentangan dengan alam akan hancur dengan sendirinya. Jadi pendekatannya sangat naturalistik. Sehingga agama kemudian tidak mau berdekatan dengan berbagai persoalan kehidupan. Ia (agama), kini mulai ditempatkan pada konteks *niskala* semata. Padahal, ia sebenarnya harus berbicara pada persoalan-persoalan kehidupan (*sekala*). Jika ini terus terjadi maka kritik Karl Mark terhadap agama akan menjadi benar. Agama dalam kondisi seperti ini, hanya akan menjadi candu masyarakat. Pandangannya yang naturalistik juga akan semakin mendekatkannya pada pernyataan Georg Lukacs yang menyatakan “naturalisme adalah bohong karena diam tentang konteks social”.

Apabila Hindu tak ingin menjadi candu masyarakat, atau berkuat dalam kebohongan-kebohongan maka ia perlu menerjunkan dirinya dalam konteks sosial. Jadi, agama mesti bisa menjadi senjata bagi perubahan-perubahan sosial untuk menuju kepada masyarakat yang lebih baik. Wacana-wacana seperti ini sebenarnya sangat terbuka dalam khasanah Hinduisme. Kakawin Ramayana misalnya menyebutkan syair *ksayanikang papa nahan prayojana* yang artinya melenyapkan penderitaan masyarakat hendaknya menjadi tujuan utama. Bait pertama dalam Kakawin Arjuna Wiwaha juga menyemangati sebuah perilaku utama bagi orang yang memiliki tujuan utama (*ambek sang paramartha*), yaitu memerangi raksasa sehingga sifat-sifat kedewataan menjadi ajeg di muka bumi ini. Bait pertama dari Kakawin Bharatayudha juga menyatakan *sang sura mrihang yajna ring smara mahyun hilanganikang parangmuka* yang artinya ksatria mengharapkan yadnya di medan peperangan untuk melenyapkan noda-noda masyarakat. Syair-syair ini memberikan inspirasi kepada umat Hindu untuk terjun ke medan realita sosial untuk menghilangkan berbagai persoalan sosial.

Swami Vivekananda dan Mahatma Gandhi juga paling getol untuk memberikan penafsiran seperti ini. Pada salah satu pernyataannya, Swami Vivekananda berkata *we have wept for a long enough no more weeping, stand on your feets and be a men* yang artinya “kita sudah terlalu lama menangis, berhentilah menangis, berdirilah di atas kakimu sendiri dan jadilah manusia”.

Mahatma Gandhi kemudian menjalaninya langsung ke dalam berbagai persoalan kemanusiaan. Bahkan beliau menyebutkan bentuk pelayanannya kepada kemanusiaan sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan. Sehingga beliau mengatakan bahwa orang-orang miskin dan menderita yang dilayaninya sebagai *Harijan*, atau perwujudan Tuhan di dunia.

Penafsiran-penafsiran agama seperti itu semestilah mendapatkan tempat pada konteks kekinian. Terlebih lagi dalam memaknai hari raya Galungan ini yang berarti peringatan kemenangan. Peringatan kemenangan semestinya bermakna bahwa kita harus menang menghadapi persoalan-persoalan sosial yang berkembang seperti kemiskinan, kebodohan dan sejenisnya. Sebab jika kita tidak menang menghadapi realita seperti itu, kita tak akan sampai pada cita-cita bersama yaitu *jagaddhita* atau kebahagiaan bersama. Tidak mencapai cita-cita berarti sebuah kekalahan, bukan kemenangan. Karena itu, jelas tidak menjadi pantaslah bila kita berkemewahan dalam merayakan hari yang suci ini di tengah-tengah persoalan sosial yang seperti itu.

Kalaupun pada saat Galungan ini, kita belum bisa mencapai kemenangan yang sempurna. Namun ini hendaknya bisa menjadi titik awal dari sebuah kesadaran terhadap cita-cita kemenangan. Sehingga Galungan bisa menjadi sebuah titik awal dari kesadaran untuk melakukan revolusi (perubahan besar) dalam kehidupan. Sehingga kehidupan bisa bergerak dari ketidakbenaran menuju kebenaran, dari kebodohan menuju pencerahan dan dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Harapan revolusi seperti ini mengalir dari Mantram Reg Weda yang berbunyi sebagai berikut.

*Om asatoma sadgamaya,
tamasoma jyotir gamaya,
mrtyorma amrtam gamaya,
loka samestha sukhino bhavantu”*

artinya

Ya Tuhan, bimbinglah kami dari ketidakbenaran menuju kebenaran,
dari kegelapan menuju pencerahan,
serta dari kematian menuju kepada kehidupan abadi,
sehingga seluruh alam semesta berbahagia.

Doa ini sebenarnya mengandung harapan sebuah revolusi kehidupan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Doa ini tentunya tidak hanya diucapkan. Ia semestinya diwujudkan dalam tindakan. Tanpa tindakan, doa hanya akan menjadi sebuah nyanyian. Dia akan kehilangan “kesaktiannya” untuk mengubah berbagai kenyataan sulit yang dihadapinya. Karena itu, pada masa-masa krisis seperti ini, doa seperti ini semestinya diwujudkan dalam berbagai gerakan sosial di segala aspek kehidupan.

Peringatan Galungan ini semestinya bisa menjadi media perenungan agar seluruh umat Hindu bisa menyiapkan gerakan sosial untuk menghadapi persoalan-persoalan sosial. Kepercayaan Hindu menyatakan, hari raya Galungan adalah pemujaan terhadap Dewi Durga. Dewi ini merupakan symbol sakti atau kekuatan. Jika umat Hindu melakukan pemujaan dengan baik dan benar pada saat ini, mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan ini. Sebab hanya kekuatanlah yang bisa mengantarkan kemenangan.

Kekuatan tersebut hendaknya diarahkan untuk memenangkan *dharma*. *Dharma* itu adalah kebenaran, keadilan atau kebajikan. Nilai-nilai seperti itulah yang seharusnya ajeg di bumi ini. Jadi, kekuatan social seharusnya diarahkan dalam pertarungan untuk menegakkan *dharma*. Karena itu, kekuatan ini tentu tidak boleh diam manakala melihat ketidakadilan,

pembalikkan dari praktek agama yang seharusnya membahagiakan. Karena itu, perlu ada pemurnian kembali terhadap tafsir-tafsir agama di Bali, sehingga agama menjadi lebih membumi dan mampu mengangkat derajat kehidupan manusia – bukan memperbudak manusia.

Dari Ritual ke Realitas Sosial

Pada konteks seperti itu, ritual Galungan dan Kuningan mestilah terbangun secara lebih membumi. Perayaan *Sugihan Jawa* dan *Sugihan Bali* yang merupakan awal dari rangkaian Galungan mesti dimaknai sebagai semangat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara kuantitas dan kualitas. Peningkatan taraf hidup masyarakat seperti itu hanya bisa dilakukan melalui pengendalian diri pada pemaknaan *Penyekeban* (tiga hari sebelum Galungan). Sebab pelepasan indrya-indrya tidak akan pernah meningkatkan taraf hidup, tetapi justru akan menjerumuskan.

Penyajaaan Galungan (dua hari sebelum Galungan) mesti dimaknai sebagai pematangan spiritual atau pematangan jiwa, sehingga sang jiwa dapat menghadapi tantangan dunia pada pemaknaan *Penampahan Galungan* (sehari sebelum Galungan). Jika sang jiwa dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan membunuh sifat-sifat kebinatangan, maka sang jiwa akan mencapai kemenangan. Sang jiwa akan menjadi *Sang Jinamurti* (Sang Pemenang). Jika sang jiwa telah menjadi *Jinamurti* maka kemakmuran, kejayaan dan kebahagiaan akan menjadi bagian dari kehidupan. Semua itu adalah anugrah Tuhan yang diwejahwanti dalam simbol upakara *Tumpeng Galungan* dan *Penjor* yang bermakna kemakmuran. Dengan kemakmuran yang seperti itu, setiap orang akan mencapai kecemerlangan pada saat *Kuningan*, yang berarti cemerlang (pencerahan).

Ketika pencerahan tersebut hadir maka Tuhan akan berlingga pada tubuh yang telah suci tersebut. Kehadiran Tuhan di dalam diri itulah yang disebut dengan proses penyatuan (*moksha*). Semua itu bisa dicapai dalam kehidupan ini. Karena agama Hindu adalah agama untuk orang yang hidup, bukan agama untuk orang mati.

Galungan, Sadisme dalam Semangat Pencerahan Sosial

Akhir-akhir ini, masyarakat kita diwarnai dengan berita-berita sadistik. Kisah Ryan yang membunuh 11 nyawa. Kisah Alex Bulu yang dihukum mati karena melakukan pembunuhan berantai, dan berita seorang yang digorok lehernya di Bangli. Berita-berita ini menunjukkan betapa manusia telah menjadi demikian sadis. Bahkan berita sadis tersebut hampir setiap hari tertayang di depan mata anak-anak Indonesia. Hari Suci Galungan dan Kuningan tepat dirayakan pada titik-titik kisah kesadisan seperti itu. Akankah perayaan kemenangan dharma ini bisa memberikan inspirasi bagi kemanusiaan yang lebih baik? Bagaimanakah umat Hindu memaknai hari suci ini di tengah kontek kehidupan seperti itu?

Manusia memang bersaing sejak dahulu kala. Pembunuhan antar sesama manusia terjadi sepanjang sejarah manusia. Kisah Mahabharata yang kuno mengisahkan bagaimana kesadisan Bhima memakan darah Dursasana karena sumpahnya di medan perang. Drupadi, permaisuri Panca Pandawa yang suci berkeramas dengan ceceran darah. Sebuah pertunjukkan dendam yang sangat dasyat di tengah-tengah peradaban Hindu yang suci. Cerita ini menjadi inspirasi bagi sekte-sekte kiri yang memuja peperangan sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup di dunia.

Arca Bhairawa di Pura Kebo Edan, Tampak Siring, Gianyar mempertontonkan pemujaan perang seperti itu, dalam bentuk arca tarian di atas mayat musuh. Sebuah tarian yang merangsang dendam dan kesadisan, seperti kisah balian cetik di Karangasem yang diduga membunuh keluarga polisi beberapa bulan lalu. Catatan-catatan ini menyiratkan betapa kultur yang indah, ternyata menyimpan cerita-cerita kesadisan. Sebuah tontonan yang menjadi cermin seakan-akan masyarakat ini telah menyimpan gejala psikopat, yang pendiam tetapi tiba-tiba berubah menjadi bentuk-

bentuk kesadisan yang menggemparkan –seperti kejadian Tahun 1965 di Bali yang begitu tiba-tiba terjadi di pulau yang tenang ini.

Kisah-kisah itu menunjukkan betapa sifat-sifat kebinatangan juga telah menjadi bagian masyarakat yang beragama sekalipun. Sebab manusia memang telah menjalankan nalurinya yang sejati sebagai binatang. Kecenderungan manusia modernpun, hampir mengarah ke naluri seperti itu. Pertunjukkan seks bebas yang hampir tanpa batas di dunia maya internet. Persaingan ekonomi yang seperti lingkaran makanan di laut, yang besar memakan yang kecil. Persaingan-persaingan ini merembes ke dunia-dunia lainnya, termasuk politik. Sehingga setiap orang kemudian bernafsu untuk menjaga kepentingannya sendiri tanpa peduli kepentingan yang lainnya. Perangkat-perangkat internasional, bahkan negara cenderung diperalat untuk memuaskan kepentingan kelompok dan pribadinya.

Sebagai makhluk ekonomi, manusia telah menjadi *animal economic* yang bekerja siang malam untuk mendulang keuntungan sebanyak-banyaknya. Wilayah-wilayah ekonomi ini kemudian merambah dunia lain, sehingga manusia pun telah menuju kepada *animal politic* yang berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya dengan berbagai cara. Sehingga manusia kemudian mengarah seperti apa yang dikatakan Mahatma Gandhi, yakni politik tanpa moral dan ekonomi tanpa solidaritas. Persaingan yang kebinatangan ini kemudian menghadirkan naluri-naluri kebinatangan pada setiap benak manusia. Itulah yang menjadi tontonan manusia kini siang dan malam.

Galungan dan Kuningan saat ini, berada pada titik seperti itu, sehingga perayaan kemenangan mestilah dimaknai sebagai pembalikan dari tujuan-tujuan ekonomi yang rakus dan tujuan politik yang sempit. Kemenangan dharma mesti dimaknai sebagai pelepasan atribut kebinatangan dari berbagai persaingan ekonomi dan politik, sehingga ekonomi dan politik yang terbangun menjadi lebih berempati. Agama Hindu mengajarkan manusia mesti membangun hidupnya dari *danawa* (raksasa, kebinatangan)

menuju *manawa* (kemanusiaan), dan selanjutnya menjadi *madawa* (kedewataan).

Kemenangan sejati terjadi manakala manusia bisa mencapai kedewataan, tidak hanya setelah kematian, tetapi ketika masih hidup. Masyarakat Bali biasanya hanya percaya bahwa manusia mencapai kedewataan setelah kematian. Sehingga orang yang meninggal disebut *newata* (menjadi dewata). Tetapi apakah gunanya menjadi dewa setelah meninggal. Orang yang meninggal tidak akan bisa mengangkat derajat kehidupan masyarakat ini. Karena itu, upacara kematian seperti *maligya* (yang berarti penyucian) yang dilakukan untuk mengangkat roh manusia menjadi dewa seharusnya dilakukan sebagai ritual kehidupan – bukan ritual kematian. Pada saat hiduplah, dana milyaran yang digunakan untuk *maligya* seharusnya digunakan untuk mengangkat derajat kemanusiaan. Memiliki sifat dewa semasih hidup jauh lebih menguntungkan sesama daripada setelah meninggal.

Oleh karena itu, yoga-yoga kuno selalu mengajarkan tentang jalan-jalan mencapai ketuhanan semasih hidup. Yoga-yoga ini telah banyak ditafsirkan dalam bentuk-bentuk yang mencerminkan kemalasan (*tamasika*), sehingga teknik-teknik ini kemudian hanya menjadi simbol-simbol ritual. Pada awalnya, simbol-simbol tersebut hidup dalam diri seorang pendeta di Bali karena sang pendeta tidak hanya memahami simbol tetapi juga melakukan berbagai latihan rohani. Namun belakangan, simbol-simbol tersebut berhenti hanya simbol sebab tidak didahului oleh latihan-latihan kerohanian yang cukup. Ritualpun kemudian hanya menjadi pameran, bahkan telah berkembang menjadi obyek touristik.

Simbol-simbol seperti itu tidak bisa mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Biaya yang dikeluarkannya pun percuma.

Biaya tersebut tidak menambah keyakinan bahwa hidup akan menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya, biaya-biaya yang besar tersebut kemudian berubah menjadi kecemasan terhadap masa depan yang tidak menentu. Jika demikian adanya, ritual tidak akan menjadi membahagiakan, tetapi mencemaskan. Sebuah

menggunakan upacara tertentu) tetapi tujuannya rasional (misalnya untuk kesejahteraan dunia, keselamatan, kekayaan dan sejenisnya). Sedangkan agama adalah kepercayaan masyarakat yang cara-caranya rasional (misalnya puasa untuk mengendalikan diri dan sejenisnya) namun tujuannya irrasional (misalnya *moksha, nirvana, sorga* dan sejenisnya). Agama dan Magic ini –meminjam terminologi Weber- rupanya saling memperebutkan pengaruh di Bali pada zaman kekalahan Singamandawa. Pada pertarungan ini, Singamandawa yang mengajarkan agama (puasa dan sejenisnya untuk mencapai kebahagiaan) kalah. Kaum magic yang mementingkan cara-cara irrasional namun tujuannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari menang. Sebab yang dibutuhkan masyarakat bukan *moksha, nirvana* atau sorga di akhirat. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa mengatasi persoalan kehidupannya sehari-hari.

Pada titik ini, kemenangan dharma masih perlu dipertanyakan lagi. Sebab pada kenyataannya yang menang adalah pragmatisme. Sehingga kepercayaan yang mendukung pragmatisme (magic), yaitu tujuan-tujuan pendek kemudian menang atas tujuan-tujuan ideologis agama yang abstrak. Jadi, memenangkan agama yang memiliki idealisme yang abstrak sulit dicerna masyarakat. Sehingga tak salah, agama kemudian mengalami kegagalan ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang tujuan-tujuannya yang sulit dibumikan sesuai keinginan masyarakat.

Sampai pada awal zaman modern, kepercayaan yang mendukung pragmatisme ini masih tetap dominan di Bali. Tetapi setelah modernisasi, apa yang disebut dengan magic ini mengalami tantangan hebat. Sebab, kepercayaan yang bersifat magic ini mendapatkan lawan yang lebih pragmatis lagi, yakni ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini merupakan sesuatu yang berbeda lagi. Ilmu memang mengharapkan tujuan-tujuan rasional, seperti kesejahteraan dan sejenisnya, namun caranya juga rasional, misalnya dengan metode-metode yang telah teruji melalui percobaan. Ilmu pengetahuan kemudian ternyata bisa menghasilkan banyak hal yang menakjubkan. Sehingga

Dengan demikian, pemaknaan Galungan dan Kuningan mestilah dimaknai sebagai semangat untuk membangun kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ritual yang sarat simbol tersebut mestilah mampu melahirkan masyarakat yang tercerahkan, sehingga bisa menghargai sesama dan membangun solidaritas sosial yang tangguh, baik sebagai bangsa maupun sebagai makhluk dunia.



Galungan dan Kuningan, Hari Kemenangan Dharma?

Umat Hindu di Bali segera akan merayakan Galungan dan Kuningan. Hari raya ini adalah hari raya untuk memperingati kemenangan dharma melawan adharma, yang artinya juga memperingati kemenangan agama –sebab dharma adalah agama. Padahal, kemenangan agama sesungguhnya masih menjadi pertanyaan besar di tengah-tengah peradaban manusia. Benarkah agama (dharma) memang pernah menang? Bagaimanakah Galungan dan Kuningan bisa dimaknai dalam pertanyaan besar itu? Atau bagaimanakah kita mesti memenangkan dharma jika itu masih dalam perjuangan?

Secara mitologi, umat Hindu di Bali memperingati Galungan dan Kuningan sebagai rasa syukur atas kemenangan Dewa Indra atas penguasa Bali yang jahat, Mayadanawa. Mitologi ini menceritakan bahwa Mayadanawa berperilaku seperti raksasa. Dia melarang masyarakat Bali mengadakan upacara kepada dewa-dewa. Sehingga masyarakat Bali memohon kepada dewa-dewa agar kekuasaan Mayadanawa runtuh. Dewa Indra mendengarkan doa ini. Dewa perang ini selanjutnya turun dari langit menyerang Mayadanawa. Raja Raksasa ini kalah. Setelah kekalahan ini, masyarakat Bali merayakan Galungan dan Kuningan sebagai hari kemenangan dharma atas adharma.

Mitologi ini terkadang dikaitkan dengan dua peristiwa sejarah penting penaklukan penguasa Bali oleh kekuatan luar. Yakni penaklukan Shri Kesari Warmadewa atas Singamandawa yang memiliki raja yang bernama Ugrasena pada sekitar abad ke-9 Masehi, dan penaklukan Majapahit atas Kerajaan Bedahulu. Sehingga perayaan ini kerap juga mengandung makna kemenangan budaya baru terhadap budaya lama yang telah usang. Benarkah bisa disebutkan demikian? Pertarungan esensial apa saja yang sesungguhnya terjadi pada dua peristiwa sejarah tersebut?

Secara historis, pertarungan Shri Kesari Warmadewa dengan Singamandawa lebih merupakan pertarungan idiologi. Singamandawa merupakan kelanjutan dari keturunan Kalingga yang telah dikalahkan di Jawa. Keturunan Kalingga ini merupakan kelanjutan dari sebuah tradisi agama pencerahan yang terjadi di India dari zaman Buddha. Kerajaan Kalingga ini aslinya berada di Negara Bagian Orrisa-India. Kerajaan ini mengalami kehancuran pada sekitar 200 SM setelah dikalahkan Asoka. Sisa-sisa kerajaan ini rupanya terus menyebar ke Asia Tenggara sampai Indonesia. Sehingga pada awal masehi, menurut berita prasasti, telah ada Kerajaan Kalingga di Jawa yang rajanya bernama Ratu Simha. Kerajaan ini selanjutnya menjadi ibu dari Mataram Kuno (Dinasti Sanjaya dan Sailendra).

Keturunan Kalingga ini merupakan raja-raja yang membawa agama (Hindu dan Buddha) ke Indonesia. Tetapi Singamandawa rupanya mengalami kesulitan dalam mengajarkan agamanya kepada masyarakat Bali. Sebab ketika itu, masyarakat Bali masih menyukai hal-hal yang bersifat magic (irrasional). Di tengah-tengah penyebaran agama seperti ini, telah muncul sinkretisme agama yang lebih bertujuan pragmatis di India. Sinkretisme ini berlatarbelakang politik. Yakni untuk penyatuan berbagai suku bangsa seperti yang terjadi pada Imperium Asoka dan Saka. Pengaruh besar ini melahirkan pembauran agama dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih pragmatis, seperti kesejahteraan, hiburan dan sejenisnya. Sinkretisme ini berpengaruh sampai ke Indonesia, sehingga kekuasaan lama yang lebih memiliki idialisme terhadap tujuan-tujuan agama tersingkirkan. Singamandawa di Bali pun kemudian dikalahkan penguasa baru yang lebih toleran dengan tradisi-tradisi lokal yang bersifat magic. Sehingga lahirlah percampuran antara magic dan agama di Bali. Padahal, sesungguhnya agama dan magic adalah dua hal yang berbeda.

Sosiolog Agama, Max Weber dalam Hegomoni Sistem Kepercayaan menjelaskan perbedaan ini. Magic adalah kepercayaan masyarakat yang cara-caranya irrasional (misalnya

Kerancuan Nyepi, Kebingungan Manusia Bali?

Masyarakat Hindu, saat ini, dibingungkan oleh penentuan hari raya Nyepi tahun 2005. Satu pihak yang mengusung ketetapan Mahasabha VI tahun 1991 yang menetapkan *penampih sasih* berkeseimbangan, menempatkan Nyepi jatuh pada 9 April tahun 2005. Satu pihak lagi yang mengusung hasil Paruman Sulinggih PHDI Bali tahun 2001, yang menganulir Tap Mahasabha VI tersebut menetapkan Nyepi pada 11 Maret 2005. Perbedaan kedua pandangan ini akibat dari perbedaan penempatan *penampih sasih*. Berdasarkan Tap Mahasabha, *penampih sasih* diletakkan pada Sasih Kasa (sebelum Sasih Kadasa, saat Nyepi), sedangkan berdasarkan Paruman Sulinggih PHDI Bali, *penampih sasih* diletakkan pada Sasih Asadha (setelah Sasih Kadasa). Perbedaan ini telah sampai ke tangan PHDI Pusat yang berwenang untuk memilih salah satunya. Fenomena ini baru pertamakali terjadi di Bali, terutama di kalangan umat Hindu. Pertanda apakah itu jika dilihat dari sosio-religius masyarakat Bali?

Bagi masyarakat Bali, “saat” atau “waktu” yang juga disebut *kala* memiliki makna yang cukup dalam. Sebab penentuan *kala* merupakan penentuan awal dari semua perencanaan kehidupan. *Kala* atau “saat” selalu dicari bila masyarakat Bali ingin melakukan sesuatu, karena *kala* tersebut berperan penting dalam kehidupan. Misalnya jika ingin pergi, sebaiknya memilih “saat pagi” sebab kalau siang akan panas dan menguras tenaga. Karena itulah, penentuan *kala* menjadi sangat penting. Untuk bisa menentukan ini, manusia Bali mesti memahami *dewasa*. *Dewasa* –menurut lontar-lontar wariga- artinya *Dewa Sarira* (badan dewa). Badan dewa tersebut adalah cahaya. Jadi, *dewasa* sama artinya dengan pencerahan (*enlightment*). Karena itu, untuk menentukan waktu, manusia Bali mesti mengalami pencerahan.

kedudukan agama semakin terpinggirkan. Pertama agama dipinggirkan oleh magic, berikutnya oleh ilmu pengetahuan. Pada kondisi seperti ini, bagaimana agama bisa dikatakan menang? Bagaimanakah bisa memenangkan agama pada ketertindihan magic dan selanjutnya ilmu pengetahuan?

Kelemahan agama adalah ketidakmampuannya menjelaskan tujuan-tujuannya yang bersifat abstrak, seperti sorga, *moksha* dan *nirvana*. Karena itu, tujuan-tujuan ini mesti mendapatkan penafsiran yang membumi. Yaitu bagaimana membumikan sorga dan *moksha* tersebut, -yang dalam bahasa Bali sering disebut sebagai *suka tanpa wali duka* (kebahagiaan yang tidak lagi menimbulkan penderitaan). Apakah itu bisa ada di bumi? Pertanyaan ini sebenarnya telah muncul sejak zaman Buddha (sekitar 600 SM). Tetapi filsafat agama tidak bisa memformulasikan itu secara nyata. Buddha menyebutkan itu sebagai kesadaran pikiran terhadap kenyataan yang menyebabkan penderitaan (*buddhi*). Upanisad menyebutkannya sebagai kesadaran atman. Kesadaran budi dan kesadaran atman ini ternyata masih juga sangat abstrak. Sehingga zaman pencerahan yang melahirkan Buddhisme dan Upanisad (Hindu) tidak bisa bertahan lama. Masyarakat India kemudian lagi terjerembab ke dalam tradisi magic, yakni menempuh cara-cara yang irrasional untuk mencapai tujuan jangka pendek.

Keterjerembaban ini yang membuat masyarakat Hindu (India) sulit melakukan perubahan. Mereka selanjutnya terjebak dalam sistem kasta yang menghegemoni masyarakatnya atas nama agama. Sebab mereka sangat tergantung kepada kaum Brahmana untuk melakukan ritual yang irrasional untuk mencapai tujuan jangka pendek. Kepercayaan ini menempatkan kaum Brahmana sebagai hegemoni yang melanggengkan sistem kasta berabad-abad di India. Kondisi ini sangat terbalik dari keadaan agamapencerahan yang diharapkan bisa menjadi pembebas (*moksha*). Sebab agama kemudian tidak lagi membebaskan tetapi telah membelenggu masyarakatnya. Masyarakat kemudian menjadi

sangat tergantung kepada kaum Brahmana yang menguasai teknik-teknik ritual untuk berbagai maksud jangka pendek.

Pada abad ke-18 Masehi, abad pencerahan kembali muncul di India. Tokoh seperti Swami Vivekananda muncul. Beliau memberikan penafsiran baru terhadap agama. Beliau mengembangkan doktrin Karmayoga, yaitu kerja keras untuk mencapai berbagai tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada titik inilah, tujuan-tujuan agama yang abstrak dibumikan ke dalam bentuk gerakan pembebasan kaum miskin dan terkebelakang. Jadi, sorga seterusnya mendapatkan tafsir sebagai tujuan dari gerakan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mahatma Gandhi selanjutnya memberikan tafsir yang lebih nyata lagi dalam gerakan kemerdekaan India. Beliau menggunakan cara-cara agama yang rasional, seperti hidup sederhana untuk mencapai tujuan yang rasional, yaitu pembebasan masyarakat dari penjajahan.

Jadi, penafsir Hindu pada abad ke-20 Masehi kemudian memberikan tafsir baru terhadap rasionalisasi tujuan-tujuan agama. Agama Hindu –pada titik ini- kemudian menjadi tidak terlalu minder dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan, agama bisa menjadi alternatif atas berbagai kebekuan ilmu pengetahuan. Sebab agama telah menjadi semakin rasional, baik dalam cara maupun tujuan. Sorga di langit ketujuh dan moksha yang melampaui batas pikiran kemudian dibumikan sebagai tujuan-tujuan manusia di bumi.

Galungan dan Kuningan pada abad ke-21 Masehi ini mestilah dimaknai dalam kerangka memenangkan agama seperti ini. Yakni dengan merasionalkan kembali tujuan-tujuan agama. Sehingga *sorga*, atau bahkan *moksha* (pembebasan) mestilah bisa dibumikan, sehingga tidak abstrak lagi sebagai utopia yang berpotensi untuk disalahgunakan dalam rangka kekuasaan atas nama agama. Sebab sebuah utopia, baik itu sorga atau bahkan perdamaian bisa memancing nafsu-nafsu hegemoni. Bukankah Dante Allegari memimpikan imperium dunia untuk perdamaian? Hindu dalam hal yang sama dari berabad-abad yang lalu

memimpikan penguasa tunggal (*cakrawerti*) untuk perdamaian dunia. Jadi, pemaknaan agama ke dalam rasionalisasi terutama dalam tujuannya menjadi tugas bagi mereka yang ingin memenangkan dharma. Jika tidak demikian, penderitaan yang berulang-ulang (*samsara*) akan menjadi kenyataan bagi setiap manusia yang beragama sekalipun.



menghilangkan keraguannya dengan memegang tujuan-tujuan kehidupannya yang berbasiskan kepada “jagaddhita” (kebahagiaan bersama). Tujuan-tujuan inilah yang akan mengerem manusia Bali untuk tidak terjebak ke dalam kerakusan ekonomi yang bisa memiskinkan sesamanya. Bagaimanapun manusia Bali mesti memiliki kesadaran sebagai bagian dari peradaban besar umat manusia. Karena itu, manusia Bali tentu mesti berbagi. Sebab setiap manusia tak akan bisa hidup sendiri.

Jadi, pembangunan solidaritas manusia Bali, semestinya tidak hanya dibangun di kalangan masyarakatnya sendiri (banjar dll). Tetapi juga mesti dibangun pada pergaulan global. Sehingga manusia Bali tidak menjadi manusia terasing, tetapi mesti menjadi manusia yang “gaul” – meminjam istilah generasi muda masa kini–dengan tanpa mengubah tujuan-tujuan kehidupannya yang berdemensi sosial, menjadi individual. Mudah-mudahan kebingungan manusia Bali dalam menentukan Nyepi, tidak menjadi cermin dari ketidakmampuan manusia Bali untuk melakukan *adjustment* terhadap perubahan yang terjadi.



Pengertian *dewasa* sama dengan pengertian *wariga* yang juga berarti “pencerahan”. Pengertian ini juga sama dengan pengertian istilah Sanskerta untuk ilmu perbintangan yang disebut dengan *Jyotisha*. *Jyotisha* berasal dari *jyotir* yang juga artinya cahaya. Jadi, penentuan waktu mesti didasari oleh cahaya, penerangan, atau pencerahan. Karena itu, hanya mereka yang memiliki pencerahan yang bisa mengetahui *kala*. Dengan mengetahui *kala*, manusia akan bisa merencanakan kehidupannya. Sebab dengan mengetahui *kala*, manusia akan bisa memahami “saat” dimana suatu keadaan menyedihkan atau mengembirakan. Jadi, hanya mereka yang mengalami pencerahanlah yang bisa memahami hal ini.

Mereka yang mengalami pencerahan, tentu adalah mereka yang tidak mengalami kebingungan, atau kebimbangan. Jadi ketika manusia Bali bingung menentukan *kala*, atau saat Nyepi, itu artinya sedang mengalami sebuah kebingungan atau kebimbangan. Kebingungan atau kebimbangan ini, akan berpengaruh kepada pelaksanaan setiap perencanaan untuk masa depan. Bahkan, ini bisa menyebabkan manusia Bali diam, tak mau bergerak, sebab mereka ragu dalam memilih saat yang tepat. Apakah yang menyebabkan manusia Bali bingung seperti itu?

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam atau di luar Bali mendorong kebingungan ini. Manusia Bali, saat ini, sedang mengalami reorientasi tujuan-tujuan kehidupan. Tujuan-tujuan kehidupan yang bersifat spiritual (kebahagiaan bersama), mulai tergeser kepada tujuan-tujuan sesaat (kerakusan individu). Pergeseran ini kemudian menimbulkan konflik batin yang belum usai. Perubahan orientasi ini juga tidak mendapatkan sandaran politik yang kokoh, sehingga mereka kemudian berada dalam ambivalensi (keraguan) yang berkepanjangan.

Secara sosio-kultural, manusia Bali juga tengah mengalami demam budaya instan dan sensasional. Demam ini mengejutkan budaya-budaya kestabilan, keharmonisan dan sejenisnya. Ada degup kencang perubahan kultur yang hebat di dada manusia Bali, tetapi satu kakinya ternyata masih terkait pada kultur kestabilan

dan keharmonisan. Sehingga mereka kemudian menjadi “generasi peragu”. Keadaan ini kemudian diperparah lagi secara ekonomi yang sedang mengalami tamparan hebat. Secara ekonomi, manusia Bali sebenarnya sedang berangkat, melepaskan diri dari ekonomi agraris menuju ekonomi pariwisata. Namun begitu mereka bergerak, mereka ternyata tidak mendapatkan sandaran yang kokoh di pariwisata. Pariwisata ternyata merupakan industri yang sangat rentan, sehingga manusia Bali kembali menjadi peragu terhadap pilihannya. Keraguan ini kemudian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia Bali saat ini. Hal ini pun seterusnya tercermin pada keraguannya menetapkan Nyepi. Apakah yang mesti dilakukan menghadapi fenomena ini?

Bimbang dan ragu, adalah persoalan manusia sehari-hari. Dari dulu sampai sekarang, manusia senantiasa dianggapai kebimbangan. Arjuna juga mengalami kebimbangan ketika mesti menentukan pertempuran di Kuruksetra. Pada kebimbangan tersebut, Shri Kresna datang menunjukkan tujuan-tujuan kehidupan spiritual. Sehingga Arjuna kemudian tidak terjebak dalam halusinasi dari keinginan untuk memenuhi indrya (tujuan-tujuan saat). Karena itulah, pada saat ini, manusia Bali perlumengadakan “samvada” (pengukuran visi dan misi) dengan tujuan-tujuan kehidupan spiritual. Apakah yang dilaksanakan saat ini telah berpijak kepada tujuan-tujuan spiritual yang berorientasi kepada kesejahteraan bersama, atau telah terjebak kepada tujuan-tujuan sesaat? Pengukuran inilah yang disebut dengan *samvada*, yang bisa juga disebut dengan dialog batin. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan Bhagavad gita untuk melukiskan dialog Kresna-Arjuna di Kuruksetra.

Setelah mengadakan *samvada*, manusia Bali mesti bisa mengambil kebijakan terhadap kehidupannya. Itu artinya, manusia Bali mesti mengambil peran-peran politik untuk memutuskan masa depannya. Jadi, manusia Bali tidak bisa lagi bersandar kepada kekuatan politik tertentu. Tetapi mereka harus bangkit sendiri, memainkan peran politiknya, sehingga bisa ikut aktif menentukan perjalanan masa depan masyarakatnya. Manusia Bali mesti bisa

menentukan sendiri arah perjalanan masyarakatnya, tidak lagi menyerahkan semua ini kepada kekuatan politik yang dominan secara nasional.

Secara sosio-kultural, manusia Bali sudah saatnya bisa mengukur diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Artinya, manusia Bali mesti mulai bisa *nyikutang awak padidi*, menyesuaikan semua fenomena dengan kemampuan diri. Jadi, tidak terjebak atau mengikuti wacana-wacana dunia yang belum tentu sesuai dengan kemampuan lokal. Posisi ini mesti bisa juga dimainkan dalam wilayah ekonomi. Apapun perkembangan ekonomi di Bali, apakah itu pariwisata, mestilah mengikuti dinamika masyarakatnya. Berapapun kemampuan masyarakat Bali, sedemikianlah seharusnya pariwisata dibangun. Sehingga tidak menimbulkan *over capacity* (kelebihan muat). Jadi, pembangunan pariwisata ini mesti sejalan dengan kemampuan masyarakat Bali dalam melakukan *adjustment* (penyesuaian) terhadap perkembangan tersebut.

Apabila itu dipaksakan, ini akan menimbulkan kerancuan-kerancuan pada masyarakat Bali yang berpotensi untuk menenggelamkan ketahanan budayanya. Sebab ketahanan manusia Bali, sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi. Kemampuan ini dapat terlihat dari kemahiran manusia Bali dalam menyesuaikan perhitungan kalender Saka, yakni menyesuaikan perhitungan bulan dengan perhitungan matahari melalui sistem *penampih sasih*. Sehingga kalender Saka di Bali menjadi sangat unik. Bila kemampuan ini hilang, manusia Bali akan menjadi manusia peragu, bahkan mungkin “gagap” dalam menghadapi perkembangan yang terjadi.

Hal ini tentu akan menyisihkan masyarakat Bali dari pergaulan dunia. Sebab keunikannya akan hilang. Jika keunikannya hilang maka manusia Bali akan kehilangan manfaatnya dalam masyarakat dunia. Kehilangan manfaat berarti kehilangan “pengaruh”, “citra” dan sebagainya. Kehilangan semua itu berarti ketenggelaman budaya Bali. Karena itu, manusia Bali mesti bangkit,

dirayakan umat Hindu, tetapi sebenarnya ia terbuka untuk dimaknai oleh seluruh umat manusia.



Nyepi, Transformasi Kebudayaan Menuju *Jagaddhita*

Perayaan Nyepi Icaha 1926, atau tahun 2004 ini benar-benar sepi dari hangar bingarnya pawai ogoh-ogoh yang biasanya dilaksanakan pada upacara Tawur Agung Kasanga (sehari sebelum Nyepi). Tetapi, suasana Nyepi pada 21 Maret 2004 tetaplah seperti tahun-tahun sebelumnya. Umat Hindu biasanya melakukan catur brata penyepian, yaitu tidak menyalakan api (*amati gni*), tidak menghibur diri (*amati lalangan*), tidak bekerja (*amati karya*) dan tidak bepergian (*amati lalungan*). Sehingga Denpasar pasti akan sepi, bebas dari polusi kendaraan bermotor. Siapapun yang tinggal di Bali ketika itu pasti merasakan keheningan dan kedamaian. Demikianlah sebenarnya Nyepi yang memang bermakna perdamaian. Sehingga perayaan ini tetap memiliki relevansi dengan perkembangan zaman. Sebab perdamaian memang menjadi kerinduan umat manusia dari zaman ke zaman. Bagaimanakah sebenarnya Nyepi tersebut? Bagaimanakah umat Hindu memaknainya saat ini, terlebih lagi dalam suasana perhelatan politik nasional?

Sejarah lahirnya tahun Caka sekitar tahun 78 Masehi sebenarnya penuh dengan warna perdamaian. Pada tahun itu, Raja Kaniskha dari Bangsa Caka berhasil mempersatukan berbagai suku yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Sehingga bangsa yang sebelumnya mengalami peperangan demi peperangan, menjadi rukun dan damai. Permulaan dari kerukunan dan perdamaian ini kemudian diperingati sebagai awal Tahun Caka. Peringatan ini kemudian menyebar ke berbagai tempat, termasuk Indonesia. Negarakertagama juga mencatat bahwa Kerajaan Majapahit juga memperingati Tahun Baru Chaitra yang merupakan Tahun Baru Caka.

Akan tetapi, cerita di Indonesia tentang Tahun Caka sedikit berbeda. Tahun Caka, bagi suku-suku di Indonesia, sering dikaitkan dengan cerita kedatangan Shri Aji Saka ke Indonesia. Shri Aji Saka diceritakan berhasil mengalahkan Raja Raksasa yang berkuasa di Indonesia. Setelah raja ini kalah, Shri Aji Saka kemudian memperkenalkan huruf *Hanacaraka* kepada masyarakat Indonesia. Cerita ini menunjukkan bahwa kedatangan Shri Aji Saka membawa suatu peradaban yang lebih maju, yaitu peradaban yang mengenal huruf. Jadi, peringatan Tahun Baru Caka mengandung dua makna historis bagi umat Hindu di Indonesia, yaitu peringatan perdamaian dan perkembangan peradaban.

Perdamaian dan proses perkembangan peradaban sebenarnya usaha manusia dari zaman ke zaman. Umat Hindu tidak mengenal yang disebut dengan kebenaran terakhir, tetapi mengenal yang disebut dengan kebenaran abadi. Jadi, proses peradaban, bagi umat Hindu, tidak akan pernah berhenti –selalu akan berubah. Tetapi perubahan tersebut tentulah harus mengacu kepada kebenaran abadi, yaitu perjuangan manusia untuk menghilangkan penderitaan-penderitaan hidupnya. Itulah sebenarnya proses terus-menerus yang dilakukan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan abadi (*ananda*). Karena itu, pemaknaan Nyepi seperti itu masih sangat relevan untuk konteks kekinian.

Pada saat ini, umat Hindu mengalami berbagai persoalan kehidupan, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik yang berwarna kekerasan, kebangkrutan ekonomi dan sejenisnya. Di tengah persoalan tersebut, sayup-sayup terdengar seruan-seruan perdamaian dan suatu peradaban yang menjanjikan yang bernama “demokrasi”. Hal-hal ini menjanjikan masa depan yang lebih bagi kepada kita semua. Sebab dalam demokrasi, harkat dan martabat manusia akan semakin dihargai. Demikian juga, demokrasi menjanjikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat. Sehingga “demokrasi” kemudian menjadi idola di dalam mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan, seperti ketidakadilan sosial dan sejenisnya.

Umat Hindu tentulah tidak akan pernah anti terhadap setiap kebudayaan baru, termasuk demokrasi. Sebab itu hanya alat manusia di dalam perjuangannya untuk melenyapkan penderitaan mereka. Jadi, sebagai sebuah alat, demokrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan (Hindu). Karena itulah, perayaan Nyepi, saat ini, perlu dimaknai dalam konteks transformasi kebudayaan untuk mencapai *jagaddhita* (kesejahteraan masyarakat).

Oleh karena itulah, pemaknaan Nyepi kemudian harus bertemu dengan pemaknaan demokrasi kita. Yaitu demokrasi yang damai dalam pelaksanaannya, dan mengarah kepada tujuan kesejahteraan bersama. Jadi, Nyepi yang jatuh pada 21 Maret 2004, bertepatan dengan masa kampanye, memiliki makna yang penting. Sebab Nyepi bisa memberikan inspirasi bagi perdamaian dan proses perkembangan kebudayaan manusia. Kedua hal ini tentu mesti menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebab tanpa perdamaian, proses yang terjadi tidak dapat disebut sebagai perkembangankebudayaan. Bahkan jika proses perkembangan kebudayaan terjadi dengan warna-warna kekerasan (ketidakdamaian), maka itu layak disebut sebagai “kemunduran kebudayaan” –bukan perkembangan kebudayaan. Dalam konteks yang demikian inilah, Nyepi menjadisangat relevan untuk dimaknai dalam perhelatan politik yang didalamnya diletakkan harapan terhadap lahirnya “kemajuan peradaban”, sehingga manusia bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya.

Dalam kerangka seperti inilah, umat Hindu di Bali kemudian mengedepankan pemaknaan dalam perayaan Nyepi tahun ini. Sehingga umat Hindu memang mengurangi perayaan dalam bentuk pawai ogoh-ogoh. Pengurangan ini tidak mengurangi makna Nyepi, tetapi justru memberi makna yang lebih dalam lagi. Sehingga Nyepi benar-benar bisa menjadi tonggak bagi lahirnya perdamaian dan peradaban yang lebih baik. Tentunya tidak hanya umat Hindu yang berharap seperti itu. Seluruh umat manusia, pastilah mengharap hal itu. Karena itu, Nyepi walaupun hanya

Kuno, kemudian berkembang dalam kebudayaan Bali Kuno. Wacana seperti ini terinspirasi dari yoga kuno yang terdapat dalam weda-weda.

Pada sistem yoga disebutkan, seseorang hanya akan mencapai tujuan hidupnya, yaitu *moksha* apabila mampu melakukan *yama-nyama*, *asana*, *pranayama*, *dhyana* sampai pada *samadhi*. *Yama-nyama* adalah pengekangan diri untuk mencapai proses berikutnya. Dalam *yama-nyama* tersebut terdapat sebuah pengekangan diri yang disebut dengan *swadhyaya*, yang artinya hanya tergantung kepada Tuhan. Jadi, seorang yogi tidak boleh tergantung dengan siapapun. Semangat tersebut kemudian bisa ditafsirkan dengan kemandirian. Hanya tergantung kepada Tuhan sama halnya dengan mandiri. Karena itu, kemandirian merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu kebahagiaan. Inspirasi inilah yang dikembangkan menjadi gerakan sosial oleh Mpu Kuturan di Bali. Sebab pada hakikatnya pergerakan sosial sama dengan pergerakan pada diri sendiri –sesuai dengan konsep *bhuwana agung* dan *bhuwana alit*.

Tafsir yoga yang personel relevan untuk ditafsirkan dalam wacana gerakan sosial, terutama dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi yang berkembang saat ini, mewacanakan privatisasi, keleluasaan investasi dan pasar bebas. Wacana-wacana tersebut sebenarnya bermuara kepada penaklukan. Jadi melalui wacana globalisasi, ambisi purba manusia yaitu menaklukkan sesamanya akan mendapatkan tempat. Karena itulah, jauh-jauh hari, Soekarno telah menyebutkan hal ini sebagai *neo kolonialisme* (penjajahan bentuk baru). Penjajahan adalah segala bentuk penguasaan. Penguasaan seperti itu tentu saja tidak sejalan dengan tujuan agama Hindu yang hendak mencapai pembebasan (*moksha*, bebas dari keterikatan). Karena itulah, wacana globalisasi mesti dilawan dengan wacana kemandirian yang akan bermuara pada kebebasan. Hanya manusia-manusia mandiri yang akan mendapatkan kebebasan.

Oleh karena itu, upacara yang merupakan pengejawantahan dari sistem yoga mesti dimaknai dalam sebuah gerakan sosial.

Nyomya, dari Ritual ke Pergerakan Sosial

Agama Hindu Bali memiliki tradisi upacara yang rumit dan teliti. Secara prinsip, upacara tersebut menggambarkan pendakian spiritual dari sifat kebinatangan menuju sifat kedewataan, atau dari *danawa* menuju kepada *madawa*. Karena itulah, setiap upacara selalu diawali dengan *pacaruan* untuk mengharmoniskan (*nyomya*) sifat-sifat buruk. Setelah sifat-sifat buruk ini hilang, bumi akan suci. Bumi yang suci merupakan tempat bagi dewa-dewi, bahkan Ida Sanghyang Widhi. Bagaimanakah tradisi itu berjalan? Apakah tradisi tersebut bisa dikontekstualkan pada masa kekinian?

Upacara di Bali merupakan perwujudan dari nilai dan harapan masyarakatnya. Pada upacara terdapat nilai-nilai *satyam* (kebenaran), *shiwam* (kesucian) dan *sundaram* (keharmonisan). Pada upacara-upacara tersebut terdapat juga harapan untuk mengadakan perbaikan terus-menerus. Sehingga manusia mencapai alam ketuhanan. Gita menyebutkan *Brahma-nirvanam rcchati* (pencapaian alam ketuhanan) –BG 2.72. Harapan seperti itulah yang terwujud dalam setiap upacara di Bali, mulai dari *pacaruan* sampai *Ngadegang Sanggar Agung*, menstanakan *Ardenareswara* (Tuhan yang berwujud pria dan wanita).

Pada *pacaruan* tersebutlah ada proses yang disebut dengan *nyomya* (pengharmonisan atau pemurnian sifat-sifat kebinatangan). Setelah pemurnian ini, bumi akan suci. Bumi yang suci merupakan altar persembahan. Altar persembahan tersebut diwujudkan dalam bentuk *pabangkit* yang mengandung simbol-simbol bumi atau alam semesta. Dalam altar yang suci itulah, umat menstanakan sifat-sifat kedewataan –melalui simbol penstanaan dewa-dewi di *sanggar agung*. Demikianlah sebenarnya proses persembahan itu, diawali dengan pemurnian, diakhiri dengan

pencapaian ketuhanan. Proses seperti itu sebenarnya juga merupakan proses yoga.

Proses yoga diawali dengan pengekangan sifat-sifat kebinatangan melalui *brata* (*yama-nyama*). Setelah proses pengekangan, maka tubuh akan tersucikan. Tubuh yang suci merupakan altar bagi pemujaan (*asana*). Altar pemujaan ini mesti senantiasa dibangun atau dihidupkan melalui *pranayama* (pengaturan nafas). Setelah itu dapat dilakukan, barulah seseorang dapat melakukan *dhyana* (konsentrasi kepada Tuhan). Akhir dari proses ini adalah pencapaian *samadhi*, atau keadaan ketuhanan. Akan tetapi, proses ini dalam tradisi Bali kerap kali terhenti pada simbol dalam upacara. Simbol ini pada kenyataan sulit terwujud. Bagaimanakah mesti mewujudkan hal ini?

Ketika umat berpikir tentang keadaan ketuhanan, mereka seringkali berpikir bahwa keadaan itu adalah keadaan setelah kematian. Jadi, keadaan tersebut adalah keadaan di kerajaan Tuhan (sorga). Penafsiran seperti ini mungkin benar pada orang yang menjelang kematian, tetapi sangat berbahaya bagi orang-orang muda. Selain penafsiran seperti itu, ada sebenarnya penafsiran lain. Yaitu bahwa keadaan ketuhanan bisa diwujudkan di dunia ini. Karena dunia ini sesungguhnya merupakan pancaran dari *Brahman* (Tuhan), seperti halnya manusia. Jadi, pemurnian dunia atau diri mesti dilakukan dalam rangka mewujudkan sifat-sifat ketuhanan di bumi. Sifat-sifat ketuhanan tersebut adalah *Sat* (kebenaran), *Cit* (pengetahuan) dan *Ananda* (kebahagiaan).

Pada tataran ini, cita-cita keagamaan mendapatkan titik temu dengan cita-cita kemasyarakatan. Cita-cita kemasyarakatan adalah mewujudkan keadilan, masyarakat yang terdidik, sejahtera dan bahagia. Karena itulah cita-cita pencapaian keadaan ketuhanan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pergerakan sosial untuk menegakkan keadilan, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan kebahagiaan. Semangat inilah yang kemudian digelorakan oleh Swami Vivekananda dan Mahatma Gandhi. Kedua pejuang kemanusiaan ini mendeklarasikan pengabdian

kepada Tuhan sebagai pengabdian kepada kemanusiaan. Tafsir ini yang disebut dengan *karmayoga*.

Tafsir seperti itu lahir dari keterpurukan kebudayaan India pada zamannya. India yang besar ternyata telah dikalahkan pada era itu. Masyarakat India berada dalam kemiskinan, konflik ras dan kebodohan. Padahal India dalam dunia sastra, identik dengan keberlimpahan, kasih sayang dan kemajuan peradaban. Tetapi itu semua ternyata hanya terdapat dalam dunia sastra. Kenyataannya, India terjajah dan terkebelakang. Karena dunia sastra yang memainkan simbol-simbol nilai dan harapan hanya terhenti pada simbol –tidak meluas menjadi sebuah gerakan sosial. Masyarakat Bali berpotensi untuk mengalami degradasi seperti itu manakala masyarakatnya sendiri hanya cukup puas dalam bermain simbol – tidak mewujudkan semua itu dalam realita sosialnya.

Dalam mencairkan simbol-simbol ini, pendapat Prof. I Gusti Ngurah Bagus (alm) perlu mendapatkan perhatian bahwa, Bali memerlukan Mpu Kuturan baru yang mampu mengaplikasikan wacana kebudayaannya pada realita sosial yang dihadapinya. Salah satunya yaitu globalisasi. Kalau tidak, Bali akan terjajah, terkebelakang dan terpinggirkan. Mpu Kuturan pada zamannya, melahirkan konsep *pakraman* dalam menghadapi sistem kerajaan yang mulai berkembang di Bali. Dengan membangun konsep ini, beliau berharap kekuasaan kerajaan tidak bisa menghapuskan demokrasi rakyat yang telah berkembang sejak kedatangan Rsi Markendya di Bali, sekitar abad ke-7 Masehi. Jadi, pada prinsipnya, Mpu Kuturan mencanangkan pembangunan “kuasa bawah” untuk mengimbangi “kuasa atas” (kerajaan). Pada pembangunan ini, semangat kemandirian sangat dikedepankan.

Wacana seperti ini sebenarnya merupakan wacana yang bersumber dari Weda. Sehingga Mahatma Gandhi yang di India, juga mendapatkan inspirasi yang sama. Beliau memperkenalkan sebuah pembangunan desa mandiri yang disebut dengan *Gram Swaraj* (*gram* atau *grama*, dalam bahasa Bali kemudian menjadi *krama* artinya desa, sedangkan *swaraj* artinya mandiri). Jadi, wacana kemandirian sebenarnya telah ada sejak zaman India

bukan dogmatisme agama. Rasionalitas ini lahir dari sebuah gerakan penafsiran kembali agama Hindu. Sebab, agama Hindu sebenarnya juga berbasiskan pada rasionalitas. Meskipun mesti disadari aspek dogmatisme masih ada yang melekat. Tetapi itu merupakan sebuah kewajaran untuk menyeimbangkan kedua belahan otak manusia.

Sejarah Hinduisme memang sempat terbelenggu dalam kubangan dogmatisme pada zaman Brahmana. Tetapi kemudian muncul zaman Upanisad yang mencoba mempertanyakan berbagai dogma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Zaman rasionalitas inilah yang berkembang menjadi agama Hindu modern. Shri Sankara Charya mengembangkannya menjadi Advaita pada abad ke-7 Masehi. Ramanuja mengembangkannya menjadi Dvaita pada abad ke-12 Masehi. Kedua pandangan ini bertemu pada satu titik, yakni rasionalisasi agama. Apalagi pada abad modern, muncul tokoh yang bernama Dayananda Saraswati, pendiri Arya Samaj (abad ke-18 masehi) yang menentang segala bentuk dogmatisme dalam Agama Hindu. Sebab Hindu memang berbasiskan pada rasionalitas.

Di Bali, pada abad ke-7 Masehi, Rsi Markendya telah menanamkan basis *karmayoga* (kerja keras) yang merupakan jalan rasional untuk mencapai kebahagiaan bersama. Pada abad ke-10 Masehi, Mpu Semeru, Mpu Kuturan dan yang lainnya datang ke Bali memberikan pendirikan kepada seluruh lapisan masyarakat Bali. Pada abad ke-12 Masehi, Mpu Tantular telah menulis tentang prinsip dasar bagi seluruh filsafat kehidupan, yang sesungguhnya merupakan satu kesatuan. Beliau menulis *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*, yang artinya bahwa setiap usaha sadar manusia untuk membangun dirinya mendapatkan pengakuan sebagai jalan untuk mencapai tujuan tertinggi. Jadi, tidak ada lagi, dominasi terhadap kebenaran dari kelompok mana pun. Lahirnya karya-karya besar ini merupakan awal dari lahir zaman rasionalisme di Indonesia.

Hal-hal ini mestinya bisa mendapatkan pemaknaan-pemaknaan yang lebih berarti pada era Hindu modern di Bali, seperti halnya di

Hanya melalui pergerakan sosial, sebuah masyarakat akan mendapatkan kemajuan. Sedangkan jika hanya terhenti pada simbol, mereka hanya akan menjadi tontonan atau produk dari industri besar yang bernama pariwisata. Masyarakat Bali tidak akan mendapatkan banyak hal dari industri padat modal tersebut. Sebagian besar hasil dari industri tersebut akan mengalir kepada pemilik modal. Sisanya kepada penguasa, dan hanya sebagian kecil berimbas kepada masyarakat. Dari bagian kecil yang didapatkannya ini, masyarakat telah mengorbankan banyak hal, yaitu cita-cita kebahagiaan dan spiritualitasnya. Karena itu, marilah kita berusaha sendiri secara terus-menerus. *utsaha ta larapana* yang artinya usaha adalah penyebab dari hasil, demikianlah Kakawin Ramayana mengingatkan kita. “Kita sudah lama menangis, berhentilah menangis, mari bangun dan bangkit sampai tujuan akhir tercapai,” demikian kata Swami Vivekananda.



***Nyupat* Dogmatisme, Menuju Rasionalisme**

Tahun baru 2005 sebentar lagi tiba. Setahun ini, masyarakat Bali telah melakukan banyak hal. Kekerasan politik, seperti yang dikhawatirkan banyak orang, hampir tidak ada. Bahkan cahaya baru (rasionalisme) mulai berkembang sebagai kultur politik baru. Berdasarkan penelitian, hampir 60 persen masyarakat Balimemilih gambar parpol dan nama calon pada Pemilu Legislatif tahun 2004 ini. Ini berarti, masyarakat Bali telah rasional dalam berpolitik. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, juga tidak tampak fanatisme berlebihan di Bali. Adakah ini pertanda munculnya cahaya baru, rasionalisme di ranah Bali mulai tahun 2004? Bisakah cahaya baru ini menyinari pertarungan politik regional (Pilkada) yang mulai dilaksanakan tahun 2005?

Secara tradisional, pemilihan pemimpin di Bali, selalu terkait dengan agama (sistem religi). Sehingga pemimpin kadangkala dipilih berdasarkan *pamuwus* (pewisik) Ida Bhatara. Jika tidak demikian, masyarakat biasanya mencari keturunan dari kekasih dewata seperti yang termuat dalam babad untuk menjadi pemimpin. Sehingga pemilihan pemimpin memang tidak berdasarkan alasan yang rasional, tetapi berdasarkan alasan yang dogmatis. Dogmatisme ini mendorong lahirnya kekerasan. Sebab masyarakat yang percaya pilihannya merupakan kehendak dewata, akan berani melakukan kekerasan. Sebab kekerasan yang mereka lakukan mendapatkan pembenaran agama. Dengan mengatakan, itu merupakan kehendak dewata untuk memenangkan sang pahlawan. Jadi, pembenaran dogmatisme agama terhadap pilihan politik memang sangat rentan dengan kekerasan.

Sejarah politik di Bali, kerap memang mengaitkan berbagai bentuk kekerasan dengan dogmatisme agama. Seperti penyerangan Majapahit terhadap Bedahulu. Pihak Majapahit ketika itu, mencari pembenaran dogma agama bahwa tindakan kekerasannya tersebut

benar. Karena Raja Bali tidak mau melakukan upacara (*ngucak aci*). Sehingga Dewata memang mengutus tentara Majapahit untuk menyerang Bedahulu. Cerita sejarah ini terus berkembang menjadi mitologi yang bernama Purana Bali. Purana ini memberikan pembenaran terhadap gerakan politik Majapahit ketika itu. Pada cerita-cerita babad, turunan dari cerita ini dalam bentuk kejadian yang berbeda seringkali muncul. Sebut saja, penyerangan Bali terhadap Dalem Bungkut di Nusa Penida, disebutkan sebagai kehendak Ida Bhatara Gunung Agung. Sehingga hanya keris anugrah dari Ida Bhatara Gunung Agung yang bisa membunuh Dalem Bungkut.

Dogma-dogma seperti ini, tidak terlepas dari pengaruh ibunya kebudayaan Bali, yakni dari dogma serupa di Jawa. Pada lintasan sejarah Jawa, tindakan Ken Arok mendapatkan pembenaran dalam Pararaton. Karena Ken Arok merupakan putra Dewa Brahma yang ditakdirkan menjadi penguasa Jawa. Tindakan seorang putra dewa merupakan tindakan yang benar -seperti halnya tindakan dewa yang kadangkala juga mendatangkan bencana seperti badai untuk kebaikan umat manusia. Karena putra dewa merupakan perwujudan kebenaran. Pada titik ini, segala perilaku buruk “kekuasaan” mendapatkan pembenaran dogma agama. Penerusan dogma-dogma seperti ini pada perhelatan politik modern (pasca Indonesia merdeka) dalam bentuk yang lain kerap masih terdengar. Misalnya dengan penempatan “kekuasaan” sebagai *guru wisesa*, sehingga berada dalam posisi “benar”.

Dogma-dogma seperti ini terlihat mulai surut pada perhelatan demokrasi tahun 2004. Sehingga tidak ada lagi, kekerasan politik yang terjadi. Sebab “kekuasaan” telah tidak lagi mendapatkan pembenaran agama untuk melakukan apa saja. Bahkan, masyarakat sudah mulai kritis terhadap perilaku para penguasa. Sehingga mereka menjadi hati-hati dalam bertindak. Tindakan yang keliru, tidak akan mendongkrak suara mereka tetapi justru akan menurunkan dukungan mereka. Tanda-tanda ini merupakan sebuah harapan pencerahan baru dalam masyarakat Bali. Sebab masyarakat telah benar-benar bergerak dalam rel rasionalitas,

ketika itu. Mereka melihat sistem sosial Hindu telah tercemar dengan kepentingan sempit. Para Brahmana ingin tetap memelihara eksistensinya sampai ke anak cucunya, demikian juga para ksatriyanya. Sehingga, sebagai pemimpin masyarakat, mereka hanya bisa mengembangkan dogma-dogma agama dan tahyul untuk menakut-nakuti masyarakat melakukan perubahan. Dogma-dogma ini kemudian dirasakan menjadi penghambat kemajuan Hinduisme. Karena itu, kalangan terpelajar menyingkirkan diri ke hutan, membangun pola pendidikan yang bebas, untuk mengajar murid-muridnya agar bisa melakukan perubahan sosial.

Tradisi ini melahirkan zaman pencerahan, yang disebut dengan zaman Upanisad yang berbasiskan rasionalitas. Tradisi ini pula yang melahirkan zaman Buddha, yakni zaman pemberontakan terhadap berbagai dogma dan tahyul agama yang membelenggu. Perubahan besar selanjutnya terjadi di anak benua India ketika itu. Dogma-dogma agama runtuh, digantikan dengan rasionalitas. Era inilah yang melahirkan peradaban Hindu yang besar, dari 600 SM – 200 SM. Bahkan, era ini selanjutnya menjadi dasar pembangunan pemikiran Hindu yang besar, dari awal Masehi sampai zaman Sankara Charya (abad ke-7 Masehi), Ramanuja (abad ke-12 Masehi) dan yang lainnya. Jadi, tradisi *aranyaka* (hutan) selanjutnya menjadi dasar bagi gerakan pembebasan di kalangan umat Hindu.

Sistem *aguron guron* merupakan kelanjutan dari tradisi *aranyaka* tersebut. Tetapi pola ini hanya memiliki tujuan pada pembebasan diri semata, bukan pembebasan sosial. Jadi, sifatnya sangat pribadi sehingga I Gusti Bagus Sugriwa (alm) kemudian tidak bisa mengambil format pendidikan ini menjadi format pendidikan Hindu modern. Beliau selanjutnya mengambil pola pendidikan modern dengan memasukkan pelajaran agama Hindu ke dalamnya. Format inilah yang berkembang menjadi PGAHN Denpasar, terus menjadi STAHN Denpasar. Apakah pola demikian bisa disebut dengan pendidikan Hindu?

Tradisi *aranyaka* yang berkembang menjadi *guru kula* di India, dan *aguron guron* di Bali mengemban misi pembebasan. Jadi,

India. Pada masyarakat India, buah manis dari zaman-zaman pencerahan ini, mendapatkan ulasan cukup mendalam dari penafsir Hindu modern seperti Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Radha Krishnan dan yang lainnya. Sebab, secara nilai, tradisi agama Hindu di Bali sebenarnya juga mengidolakan rasionalitas. Bentuk-bentuk *caru* merupakan sebuah simbol dari *penyupatan* kebodohan menuju kecerdasan. Kebodohan disimbolkan dengan hewan, seperti kerbau, ayam dan yang lainnya. Hewan-hewan ini dikorbankan sehingga kebodohan tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi, konsep *caru* ini ternyata terhenti pada sebatas simbol. Implementasi nilai ini dalam gerakan sosial akhirnya tidak pernah terjadi. Karena itu, pada era ini, masyarakat Bali mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan konsep *caru* tersebut ke dalam realitas sosial, yakni dengan gerakan untuk menghilangkan segala bentuk kebodohan dan pembodohan.

Hinduisme memang memegang misi ini. Bhagavad Gita mengatakan, pedang pengetahuan dapat memotong rantai penderitaan. Reg Veda juga mengulas sebuah mantra *Om tamaso ma jyotir gamaya* yang artinya semoga bergerak dari kegelapan menuju pencerahan. Mantra kuno ini menjadi inspirasi dari perjuangan RA Kartini yang menyatakan “habis gelap terbitlah terang”. Jadi, perjuangan manusia dari zaman weda sampai zaman modern tetap sama, yakni perjuangan untuk mengusir kebodohan, mencapai kecerdasan. Karena itulah, Hinduisme jelas mengemban misi tersebut dalam usaha untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Jadi, setiap usaha untuk melakukan pembodohan adalah Adharma. Sehingga menentang segala bentuk pembodohan sesungguhnya merupakan Dharma itu sendiri.

Pada tahun 2005 ini, masyarakat Bali perlu memikirkan langkah-langkah ini dalam usaha ini. Sebab, Bali akan menghadapi pertarungan lokal (Pilkada), yang bukan tidak mungkin akan menggunakan dogma-dogma lokal dengan tafsir yang sempit. Jadi, masyarakat Bali memang mesti melakukan sebuah ritual kuno dalam konteks gerakan sosial, yakni *penyupatan* terhadap dogmatisme agama. Sehingga dogma-dogma ini tidak

disalahartinya atau dijadikan pembenar bagi tindakan yang menyimpang. Bahkan masyarakat Bali perlu mengadakan penafsiran ulang terhadap makna “kekuasaan” yang sebelumnya mendapatkan porsi dominan dalam menerjemahkan kebenaran. Kebenaran mestilah dimaknai sebagai “dimana-mana ada” (*wyapi wyapaka*). Sehingga siapa pun tidak dapat melakukan dominasi terhadap penerjemahan kebenaran. Apalagi itu hanya kekuasaan politik yang bersifat sementara. “Kekuasaan agama dan adat” sekali pun, tidak dapat mendominasi penerjemahan kebenaran.



Pendidikan Hindu, Gerakan Pembebasan

Sampai dewasa ini, pendidikan Hindu masih menjadi wacana yang cukup menarik pada kalangan masyarakat Bali. Wacana ini sebenarnya bukan wacana baru. I Gusti Bagus Sugriwa (alm) telah mewacanakannya sejak tahun 1950-an. Beliau kemudian merintis Pendidikan Guru Agama Hindu (PGAH) pada tahun 1960-an. Rintisan ini menjadi STAHN Denpasar saat ini. Namun, wacana ini terus berkembang, karena umat Hindu belum memiliki sekolah umum yang bernafaskan Hindu. Di tengah kondisi ini, timbul ide *guru kula* yang sebenarnya mengadopsi gaya pergerakan umat Hindu di India. Namun ada yang berpandangan bahwa Bali tidak boleh hanya pintar mengadopsi, tetapi juga mesti mampu menampilkan lokal geniusnya. Bagaimanakah seharusnya format pendidikan Hindu seperti itu? Adakah basis kultural Bali dalam usaha pembangunan pendidikan Hindu ini?

Secara tradisi, masyarakat Bali hanya mengenal sistem pendidikan spiritual yang disebut *aguron guron*. Sistem pendidikan ini biasanya untuk pendidikan spiritual. Dengan sistem ini, siswa tinggal di rumah gurunya. Siswa menjadi anggota keluarga gurunya, sehingga mereka harus bekerja bersamagurunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi, siswa mesti mengabdikan kepada gurunya (*guru tyaga*). Sistem pendidikan spiritual seperti ini masih berkembang sampai saat ini, tetapi sangat pribadi –khusus untuk pendidikan spiritual.

Sistem *aguron guron* ini merupakan kelanjutan dari tradisi pendidikan Hindu, yang di India disebut *guru kula*. *Guru Kula* maksudnya berguru dengan menjadi anggota keluarga guru. Tradisi ini merupakan kelanjutan dari tradisi *aranyaka* (hutan) di India yang berlangsung sekitar 600 SM. Tradisi *aranyaka* ini berkembang karena cita-cita pembebasan dari kalangan terpelajar

Peneduh Jagat, Awal atau Akhir Bencana?

Baru-baru ini (2/2 2005) yang bertepatan dengan Buda Kliwon Gumbreg, masyarakat Bali mengadakan upacara *peneduh jagat* yang dipusatkan di Besakih. Upacara ini dimaksudkan untuk menangkal berbagai bencana yang mungkin akan muncul (*tolak bala*), seperti tsunami dan sejenisnya. Apalagi memang terdapat berbagai ramalan tentang tsunami di garis pantai dari Aceh sampai Bali. Bagaimanakah mesti memaknai upacara tersebut dalam konteks kekinian? Apakah dengan upacara itu, kita sudah berarti bisa bebas dari berbagai bencana?

Sejak zaman dahulu, manusia senantiasa bercita-cita untuk membebaskan masyarakat dan dirinya dari berbagai bencana. Agama Hindu menyebut ini sebagai pembebasan (*moksha-jagaddhita*). Ada juga yang menyebutkan sebagai keselamatan. Ilmu pengetahuan modern juga mencita-cita hal ini. Tetapi pembebasan atau keselamatan tidak pernah tercapai. Bahkan penderitaanlah yang terus terjadi berulang-ulang dari waktu ke waktu, hanya bencana ke bencana. Agama Hindu kemudian mengajarkan berbagai jalan untuk memutuskan rantai penderitaan yang berulang-ulang ini (*samsara*). Ada empat jalan yang diajarkan yang disebut dengan *catur marga*, yaitu *bhakti marga* (pelayanan), *karma marga* (kerja), *jnana marga* (pengetahuan) dan *raja yoga marga* (disiplin).

Agama Hindu di Bali seterusnya menggunakan jalan upacara sebagai jalan untuk membebaskan manusia dari berbagai bencana. Karena itu, masyarakat Bali kemudian mengenal berbagai upacara tolak bala, seperti upacara *peneduh jagat* ini. Jalan ini sebenarnya merupakan jalan dari zaman-zaman pra Hindu. Pada zaman pra Hindu, nenek moyang kita biasanya melakukan upacara sebagai tanda syukur. Misalnya ketika panen berhasil, lepas dari bencana atau berhasil melakukan sesuatu. Pada upacara ini biasanya ada

pendidikan mesti diabdikan untuk usaha pembebasan. Sedangkan bentuk pendidikan tersebut tentulah tidak mesti sama dengan zaman dahulu. Sebab Hindu Dharma tidak pernah terikat kepada bentuk. Bentuk menurut pandangan Hindu bersifat sementara (*maya*). Sedangkan yang abadi adalah jiwa (*spirit*). Karena itu, spiritlah yang mesti dipegang teguh, bukan bentuk. Spirit pendidikan Hindu adalah usaha memotong rantai penderitaan. Bhagavad gita mengatakan, dengan pedang pengetahuan, rantai penderitaan dapat dipotong. Sehingga masyarakat bisa mencapai kebahagiaan. Jadi, pendidikan –menurut pandangan Hindu- adalah perjuangan untuk melenyapkan penderitaan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan sebuah perjuangan pembebasan..

Ide besar dari zaman *aranyaka* ini selanjutnya diterjemahkan pada zaman modern (abad ke-19 – 20 Masehi) oleh Rabindranath Tagore dan Mahatma Gandhi. Beliau mengambil ide besar pembebasan tersebut untuk membebaskan India dari penjajahan Inggris. Gerakan ini menjadi inspirasi gerakan pendidikan Taman Siswa di Indonesia, yang dipelopori Ki Hajar Dewantara. Gerakan pendidikan ini dibangun juga untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari penjajahan Belanda. Jadi, spirit pembebasan dalam nilai-nilai Hindu, kemudian menjelma menjadi perjuangan pembebasan masyarakat dari penjajahan. Karena itu, pembangunan pendidikan Hindu tidak bisa terlepas dari perjuangan untuk mencapai pembebasan.

Gerakan inilah yang berkembang di India menjadi *guru kula* modern. Gerakan ini dilakukan untuk melawan format pendidikan barat (yang dikembangkan penjajah Inggris) yang mengancam nilai-nilai luhur umat Hindu di India. Semangat gerakan inilah yang kemudian memberikan semangat kepada tokoh-tokoh Hindu di India untuk memformat format pendidikan alternatif yang berbasis Hindu. Adakah semangat seperti itu dalam usaha membangun pendidikan Hindu di Bali? Bagaimana pun juga, pendidikan mesti terbangun dalam semangat perjuangan seperti itu. Semangat perjuangan seperti ini nyaris tak pernah diwacanakan. Wacana yang muncul kebanyakan wacana

“kesirikan”, seperti kalau umat lain memiliki format pendidikan berbasis agama, kenapa Hindu tidak?

Jika dasarnya hanya “kesirikan” maka tujuannya pun akhirnya pragmatis, yakni untuk memenuhi porsi pada instansi pemerintahan dan instansi lainnya, bukan dalam kerangka gerakan pembebasan. Jadi, tujuannya hanya untuk mengambil sub-sub peran dari kekuasaan. Sehingga akhirnya hanya menjadi alat kekuasaan. Tujuan pragmatis ini mengingatkan kita terhadap sejarah pendidikan yang dilahirkan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Pendidikan Hindia Belanda ini dimaksudkan untuk mengisi tenaga siap pakai pada instansi pemerintahan Hindia Belanda atau perkebunan milik Belanda di Indonesia. Pendidikan pola penjajah seperti ini, tentu hanya akan melanggengkan penjajahan dengan segala bentuknya yang baru. Jadi, tak akan menjadi gerakan pembebasan –malah sebaliknya akan membelenggu umat. Karena itulah, derajat masyarakat akhirnya tak pernah terangkat oleh proses pendidikan seperti itu. Masyarakat seterusnya tetap berada dalam lingkaran penderitaan yang berulang-ulang (*punarbawa*). Persoalannya pun tetap sama dari zaman ke zaman meskipun bentuknya berbeda.

Jadi, jika masyarakat Hindu di Bali, ingin membangun pendidikan Hindu maka mesti kembali kepada spirit perjuangan pembebasan. Pendidikan Hindu mesti dibangun dalam kerangka pergerakan sosial untuk mencapai pembebasan. Jadi, pendidikan ini mesti menjadi dasar bagi zaman pencerahan. Karena itu, disiplin pribadi, semangat hidup dan gairah perjuangan seperti yang tersirat dalam tahapan-tahapan Yoga Kuno mesti menjadi prioritas dalam pendidikan ini. Sehingga pendidikan ini melahirkan generasi yang tangguh untuk melawan penderitaan dirinya dan masyarakat. Bahkan, mereka mesti mampu memenangkan pertarungan ini –dengan mengalahkan penderitaan diri dan melenyapkan penderitaan masyarakat.

Sistem yoga mengajarkan pengabdian sosial (*bhakti yoga*), kerja keras (*karma yoga*), belajar (*jnana yoga*) dan disiplin diri yang kuat (*raja yoga*) untuk melenyapkan penderitaan. Semua

usaha-usaha tersebut dilakukan untuk pembebasan manusia dari segala dosa. Dengan pengabdian yang tulus (*bhakti*), seseorang akan terbebas dari dosa-dosa masa lalu. Karena masyarakat akan segera melupakan dosa dari pengabdian yang tulus. Demikian juga, dengan kerja keras (*karma*), dosa-dosa juga akan dimaafkan. Begitu juga, dengan usaha pembelajaran, perbaikan diri yang terus menerus (*jnana*), dosa juga akan diampuni. Terlebih lagi, bila seseorang bisa melakukan disiplin diri yang kuat maka ia akan terhindar dari dosa. Semua usaha ini adalah usaha pembebasan, yang saat ini mestinya dikembangkan menjadi usaha pembebasan sosial, bukan hanya pembebasan diri. Semangat yoga kuno ini mesti bisa diterapkan dalam pola pendidikan Hindu modern. Sehingga pola pendidikan Hindu modern tidak berkembang menjadi pragmatisme baru yang akan memperpanjang rantai penderitaan masyarakat.



kerakusan ekonomi semata-mata. Jika tidak melakukan itu, upacara *peneduh jagat* hanya akan menjadi pil penenang yang tidak akan menyelesaikan persoalan, tapi hanya menjadi sebuah pelarian. Jadi, upacara bukanlah tempat pemberhentian untuk berpesta, tetapi awal dari sebuah gerakan yang lebih besar. Pembebasan masih jauh di depan. Akan sangat keliru bila kita mengira jalan sebagai pencapaian. Jalan sebagai akses memang benar. Tetapi mendapatkan akses belum tentu mendapatkan hasil. Sebab untuk mendapatkan hasil mesti ada usaha di dalamnya. Dengan usaha yang sadar dan terus-menerus, semoga upacara ini bisa menjadi akhir dari berbagai bencana kemanusiaan, semoga.



pesta untuk memuaskan semua komponen yang ada dalam upacara, termasuk para roh leluhur. Setelah zaman Hindu, upacara ini juga digunakan menjadi semacam pesta untuk para dewa, roh leluhur, manusia dan para bhuta (makhluk di bawah manusia). Sehingga mereka bisa terus memberikan kenyamanan dan keamanan kepada umat manusia. Dengan demikian, kata yadnya dalam agama Hindu yang artinya pengorbanan, kemudian diterjemahkan menjadi upacara yang sangat dekat maknanya dengan pesta untuk keselamatan.

Sebagian besar masyarakat Bali sangat yakin bahwa dengan pesta ini, para dewa akan senang. Bukan hanya para dewa, para bhutakala yang biasanya membencanai manusia juga akan puas. Sehingga mereka kemudian akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bencana. Efektifkah keyakinan ini untuk menyelamatkan manusia dari bencana? Keyakinan ini setidaknya memang bisa memberikan rasa aman. Tetapi keyakinan yang berlebihan terhadap hal ini bisa membuat manusia Bali menjadi lupa diri. Mereka bisa menjadi bersikap sangat patal. Yaitu sikap yang menyerahkan segala sesuatunya kepada para dewa untuk mendapatkan rasa aman. Jika ini yang terjadi dalam masyarakat maka upacara *peneduh jagat* yang dilakukan di Besakih akan menjadi awal dari sebuah bencana. Sebab upacara diletakkan sebagai puncak usaha manusia, bukan awal dari usaha manusia. Tindakan seperti ini jelas akan bisa membuat masyarakat Bali lupa untuk melakukan usaha sadar untuk menghindarkan diri dari bencana. Padahal pada kenyataannya, masyarakat Bali perlu melakukan berbagai telaah kritis berkenaan dengan proyek PLTP Bedugul, perlindungan daerah pesisir dan sebagainya untuk keberlangsungan hidupnya.

Weda-weda menyebutkan upacara seperti itu sebagai bentuk dari kegiatan yang bersifat *tamasika* (kemalasan). Sebab hasil dari upacara itu, bukan tindakan yang sadar dan aktif, tetapi sebuah kemalasan. Karena itu, pemaknaan upacara yang seperti ini tidak akan membebaskan, tetapi akan membelenggu manusia dari zaman ke zaman. Jadi, bila ingin mendapatkan pembebasan dari berbagai

bencana, manusia Bali mesti memberikan pemaknaan yang lebih baik dari upacara itu. Upacara mestilah dimaknai sebagai tonggak awal dari kesadaran manusia untuk memperbaiki dirinya. Jadi, upacara mestilah ditempatkan sebagai usaha awal manusia untuk membebaskan dirinya dari berbagai bencana. Atau upacara semestinyalah ditempatkan sebagai tonggak awal kesadaran manusia. Setelah upacara, manusia hendaknyalah bangkit untuk bekerja terus menerus agar bisa mencapai pembebasan.

Secara sadar, nenek moyang kita telah meletakkan tari sakral pada berbagai upacara kita. Tradisi ini kemudian mendapatkan pemaknaan sebagai Shivanataraja setelah zaman Hindu. Shiwanataraja (Tarian Shiwa), memiliki sebuah makna tindakan aktif untuk pembebasan. Tarian Shiwa memiliki dua gerakan utama, yaitu gerakan tangan yang disebut dengan *mudra* dan gerakan kaki yang disebut dengan *tandava*. Kedua gerakan ini mesti dilakukan untuk mencapai pembebasan. Jadi, kedua gerakan ini sebenarnya memiliki makna tindakan aktif untuk mencapai pembebasan. Pada bahasa sehari-hari orang Bali, tari diterjemahkan dengan kata *solah*. *Solah* juga sebenarnya berarti tindakan. Jadi upacara mestilah berisi tari yang mengandung makna usaha aktif manusia.

Kakawin Ramayana, secara lebih gamblang menjelaskan itu dalam syair *utsaha ta larapana* yang artinya usahalah yang menjadi penyebab untuk mendapatkan hasil. Pada konteks inilah, masyarakat Bali semestinya menempatkan pemaknaan upacara itu. Terlebih lagi, secara tradisi, masyarakat Bali memang memiliki tradisi kerja yang baik dalam sebuah organisasi yang disebut dengan *pakraman*. Usaha yang dilakukan dalam sistem ini adalah usaha yang dilandasi oleh sebuah solidaritas sosial yang tinggi. Sehingga mereka tidak akan terjebak ke dalam perilaku yang individualistik. Sebab pada kenyataannya, manusia memang tidak akan bisa mengatasi berbagai persoalannya sendiri. Jadi, manusia juga tidak akan bisa aman sendiri. Karena itulah, pada setiap doa umat Hindu, terdapat doa yang menyebutkan *lokasamestha sukhino bhawantu*, yang artinya semoga seluruh alam berbahagia.

Jadi, upacara *peneduh jagat* pun mesti ditempatkan dalam konteks ini. Yakni bukan untuk semata-mata keselamatan Bali, tetapi keselamatan seluruh alam semesta.

Agama Hindu menggunakan kata “Jagaddhita” yang artinya kebahagiaan seluruh dunia sebagai sebuah cita-cita. Sebab, Hinduisme sangat yakin manusia tidak akan bisa bahagia sendiri sementara yang lainnya menderita. Secara ekonomi, Amrtya Sen, ahli ekonomi dunia yang memperoleh Nobel membuktikan hal ini. Amrtya Sen menjelaskan bahwa kemakmuran suatu masyarakat yang tanpa usaha memakmurkan masyarakat lainnya, akan membuahkan kebangkrutan ekonomi. Sebab, produksi akan mencapai ambang yang sangat kecil di lingkup masyarakat yang makmur itu. Sedangkan masyarakat yang miskin tidak akan bisa membeli produk itu. Jadi, produksi akan terhenti pada ambang tertentu. Karena itu, untuk menghidupkan kembali produksi, membantu pembangunan masyarakat yang miskin menjadi sebuah keniscayaan. Inilah yang disebut Etika Ekonomi yang mesti diperhatikan saat ini.

Etika Ekonomi seperti itu sebenarnya merupakan moralitas sederhana yang sudah diajarkan secara turun menurun. Jadi, upacara masyarakat Bali mestilah dimaknai secara lebih luas seperti ini. Bahkan Tarian Manusia Bali mestilah menjadi *Shiwanataraja* yang bermakna tindakan yang membebaskan dunia dari belenggu penderitaan. Gunung Agung yang menjadi media upacara tersebut mestilah bisa dimaknai sebagai tempat penancapan obor pembebasan. Sehingga kemudian, sejarah bisa mencatat bahwa yang berusaha membebaskan dunia bukan hanya Tuan Bush -yang dalam pidotanya ingin menjadikan Amerika sebagai *Empire of Liberty* (Negara Pembebas), tetapi juga masyarakat Bali.

Upacara *peneduh jagat* jika dimaknai seperti itu, akan menjadi catatan usaha manusia untuk membebaskan dunia dari penderitaan. Karena itu, pasca upacara ini, manusia Bali mestilah menghilangkan kerakusan ekonominya, bahkan mesti berani melawan setiap tindakan yang mengeksploitasi alam demi

membebaskan dirinya, apalagi membebaskan masyarakat. Seseorang bisa mengalahkan maya bila mengetahui tentang kebenaran (*Brahmawidya*). Karena itulah, pada Gita pada Bab I menjelaskan tentang keraguan-raguan Arjuna. Kemudian pada Bab II, Shri Krishna menguraikan tentang *Brahmawidya Yoga Sastra* untuk membebaskan Arjuna dari belenggu keraguan (*maya*). Dalam *Brahmawidya* telah dijelaskan, lakukan kewajibanmu maka engkau akan mencapai kebahagiaan. Jadi, kerja keras juga merupakan pelajaran dari *Brahmawidya Yoga Sastra*.

Konsep-konsep inilah yang kemudian dijabarkan oleh penafsir Hindu modern, seperti Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi dan yang lainnya. Swami Vivekananda mengatakan, setiap orang adalah cahaya. Karena itu, setiap orang bisa mencapai pencerahan, jika ia melakukan kerja keras. Jadi, tidak hanya Bangsa Barat yang bisa mencapai puncak peradaban. Bangsa-bangsa timur pun bisa mencapainya, jika melakukan kerja keras. Karena setiap manusia memiliki potensi yang sama untuk maju. Pada titik inilah, Swami Vivekananda menyemangati bangsa-bangsa timur dengan mengatakan, bangkit, bangun, bergeraklah sampai tujuanmu tercapai. Jadi, tidak ada alasan bagi bangsa timur untuk merendahkan dan direndahkan. Karena mereka adalah cahaya-cahaya Brahman (*atman*). Sehingga mereka berpotensi berada dalam cahaya itu, apalagi hanya berada pada puncak peradaban.

Mpu Tanakung, penyair Jawa Kuno telah menguraikan itu dengan tuntas pada awal karyanya. *Dhyana*, *sthuti*, *kutamantra*, *japa* dan *mudra*, tidak lain adalah proses kerja itu sendiri. *Dhyana* artinya berkonsentrasi pada kerja. *Sthuti* artinya memohon berkatNya. *Kutamantra* artinya memiliki tujuan yang jelas. *Japa* artinya tidak bosan-bosannya melakukan percobaan-percobaan untuk mencapai tujuan, serta *mudra* artinya gerakan yang terus menerus. Jadi, semua itu adalah rangkaian kerja keras yang mesti dilakukan untuk memuja Sanghyang Shiwa. Jadi, mereka yang tidak melakukan kerja bukan seorang pemuja Shiwa. Karena itu, ia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Bahkan, ia akan terjerembab ke dalam Samsara (penderitaan yang terus menerus).

Shiwaratri, Gerakan Pembebasan Sosial

*Sanghyang ning hyang amurti niskala sirati-kineneping
akabwatan lango*

*Sthulakara sira pratisthita haneng hridayakalamadhy
nityasa*

*Dhyana mwanng stuti kutamantra japa mudra linekasaken ing
samangkana*

*Nghing pinrih-prih I citta ning hulun anugrahana tulusa
digjayeng lango*

(Shiwa yang tidak berwujud (*niskala*) selalu dipuja oleh mereka yang mengharapkan kebahagiaan, Beliau yang tak berwujud ini sebenarnya juga dapat berwujud dengan mengambil tempat di padma hati yang paling dalam *Dhyana* (konsentrasi pikiran), *sthuti* (pemujaan), *kutamantra* (mengkonsentrasikan mantra), *japa* (mengulang-ulang nama sucinya) dan *mudra* (gerak tangan) adalah cara-cara untuk memujanya. Tetapi yang hamba harapkan kepadanya, berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menganugrahi hamba kebahagiaan) (Kakawin Lubdaka, Canda Jagadhita bait pertama).

Minggu, 9 Januari 2005, umat Hindu di Bali memperingati hari suci Shiwaratri yang jatuh pada Purwaning Tilem Kapitu menurut perhitungan Kalender Bali. Hari suci ini dikenal sebagai hari penebusan dosa. Siapa pun yang melakukan *jagra* (jaga semalam suntuk) pada malam itu, dipercaya akan mendapatkan kebebasan (*moksha*). Karena malam itu merupakan malam yang penuh anugrah dari Sanghyang Shiwa. Benarkah demikian? Bagaimanakah kita memaknai kebebasan yang dijanjikan ini

dalam kehidupan sehari-hari, dimana kita menghadapi berbagai fenomena kehidupan?

Kutipan di depan yang merupakan petikan dari Kakawin Shiwatri Kalpa pada bagian awal karya tersebut mengisahkan sebuah pujian kepada Sanghyang Shiwa (Tuhan Yang Maha Esa). Sang penulis karya ini (Mpu Tanakung) pada syair tersebut menyampaikan maksud dari semua pemujaannya, yakni untuk mencapai *digjayeng lango* (mencapai kebahagiaan). Dalam usaha ini, Sang Mpu menyampaikan beberapa cara pemujaan, yaitu *dhyana* (konsentrasi pikiran), *Sthuti* (pemujaan), *kutamantra* (berkonsentrasi pada satu mantra), *japa* (mengulang nama Tuhan) dan *mudra* (gerak tangan). Jadi, pada awal karya besar ini, beliau telah mengulas cara untuk mencapai kebahagiaan.

Cara-cara tersebut tidak lain adalah praktik-praktik yoga. Praktik-praktik ini dapat dilakukan apabila seseorang melakukan gerakan dasar yaitu *yama-nyama brata* (berbagai bentuk pengendalian diri). Setelah melakukan itu, seseorang baru bisa melakukan *dhyana* (konsentrasi) sampai *samadhi* (pencapaian kesadaran yang sempurna). *Samadhi* adalah pencapaian yang tertinggi. Karena itu, *samadhi* juga merupakan pembebasan (*moksha*). Mencapai pembebasan berarti juga lepas dari segala penderitaan. Jadi, perjuangan manusia dari zaman ke zaman adalah sama, yakni melepaskan diri dari penderitaan, mencapai kebahagiaan.

Perjuangan untuk melepaskan diri dari penderitaan ini, salah satunya bisa dilakukan dengan *mudra* (gerak tangan) –seperti yang dinyatakan Mpu Tanakung dalam Kakawin Shiwatri Kalpa. Gerak tangan tiada lain adalah proses kerja. Jadi, secara tidak langsung, Sang Mpu telah mengatakan bahwa kerja (*mudra*) merupakan jalan pembebasan. Prinsip ini adalah prinsip dari *karmayoga*. Gita menyatakan, lakukan kewajibanmu (*karmany evadhikaras te*). Jadi, setiap orang mesti melakukan kewajibannya. Jika manusia tidak terlibat dalam proses kerja, ia tidak akan dapat membebaskan dirinya dari penderitaan, apalagi membebaskan masyarakat. Bahkan, orang yang mengharapkan kesejahteraan

tanpa mau bekerja, adalah seseorang yang menderita penyakit sosial. Mahatma Gandhi menyebutnya sebagai *welfare without work* (kesejahteraan yang tanpa kerja). Mahatma Gandhi memasukkan kesejahteraan tanpa kerja ke dalam tujuh dosa masyarakat (*seven social sins*). Dosa seperti ini jelas tidak akan mendatangkan kebahagiaan.

Oleh karena itu, Shiwatri yang merupakan malam penebusan dosa mesti dimaknai sebagai pembangunan kesadaran (*jagra*) untuk melenyapkan dosa masyarakat itu. Bahkan, malam kesadaran ini, mesti bisa dijadikan awal bagi sebuah tekad untuk bekerja keras bagi pembangunan peradaban manusia. Karena, pada kenyataannya, manusia kerap kali mencita-citakan sebuah kebahagiaan tanpa kerja keras. Sehingga mereka menciptakan mesin untuk mempermudah hidupnya. Tetapi mesin-mesin itu kemudian menjadi penyebab dari berpindahnya tanah-tanah petani kepada tuan-tuan tanah. Jadi, mesin-mesin itu ternyata tidak membuahkan kebahagiaan, bahkan menyebabkan penderitaan. Karena itu, seseorang yang *jagra* pada malam Shiwatri mestilah tidak terjebak dalam budaya seolah-olah (*maya*).

Budaya seolah-olah inilah yang menjadi keseharian masyarakat kekinian. Dengan membeli mesin cuci, seseorang berpikir akan hidup mudah. Tetapi ternyata setiap bulan, mereka mesti memikirkan pembengkakan biaya listrik. Demikian juga mesin-mesin lainnya. Jadi, semua itu hanya ilusi belaka. Tidak ada yang memudahkan hidup manusia yang sebenarnya. Karena itu, berhayal terhadap berbagai kemudahan, sebenarnya adalah dosa sosial. Sebab, tanah-tanah akan berpindah karena hayalan ini. Pada masyarakat kita, setiap orang mungkin telah mulai memperhatikan bahwa bagaimana tanah-tanah kita telah berpindah tangan, hanya karena generasi kita ingin menjadi “buruh”. Jadi, maya telah membawa tuan tanah bercita-cita menjadi buruh. Alangkah lucunya.

Pada kondisi ini, Weda-weda mengajarkan jalan pembebasan, dengan mengalahkan maya (budaya seolah-olah). Jika seseorang masih terjebak dalam maya maka ia tidak akan dapat

Di tengah-tengah krisis kemanusiaan seperti inilah, *Semaradahana* mesti menjadi perenungan bersama. Sebab karya itu mengajarkan tentang cinta sejati, yaitu perasaan yang bersekutu dengan sifat-sifat kedewataan (pencerahan). Jika kita bisa memahami dan menghayati hal ini maka selanjutnya kita tentu akan bisa berbicara tentang pembebasan. Pembebasan, atau dalam istilah Hindu disebut *moksha* adalah terbebasnya manusia dari segala jenis penderitaan. Itulah yang sesungguhnya menjadi tujuan daripada cinta yaitu kebahagiaan. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila cinta terwujud dalam bentuk-bentuk pelayanan, bukan kepemilikan atau “kuasa”. Konsep cinta kasih seperti inilah yang dikembangkan oleh Swami Vivekananda dalam realitas sosial, yaitu pelayanan kepada sesama.

Konsep seperti ini sebenarnya lahir dari ajaran bhakti (cinta kasih) yang diajarkan oleh Mahaguru Ramanuja sekitar abad ke-10 Masehi. Ajaran ini sebenarnya juga mendapatkan pengaruh dari filsafat Samkya yang dikembangkan Rsi Kapila. Maharsi ini mengajarkan tentang 26 taw (hakikat) dalam proses penciptaan. Gerak yang tertinggi dan terhalus dari perkembangan ini adalah gerak *purusha* (positif) dan *pradhana* (negative). Pada gerak ini, gerakan *pradhana* yang mengelilingi *purusha* semata-mata terjadi untuk menumbuhkembangkan proses selanjutnya. Jadi gerakannya adalah gerakan “pelayanan” untuk menumbuhkan daya kreasi dari objek gerakan (*purusha*). Ajaran ini selanjutnya berkembang menjadi ajaran *bhakti* kepada Tuhan dalam bentuk vertikal (pemujaan).

Inspirasi Pakraman

Swami Vivekananda kemudian mengembangkan konsep ini dalam bentuk horizontal (aspek sosial). Sebab Tuhan sesungguhnya juga berada dalam seluruh ciptaanNya. Karena itu, pelayanan terhadap manusia juga termasuk pelayanan terhadap Tuhan. Mahatma Gandhi selanjutnya mengembangkannya dalam bentuk gerakan sosial yang bernama *sevagram* atau pelayanan yang dilakukan di pedesaan. Sebab konsep-konsep kasih sayang

Oleh karena itu, Shivaratri mestilah dimaknai sebagai kesadaran baru manusia (*jagra*) untuk membebaskan dirinya dari penderitaan, yakni dengan melakukan kerja keras. Orang-orang barat bisa memajukan kebudayaan dengan melakukan kerja keras. Mereka kembali mengungkap filsafat-filsafat kuno pada zaman Yunani Kuno pada zaman Renaissance untuk mencapai kemajuan peradabannya. Mereka mengesampingkan semua dogma yang menenggelamkan mereka berabad-abad. Akhirnya, mereka kemudian bisa memimpin dunia. Karena itu, pada saat ini, tiba saatnya, masyarakat timur (Hindu) untuk memutar kembali ajaran-ajaran kuno untuk mencapai pencerahannya sendiri. Sebuah masyarakat atau manusia akan mencapai pencerahannya dengan usahanya sendiri. *Yama-nyama brata* mengatakan, *swadyaya* yang artinya hanya bergantung pada dirinya sendiri. Jadi, orang lainnya hanya bisa menjadi pembanding. Jadi, Shivaratri yang bertepatan jatuh pada awal Tahun 2005 ini mestilah bisa dijadikan tonggak bagi perjuangan manusia untuk melepaskan dirinya dari penderitaan dengan usaha sendiri (kerja keras).

*“Om Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotir gamaya,
mrtyor ma amrtam gamaya, lokasamestha sukhino bhavantu,
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om”*

(Semoga hamba digerakkan dari ketidakbenaran menuju kebenaran,
dari kegelapan menuju pencerahan, dari kematian menuju kehidupan yang abadi,
semoga seluruh alam berbahagian, semoga damai selalu).

Cinta, Krisis Kemanusiaan dan Pembebasan

Pada 14 Februari, banyak orang yang merayakan Valentine Day, atau hari kasih sayang. Pada hari inilah, sepasang kekasih mungkin berbagi kasih sayang dengan bunga mawar atau yang lainnya. Hari seperti itu tentulah hari yang membahagiakan. Sebab kasih atau cinta mekar pada banyak hati manusia. Tetapi mekarnya cinta kasih manusia, tidak pernah menyurutkan berbagai tindak kekerasan di dunia ini. Setiap saat, kita masih mendengar berbagai kasus kekerasan dengan segala bentuknya. Mereka yang melakukan tindak kekerasan ini adalah orang-orang yang lahir dari kasih sayang ibu dan bapaknya. Mereka juga punya kekasih yang dicintainya. Bagaimana mungkin jiwa yang begitu lembut bisa menjadi kejam dalam waktu yang bersamaan? Apakah yang sesungguhnya sedang terjadi pada diri pencinta-pencinta ini?

Sastra Jawa Kuno yang berkembang di Bali, memiliki satu karya tentang cinta yang berjudul *Semaradahana*, yang artinya kehancuran cinta. Karya ini menceritakan kemarahan Dewa Shiwa yang tapanya hendak digoda kekuatan cinta yang muncul dari Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih. Dewa Shiwa kemudian membakar kekuatan cinta ini dengan mata ketiganya (*tri netra*). Sehingga cinta selanjutnya hancur (*dahana*). Ketika cinta hancur, alam semesta terus bersimbah air mata. Alam itu seakan-akan terus bergerak menuju kehancuran.

Oleh karena itu, Dewa Shiwa kemudian menghidupkan kembali cinta (*kama*). Namun Beliau menyatukan kekuatan cinta dengan Dirinya. Sehingga kekuatan cinta kemudian disebar di seluruh alam semesta, seperti juga diriNya yang tersebar di seluruh alam semesta sebagai jiwa. Jadi, Shiwa kemudian menyatukan diriNya dengan cinta. Sehingga Beliau selanjutnya juga bernama *Kameswara* (Tuhannya para pencinta). Jadi, Shiwa seterusnya menjadi Pencinta yang Agung. Proses ini seterusnya melahirkan

Sang Penyelamat yang bernama Dewa Ganesha yang berwajah gajah. Putra Shiwa dengan Dewi Parwati ini kemudian menjadi penghancur musuh para dewa, yaitu Raksasa Nilarudraka. Karena itulah jika seseorang ingin mendapatkan keselamatan mesti memuja Shiwa (Tuhan) dengan cinta (bhakti).

Pada konteks ini, cinta benar-benar melahirkan keselamatan, karena ia dilekatkan pada aspek kedewataan yang ada dalam diri Shiwa. Itulah sesungguhnya cinta yang sejati, yaitu cinta yang bersekutu dengan sifat-sifat kedewataan. Tetapi jika perasaan ini bersekutu dengan sifat-sifat keraksasaan (*asura*) maka perasaan ini tidak akan lagi menjadi cinta. Perasaan seperti itu hanya akan mengembangkan keterikatan, kepemilikan dan nafsu. Sifat-sifat seperti ini –seperti yang dinyatakan Bhagavad Gita Bab II- hanya akan melahirkan kemarahan (*krodha*). Kemarahan hanya akan melahirkan kebingungan. Kebingungan akan menghancurkan pengetahuan. Jika pengetahuan hancur, tidak akan ada kebijaksanaan. Jika tidak ada kebijaksanaan maka sang diri akan semakin tenggelam ke dalam penderitaan.

Krisis kemanusiaan sebenarnya bermula dari hal itu. Manusia kerap kali melekatkan cinta dengan keterikatan yang selanjutnya berkembang menjadi kepemilikan. Sehingga bahasa cinta kemudian menjadi bahasa “kuasa”. Selanjutnya, cinta mendapatkan makna sebagai “kepatuhan”. Dalam makna seperti ini, cinta menjadi membelenggu. Sehingga ia kemudian menampilkan wujudnya yang sangat menakutkan, yaitu dalam bentuk teror atas nama cinta. Bukankah kita sering mendengar teror-teror seperti itu atas nama cinta terhadap negara, bahkan cinta terhadap Tuhan? Inilah tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi, dimana cinta yang lembut ditampilkan dalam bentuk kekerasan. Ini juga sangat menyedihkan sebab cinta yang seharusnya ditampilkan dalam bentuk “pelayanan”, kemudian ditampilkan dalam bentuk kekuasaan yang berisi perintah, disiplin dan kepatuhan. Dalam penjabaran seperti inilah, kita kemudian dapat mengerti mengapa mereka yang mengaku mencintai mewarnai dirinya dengan kekerasan?

menjadi 210 hari dengan sistem *pawukon*. Hal ini berarti, raja-raja Bali perantaraan ini telah melakukan berbagai percepatan manajemen kerja di Bali. Hitungan musim tanam yang setiap tahun sekali, telah dipercepat menjadi setiap enam bulan sekali, searah dengan perputaran musim di Bali yang lebih pendek. Dengan percepatan ini, persediaan bahan pangan diharapkan semakin melimpah, untuk dipersembahkan dalam upacara besar kemenangan (Galungan dan Kuningan) yang berlangsung setiap 210 hari.

Produktivitas pangan yang berlimpah mendorong kebijakan perdagangan, sehingga raja-raja Bali yang pernah merantau ke Jawa ini, kemudian membuka hubungan perdagangan dengan Cina. Raja Jayapangus misalnya, menikahi putri Cina untuk memperlancar hubungan perdagangan dengan Bali. Dengan dibukanya pantai-pantai Bali, pertukaran kebudayaanpun terjadi. Perayaan Galungan dan Kuningan kemudian dimeriahkan dengan pertunjukkan *barong* yang berasal dari Cina. Adonan makanannyaupun –yang sebagian untuk persembahkan- merupakan olahan babi yang merupakan pengaruh Cina. Bali rupanya menjadi daerah yang sejahtera ketika itu sampai zaman Sri Astasura Ratnabumi Banten pada abad ke-13 Masehi yang ditaklukkan Majapahit karena menyaingi pengaruh perdagangan Majapahit yang besar.

Raja-raja Bali berikutnya yang berasal dari Jawa (Dinasti Kepakisan dari Majapahit) meneruskan tradisi ini. Raja-raja ini menghormati tradisi-tradisi lama, bahkan mengakui otoritas pembangun kebudayaan Bali sebelumnya. Namun pusat-pusat perdagangan kemudian dipusatkan ke Majapahit, sehingga Bali hanya menjadi daerah sub-perdagangan dengan dunia luar. Jadi, tradisi Majapahit tidak membawa perubahan berarti di Bali, kecuali tatanan birokrasi yang sangat hirarkis, dengan pembangunan kelas sosial yang tertutup. Jadi, perubahan terbesar di Bali sebenarnya terjadi ketika keturunan Bali rantauan (Airlangga) memerintah Bali, dengan melakukan percepatan musim tanam untuk meningkatkan produktivitas pangan dan

kepada sesama memang masih tumbuh dan berkembang di pedesaan. Ajaran ini sejalan dengan tujuan pakraman di Bali yang mengusung nilai cinta kasih kepada sesama.

Oleh karena itulah, masyarakat Bali perlu mencari inspirasi dari perkembangan pemikiran ini. Sebab seringkali juga pakramanyang berlandaskan cinta kasih muncul dalam bentuk “kuasa”, bukan pelayanan. Sehingga *rasa* dalam diri masyarakat tidak lagi menjadi mekar. Jika *rasa* tidak mekar maka kebudayaan tidak akan bertumbuh dengan baik, bahkan bisa tenggelam. Manusia pada titik itu, kemudian hanya akan menjadi alat “kuasa”. Sebagai alat “kuasa”, ia akan menjadi kaku, beku dan tanpa ampun. Bahkan bisa mengabaikan nilai kemanusiaan demi ajegnya “kuasa” yang diyakini memberikan kenikmatan bagi yang memilikinya. Perkembangan seperti itu –jika terus terjadi- akan sangat manakutkan sebab akan merongrong landasan berpikir dari pola pakraman seperti itu.

Jadi, konsep *parahyangan* (kedewataan) yang dilekatkan pada *pawongan* (kemanusiaan) dan *palemahan* (lingkungan) mesti dimaknai secara utuh. Semua itu mesti dimaknai sebagai pelekatan sifat-sifat kedewataan dalam hubungan manusia dengan manusia atau dengan lingkungannya. Sebab hanya melalui kelekatan inilah, manusia akan dapat menghayati cinta sejati. Yaitu cinta yang mesti terwujud dengan pelayanan. Hanya dalam konteks seperti inilah, pakraman akan dapat diwujudkan sebagai bentuk gerakan pembebasan manusia dari penderitaan. Itulah sesungguhnya hakikat dari Hinduisme yang terwujud dalam tatanan masyarakat desa di Bali.

Setiap saat, masyarakat Bali semestinya bisa menelaah persoalan ini. Bahkan pada Valentine Day yang tentunya masih baru di Bali, kita bisa merenungkan landasan berpikir kita. Kesadaran bisa datang dari mana pun juga. Apalagi kesadaran tentang cinta tergolong sangat purba dalam peradaban masyarakat Bali. Meskipun masyarakat ini –memang harus diakui- sempat menampilkan warna-warna kekerasan yang mengejutkan. Tetapi itulah kenyataan manusia. Setiap saat, mereka bisa berada dalam

ketidaksadaran. Karena itulah, perlu usaha penyadaran setiap waktu. Sehingga manusia Bali senantiasa teringat pada tujuan utamanya, yaitu kebahagiaan. Jika mereka teringat, mereka tentu mesti “ambek paramartha” atau berperilaku sebagai orang yang memiliki tujuan utama. “Ambek paramartha” itu adalah pelayanan yang tanpa pemrih. Inilah konsep “ngayah” (pelayanan) yang berkembang dalam keseharian masyarakat Bali. Jadi jika ingin memajukan peradaban, cinta kasih adalah jalannya –bukan kekerasan.



“Bali Rantau” Memimpin, Semangat Baru Kesejarahan Bali

Pasangan Mangku Pastika–Puspayoga akhirnya memenangkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Pasangan ini mengemban berbagai visi perubahan yang diamanatkan masyarakat Bali. Salah satunya adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat Bali, disamping amanat-amanat lainnya seperti menjaga keamanan Bali. Mangku Pastika yang akan menjadi orang nomer satu di Bali merupakan orang Bali perantauan yang akan memberikan sentuhan bagi “kampungnya”. Bagaimanakah jalinan unik Bali asli dan Bali perantauan mewujudkan bentuk pembangunan masyarakat Bali ke depan?

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang telah menapaki sejarah panjang peradaban umat manusia. Pada abad ke-7 Masehi, seorang pendatang dari Desa Aga-Jawa Timur, Rsi Markendya menanamkan pengaruhnya yang besar di Bali. Beliau mengajarkan masyarakat Bali untuk membangun saluran irigasi yang baik, sehingga bisa bertani dengan pola menetap. Pada abad ke-9 Masehi, paduan Jawa-Bali (Mahendra Datta – Udayana Warmadewa) memerintah Bali. Pasangan Jawa-Bali ini memberikan pengaruh bahasa tulis kepada masyarakat Bali.

Pada abad ke-12 Masehi, keturunan Airlangga yang telah merantau ke Jawa, kembali memerintah Bali. Raja-raja keturunan Airlangga ini menggunakan gelar *jaya* yang berarti kemenangan. Raja-raja Bali perantauan ini meninggalkan pengaruh perayaan Galungan dan Kuningan kepada masyarakat Bali. Pada tataran menejemen waktu, Bali perantauan ini menanamkan pengaruh sistem perhitungan waktu yang disebut dengan *pawukon* yang mengambil siklus 210 hari, untuk merayakan hari kemenangan (Galungan dan Kuningan).

Secara menejemen waktu, putaran tahun masyarakat Bali dipercepat dari 365 hari (berdasarkan perhitungan tahun matahari)

Perspektif Dharma dalam Penghapusan Subsidi BBM

Pemerintah sedang berada dalam dilema untuk menghapuskan atau mengurangi subsidi BBM. IMF mendesak penghapusan subsidi BBM untuk menyehatkan perekonomian negara ini. Tetapi, penghapusan subsidi BBM jelas akan menaikkan harga-harga barang, karena kenaikan biaya-biaya pengiriman. Walaupun demikian, memberikan subsidi BBM pun bukanlah pekerjaan mudah. Pemerintah sedikitnya harus menyediakan dana subsidi sekitar Rp. 120 Triliyun untuk mempertahankan harga minyak seperti saat ini. Apakah yang bisa dilakukan menghadapi fenomena ini? Bagaimanakah dharma (nilai hidup yang paling esensial) memandang fenomena ini?

Fenomena kenaikan harga minyak di pasar dunia telah membuktikan sebuah kenyataan besar dari pernyataan Isopanisad, salah satu kitab suci agama Hindu. Isopanisad menyatakan, Tuhan adalah pemilik segalanya (*isawasyam idam sarwam*). Karena itu, manusia hanya bisa mengambil segala sesuatu yang ada sesuai dengan kebutuhannya (sesuai jatah). Manusia tidak bisa mengambil segala sesuatu secara berlebihan. Sebab jika mereka mengambil berlebihan, mereka jelas akan mengambil jatah orang lain. Bahkan, jika manusia berkeinginan mengambil segala sesuatunya secara berlebihan, maka hukum alam (*rta*) akan memaksanya untuk menghargai prinsip-prinsip ketuhanan ini.

Rta tersebut telah terjadi saat ini. Hukum pasar kemudian menghentikan kerakusan manusia terhadap minyak bumi –dengan menaikkan harganya. Kenaikan harga ini jelas telah mendorong manusia untuk selalu berada pada prinsip-prinsip ketuhanan (dharma). Yaitu bahwa manusia mesti senantiasa efisien menggunakan milik Tuhan. Inefisiensi (keborosan) hanya akan menyebabkan kehancuran. Jadi, manusia mesti hanya mengambil

membuka perdagangan langsung dengan dunia luar. Bagaimanakah ketika Bali rantauan pada era modern ini kembali memimpin Bali? Adakah Bali bisa melakukan berbagai percepatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya?

Percepatan Ekonomi

Kepemimpinan Bali pada lima tahun ke depan memiliki peluang yang besar untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi, seperti era kepemimpinan keturunan Airlangga di Bali. Kepemimpinan yang berbasis pengalaman pengaturan keamanan yang kuat mestinya bisa mendorong percepatan pembangunan pariwisata. Rentang antara “musim sepi” dan “musim ramai” pariwisata yang panjang (enam bulan) seharusnya bisa diperpendak menjadi tiga bulan dengan kreativitas-kreativitas yang memadai di dunia pariwisata. Misalnya melalui pengembangan pariwisata konvensi yang memerlukan tingkat pengamanan yang lebih besar.

Perkembangan pariwisata seperti itu hendaknya bisa mendorong perkembangan bandara Ngurah Rai, sehingga Bali bisa menjadi pintu gerbang utama Indonesia. Karena pembangunan citra Indonesia bisa dimulai dari Bali. Bahkan lebih jauh lagi, Bali bisa menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas menuju benua selatan dan Asia Timur. Pengaruh-pengaruh buruk dari lalu-lintas seperti itu, misalnya Narkoba dan sejenisnya, seharusnya bisa dideteksi sedini mungkin karena jaringan keamanan yang memadai dari kepemimpinan yang kuat di bidang itu.

Percepatan pengembangan dunia pariwisata seperti ini, hendaknya bisa didukung dengan produktivitas pertanian yang berkualitas dan memadai. Sehingga sektor ini bisa mendukung sektor pariwisata melalui penyediaan bahan-bahan pangan yang berkualitas standar internasional. Sambungan antara kedua sektor ini semestinya terbangun dengan baik, untuk menyeimbangkan kesenjangan ekonomi perkotaan dan pedesaan. Sehingga Bali menjadi satu kesatuan pembangunan ekonomi yang utuh. Dengan

demikian, percepatan tidak hanya terjadi di sektor jasa (pariwisata) tetapi juga terjadi di sektor produksi.

Akulturasasi Kebudayaan

Lalu-lintas seperti ini sudah tentu mengandung konsekuensi bagi masyarakat Bali. Misalnya persentuhan kebudayaan dan sejenisnya. Namun masyarakat Bali sebenarnya memiliki pengalaman yang cukup dalam persentuhan kebudayaan seperti ini. Bahkan orang-orang Bali terkenal sangat pintar untuk melakukan akulturasasi kebudayaan. Seperti akulturasasi tari barong yang berasal dari Cina dengan kebudayaan Bali. Tarian ini, bahkan bisa masuk ke dalam khasanah spiritual masyarakat Bali, dalam bentuk upacara tolak bala.

Pada era modern ini, akulturasasi kebudayaan dalam bentuk kesenian-kesenian kontemporer akan mendorong pembangunan budaya pop di Bali. Sehingga Bali tidak hanya terkenal sebagai pusat kebudayaan klasik, tetapi telah mampu juga mengembangkan kebudayaan-kebudayaan populer. Bukankah demokrasi juga merupakan kebudayaan populer yang sedang terbangun di Bali? Pada akulturasasi kebudayaan seperti itu, etnisitas Bali yang kuat mesti bisa terbangun, sehingga terbangun sebuah kebudayaan yang unik untuk mengundang perhatian dunia. Bukankah keunikan Bali merupakan salah satu daya tarik pariwisata dunia?

Berbagai percepatan pembangunan seperti itu jelas mengandung konsekuensi bagi masyarakat Bali. Tetapi Bali sudah selayaknya memikirkan hal tersebut. Setiap masyarakat tidak boleh takut dengan berbagai tantangan zaman. Setiap masyarakat mesti menaklukkan tantangan zaman tersebut. Mahatma Gandhi berkata “berenang dalam lautan tradisi adalah sesuatu yang baik tetapi tenggelam di dalamnya adalah bunuh diri”. Mengarungi kebudayaan Bali yang membangkitkan gairah adalah sesuatu yang mengasyikan. Tetapi jika karena itu, masyarakat Balimenutup dirinya terhadap dunia luar, itu adalah bunuh diri. Setiap bangsa memerlukan persahabatan dengan bangsa-bangsa lainnya, untuk

pembangunan dirinya. Jadi, tentu sangat tidak beralasan bila Bali menutup diri.



pelajaran ini sebagai dharma (kebajikan), mereka akan bergerak menuju keselamatan. Penderitaan sesaat –karena *brata*- akan memberikan inspirasi yang besar untuk mengembangkan ide-ide besar. Diantaranya energi alternatif, transportasi publik yang murah, tarif telpon yang murah dan sejenisnya. Oleh karena itu, penghapusan atau pengurangan subsidi BBM, adalah jalan dharma menuju keselamatan. Sebab, pada titik itu, kita mulai bisa melihat dan mempertimbangkan keberadaan Pertamina (perusahaan minyak negara) yang sudah tidak lagi bisa berperan optimal untuk membantu masyarakat. Jadi, jika pasar adalah kenyataan, kenapa harus ada Pertamina?



jatahnya, dengan tidak menginginkan jatah orang lain (*tena tyuktena bhunjitha ma grdhah kasya svid dhanam*).

Pernyataan Isopanisad ini merupakan sebuah renungan untuk memutuskan penghapusan atau pengurangan subsidi BBM. Bagaimana pun, masyarakat Indonesia mesti menyadari bahwa hukum alam (*rta*) telah memaksanya untuk bertindak efisien. Karena itu, masyarakat mesti melakukannya. Jika masyarakat tidak melakukannya, tetapi tetap menuntut subsidi BBM, maka itu sama dengan mengembangkan kerakusan. Sebab, pada saat yang sama, sebagian masyarakat yang demikian, sebenarnya telah berkeinginan untuk mengambil jatah orang lain. Yakni dana masyarakat yang sebesar Rp 120 Triliyun. Dana tersebut sebenarnya adalah dana untuk orang-orang yang tidak beruntung. Diantaranya adalah dana untuk 30 juta pengangguran yang tersebar di semua wilayah di negara ini. Jika dana tersebut dibagikan saja (ambil mudahnya) kepada 30 juta pengangguran, maka setiap penganggur akan mendapatkan sekitar Rp. 4 juta per tahun, atau sekitar Rp. 300 ribu lebih per bulan.

Jika kemudian, pemerintah melemparkan jatah tersebut untuk subsidi BBM maka persoalan 30 juta pengangguran tidak akan bisa terselesaikan. Masyarakat juga tidak akan terbiasa melakukan penghematan BBM, sebab BBM masih murah. Bahkan yang akan lebih menyakitkan adalah, bahwa sebagian masyarakat akan menghitung keuntungan dari pengurangan biaya-biaya yang disebabkan oleh pengambilan jatah untuk orang-orang tidak beruntung. Keuntungan dari pengurangan jatah untuk orang miskin, adalah ketamakan. Ketamakan adalah adharma (ketidakbenaran).

Setiap ketidakbenaran jelas memerlukan biaya yang sangat mahal. Sebab jika nanti hukum alam (*rta*) memaksa ketidakbenaran menjadi kebenaran, maka sakitnya akan terasa sangat keras. Itulah yang disebut manusia sebagai “bencana”. Itulah yang disebut pemerintah sebagai “krisis”, untuk menghaluskan kondisi bencana. Jadi, mau tidak mau, manusia mesti mengikuti hukum alam. Karena itu, manusia mesti berhemat

(efisien) di segala bidang. Semua hal ini memang tidak mudah. Bahkan, seluruh Maharsi pun telah mengatakan, semua itu tidak mudah. Sebab, manusia memiliki keinginan yang tak terbatas (*Kama*).

Pengendalian Diri

Jika manusia mengikuti keinginan yang tak terbatas ini (*kama*), mereka akan mengalami kehancuran. Karena itu, manusia mesti mengendalikan keinginannya dan hanya bertumpu pada keinginan-keinginan terhadap kebutuhan mendasar. Manusia hendaknya tidak menginginkan segala sesuatu yang memang tidak dibutuhkan. Sebab, tindakan tersebut jelas hanya akan mengembangkan ketamakan. Dalam usaha mengendalikan keinginan ini, Weda-weda mengajarkan *brata* (pengendalian diri). Jika manusia ingin mencapai keselamatan, mereka harus melakukan *brata*. Jika tidak melakukan *brata*, manusia akan menyongsong kehancurannya sendiri. Sebab tidak ada keselamatan apa pun yang bisa diperoleh tanpa pengendalian diri (*brata*).

Demikianlah Weda-weda dalam praktek-praktek yoga mengajarkan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Ajaran ini benar-benar bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan masa kini. Pada saat ini, di tengah eksploitasi alam yang berlebihan, manusia jelas dituntut untuk melakukan *brata*. Jika manusia mengembangkan ketamakan, alam akan mengalami kehancuran. Peradaban manusia pun akan hancur. Jika itu terjadi, itu bukanlah takdir Tuhan –tetapi merupakan akibat-akibat perbuatan manusia. Jadi, Hindu memang mengajarkan refleksi diri, bukan menyalahkan takdir apalagi menyalahkan Tuhan.

Kebijakan-kebijakan di Bali mengatakan, keinginan sebagai *segara agung tanpa tepi* (samudra yang tak terbatas). Jika manusia mengejanya, mereka akan tenggelam ke dasar samudra. Manusia yang demikian tidak akan mendapatkan apa-apa, seperti mengejar tapak kaki burung di udara (*tampakung kuntul angalayang*). Karena itu, masyarakat tentulah mesti memikirkan tindakan-tindakan

efisien untuk memelihara sumber daya alam. Prinsip-prinsip ekonomi juga menuntut hal itu. Suatu negara yang tidak bisa mengembangkan efisiensi akan kalah dalam persaingan ekonomi global. Kalah dalam persaingan global berarti akan kehilangan kemampuan untuk memproduksi. Kehilangan kemampuan untuk memproduksi jelas hanya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai budak –yang tidak akan memiliki faktor-faktor produksi.

Kenyataan ekonomi seperti ini semakin membenarkan ajaran kuno tentang *kama* (keinginan). Weda-weda mengatakan, mereka yang terjerembab dalam keinginan, akan menjadi budak. Budak jelas tidak akan memiliki kecerdasan. Orang yang tidak memiliki kecerdasan, tidak akan pernah bisa mengalami pencerahan.

Mereka senantiasa akan berada dalam kegelapan. Keggelapan adalah kepengapan, kemiskinan dan sejenisnya. Jadi, perjuangan manusia yang paling esensial, adalah melepaskan dirinya dari perbudakan. Hindu menyebutnya sebagai *moksha* (pembebasan).

Ajaran pembebasan ini sebenarnya bukanlah dominasi pemahaman spiritual individual. Ajaran pembebasan ini sebenarnya juga bisa menjadi inspirasi bagi sebuah pergerakan sosial. Sebab, prinsip-prinsip ini adalah prinsip universal. Setiap orang, baik individu maupun berkelompok, mesti melakukan hal yang sama untuk mencapai pembebasan. Hal-hal yang sama itu,

adalah *brata* (pengendalian diri). Jadi, fenomena penghapusan

BBM ini adalah fenomena yang baik untuk memaksa kita melakukan *brata*. Seorang *sisya* (murid) yang kesadarannya belum tumbuh memang mesti dipaksa gurunya untuk melakukan *brata*. Kini guru kita yang abadi (hukum alam) memaksa kita belajar untuk melakukan *brata*. Akankah kita lulus, dan bisa berangkat menuju pembebasan? Jika kita tidak lulus maka kita harus mengulang penderitaan-penderitaan lagi agar bisa belajar melakukan *brata*.

Oleh karena itu, fenomena kenaikan harga BBM adalah pelajaran berharga dari guru yang abadi (hukum alam). Jika manusia tidak mengikuti pelajaran ini, mereka akan mengulangi penderitaan-penderitaan yang sama. Tetapi jika mereka mengikuti

Pertunjukkan kembang api yang membawa korban jiwapun terjadi. Pertunjukkan ini kemudian dilengkapi dengan upacara yang bernama Karipubaya. Upacara itu mempertontonkan bahwa mereka yang berlaku seperti binatang (*disorder*), akan segera dikorbankan. Upacara ini juga menunjukkan teror yang berbasis kultural bagi para teroris. Teror ini mampu membangun kembali pungli atas nama keharmonisan. Penertiban penduduk pendatang misalnya, memberikan celah baru bagi adanya pungli. Pos-pos pengamanan swasta bagi perusahaan-perusahaan besar, merupakan bisnis baru setelah teror tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kita belum bisa lepas dari teror. Anggaran negara untuk membiayai keamanan terasa tidak cukup, untuk membangun keamanan nasional. Masyarakat perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk menciptakan keamanan bagi diri dan keluarganya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kultur kita masih sangat menghambat pengembangan potensi ekonomi secara optimal. Sebab masih ada sekelompok masyarakat yang masih tidak mau bekerja, tetapi ingin mendapatkan bagian dari proses ekonomi. Mereka adalah benalu pada tanaman kurus yang sedang tumbuh.

Negara tidak boleh membiarkan kondisi ini berlangsung terus. Negara harus membangun ketegasannya sebagai pelindung hak-hak sipil. Negara bertanggungjawab untuk menghentikan segala jenis teror, bukan membiarkan perkembangan teror baru atau menjadi bagian dari teror. Jika negara masih menjadi bagian dari teror maka negara Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi *antithesa* dari kondisi sebelumnya, yaitu kolonialisme dan feodalisme. Jika itu terjadi, itu artinya kita kehilangan harapan untuk membangun masyarakat yang mandiri, cerdas dan sejahtera.

Bom Bali, Lanjutan Teror Kultural

Pada 12 Oktober 2002, Bali mengalami peristiwa yang mengejutkan. Bom meledak di Kuta, menewaskan 202 orang dan mencederai 209 orang. Peristiwa ini tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bali terkenal sangat damai, memiliki toleransi yang tinggi tetapi kepentingan sesaat, telah menjadikan Bali sebagai medan perang. Medan perang inipun tidak hanya di Bali, tetapi terus melebar ke seluruh Indonesia sehingga teroris kemudian menjadi ancaman nasional dan dunia yang menakutkan.

Bali memiliki pengalaman yang menyakitkan tentang bom, tetapi sekaligus memberikan harapan baru tentang solidaritas sosial yang lebih baik. Pasca bom, terdapat gerakan-gerakan untuk melakukan doa bersama, yang mengambil tema doa perdamaian. Dialog-dialog keagamaan pun semakin sering, dengan menghadirkan tokoh berbagai agama. Jembatan-jembatan dialog pun terbangun. Bahkan komunitas-komunitas kecil keagamaan pun dapat ikut bersama-sama mendoakan kedamaian. Suasana saling memahami mulai terbangun.

Fenomena ini menunjukkan relasi baru masyarakat Bali dalam membangun keharmonisan yaitu melalui doa bersama. Selama bertahun-tahun, masyarakat Bali mendapatkan pengalaman teror dalam membangun keharmonisan. Pada sekitar abad ke-17 – 19 Masehi, perang saudara antara sembilan kerajaan di Bali, membangun teror di mana-mana. Kolonial Belanda pada abad ke-20 Masehi, menggantikan teror itu dengan ketakutan terhadap terulangnya lagi perang yang menyakitkan. Pemerintah kolonial Jepang juga melanjutkan teror tersebut, dengan mengambil para pemuda untuk romusha (kerja paksa).

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945 – 1949) teror juga terjadi dimana-mana. Pasukan NICA mengintrograsi penduduk lokal yang belum lepas sama sekali dari ketakutan, untuk mencari para pejuang republik. Era 1950 – 1966, teror politik menghantui

sejarah Bali. Terjadi juga pemberontakan seporadis karena ketidakpuasan para pejuang terhadap kebijakan Soekarno, terutama terhadap politik merangkulnya, yang merangkul bekas musuh-musuh republik. Pasca Orde baru, teror atas nama stabilitas menjejala dimana-mana. Mereka yang memiliki perbedaan, bahkan sebatas perbedaan kepercayaan terus diintai atas nama stabilitas nasional, kata baru keharmonisan yang lebih bernuansa kultural.

Pasca reformasi, teror-teror mulai redup, tetapi teror baru yang bernama “bom” menghantui masyarakat Bali. Setelah Bom yang pertama, bom kedua menyusul. Teror ini semakin melengkapi teror-teror yang ada selama 300 tahun. Pada kurun waktu tersebut, masyarakat Bali berada dalam ketakutan, untuk berpendapat dan mengembangkan potensi dirinya. Pembangunan keharmonisan yang diidamkan ternyata telah merengut begitu banyak kesempatan anak-anak untuk tumbuh cerdas. Anak-anak benar-benar telah kehilangan kesempatan untuk melihat Tuhan karena kekuasaan telah melepaskan “hantu” dimana-mana.

Secara kultural, ini menjelma ke dalam tradisi *caru* (upacara pengorbanan binatang). Pada tradisi tersebut, masyarakat diberikan pertunjukkan bahwa keharmonisan memerlukan pengorbanan daging dan darah, sehingga pembunuhan atas nama keharmonisan mendapatkan membenaran. Tetapi korban-korban ini telah semakin beradab dari zaman ke zaman. Secara mitologi, korban ini bermula dari korban manusia seperti yang dikisahkan pada kisah Kuntisraya di Bali, dimana Kunti diwajibkan untuk mengorbankan anak kesayangannya, Sadewa. Korban ini kemudian diurungkan atas nama dharma (peradaban baru) yang melarang pengorbanan manusia. Pengorbanan manusia kemudian berubah menjadi penyucian. Darah digantikan dengan air suci (*tirta*), sedangkan daging digantikan dengan beras. *Caru* (pengorbanan) kemudian lebih ditekankan sebagai *sudamala* (menyucikan kekotoran).

Upacara korban sebenarnya pertunjukkan “kekuasaan” untuk membangun kepatuhan masyarakat. Pada setiap upacara,

kekuasaan selalu mempertontonkan korban yang diperlukan untuk membangun keharmonisan. Korban ini biasanya diambil dari musuh-musuh kerajaan, sehingga masyarakat mendapatkan pelajaran bahwa mereka yang melakukan sesuatu yang mengganggu keharmonisan (*disorder*) akan dikorbankan. Peninggalan sejarah tentang hal ini terdapat di Pura Kebo Edan, Bedulu, Gianyar. Pada pura tersebut, terdapat patung manusia yang menginjak mayat manusia.

Hal ini menandakan bahwa untuk membangun keharmonisan, pengorbanan tetap diperlukan. Tetapi masyarakat Bali meledak pola kekuasaan seperti itu dengan memberikan sesaji kepada patung tersebut pada hari untuk melakukan upacara pada hewan peliharaan (*Tumpek Kandang*). Ini artinya telah terjadi protes sosial secara kultural terhadap kekuasaan yang menggunakan segala cara untuk membangun ketertiban sosial, dengan menyamakan kekuasaan seperti itu dengan hewan.

Pada abad ke-21 ini, upacara tersebut hampir kehilangan maknanya sebagai teror. Suasana teror yang diciptakan terdahulu, tidak kelihatan lagi. Upacara, bahkan lebih mempertontonkan kesemarakkan. Korban binatang masih ada, tetapi “penyembelihan” binatang-binatang tersebut dilakukan dengan beradab dan sehat, sehingga suasana teror hampir hilang. Upacara, kemudian menunjukkan kemeriahan seperti pesta untuk menunjukkan status ekonomi. Ketika upacara kehilangan kekuatannya untuk mempertunjukkan kekuasaan maka media teror baru tercipta dan diciptakan.

Bom yang meledak di Kuta, merupakan salah satu media baru bagi teror baru. Teror inipun terbangun untuk membangun kepatuhan publik. Pasca reformasi, pungli sulit dilakukan di Bali. Pengusaha, masyarakat dan pendatang selalu menanyakan identitas setiap orang yang memungut uang. Masyarakat menyuarakan berbagai praktik pungli melalui berbagai media, sehingga orang yang melakukan pungli ketakutan. Hal ini mendorong mereka membangun sarana baru untuk membangun kepatuhan masyarakat.

(puputan). Badung pun akhirnya takluk. Berikutnya Klungkung dan daerah-daerah lainnya menyusul takluk.

Masyarakat Bali tentu tidak ingin kasus Corby berubah menjadi kasus Sri Komala. Apalagi bila sampai masyarakat Australia melakukan perang ekonomi dengan masyarakat Bali. Kondisi ini tentu tidak akan menguntungkan bagi Bali, juga bagi masyarakat Australia. Bali, sampai saat ini, menjadi tujuan pariwisata yang murah bagi masyarakat Australia. Hubungan ini tentu telah menjalin rasa persaudaraan. Masyarakat Australia sangat akrab dengan Bali, demikian sebaliknya. Karena itu, ketegangan hubungan Australia dan Indonesia bisa menimbulkan pengaruh terhadap hubungan ekonomi, terutama pariwisata Bali.

Selama ini, hanya publik Australia yang mengetahui betul kondisi Bali yang berbeda dengan situasi keamanan di daerah lainnya di Indonesia. Karena itu, apabila pemerintah salah menangani emosi publik Australia, ini bisa menjadi sumber promosi hitam bagi pariwisata Bali. Promosi hitam seperti ini bisa menimbulkan pengaruh buruk terhadap pariwisata Bali yang memang sedang mengalami persoalan. Pengaruh buruk ini hanya akan memperparah kondisi Bali. Apakah yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini?

Indonesia tentulah mesti mempertahankan kedaulatannya seperti yang dilakukan Raja Badung. Tetapi mempertahankan kedaulatan tentulah tidak mesti melalui puputan. Sebab puputan belum tentu menjamin sebuah keberlangsungan kehidupan. Bahkan puputan justru bisa memusnahkan kehidupan. Secara kultural, masyarakat Bali adalah masyarakat yang mencintai keberlangsungan kehidupan. Karena kultur Bali sangat menginginkan yang namanya keabadian. Bahkan kebenaran, bagi masyarakat Bali, sebenarnya adalah keabadian. Semua yang abadi adalah benar, sedangkan yang sementara adalah kepalsuan (*maya*). Keabadian tersebut tentulah merupakan keberlangsungan, bukan kekakuan yang beku dan mati.

Keberlangsungan (keabdian) hanya bisa dicapai dengan pengendalian diri. Karena itu, masyarakat Bali dan Australia

“Corby” dan “Tawan Karang”, Dilema Bali?

Kasus Corby sempat menimbulkan ketegangan antara Australia dan Indonesia. Bahkan, publik Australia nyata-nyata telah menunjukkan ketidaksimpatianya terhadap keputusan pengadilan di Indonesia. Diantara mereka, sudah ada yang mengirim berbagai barang yang menyinggung perasaan kedua negara. Padahal, pariwisata Bali sebagian tergantung kepada publik Australia. Tidakkah ini akan menimbulkan masalah bagi pariwisata Bali? Bagaimanakah sebaiknya masyarakat Bali melihat kondisi ini?

Proses hukum Corby tentu menjadi persoalan pengadilan. Sebagai negara yang menganut supremasi hukum, rakyat dan pemerintah Indonesia tentu tidak boleh mencampuri proses ini. Pengadilan mesti mendapatkan kesempatan untuk membuktikan semuanya. Sehingga keputusannya bisa mewakili keadilan publik. Akan tetapi, masyarakat Bali perlu mengambil berbagai langkah untuk merajut hubungan baik dengan masyarakat Australia. Sehingga kedua masyarakat ini bisa maju bersama-sama, terlepas apa pun keputusan pengadilan.

Siapa pun juga tentu tidak ingin kasus ini menjadi gara-gara timbulnya hubungan yang kurang baik dengan masyarakat Australia. Apalagi, masyarakat Bali dan Australia telah sama-sama pernah menjadi korban teroris pada peristiwa Bom Kuta beberapa waktu lalu. Bahkan PM Australia ketika itu, menyampaikan bela sungkawa secara khusus kepada masyarakat Bali. Oleh karena itu, perasaan emosional yang berkembang selama ini mestilah mendapatkan peneduhan untuk keuntungan semua pihak.

Bagaimana pun juga, masyarakat Bali yang telah mencanangkan pariwisata budaya tentu tidak menginginkan peredaran obat-obat terlarang di Bali. Meskipun semua orang tahu, peredaran obat-obat terlarang ini kerap terjadi di Bali. Karena

pariwisata tanpa disadari juga telah mendorong bertumbuhnya peredaran obat terlarang. Bahkan telah menjadi kebiasaan pada setiap daerah pariwisata, obat terlarang mesti selalu tersedia. Bali memang tidak menginginkan hal itu, tetapi eksekusi ini juga sampai di Bali.

Jika memikirkan pariwisata, semua orang akan berpikir tentang tempat bersenang-senang. Pada tempat yang untuk bersenang-senang, seks bebas, candu dan sejenisnya tentu sering dibayangkan. Pikiran seperti ini kemudian menjadi kesempatan ekonomi bagi para pedagang obat terlarang. Sehingga daerah pariwisata sering menjadi tujuan perdagangan obat terlarang ini.

Tetapi pariwisata yang dikembangkan Bali adalah pariwisata budaya yang tidak akan membiarkan pertumbuhan peredaran obat terlarang. Namun bayangan budaya yang digambarkan masyarakat barat tentu berbeda dengan gambaran budaya bagi masyarakat kita.

Orang-orang barat menggambarkan budaya Bali seperti bayangan dalam relief-relief candi. Pada relief-relief itu, ada pahatan tentang bidadari yang menari untuk kesenangan para dewa. Ini kemudian menjadi image primitif yang merangsang tumbuhnya pariwisata di negara-negara timur, termasuk Bali. Jadi, citra yang eksotik merupakan daya tarik yang kuat untuk pariwisata. Mungkin tak ada orang yang mengungkap bila orang-orang barat datang ke Bali karena adanya foto-foto eksotik gadis-gadis Bali yang bertelanjang dada pada akhir abad ke-19 Masehi. Image ini yang membangun pariwisata Bali.

Orang-orang barat juga melihat dalam relief-relief candi, para dewa bersuka ria dengan minuman *soma* yang merangsang kehidupan dan awet muda. Para raja kemudian mengikuti cara-cara dalam relief candi ini. Sehingga gaya ini menjadi gaya elitis para kaum bangsawan di Asia. Pada tradisi agama kuno orang timur, mabuk dan hubungan seks, bahkan menjadi bagian ritual. Meskipun kemudian, ritual tersebut tidak digunakan lagi. Namun bekas-bekasnya yang membangun citra kesenangan seperti itu masih ada dalam relief candi-candi di Asia. Jadi, citra kultur kita

memang menawarkan tempat bersenang-senang di tengah panorama alam yang indah. Inilah pariwisata kita.

Akan tetapi, hukum positif di Indonesia melarang hal tersebut untuk melindungi generasi bangsa ini. Tetapi desakan-desakan ekonomi mendorong pertumbuhan ini. Semua ini menjadi dilema bagi pariwisata Bali. Akankah Bali tetap kuat bertahan dalam pariwisata budaya atau akan menentukan jalan yang lain? Semua ini tentu terserah bagi masyarakat Bali. Apakah masyarakat Bali memang mau menyediakan tempat bersenang-senang seperti yang ada dalam relief candi-candi atau akan menentukan lain? Menjadikan Bali sebagai sorga dalam kegairahan, atau menjadikannya tempat sunyi yang nyaman (*lonely planet*) adalah dua pilihan yang mesti ditentukan.

Persoalan ini benar-benar akan menjadi dilematis bagi masyarakat Bali. Apalagi jika persoalan Corby kemudian menjadi gara-gara sebuah hubungan yang tidak baik. Bali pernah mengalami kondisi ini seratus tahun lalu, tepatnya pada tahun 1906. Ketika itu, Bali merupakan salah satu tempat perdagangan candu. Pedagang-pedagang Cina dan Eropa bersaing memperebutkan pasar di Bali. Raja-raja Bali kemudian menutup pintu perdagangan ini. Sebab tidak mendapatkan posisi menguntungkan dari proses ini. Bahkan Raja-raja Bali menetapkan hak tawan karang terhadap kapal-kapal asing yang terdampar. Hak ini diperlakukan untuk menghindari upaya-upaya penyelundupan di pantai-pantai Bali. Akan tetapi, pelaksanaan hak ini ternyata menimbulkan masalah.

Suatu ketika, kapal Sri Komala yang berlindung dibawah Belanda terhempas di pantai Sanur. Masyarakat setempat kemudian menjarah kapal tersebut sebagai pelaksanaan dari hak tawan karang terhadap kapal-kapal asing yang terdampar. Tetapi apa yang terjadi? Belanda melakukan tekanan politik terhadap Raja Badung. Namun Raja Badung tetap membela masyarakatnya yang melakukan tindakan tersebut. Sebab raja memang telah memperlakukan hak tawan karang. Belanda kemudian melakukan penyerangan. Raja dan rakyat Badung melawan habis-habisan

memiliki gap dengan masyarakat kebanyakan. Politik ini berguna untuk mencegah kalangan bangsawan membangun solidaritas untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial.

Gap ini terasa sekali pada masa-masa perjuangan revolusi Indonesia. Pada saat itu, kalangan pejuang bermusuhan dengan birokrat NICA yang dijabat kalangan elit di Bali. Permusuhan ini berlanjut pada masa republik ketika terjadi pemberontakan Logis karena Soekarno mengambil politik “jalan tengah” untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Pengaturan-pengaturan pasca perang oleh Soekarno ini sudah mulai menampakkan hasil dalam pengaturan sumber daya alam. Kepemilikan tanah di Bali sudah mulai merata, tetapi tantangan ekonomi tidak berhenti pada tanah semata.

Sumber-sumber ekonomi baru yang berbasiskan pada keterampilan individu, menjadi relasi “kuasa” baru di Bali. Pariwisata pada era 1980 – 1990-an melahirkan kelas menengah-kelas menengah baru yang menyisihkan kelas menengah lama. Kalangan profesional baru lainnya, juga menjadi relasi kuasa atas uang dan bahkan tahta pada era demokrasi ini. Relasi kuasa baru ini membangun keterkejutan sosial, yang gampang sekali memuncak menjadi kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini tidak terbendung sama sekali karena kelas menengah-kelas menengah baru yang muncul lebih individual dan liberal.

Kelas menengah ini, bahkan karena aksesnya yang cukup kuat dengan sumber-sumber agama dan ilmu pengetahuan, kemudian mempertanyakan tradisi-tradisi yang dianggap tidak adil. Desa pakraman lambat dalam mengatasi perubahan ini, sehingga berbagai kebingungan terjadi pada berbagai desa. Kebingungan-kebingungan ini melahirkan berbagai konflik, karena adanya kesenjangan pengetahuan dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal mengemban amanat UUD 1945 untuk membangun kesejahteraan dan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah harus belajar dari kejadian-kejadian yang berlangsung selama ini, dengan melakukan berbagai

tentulah mesti bisa mengendalikan dirinya masing-masing. Sehingga sama-sama bisa menjaga keberlangsungan kehidupannya masing-masing. Kebijakan kehidupan ini sebaiknya bisa diaplikasikan dalam kehidupan politik, terutama untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Pada konteks itu, pemerintah Indonesia mestilah memperhatikan cita-cita keberlangsungan tersebut. Keberlangsungan ini hanya bisa terjadi apabila masyarakat Australia dan masyarakat Bali memiliki hubungan yang baik –bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, masyarakat Bali tentu tidak perlu terpancing emosi menghadapi kondisi ini. Semua orang juga tahu setiap daerah atau negara memiliki sisi-sisi hitam. Namun sebagai masyarakat yang beradab, kita tentu mesti menonjolkan sisi-sisi yang baik dari kedua belah pihak. Kemudian, kedua negara mesti bersama-sama memerangi sisi-sisi hitam ini, termasuk perdagangan obat terlarang. Perdagangan obat terlarang ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Bali telah mengenalnya sejak abad ke-17 Masehi. Bahkan perang-perang puputan terjadi sebagian karena alasan perdagangan candu –disamping alasan-alasan yang lebih substansial lainnya.

Peristiwa-peristiwa sejarah ini mestilah menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pemerintah Indonesia dan Australia tentu tidak akan ingin bersitegang hanya karena persoalan mariyuana. Jika itu terjadi, itu artinya pedagang-pedagang obat terlarang telah berhasil menciptakan sebuah ketegangan yang akan berakibat buruk bagi perekonomian. Pada kondisi perekonomian yang buruk, kesempatan kerja akan berkurang. Di tengah kondisi ini, perdagangan obat terlarang bisa menjadi alternatif pekerjaan lain. Jadi, ketegangan ini tidak akan menguntungkan kedua negara. Bahkan malah akan merugikan generasi kedua negara di masa yang akan datang.

Keadilan Ekonomi, Resolusi Konflik “Mpu Kuturan”

Desa pakraman mendapatkan sorotan hebat belakangan ini. Ada bentrokan Klungkung, bentrokan Bangli dan bentrokan seporadis lainnya. Ada banyak kasus yang bersinggungan dengan desa pakraman, yang penyelesaiannya berlarut-larut. Hal ini semakin membenarkan sinyalemen bahwa orang Bali tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Mereka memerlukan orang lain, untuk menyelesaikan persoalannya. Apakah memang demikian adanya? Kenapa desa pakraman demikian lemahnya menghadapi konflik intern?

Subak dan desa pakraman lahir dari proses sosial yang bisa disebut “konflik”. Subak lahir dari konflik ekonomi yaitu pembagian air untuk persawahan. Desa pakraman lahir dari konflik tapal batas di masa lalu, yang juga bersumber dari konflik kekayaan alam non-irigasi air. Misalnya kawasan hutan, tempat suci dan sejenisnya. Raja kemudian mengeluarkan prasasti yang menyangkut batas-batas desa tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan Raja Jayapangus (abad ke-12 Masehi) atau prasasti sebelumnya.

Konflik-konflik di masa lalu sebagian besar berkaitan dengan pembagian sumber daya ekonomi, sehingga muncul kearifan untuk membangun sistem perekonomian yang berkeadilan. Sistem perekonomian ini terlihat dari pembagian sawah, tegalan dan pakarangan rumah yang relatif adil di hampir sebagian besar desa pakraman di Bali. Kolonialisme yang memanfaatkan tangan-tangan feodalisme kemudian menata ulang sistem pertanian ini menjadi bentuk-bentuk feodalisme barat, dimana kaum bangsawan mendapatkan hak sebagai “tuan tanah” seperti yang terlihat pada kebangsawanan di Eropa. Misalnya Inggris yang sampai saat ini,

tanah sebagian besar dimiliki oleh elit yang jumlahnya tidak lebih dari 20 persen penduduk setempat.

Pola inilah yang mengawali berbagai konflik di Bali. Bahkan konflik Tahun 1965 -an yang menelan korban sekitar 200 ribu orang Bali berawal dari konflik ini. Konflik ini bermula dari undang-undang landreform yang membatasi kepemilikan tanah. Undang-undang ini berjalan kurang cepat di tingkat bawah, sehingga terjadi gerakan sepihak kalangan PKI untuk menyerobot lahan-lahan tersebut. Undang-undang ini berjalan lambat karena proses politik yang terjadi di daerah melibatkan oknum-oknum “tuan tanah” yang ingin terus melakukan negosiasi atas kepemilikan tanah mereka. Ketidaksabaran sejumlah pihak dalam melakukan negosiasi mendorong tindak kekerasan yang kemudian bercampur aduk dengan dendam dan sejenisnya.

Pasca kekerasan tersebut, kekerasan-kekerasan seporadis terus bermunculan di Bali. Pada era Orba, kekerasan ini terendam karena adanya ancaman untuk mem-PKI-kan pihak-pihak yang bertikai. Pasca Orba, kekerasan ini mulai meletus lagi, mulai dari kasus pelanggaran penguburan, batas wilayah dan sebagainya. Konflik-konflik ini menunjukkan lemahnya desa pakraman dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi. Desa pakraman benar-benar telah terpinggirkan sejak era kolonial dalam proses pengambilan keputusan, sehingga begitu mendapatkan kesempatan, ini menjadi gerakan sepihak yang terkesan hegomonik dan bahkan menindas.

Hal itu terjadi karena proses “keterwakilan” yang tidak memuaskan dalam mengambil keputusan. Pada masa kolonial, desa pakraman diwakili kalangan birokrat Belanda yang adalah bangsawan lokal dalam negosiasi dengan pemerintah. Keputusan-keputusan yang dihasilkan kemudian banyak merugikan golongan terbanyak, dan menguntungkan golongan elit. Misalnya privatisasi tanah yang telah mengobrak-abrik otoritas desa pakraman oleh swapraja yang patut dipertanyakan legitimasinya secara historis. Privatisasi ini, belakangan baru diketahui sebagai bagian dari politik pecah belah Belanda, agar kalangan elit (bangsawan)

mengorbankan nilai-nilai hakiki untuk sebuah ilusi. Dalam cerita pemutaran Mandara Giri, masyarakat Bali bisa juga mendapatkan inspirasi. Pada kisah ini, kaum raksasa akhirnya kehilangan *amerta* yang telah tergemgam, karena terbius ilusi kecantikan Dewi Danwantari yang menari diantara mereka. Sehingga mereka mabuk, dan kemudian kehilangan *amerta*. Tidakkah keadaan saat ini seperti itu?

Setelah *amerta* hilang, kecantikan Danwantari pun tidak ada lagi. Dewi ini lari melarikan *amerta*, karena dia memang ilusi. Tidakkah pariwisata seperti itu adanya sekarang ini? Setelah mengambil *amertanya* Bali, mereka kemudian pergi meninggalkan berbagai persoalan. Tetapi memang demikianlah nasib kaum raksasa, yang menukarkan *amerta* dengan kesenangan ilusi. Kelemahan kaum raksasa adalah kesenangannya kepada ilusi, padahal mereka sangat kuat. Para dewa tidak terjebak kepada berbagai ilusi, sehingga walaupun sedikit lebih lemah dibandingkan kaum raksasa, mereka menjadi kuat. Jadi, yoga bisa membuat mereka yang lemah menjadi kuat, tak tertandingi.

Dari beratus-ratus abad yang lalu, leluhur masyarakat Bali mengajarkan yoga kepada masyarakat Bali. Cerita-cerita babad di Bali menyatakan, bahwa semua leluhur masyarakat Bali melakukan yoga. Hyang Putrajaya beryoga di Besakih, Hyang Gnijaya beryoga di Lempuyang dan Dewi Danuh beryoga di Danau Batur. Setelah tiga leluhur utama, putra Pasupati ini, ada juga Mpu Gana dan mpu-mpu lainnya yang beryoga di hampir setiap sudut Bali, termasuk pesisirnya. Jadi, dari generasi ke generasi, leluhur orang Bali melakukan yoga pada setiap sudut tanah ini, untuk menjaga kestabilan pulau ini.

Semua cerita ini seringkali mendapatkan pemaknaan yang salah. Sebab, ketika masyarakat mengetahui bahwa leluhurnya telah beryoga di setiap tempat, mereka tidak perlu lagi melakukan yang sama. Mereka merasa telah terlindungi. Padahal, yoga mestilah dilakukan berkesinambungan. Cerita Adiparwa menceritakan bagaimana Raja Sagara melakukan yoga sampai beberapa generasi untuk mengalirkan Sungai Gangga ke wilayah

perubahan dan percepatan. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat harus terus dipercepat. Pembangunan kesejahteraan dengan menghilangkan beban-beban masyarakat yang urgen, misalnya biaya pendidikan dan kesehatan harus terus dilakukan, sehingga tidak ada lagi anak tidak bisa sekolah karena alasan ekonomi. Anak-anak yang lahir tidak boleh kehilangan masa depannya karena kesalahan orang tuanya. Negara harus memberikan jaminan bagi pertumbuhan anak di berbagai sektor kehidupan.

Pemerataan di bidang pendidikan, akan mendekatkan posisi desa pakraman pada era Mpu Kuturan yang berusaha membangun keadilan ekonomi. Pada masa itu, Sang Mpu memotong kesenjangan penguasaan tanah. Tanah dibagikan untuk kesejahteraan bersama. Pada masa kini, keterampilan individu yang harus didistribusikan secara merata melalui pendidikan, sehingga setiap orang bisa mengembangkan produktivitasnya untuk pembangunan ekonomi. Jika ada kemakmuran bersama maka perdamaian akan terwujud. Setiap orang akan mau duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, jika mereka makmur. Siapapun di dunia ini, tidak menghendaki peperangan. Hanya orang miskin yang menghendaki peperangan karena hanya itu satu-satunya jalan bagi orang miskin untuk mendapatkan sorga yang juga patut dipertanyakan kebenarannya secara filosofis.

Filsafat Samkya dari Rsi Kapila yang di Bali menjadi Rwa Bhineda mengajarkan bahwa dunia ini dapat berjalan dengan teratur bila terjadi keseimbangan kosmis antara purusha dan pradhana. Purusha harus kuat beryoga menopang gerakan penciptaan, sedangkan pradhana harus berputar sekuat-kuatnya. Jika salah satu kendor maka ketidakseimbangan akan terjadi yang meninggalkan berbagai dishormoni dalam masyarakat. Karena itu, setiap orang Bali sebagai purusha harus teguh dalam dharma, dan sebagai pradhana (badan) harus giat melakukan berbagai inovasi yang bertumpu pada dharma. Hal inilah yang akan melahirkan kebahagiaan lahir dan batin.

Gempa Pesisir, Kilas Balik Bali Abad ke-19?

Bali, mulai tergoncang gempa di pantai utara. Pantai selatanpun menunjukkan kenaikan ombak yang demikian besar. Pesisir Bali mulai mengalami ancaman serius dari alam lingkungan. Pertanda apakah ini? Adakah sesuatu ketidakharmisan manusia Bali dengan alamnya?

Pesisir Bali telah mulai mendapatkan ancaman yang serius semenjak pedagang Cina, Barat dan pedagang lainnya memasuki Bali sekitar abad ke-17 Masehi. Diantara pedagang ini, sebagian menjual candu untuk elite-elite dan orang-orang kaya Bali. Sehingga mereka kemudian mulai menjadi tidak serius menata masyarakat dan peradabannya. Perdagangan ini juga menimbulkan konflik antara sesama pedagang, yang kemudian mendapat campur tangan elite lokal. Perang raja-raja Bali dengan Belanda pada abad ke-19 Masehi, lebih banyak dipicu persaingan dagang seperti ini. Jadi, terbukanya pesisir Bali mengandung konsekuensi yang sangat besar bagi peradaban ini.

Goncangan dari terbukanya pesisir Bali bermula dari Buleleng (pantai utara), yaitu Perang Jagaraga tahun 1849. Belanda kemudian menancapkan kakinya dari Buleleng, terus menuju pusat kekuasaan di selatan. Semua itu jelas bermula dari manusia Bali yang tidak bisa membatasi diri dalam pergaulan dengan dunia luar. Sehingga mereka larut ke dalam perdagangan candu yang merugikan masyarakat. Kerajaan pun sedikit demi sedikit tercabik, sampai kemudian harus diserahkan kepada Belanda. Apakah kilasan sejarah ini gambaran dari gempa-gempa yang terjadi belakangan ini?

Pembangunan pariwisata yang demikian menggeliat di Bali sejak tahun 1970-an, adalah pembukaan pesisir Bali yang kedua kalinya. Pada saat itu, Nusa Dua menjadi awal dari segalanya.

Kasus Nusa Dua ini kemudian terus merayap ke seluruh pelosok Bali. Pembangunan pariwisata hinggap hampir di semua pesisir. Semua itu jelas menimbulkan persoalan lingkungan yang cukup serius. Hutan bakau yang mulai berkurang, abrasi pantai dan terjepitnya kawasan suci merupakan kasus-kasus lingkungan yang mengejala di Bali. Semua ini jelas berdampak kepada seluruh fenomena alam yang terjadi belakangan ini.

Oleh karena itu, manusia Bali mestilah mulai berpikir tentang perjalanannya selama ini. Apakah manusia Bali telah berjalan dalam keselarasan dengan lingkungan seperti yang diajarkan nenek moyangnya? Atau telah terlalu jauh meninggalkan keselarasannya karena kerakusannya terhadap materi? Semua pertanyaan tersebut mestilah terjawab untuk melangkah ke depan. Pada masa lalu, perdagangan candu telah menyebabkan hilangnya kedaulatan di tanah ini. Pada masa sekarang, apakah dunia ilusi kemajuan akan menyebabkan hilangnya kedaulatan di tanah ini?

Pada tataran seperti ini, masyarakat Bali mesti mulai merenungkan kembali pada ajaran-ajaran pendakian spiritual, khususnya sistem yoga kuno. Pada sistem ini, terdapat sebuah pandangan tentang kewaspadaan terhadap *maya* (ilusi). Jika seseorang terjebak kepada ilusi, dia akan senantiasa mendapatkan kekecewaan, karena semua itu adalah “tidak ada”. Dalam melawan ilusi (*maya*) ini, yoga mengajarkan tentang *yama* (pengendalian diri). *Yama* merupakan dasar daripada pendakian yoga. Tanpa *yama*, seseorang akan sulit mengkonsentrasikan dirinya kepada tujuan-tujuan hidup yang mulia. Jika seseorang tidak bisa berkonsentrasi pada tujuan-tujuan hidup yang mulia, dia akan mencapai kegagalan.

Oleh karena itu, pengendalian diri terhadap berbagai hal merupakan senjata untuk mencapai tujuan utama. Arjuna tidak akan mendapatkan pasupati jika tidak melakukan yoga. Dia juga tidak akan memenangkan Bharata Yudha jika tidak melakukan yoga. Cerita ini mengajarkan masyarakat Bali untuk melakukan yoga dalam kehidupan sehari-hari, yakni mengendalikan diri dari keinginan terhadap ilusi-ilusi kesenangan. Sehingga sampai

pemikiran pemberdayaan rakyat. Menguasai rakyat secara langsung lebih mahal daripada menyuap kaum feodal.

Pemikiran republik dari Jawa kemudian mempengaruhi Bali mulai tahun 1930-an. Tuntutan-tuntutan pemerintahan rakyat mulai terdengar di Bali sejak tahun ini, melalui organisasi Parindra dan sejenisnya. Pemikiran ini berkembang sampai revolusi kemerdekaan dan Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka berhasil membentuk pemerintahan sampai ke daerah-daerah tahun 1950-an, rakyat Bali dengan tegas menolak dewan raja-raja untuk berkuasa kembali. Masyarakat Bali tidak mau menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta. Masyarakat Bali memilih pemerintahan rakyat yang modern.

Akan tetapi, tahyul-tahyul lama masih saja beredar di tengah-tengah masyarakat. Apalagi tradisi upacara masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Tradisi upacara ini bersandar pada tahyul-tahyul lama yang feodalistik. Para pemikir Hindu modern di Bali masih tenggelam dalam menghadapi fenomena ini. Jadi, secara politik, masyarakat Bali sudah demikian maju. Tetapi secara tradisi keagamaan, masih menggunakan pendekatan lama yang feodalistik. Namun demikian, gerakan-gerakan baru, seperti pengangkatan Brahmana dan yang lainnya sudah mulai terbuka. Saat ini, siapa saja bisa menjadi Brahmana (pendeta) di Bali asal memenuhi beberapa kriteria untuk itu.

Perkembangan pemikiran baru ini menghadapi tantangan yang besar. Kaum yang diuntungkan oleh tradisi lama juga melakukan gerakan-gerakan. Raja-raja lama juga mulai membangun kerajaannya di negeri *maya* (ilusi atau *raja kone*). Jadi, gerakan-gerakan baru ini mulai berhadapan dengan mimpi-mimpi lama di Bali. Tetapi bagaimanapun juga, setiap orang mesti menjadikan peristiwa di Nepal sebagai cermin bahwa betapa Raja Gyanendra telah meratapi bangkai kuda, yang tidak mungkin akan berlari lagi. Bahkan kuda itu pun tidak akan pernah mau berlari lagi jika mereka mesti mengemis pengakuan misalnya kepadapemerintahan republik.

kerajaannya. Jadi, masyarakat Bali pun hendaknya melakukanyoga dari generasi ke generasi, sehingga tidak terjebak kepada berbagai kebohongan.

Seseorang yang melaksanakan yoga, seperti halnya para dewa, akan mendapatkan *amerta*. *Amerta* adalah kehidupan abadi. Pada saat ini, *amerta* bisa dimaknai sebagai “keberlangsungan kehidupan”. Semua itu hanya bisa dicapai dengan menjaga alam ini tetap lestari. Sehingga semua manusia bisa hidup dengan bahagia. Demikianlah sebenarnya Hinduisme yang mengajarkan bahwa “keabadian” bukanlah setelah kematian tetapi pada kehidupan ini. Sorga juga bukanlah setelah kematian, tetapi pada kehidupan ini. Jika tanda-tanda kebahagiaan dan kebebasan tidak tampak dalam kehidupan ini, janganlah terlalu banyak berharap setelah kematian.

Oleh karena itu, prilaku mulia para leluhur orang Bali yang beryoga pada setiap sudut pulau Bali, mesti diteruskan saat ini. Sehingga masyarakat Bali hendaknya mulai bisa melakukan *yama* (pengendalian diri) di gunung, aliran sungai dan pantai, untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pada konteks modern ini, yoga bisa dimaknai sebagai bentuk kedisiplinan terhadap rencana ruang yang baik, untuk tujuan-tujuan kesejahteraan yang terukur. Sehingga masyarakat Bali terus mendapatkan *amerta*, yaitu “keberlangsungan kehidupan yang terus-menerus”.

Gyanendra, Reruntuhan Situs Raja Hindu Terakhir

Raja Gyanendra akhirnya menuruti keinginan rakyat Nepal untuk menghidupkan kembali demokrasi di negaranya, dengan mengaktifkan kembali parlemen. Pernyataan Gyanendra ini merupakan sebuah momentum besar dalam sejarah masyarakat Hindu. Sebab, Raja Gyanendra adalah raja Hindu terakhir yang jatuh karena tuntutan pemerintahan sendiri (demokrasi) masyarakatnya. Fenomena ini menunjukkan telah terjadinya perubahan pemikiran mendasar di kalangan masyarakat Hindu di dunia. Bagaimanakah perubahan ini terjadi? Bagaimanakah pengaruhnya bagi masyarakat Bali?

Nepal adalah negara yang paling belakang menerima perubahan pemikiran ini. Perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan pemikiran Hindu di India, sejak zaman Dayananda Saraswati, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi dan yang lainnya. Perubahan ini berawal perubahan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki kemampuan yang sama untuk mencapai pembebasan. Jadi, pembebasan bukan merupakan dominasi kaum Brahmana. Spirit ini muncul sejak zaman Upanisad. Tetapi pada zaman pertengahan (14 Masehi), Shri Caitanya Mahaprabhu dan tokoh lainnya memberikan penafsiran bahwa orang bodoh pun bisa mencapai pembebasan jika berbhakti kepada Tuhan (Bhakti Marga). Heinrich Zimmer menyebutkan zaman pemikiran tersebut sebagai *Wedantasara* (intisari pemikiran Wedanta).

Pada abad ke-18 Masehi, Swami Dayananda Saraswati menegaskan lagi bahwa weda-weda untuk semua orang. Sehingga purana-purana dan kitab-kitab lain yang menyatakan hanya sekelompok orang saja yang berhak mempelajari weda adalah kitab-kitab bohong. Beliau melalui pergerakan Arya Samaj juga menerjang berbagai bentuk tahyul dalam Hinduisme. Sebab weda-

weda adalah sangat logis. Perkembangan pemikiran baru ini meruntuhkan tahyul bahwa kaum penguasa adalah keturunan dewa.

Swami Vivekanda pada abad ke-19 Masehi juga merupakan guntur besar yang merayakan persamaan dan kebebasan dalam pemikiran Hinduisme. Berikutnya, Mahatma Gandhi pada abad ke-20 Masehi merealisasikannya lagi dalam bentuk pengakuan bahwa mereka yang sebelumnya terhina juga merupakan saudara. Orang-orang miskin dan tertindas kemudian beliau panggil sebagai Harijan (putra ketuhanan). Sejak saat itu, pemikiran tentang raja-raja keturunan dewa penyelamat dunia telah sirna dalam masyarakat Hindu di India.

Pemikiran ini mempengaruhi Nepal, sehingga negara itu kemudian membentuk pemerintahan demokrasi. Tetapi setelah sekian lama membangun demokrasi, Raja Gyanendra rupanya ingin berkuasa lagi. Namun demikian, dia rupanya telah terlambat. Rakyatnya sudah berpikir demikian maju, sementara keturunan raja-raja ini berpikir ke belakang pada kejayaan leluhurnya. Sehingga masyarakat Hindu di dunia saat ini, sudah tidak lagi percaya kepada orang-orang yang mengaku keturunan dewa-dewa untuk menyelematkan dunia. Mereka sudah menganut pemikiran Hindu modern yang menyatakan, setiap manusia adalah *atman*, sehingga mereka memiliki potensi yang sama untuk maju. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap Bali?

Masyarakat Bali telah mendapatkan pengaruh ini sejak tahun 1920-an. Para pemikir Bali modern yang bergabung dalam Suryakanta telah menyuarakan perubahan ini. Mereka telah melanjutkannya habis tahyul-tahyul yang berkaitan dengan kasta di Bali pada tahun 1920-an ini. Pemikiran baru ini sempat menimbulkan sedikit gejolak sosial di Bali pada tahun 1930-an. Pemerintahan kolonial rupanya tidak berkenan terhadap perubahan yang terjadi. Sebab, pemberdayaan rakyat bagi penajahan adalah kekuatan yang akan mengancam kekuasaannya. Pemerintah kolonial Belanda berhitung lebih murah memelihara kaum feodal untuk mengendalikan rakyat daripada membiarkan pemikiran-

anaknyanya. Dia pun membunuh anaknya untuk sebuah kesetiaan, yang akhirnya diketahui keliru. Sedangkan Ki Kacang Dawa yang sebenarnya menjadi tersangka dalam kasus perselingkuhan dengan istri raja akhirnya bisa meloloskan diri.

Cerita-cerita babad dan catatan sejarah tersebut, sebenarnya berakar kuat pada tradisi lisan di Bali, yang ada jauh sebelum ada aksara di Bali. Cerita lisan tersebut adalah cerita Pan Balang Tamak. Pan Balang Tamak dikisahkan adalah rakyat yang selalu tidak patuh dengan perintah pemimpinnya. Tetapi, dia selalu memiliki alasan yang sulit untuk dipatahkan. Raja tidak bisa menghukum orang seperti itu, kecuali dengan jalan memberikannya racun. Diapun mati terkena racun. Tetapi sebelum kematiannya, ia sempat membuat strategi. Ia menyuruh istrinya agar membuatnya seolah-olah tidak mati dengan menaruh mayatnya pada sebuah gedong suci. Mayat tersebut agar digantungkan sejenis serangga yang bersuara seperti dengungan “aum”. Istrinya kemudian disuruh bercerita bila Pan Balang Tamak masih beryoga di tempat sucinya. Raja berpikir racunnya tidak meman, sehingga ia meminum racun tersebut. Rajapun kemudian mengalami kematian yang serupa dengan Pan Balang Tamak, karena racun yang sama.

Cerita-cerita ini memberikan deskripsi bahwa kekuasaan memiliki cara yang tidak biasa, untuk menangani kejahatan. Apalagi penguasa telah menempatkan dirinya sebagai orang yang “tidak biasa”, berbeda dengan orang biasa. Sebagai orang yang “tidak biasa” maka penguasa senantiasa memiliki cara yang tidak biasa. Kultur ini memberikan legitimasi bagi pelaksanaan eksekusi-eksekusi yang tidak biasa tersebut, sehingga untuk menghadapi kultur yang seperti itu mesti digunakan juga cara yang “tidak biasa”. Cara yang “tidak biasa” itu adalah cara yang digunakan Pan Balang Tamak untuk menghadapi rajanya, yaitu pura-pura beryoga sehingga desas-desus semakin melebar dan menyudutkan raja.

Nazarudin menggunakan kultur tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Ia diam seperti Pan Balang Tamak yang sedang beryoga.

Bagaimanapun juga, setiap orang mestilah mengakui perubahan yang terjadi. Karena itu, setiap orang mesti menghormati arus besar ini. Kelompok masyarakat Hindu hendaknya tidak menjadi “pengemis kuasa” dari kelompok luar untuk menguasai orang-orangnya sendiri. Sejarah Bali membuktikan betapa masyarakat ini pernah saling tikam karena satu kelompok masyarakat ingin mengemis kuasa kepada kolonial Belanda. Karena itu, masyarakat Hindu memang sudah saatnya menjadi masyarakat yang mandiri.

Ide seperti ini, bukanlah ide baru. Akan tetapi kekuatan politik raja-raja memendam ide ini. Karena itu, masyarakat Hindu di India kemudian memperkecil cita-citanya hanya menjadi *grama swaraj* (desa mandiri). Masyarakat Hindu di Bali juga memperkecil cita-citanya sampai tingkat desa ketika berhadapan dengan kekuasaan feodal Jawa. Mpu Kuturan kemudian hanya membentuk *kramani* (desa mandiri) mulai abad ke-10 Masehi, menghadapi dominasi Kediri. Sejarah Bali membuktikan betapa Dalem Shri Kresna Kepakisan (penguasa lokal Majapahit) yang berkuasa pada abad ke-14 Masehi di Bali mesti bolak-balik ke Jawa dalam menghadapi pemberontakan desa-desa di Bali. Pemberontakan baru berakhir setelah ada kompromi tentang pengakuan terhadap kemandirian desa-desa di Bali.

Pemerintahan Bali modern juga akhirnya berkompromi dengan kemerdekaan desa-desa. Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Pakraman misalnya merupakan bentuk dari kompromi itu. Semua ini menunjukkan bahwa pemikiran baru tentang kemerdekaan dan pembebasan telah masuk ke tulang sumsum masyarakat Hindu. Karena itu, pemerintahan baru di Nepal dan Bali sudah semestinya memperhatikan kekuatan rakyat dengan segala bentuk aspirasinya.

Masyarakat Hindu dunia juga mesti mulai memikirkan tafsir-tafsir baru agama, untuk menggantikan tafsir-tafsir lama yang sudah tidak sesuai dengan zaman lagi. Masyarakat Hindu juga mesti mulai memikirkan sebuah format masyarakat Hindu yang mandiri. Sebab modernisme yang membawa demokrasi mensyaratkan sebuah kemandirian untuk mencapai cita-cita luhur.

Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa suatu masyarakat tidak bisa berharap terlalu banyak dari pertolongan di luar dirinya. Yo ga kuno menyatakan *swayambu* (hanya bergantung kepada Tuhan). Jika Tuhan ada di dalam diri manusia (*atma*) maka itu artinya hanya bergantung kepada diri sendiri. Ini adalah sebuah masyarakat baru dunia yang damai.



Nazarudin, Relasi Kultural Pan Balang Tamak Vs Raja

Belakangan ini, masyarakat menghadapi kenyataan bahwa Nazarudin tidak bisa diandalkan untuk menjadi pintu pembukaan kasus korupsi di Indonesia. Nazarudin, seperti halnya Gayus, menyisakan ruang-ruang gelap yang tidak bisa ditembus. Dia diam di tengah-tengah harapan publik agar dia terus bicara. Sejarah penanganan korupsi akhirnya tidak pernah berubah, sebab dia selalu menyisakan ruang gelap yang sangat panjang dan sulit untuk ditelusuri. Apakah memang selalu demikian penanganan kasus yang melibatkan “penguasa” dalam kultur masyarakat kita?

Kejahatan yang bersentuhan dengan kekuasaan, memang selalu penuh dengan misteri. Penanganannya pun seringkali penuh dengan trik-trik untuk menyembunyikan kasus yang sebenarnya. Pada sejarah kekuasaan di Bali, seperti dalam *The Spell of Power* karya Henk Schulte Nordholt, terungkap bahwa penanganan kejahatan yang bersentuhan dengan elite penguasa, seringkali ditangani pada tengah malam. Sang Penjahat akan dibawa ke *setra* (kuburan) pada tengah malam, untuk dibunuh. Penanganan sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menyembunyikan aib, sehingga elite kekuasaan tetap bersih, dan lepas dari segala desas-desus di tengah masyarakat.

Kisah-kisah babad di Bali seakan membenarkan hal itu. Babad Arya Tangkas misalnya mengisahkan bahwa Dalem Gelgel yang hendak menghukum Ki Kacang Dawa, harus memberikan perintah rahasia. Raja (Dalem) memberikan perintah rahasia di dalam surat, yang isinya perintah untuk membunuh orang yang membawa surat. Perintah ini kemudian menimbulkan tragedi salah eksekusi karena yang membawa surat itu terakhir adalah putra dari Arya Tangkas, bukan Ki Kacang Dawa yang harus dihukum. Arya Tangkas tanpa konfirmasi segera berpikir bahwa raja sedang menguji kesetiaannya dengan memerintahkannya untuk membunuh

Keraguan Purnama Kapat, Sebuah Transisi Kultural

Pertanyaan seputar *Purnama Kapat* (*Purnama Kartika*) masih terus bergulir di tengah-tengah masyarakat Bali. Pasalnya, terdapat dua versi mengenai penetapan Purnama Kartika. Satu versi mengikuti Ketetapan Mahasabha PHDI Pusat tentang “Penampih Sasih Berkeeseimbangan”, yang menetapkan *Purnama Kartika* 28 Oktober 2004. Sedangkan satu versi lagi mengikuti paruman sulinggih PHDI Bali yang menggunakan sistem *Pangrapetin Sasih* yang menetapkan pada 28 September 2004. Perbedaan kedua sistem ini adalah penempatan *nampih sasih* (bulan yang diduakalikan). Versi pertama menggunakan *nampih sasih* pada Sasih Kasa, sedangkan versi kedua pada Sasih Kasada. Adanya dua versi ini menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat Bali. Mengapa kebingungan ini bisa terjadi? Apakah yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat Bali dengan melihat fenomena ini?

Kebingungan mengenai *sasih* sebenarnya tak perlu terjadi di tengah-tengah masyarakat Bali jika masyarakat masih dekat dengan alam. Sebab tanda-tanda *sasih* sebenarnya bisa dilihat dari fenomena alam. Fenomena ini dicatat dalam lontar-lontar *tetenger sasih* (tanda-tanda bulan). Dalam catatan lontar ini terdapat tanda-tanda mengenai *sasih-sasih* tertentu. *Sasih Kapat* misalnya ditandai dengan “*abener ring akasa Sanghyang Surya*”, artinya matahari tepat di langit atas (tidak mereng). Tanda-tanda lainnya adalah munculnya *damuh api* (salah satu jenis embun). Masyarakat petani juga bisa menandai *sasih* dengan melihat kemunculan Bintang Kartika, atau melihat pohon *pinis nyumu sari* (pohon pinis mulai berbunga). Tanda-tanda itu mulai dilupakan masyarakat Bali, sebab mereka telah menjadi masyarakat metropolis yang jauh dari pepohonan dan tinggal di dalam gedung berAC, yang tak perlu

Dia bahkan meminta cara-cara yang tidak biasa, yaitu langsung saja menjebloskan dirinya ke penjara tanpa proses pengadilan. Cara-cara yang tidak biasa ini bisa menyelematkan kedua pihak, yaitu Nazarudin dan penguasa karena tidak akan pernah ada pembongkaran kasus tersebut lebih jauh, tetapi bisa juga sebaliknya seperti cerita Pan Balang Tamak. Pada kisah Pan Balang Tamak, raja juga mengalami kematian seperti Pan Balang Tamak sehingga rakyat terbebas dari raja yang lalim sekaligus rakyat yang penuh tipu daya. Tetapi cerita ini tak pernah menjadi kenyataan pada kultur masyarakat Bali, bahkan mungkin Indonesia.

Cerita Pan Balang Tamak hanya merupakan idialisme masyarakat yang terpinggirkan. Idialisme masyarakat yang terpinggirkan yaitu mereka berharap bisa terbebas dari penguasa yang tidak adil dan rakyat sesamanya yang juga seringkali menipu mereka. Masyarakat Bali sebenarnya berharap semua unsur masyarakat, dari bawah sampai atas, harus bekerja keras untuk mencapai kemakmuran bersama. Ketidakadilan akan menjadi sebab dari ketidakadilan lainnya, sehingga masyarakat ini tidak akan pernah menikmati keadilan.

Rentang waktu sejarah yang panjang telah membuktikan hal itu di Bali. Politik kekuasaan, yang memisahkan masyarakat umum dan elite penguasa telah mengawali proses ketidakadilan. Klaim pertama bahwa penguasa adalah dewa datang dari dinasti Shri Kesari Warmadewa. Beliau menyematkan kata *dewa* dalam namanya, agar bisa menjadi anti-thesa dari kekuasaan sebelumnya yang disebutnya *danawa* (raksasa). Tetapi pencantuman nama *dewa* ini telah memberikan makna yang terlalu jauh kepada masyarakat. Masyarakat kemudian percaya bahwa pemimpin yang bernama *dewa* tersebut, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menyelematkan masyarakat.

Kepercayaan ini menimbulkan ketergantungan yang besar, antara masyarakat dengan raja sehingga ketika terjadi peperangan masyarakat menganggap raja adalah segala-galanya. Apabila raja meninggal maka itu berarti kehancuran (*pralaya*) negara. Rakyat

akhirnya tidak melakukan apa-apa untuk membebaskan negaranya. Mereka pasrah saja menunggu perintah dari raja baru, yang selalu saja mendengungkan hal yang sama yaitu penyelamatan. Rakyat memang akhirnya tidak pernah selamat, seperti halnya ikan-ikan pada *Telaga Kemuda* yang ditipu oleh *Pedanda Baka* dengan janji keselamatan tetapi mereka dimakan di atas pohon besar.

Dari Idealisme ke Realisme

Sejarah yang panjang tersebut mestinya memberikan perenungan bahwa penandaan-penandaan tertentu dalam wilayah idealisme ke dalam realisme, bisa menjadi awal dari ketersesatan peradaban. Oleh karena itu, penandaan-penandaan idialisme terhadap realitas harus penuh dengan kewaspadaan. Penandaan yang ceroboh akan menyebabkan masyarakat hidup dalam budaya seolah-olah, yang kemudian hanya akan berhenti sebatas “kata-kata”. Apabila kita berhenti sebatas “kata-kata” maka kita sebenarnya telah menghentikan gerak maju kita. Fenomena ini hanya akan melahirkan candu “kata-kata” yang memabukkan, yang mengundang kemalasan.

Para Maharsi telah menangkap fenomena ini paling sedikit sekitar 600 SM. Dalam Wedanta, fenomena tersebut disebut dengan *maya*, yang artinya seolah-olah. Apabila seorang berhenti pada *maya* maka mereka tidak akan menemukan kebenaran sejati. Oleh karena itu, setiap orang harus menyebrangi *maya* untuk mendapatkan kebenaran sejati. Kebenaran sejati tersebut adalah menyatunya subjek dengan objek, yang oleh umat Hindu disebut dengan *moksha*. Penyatuan subjek dengan objek tersebut, adalah penyatuan antara idialisme dengan realitas. Penyatuan ini terwujud dalam terealisasinya gagasan dalam penghayatan kehidupan sehari-hari.

Kesenjangan antara idialisme dengan realitas merupakan penderitaan, yang menyebabkan berbagai ketidakpuasan di dalam diri. Ketidakpuasan di dalam diri, hanya akan melahirkan penderitaan yang berulang-ulang yang disebut dengan *samsara*. Oleh karena itu, untuk melenyapkan *samsara*, seseorang harus

melewati *maya*, yakni menyebrangi kata-kata dengan berbagai perenungan yang dalam. Rsi Patanjali mengajarkan latihan-latihan praktis untuk melewati hal tersebut, yaitu dengan melakukan Panca Yama dan Panca Nyama Brata. Kesepuluh brata tersebut merupakan praktik pengendalian diri agar seorang yogi (praktisi yoga) bisa melakukan penghayatan terhadap idialisme pembebasan.

Secara sosial, ajaran ini memberikan inspirasi bahwa jika suatu masyarakat ingin maju, mereka harus melakukan disiplin sosial (*brata*). Pemerintah juga harus melakukan kebijaksanaan dengan penuh disiplin. Jika pemerintah dan masyarakat tidak bisa melakukan disiplin maka suatu bangsa akan mengalami kegagalan untuk mewujudkan cita-cita. Kegagalan untuk mewujudkan cita-cita adalah proses *samsara* sosial dimana kita akan terus kembali kepada bentuk penjajahan yang baru, yang esensinya adalah sama yaitu penderitaan.

Untuk menuju kondisi seperti itu, pemerintah harus berani membuka ruang-ruang gelap kemanusiaannya, dan masyarakat hendaknya juga bisa memaknai keterbukaan tersebut sebagai usaha untuk kemakmuran bersama. Keterbukaan ini memang memerlukan pengorbanan seperti pengorbanan Pan Balang Tamak dan rajanya. Pengorbanan itu merupakan harga dari sebuah perjalanan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Secara kultural, masyarakat Bali bahkan mungkin Indonesia sangat menghargai pengorbanan seperti itu, sehingga pada budaya Bali ada pura yang bernama Pura Pan Balang Tamak untuk mengenang pengorbanan dari rakyat yang penuh tipu muslihat dan raja yang tidak adil. Bangsa Indonesia semestinya bisa merenungkan sebuah pengorbanan seperti itu.

Jadi, kebingungan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena mereka memilih satu jalan atau sistem secara ekstrim – seperti yang terjadi pada penentuan *sasih* yang terlalu mempercayai perhitungan. Karena itu, keraguan tentang penentuan *Purnama Kapat* ini mesti bisa menjadi cermin bagi masyarakat Bali, untuk bisa mengawinkan antara logika dan perasaan. Jadi, masyarakat bisa saja mempercayai perhitungan di kalender, tetapi jangan lupa melihat posisi matahari, bintang dan keadaan alam sekitar. Rasionalisasi tetaplah diperlukan, tetapi perasaan tetaplah harus terjaga. Mengutak-atik angka bisa dilakukan, tetapi hendaknya tetaplah bisa bangun pagi agar bisa menyaksikan saat matahari terbit. Rasio dan rasa mesti bisa bertumbuh dalam masyarakat ini secara bersamaan.



lagi melihat matahari tetapi cukup melihat jam dinding. Akhirnya, mereka kemudian mempercayakan penentuan *sasih* berdasarkan perhitungan, seperti yang termuat dalam kalender-kalender modern.

Pergerakan ini sebenarnya merupakan sebuah perubahan kultur dalam masyarakat Bali. Sebelumnya, mereka mengembangkan rasa dengan melihat tanda-tanda alam. Kemudian, mereka mengembangkan logika, dengan menentukan berbagai perhitungan yang menyebabkan mereka jauh dari alam. Masyarakat yang mengembangkan rasa adalah masyarakat yang mengagungkan kebersamaan, sedangkan masyarakat yang mengembangkan logika mengusung individualisme. Jadi, masyarakat Bali sebenarnya sedang berada dalam transisi perubahan ini. Yaitu perubahan dari rasa ke logika, atau dari kebersamaan ke individualisme. Perubahan ini menimbulkan berbagai kebingungan, antara mempercayai perhitungan, atau mempercayai perasaan. Jika mempercayai perasaan, tentunya masyarakat Bali akan merasakan, apakah saat ini matahari telah tepat berada di atas, atau masih mereng? Apakah telah ada turun *damuh api*, atau apakah Bintang Kartika telah kelihatan jelas?

Perasaan-perasaan alamiah seperti itu telah mulai menjauh dari masyarakat Bali. Mereka tak biasa lagi memperhatikan posisi matahari, sebab telah membawa arloji di tangan. Mereka tak biasa lagi melihat bintang, sebab mereka bukan petani yang akan mengayuhkan *tengala* (bajak) di sawah. Mereka tak perlu lagi melihat pepohonan telah berbuah atau berbunga, sebab pasar telah menyediakan semuanya. Inilah pergerakan-pergerakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bali. Perubahan-perubahan ini menimbulkan berbagai kebingungan, sebab kaki masyarakat Bali sebenarnya masih berpijak pada tradisi alamiah sementara kepala telah merasional. Kemanakah masyarakat Bali mesti melangkah dalam masa transisi seperti itu? Apakah menggeluti logika, atau kembali ke perasaan-perasaan alamiah?

Sejarah Hinduisme sebenarnya tak luput dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Hinduisme yang sebenarnya lahir dalam

masyarakat sosialisme yang mengembangkan rasa, tak bisa menutup diri terhadap perubahan ke logika. Pada awalnya, Hinduisme menetapkan perayaan-perayaan tertentu berdasarkan tanda-tanda alam yang dicatat melalui pengalaman empiris. Tetapi kemudian, Alexander yang Agung memasuki India 325 SM. Mereka kemudian memperkenalkan logika untuk menentukan bulan. Sistem perhitungan ini dinamakan Sistem Romaka, atau sistem yang berasal dari Roma. Perhitungan ini mempengaruhi perhitungan dalam menentukan hari raya Hindu di India pada zamannya. Jadi, perhitungan matematis yang dikembangkan di Yunani sejak zaman Plato dari sekitar 450 SM seterusnya mempengaruhi India. Zaman logika pun selanjutnya mempengaruhi Hinduisme.

Perhitungan matematis ini mempermudah masyarakat untuk memperkirakan kedatangan musim tertentu. Jadi, melalui perhitungan ini, mereka dapat bersiap lebih awal untuk menyambut perayaan-perayaan yang jatuh pada musim-musim tertentu. Pengaruh perhitungan inilah yang kemudian masuk ke dalam perhitungan Kalender Hindu yang disebut dengan Suryasiddhanta. Suryasiddhanta terbagi lagi ke dalam berbagai metode. Ada yang disebut dengan Vasisthasiddhanta, Romakasiddhanta dan banyak lagi siddhanta lainnya. Kata siddhanta merupakan terminologi zaman logika yang berkembang sejak zaman Buddha. Terminologi ini mengandung arti kesuksesan atas usaha manusia. Jadi, zaman berharap kepada anugrah Tuhan, kemudian telah berganti menjadi zaman perjuangan manusia sejak penggunaan logika memasuki Hinduisme. Pertarungan logika dan rasa ini selanjutnya menjadi inspirasi daripada teks-teks berikutnya yang berusaha mengawinkan antara logika yang berbasis perjuangan manusia, dan rasa yang berbasis “penyerahan diri”. Bhagavadgita adalah salah satu kitab suci yang mengawinkan dua pendekatan tersebut. Sehingga kitab ini mengajarkan perjuangan manusia, tetapi juga mengajarkan bahwa perjuangan memerlukan anugrahNya.

Pengaruh ini sampai juga ke Indonesia. Sehingga masyarakat Bali mengawinkan perhitungan ini dengan pengalaman empiris

mereka. Sehingga penentuan *sasih* tidak hanya didasari perhitungan, tetapi juga didasari *tenger sasih* (tanda-tanda alam). Sejak mengenal aksara, masyarakat Bali lebih mempercayai perhitungan yang diterjemahkan ke dalam kalender dinding. Sebab ini lebih praktis untuk meramalkan musim dan perayaan tertentu. Tetapi semua perhitungan sebenarnya memiliki kelemahan. Perhitungan tahun masehi saja memiliki kekurangtepatan. Sehingga setiap empat tahun sekali terdapat bulan kabisat, yang itu pun sebenarnya tidak tepat sekali. Sebab sesungguhnya, sehari bukan 24 jam, tetapi lebih kurang 24 jam. Sehingga setahun pun bukan 365 hari, tetapi lebih kurang 365 hari.

Pada ketidaktepatan perhitungan seperti itulah, rasa sebenarnya mendapatkan tempat. Tetapi ini tidak terjadi, sebab masyarakat telah terbiasa menggunakan cara-cara berlogika yang telah bisa dijelmakan menjadi sebuah alat. Apakah itu jam tangan, dan sejenisnya. Alat-alat hasil logika ini telah menjadi produk massal, sehingga mempengaruhi hampir sebagian besar masyarakat dunia, termasuk Bali. Jadi, masyarakat Bali sebenarnya telah berada pada zaman logika ini. Pertanyaannya kemudian, apakah logika bisa menyelematkan masyarakat Bali? Pertanyaan besar itu sebenarnya adalah pertanyaan agama-agama besar, termasuk Agama Hindu.

Shri Krishna dalam Bhagavadgita mengawinkan antara logika dan perasaan. Sehingga Beliau percaya pada usaha manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi, usaha manusia saja tidaklah cukup tanpa kebaktian (penyerahan diri) kepada Tuhan. Jadi, logika yang berbasis individualisme tetap mendapatkan tempat. Namun individualisme saja tanpa pengabdian sosial tidaklah ada artinya. Gita percaya mereka yang meninggalkan masyarakat untuk bertapa, akan mendapatkan pembebasan. Tetapi gita juga meyakinkan bahwa mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat pun bisa mencapai pembebasan. Dari gita, masyarakat Bali bisa mendapatkan inspirasi untuk memilih jalan tengah, yakni mengawinkan logika dan perasaan. Jalan inilah yang disebut dengan *madyatmika* (jalan tengah), yang terkenal di Bali dengan sebutan *kadyatmikan* (jalan kebijaksanaan).

adalah teologi sosial. Teologi sosial yang berasal dari garis besar teologi Hindu yang bernama *advaita*, meletakkan ketuhanan pada setiap elemen kehidupan. Sehingga kebahagiaan adalah rangkaian gerak bersama. Dengan demikian, pembebasan adalah gerakan sosial, bukan gerakan individu. Pada teologi seperti inilah, Hinduisme berada pada semangat pembebasan dunia.

Jika masyarakat Bali menganut teologi ini, harus tersedia ruang-ruang yang lebih luas bagi orang lain untuk mengekspresikan dirinya. Sumbu kesucian harus digerakan, bukan lagi pada diri sendiri atau pada kekuasaan (raja), tetapi kepada seluruh elemen kehidupan. Inilah gerak *sungu* (terompet), *bajra uter* dan *ketipluk* Rsi Markendya yang menyemangati gerakan pembebasan sosial. Semua orang harus menari dalam irama kehidupan untuk menemukan keseimbangan yang sejati. Semua orang harus ikut berputar, mengelilingi api suci yang dinyalakan sang pendeta.

Tarian tersebut adalah kerja (*karma*). Setiap orang mesti bekerja, untuk mencapai kemakmuran bersama. Ruang-ruang mestilah diatur, bukan dikuasai, sehingga akan selalu tersedia ruang-ruang untuk kesucian. Pada ruang-ruang seperti itulah, setiap orang bisa mengembangkan kerohaniannya, sehingga tercapai keseimbangan yang sejati. Jalan ini sebenarnya bukanlah jalan ekstrem, tetapi hanya merupakan jalan tengah yang dalam istilah Hindu disebut dengan *madyatmika*. Jalan tengah ini adalah jalan untuk mengembangkan kebijaksanaan, bukan kerakusan individu.

Pada garis-garis teologi seperti itulah, sebaiknya kebijakan pemerintahan diletakkan, sehingga pemerintahan tidak bersumbu pada kesejahteraan orang perorang, tetapi kesejahteraan bersama. Pembukaan UUD 1945 jelas-jelas sudah mengamanatkan garis-garis tujuan bernegara yang seperti itu. Dengan demikian, setiap pemerintahan mestilah mengemban amanat tersebut. Mahatma Gandhi mengingatkan kembali setiap orang untuk menjadi *satyagraha*, seperti yang diajarkan Weda-weda. *Satyagraha* artinya teguh memegang amanat. Sebab, hanya orang-orang yang

Polemik Uluwatu, Pergeseran Menuju Teologi “Semu”

Polemik radius kesucian pura di Pura Uluwatu berjalan tanpa kesudahan. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menyatakan, Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi bhisama kesucian pura justru telah usang, tidak mengikuti dinamika masyarakat. Pernyataan itu disampaikan sesudah berdialog dengan Pemkab Badung dan tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian, bhisama kesucian purapun sebenarnya mesti mendapatkan penelaahan kembali agar sejalan dengan dinamika masyarakat. Tetapi benarkah dinamika masyarakat Bali sudah berada sejauh itu? Bagaimanakah dinamika masyarakat tentang pandangan kesucian tersebut bisa begitu berubah?

Pandangan tentang kesucian berasal dari teologi masyarakat Bali. Teologi masyarakat Bali, dari waktu ke waktu, memang terus berubah. Ketika Rsi Markendya datang ke Bali sekitar abad ke-7 Masehi, beliau menemukan teologi masyarakat yang menyatakan bahwa Tuhan hadir pada setiap jengkal tanah dan air Bali. Bahkan pada elemen terkasar sekalipun (*bhuta*), jiwa ketuhanan tetap hadir. Dengan demikian, setiap jengkal tanah dan air adalah manesfestasi dari kesucian itu sendiri. Pandangan teologi seperti ini tergambar pada teks-teks Bhuwanakosa yang sering dikaitkan dengan Rsi Markendya.

Teologi ini menjelma menjadi pola “pengaturan” sumber daya alam, bukan “penguasaan” sumber daya alam. Tanah dan air adalah hakikat ketuhanan itu sendiri. Dengan demikian, tanah dan air adalah anugrah untuk semua orang. Pola pengaturan pengairan yang dilakukan oleh organisasi sosial ekonomi, seperti subak berakar pada teologi seperti ini. Sehingga pada organisasi seperti subak, tidak ada sawah hak milik, tetapi sawah *ayah-ayahan* (sawah karena kewajiban untuk mengerjakan, bukan hak).

Pada abad ke-9 Masehi, birokrasi kerajaan Jawa mulai berlaku di Bali, dibawah pemerintahan Dinasti Warmadewa. Birokrasi kerajaan memerlukan sumber-sumber daya untuk menjalankan roda pemerintahan. Birokrasi kerajaan juga tidak lagi menganut teologi lama. Kerajaan menganut teologi bahwa ketuhanan didunia berpusat pada sang raja. Raja adalah puncak kesucian itu sendiri, sehingga segala sesuatunya berada dalam perintah sang raja. Hubungan raja dengan rakyat adalah hubungan *kawula lan gusti* (hamba dengan tuannya). Rajalah yang akan menyelematkan rakyat, karena raja adalah penjelmaan (awatara) Tuhan di dunia. Tak ada jalan keselamatan di luar pintu sang raja. Dengan teologi seperti itu, pola “pengaturan” berubah menjadi pola “penguasaan” sumber daya alam.

Kedatangan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, tidak merubah keadaan ini. Raja-raja yang ditunjuk Majapahit itu, tetap mensumbangkan kesucian pada diri sang raja, sebagai puncak kesucian. Pola “penguasaan” terhadap sumber daya alampun semakin menjadi-jadi. Kaum bangsawan menguasai sejumlah tanah untuk mempertahankan kesetiaan pengikutnya. Keadaan ini meruncing menjadi berbagai bentuk peperangan antar bangsawan pada sekitar abad ke-17 – 19 Masehi, untuk merebut tanah-tanah subur, milik kaum bangsawan lainnya.

Belanda datang ke Bali menemukan kondisi sosial-politik seperti itu. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengakui hak penguasaan terhadap sumber daya alam, tidak hanya kepada kaum bangsawan tetapi juga kepada seluruh rakyat. Sehingga sejak Tahun 1930 –an, perubahan hak milik atas tanah terus terjadi, sampai era republik ini, melalui peraturan-peraturan agraria. Perubahan ini tentu saja menggeser teologi masyarakat Bali, dari teologi sosial menuju teologi yang menjadikan diri sendiri sebagai sumbu kesucian. Sehingga kesucian purapun terdesak sampai pada tembok (penyenger pura), di luar penyenger adalah tanah “penguasaan”, bukan tanah *ayah-ayahan* (kewajiban).

Teologi yang menjadikan diri sendiri sebagai sumbu kesucian adalah teologi kaum maya. Dalam Vedanta, teologi ini bernama

mayavadi (jalan semu). Penganut *mayavadi* tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, karena mereka hanya melihat kepentingan dirinya sendiri, tanpa mau melihat kepentingan orang lain. Mereka berpikiran bahwa pemenuhan kebutuhan diri sendiri adalah kebahagiaan (tujuan hidup). Jika setiap individu bahagia maka masyarakat akan bahagia. Dunia modern berjalan dengan teologi seperti ini, sehingga pandangan kesucianpun memang telah berubah, menuju pojok sempit sisa-sisa kebutuhan manusia terhadap ruang.

Masyarakat Bali tidak bisa mengelakan keadaan ini. Ruang-ruang kesucian tergeser terus menerus. Fenomena pedagang di Besakih, dan juga tempat-tempat lainnya, menunjukkan pergeseran yang sangat signifikan terhadap pandangan tentang kesucian. Kesucian tidak lagi terdapat pada tubuh, tetapi pada jiwa. Teks bhuwanakosa yang menyatakan bahwa *bhuta* (elemen terkasar) juga merupakan aliran kesucian, sudah tidak dimaknai lagi. Manusia sudah tidak perlu lagi perawan atau perjaka, yang penting hati saling mencintai. Tubuh dan jiwa dipisahkan, seperti pemisahan pura dengan lahan sekitarnya oleh sebuah tembok.

Pergeseran ini mulai tampak jelas ketika bom pariwisata melanda Bali sekitar Tahun 1985-an. Pertentanganpun akhirnya kelihatan pada pembangunan BNR di Tanah Lot, sekitar Tahun 1994-an. Pada pertentangan ini, batas-batas kesucian akhirnya terpojok hanya sampai 5 Km dan 2 Km, melalui perjuangan berat. Batas-batas itupun, kini semakin sempit lagi sejalan dengan perubahan pandangan kesucian masyarakat. Jadi, pergeseran pandangan kesucian, memang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pergeseran ini berjalan seolah-olah kepada “jiwa”, padahal kenyataannya kosong belaka (*maya*).

Perenungan Tujuan Sosial

Pada kondisi seperti itu, masyarakat Bali perlu merenungkan kembali tujuan-tujuan hidupnya. Jika kesejahteraan sosial menjadi tujuan kehidupan maka kendaraan teologinyapun harus berada pada rel yang benar. Kendaraan teologi untuk kesejahteraan sosial

dari Bali dataran yang ditinggal di sekitar desanya. Konflik di Pura Dalem Balingkang juga menggambarkan penolakan Desa Sukawana terhadap klaim kelompok bangsawan dari Bali dataran, terhadap upacara terbesar di Pura Dalem Balingkang. Konflik ini memenangkan Jro Gede Sukawana yang dipercaya memiliki hak orisinil terhadap upacara di Pura Dalem Balingkang. Bangsawan Bali dataran, yang sudah mulai redup kekuasaan dan keuangannya, kemudian mengundurkan diri secara perlahan.

Pasca kemerdekaan, politik kasta yang direkonstruksi Belanda mulai memudar. Masyarakat Bali pada Tahun 1950-an menyatakan komitmen untuk menjadi satu saudara, karena sama-sama merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Tetapi peran sosial adat dan agama, mulai dirambah pada elite politik baru. Mereka mulai memberikan dukungan dana untuk upacara-upacara besar di pura-pura tertentu, untuk memelihara kepatuhan politik. Politik-politik klan pun mulai kelihatan, dengan berbagai tujuan. Perkembangan ini sempat memudarkan dan menjatuhkan gengsi masyarakat Bali Aga dan Bali Mula. Antropolog David J. Stuart-Fox yang menulis tentang Pura Besakih mencatat bahwa Pura Bali Mula di Besakih, hampir saja ditinggalkan karena pengikutnya telah beralih kepada klan lain yang lebih bergengsi. Tetapi, kelompok Bali Mula ini kemudian balik kembali untuk memperbaiki Pura Bali Mula tersebut karena tertimpa berbagai penyakit yang diduga karena mereka lalai terhadap puranya.

Gerakan sponsorship, yang sebelumnya dimainkan penguasa Bali-Majapahit, kelihatan direkonstruksi kembali pada dasa warsa ini. Bahkan lebih jauh lagi, Unesco dan lembaga dunia lainnya mulai memainkan perannya. Pola-pola ini hanya mengulang sejarah di masa lalu, dengan pengembangan kasta-kasta baru yang berpusat pada penguasaan kapital. Intelektual-intelektual pun kemudian akan terbagi-bagi lagi seperti di masa lalu, menjadi kelompok-kelompok seperti kelompok pendeta yang beraliran Shiwa-Buddha yang mendapatkan sponsor negara dan kelompok *sengguhu* yang tak mendapatkan sponsor negara.

teguh memegang amanat (*satyagrahi*), yang akan mencapai kebebasan.

Oleh karena itu, pemerintah mesti menjadi *satyagrahi*. Jika pemerintah berada dalam jalan *satyagraha*, orang-orang pemerintahan tersebut akan berada pada jalur untuk menyelematkan masyarakat dan diri mereka sendiri. Tetapi jika sebaliknya, mereka akan berada pada jalan-jalan yang tidak menyelematkan masyarakat, sekaligus tidak menyelematkan dirinya. Weda-weda, baik dalam Nitisastra (ilmu pemerintahan) ataupun kitab-kitab yang lainnya, mengingatkan semua itu kepada setiap pemimpin. Dengan demikian, sudah sepantasnya, pemerintah kembali memeriksa rel-rel keretanya, sehingga sampai pada tujuan-tujuan yang diamanatkan bagi setiap pemerintahan di negeri ini.



Konflik Adat, Benang Kusut Politik Masa Lalu

Masyarakat Bali, belakangan ini, mendapatkan berita perkelahian (konflik) antar banjar, dengan berbagai latarbelakangnya. Perebutan pura, klan dan sejenisnya menjadi latarbelakang konflik-konflik tersebut. Konflik ini sering berujung pada pemagaran rumah, sampai pelemparan rumah yang sangat memalukan bagi masyarakat Bali umumnya yang cinta damai. Mengapa konflik-konflik seperti itu tak urung usai di Bali? Benarkah masyarakat Bali, adalah masyarakat yang tidak bisa memenejemen konflik di tengah-tengah sistem sosialnya telah berlangsung lama?

Masyarakat Bali mengalami perkembangan yang panjang sampai pada masa kini. Pada awalnya, mereka tinggal di gua-gua tanpa sistem sosial. Ketika itu, mereka kerap berkonflik, memperebutkan sumber daya alam yang salah satunya ada air. Rsi Markendya datang bersama orang-orang Aga ke Bali, memperkenalkan sistem *pasuwakan* (dialog berkeadilan), untuk membagi sumber daya yang terbatas tersebut. Sistem ini kemudian menjadi subak, seperti yang diwarisi Bali sampai sekarang. Subak ini telah berkembang jauh sebelum ada kerajaan di Bali.

Kerajaan mulai ada di Bali pada masa Sri Kesari Warmadewa dan Ugrasena memasuki abad ke-10 Masehi. Pada era ini, Mpu Kuturan memperlihatkan kejeniusannya dengan membangun *pakeramaan* di Bali. Pada era ini, konflik-konflik perbatasan antar *pakeramaan* dapat diselesaikan. Perebutan lahan-lahan baru, misalnya pembukaan hutan, tidak lagi terjadi sebab kerajaan telah mengambil tugas tersebut sebagai mediator.

Pada era Shri Aji Jaya Pangus abad ke-12 Masehi, konflik terjadi antara kerajaan dengan masyarakat berkaitan dengan perpajakan yang relatif baru pada masa itu. Shri Aji Jaya Pangus, Raja Bali ketika itu, rupanya sudah mulai berkenalan dengan Cina

sehingga mulai menerapkan sistem perpajakan kepada masyarakat desa. Sistem ini menimbulkan berbagai konflik. Konflik-konflik itu terlihat pada prasasti-prasasti yang dimunculkan raja ini, yang kebanyakan berisi tentang penetapan-penetapan pajak, serta berbagai keringanannya khusus bagi desa-desa tertentu.

Pasca Majapahit masuk ke-Bali sekitar abad ke-14 Masehi, konflik mulai ke ranah persaingan klan, terutama dua klan besar, yaitu Bali Aga dan Bali-Majapahit. Pejabat-pejabat Majapahit memasuki desa-desa dengan *piagem* atau *pamancangah* yang menceritakan asal-usul mereka sebagai bangsa penakluk (Majapahit). *Piagem* tersebut membuat orang-orang Bali Aga terpinggirkan sebab mereka tidak paham teks, sehingga mereka (Bali Aga) sama sekali tidak memiliki sejarah asal-usul yang ditandatangani raja. Mereka hanya memiliki prasasti-prasasti yang menerangkan status desa, bukan status klan dalam hirarki pemerintahan Majapahit.

Penyebaran pejabat-pejabat ini tak jarang menimbulkan penolakan pada masyarakat Bali Aga. Tetapi pemerintahan demi pemerintahan yang berlangsung di Bali, sama sekali tidak menguntungkan Bali Aga. Bahkan penjajahan Belanda pun tidak berpihak kepada Bali Aga. Belanda lebih jauh lagi melakukan rekonstruksi terhadap kasta, serta menetapkan berbagai hukum-hukum adatnya. Rekonstruksi ini memang mendapatkan penolakan, sampai pada persidangan Raad Kerta di berbagai daerah di Bali, tetapi politik kolonial memenangkan rekonstruksi Bali-Majapahit ini, sebagai konstruksi sosial masyarakat Bali. Sebab konstruksi sosial tersebut berbentuk penjajahan, dengan menggunakan kebudayaan sebagai senjatanya.

Penjajahan dengan pola seperti itu, meringankan biaya pengelolaan Belanda, sebab Belanda dapat menjajah dengan menggunakan tangan bangsa terjajah sendiri. Namun penolakan Bali Aga (Bali pegunungan) terhadap sistem ini masih terus terjadi. Studi tentang Bali Aga yang dilakukan Thomas A. Reuter misalnya, menggambarkan penolakan masyarakat Tembok di Buleleng untuk berbahasa Bali alus dengan kelompok bangsawan

adalah ketakutan manusia Bali yang terbesar. Jika gerhana seperti itu datang, perlu ada aktivitas ritual. Aktivitas ritual adalah bentuk dari penenangan diri setelah adanya ketegangan, bahkan ketakutan.

Pada masyarakat tradisional, fenomena alam seperti itu senantiasa mendapatkan mitos dari kalangan berpengaruh, untuk menjaga ritual (persembahan) kepada Tuhan. Sebab pada kondisi seperti itulah, kekuasaan mendapatkan statusnya sebagai “penjaga keselamatan dunia”. Di tataran ini, kekuasaan kemudian mendapatkan citra kebaikan sebagai pelaksana ritual (*Sang Yajamana*), sebab sumber daya untuk melakukan ritual melekat pada kekuasaan itu sendiri. Jadi, fenomena alam dengan mitologi ketakutannya adalah bagian dari pembangun citra kekuasaan, sebab pada titik inilah, masyarakat harus menyandarkan keselamatannya pada kekuasaan.

Pada masyarakat Indonesia modern –apalagi Bali modern– cara-cara tradisional ini masih berlangsung. Kekuasaan modern di Indonesia, memerlukan mitos ketakutan untuk menjaga citranya. Dengan alasan inilah, mafia lahir sebagai bentuk teror. Setelah teror tersebut menjadi bagian dari ketakutan masyarakat maka kekuasaan akan menjadi pemimpin ritual, bukan untuk membunuh teror, tetapi hanya sekedar membunuh binatang korban sebagai simbol hancurnya segala bentuk kejahatan. Jadi, dari dulu sampai sekarang, kekuasaan hanya memainkan simbol-simbol untuk menenangkan masyarakat, sehingga tidak pernah mengobati, apalagi membunuh kejahatan yang sebenarnya. Masyarakat pun seringkali juga berhenti sampai pada titik simbol seperti itu.

Pada era reformasi ini, kenyataan ini tampak sekali. Dengan hanya menggulingkan simbol kekuasaan diktator, masyarakat sudah merasa ditenangkan dengan segala bentuk “mafia”, padahal pada kenyataannya, “mafia” masih terus ada. Jadi, masyarakat masih terus berada pada tataran masyarakat tradisional, belum bergerak pada masyarakat modern yang mengandalkan rasionalisme dan pengamatan, sehingga suasana pikirannya seringkali digelapkan oleh permainan citra dengan simbol-simbol tertentu.

Pola ini, telah meminggirkan *sungguhu, rsi, bhujangga* dan *dukuh* ke dalam kelompok pendeta pinggiran sebagai kalangan rakyat biasa. Sedangkan pendeta beraliran Shiwa-Buddha yang merupakan agama resmi Majapahit menempati statusnya sebagai *bhagawanta*, intelektual pemerintahan yang menjadi pimpinan proyek (Pimpro) upacara-upacara istana (negara di masa lalu). Pada kasus-kasus konflik yang memanas, pendeta *sungguhu* kadang-kadang diikutsertakan dalam proyek, tetapi mendapatkan jabatan yang lebih rendah, dengan jadwal terbang (*mamuja*) yang lebih sedikit.

Rekonstruksi-rekonstruksi negara di masa lalu, yang menitikberatkan kepada kekuasaan semata, menimbulkan api dalam sekam. Ketika kekuasaan baru di era demokrasi ikut menaburkan dana pada upacara-upacara tersebut untuk persaingan politik, konflik memanas lagi. Seluruh pihak kembali membuka *piagem, purana, pamancangah* dan sejenisnya yang telah usang. Sebab mereka mulai menuntut peranserta dalam upacara yang menggunakan uang negara tersebut. Ikutan-ikutan kultural tentang hal ini melebar sampai ke desa-desa, sebab pusat-pusat memerlukan ekor-ekor untuk melanggengkan status mereka -setidak-tidaknya sebagai Pimpro Upacara di berbagai pura besar.

Babad-babad baru dengan berbagai klaim-klaim historisnya, kemudian menjadi pemandangan sehari-hari di Bali. Klaim-klaim ini memerlukan pengesahan-pengesahan melalui upacara yang kurang lebih menghabiskan dana sekitar Rp.400 juta-an. Politisi berseliweran menggunakan kesempatan itu untuk menarik simpati dengan sumbangan-sumbangan mereka. Perang jor-joran upacara, menjadi tak terelakkan sehingga menimbulkan berbagai stres-stres berat di tingkat keuangan. Pasca upacara, konflik kepentingan malah semakin melebar dan menjadi pemandangan sehari-hari.

Rekonstruksi Kearifan Mpu Kuturan

Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Bali memang lebih nyaman berada pada era anarkhi berkebudayaan pada masa Rsi Markendya. Sistem *pasuwakan* berjalan dengan baik. Masyarakat

Bali bisa berbagi kesejahteraan dengan baik. Tetapi pada era sekarang, keadaan anarkhi tidak akan bisa idial seperti itu. Peran negara dalam berbagai bentuk pengaturannya memang diperlukan, tetapi pengaturan mesti lebih membangun kemandirian. Penekanan-penekanan kekuasaan seperti yang terjadi pada era Bali-Majapahit, telah terbukti gagal membangun keharmonisan sejati. Keharmonisan yang terbangun, hanya keharmonisan semu yang seringkali meledak menjadi konflik-konflik yang laten.

Peran-peran negara yang idial pada masa kini, adalah peran-peran seperti Mpu Kuturan. Beliau hanya merupakan perancang sistem sosial. Masyarakat kemudian menjalankan sistem sosial tersebut secara mandiri. Pada era Majapahit, itu tidak terjadi sebab pejabat-pejabat pusat memasuki sistem-sistem sosial sehingga menimbulkan berbagai konflik. Pola itu hendaknya tidak diulang lagi, seperti pada masa kolonial dan republik awal. Pola-pola itu mesti dialihkan ke dalam peran-peran yang mandiri dari masyarakat.

Negara (pemerintah) hendaknya hanya mengambil peran-peran fasilitator yang cerdas merumuskan aspirasi-aspirasi masyarakat ke dalam pengaturan-pengaturan yang berkeadilan. Era demokratisasi yang berlangsung saat ini, mestinya mendorong lahirnya masyarakat seperti itu. Tetapi demokrasi saja tidak cukup tanpa diikuti peningkatan tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi harus seiring dengan peningkatan kecerdasan masyarakat, untuk menuju masyarakat seperti yang dicita-citakan Mpu Kuturan yaitu masyarakat mandiri (*sarvodaya*).

Kekuasaan dan Mafia, Transisi Masyarakat Tradisional

Akhir-akhir ini, masyarakat mendapatkan suguhan informasi tentang mafia peradilan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tataran nasional, kriminalisasi pimpinan KPK menjadi isu yang terus memuncak. Pada tataran daerah, seorang saksi mengaku disuruh berbohong oleh advokat pada sidang kasus pembunuhan “Prabangsa”. Indonesia, bahkan Bali telah disodori sandiwara “kuasa” yang secara mitos memegang etik yang teguh. Bagaimana ini bisa terjadi di daerah yang secara tradisi mendewakan moral? Bagaimana gerakkan, bahkan transformasi moral bisa memerosokkan sebuah masyarakat ke panggung kemunafikkan yang semakin terus terbuka?

Pada masyarakat tradisional seperti Bali, kekuasaan adalah perwujudan dewa di dunia. Pada kekuasaan, masyarakat berharap keselamatan di dunia ini, sehingga perwujudan kekuasaan sebagai citra moral yang tertinggi merupakan tuntutan yang agung. Demi membangun citra moral yang tinggi, kekuasaan tidak akan segan-segan menutupi aib dengan pembunuhan –walaupun Weda-weda mengatakan tanpa kekerasan adalah kebenaran tertinggi. Studi kekuasaan tradisional di Mengwi yang dilakukan peneliti Belanda menunjukkan sebuah teori betapa air suci yang di dalamnya adalah “darah” harus dilindungi dari citra-citra buruk.

Akan tetapi, kekuasaan tidaklah berjalan sedemikian baiknya. Mitologi Hindu dalam Wariga –sebagaimana ditulis pada Lontar Bhagawan Garga- menerangkan betapa kekuasaan waktu saja tidak luput dari *pakakalaan* (unsur keraksasaan). Sebab waktu juga terdiri dari terang (*ketu*) dan gelap (*rau*). Bahkan kesempurnaan “waktu” yang diwujudkan dengan *purnama*, senantiasa terancam pada keganasan Kala Rau. Terang bisa saja menjadi gelap seketika ketika Kala Rau memakan sang rembulan. Secara mitologi, ini

Nyepi, Gerakan Kehidupan Menuju Kemuliaan

Pada 16 Maret 2010 ini, umat Hindu kembali merayakan Nyepi. Nyepi kali ini, merupakan pergantian Tahun Saka dari 1931 menuju 1932. Pergantian tahun ini terjadi dimana matahari berada di sekitar katulistiwa. Tahun Saka yang menggunakan peredaran matahari (solar sistem) menempatkan 21/22 Maret sebagai tahun baru, sedangkan umat Hindu-Indonesia yang menggunakan tahun peredaran bulan dan matahari (lunar-solar sistem) menempatkan tilem (bulan mati) yang terdekat dari 21/22 Maret sebagai permulaan tahun baru. Bagaimanakah umat Hindu mesti memaknai pergantian tahun ini? Bagaimanakah relevansi *Catur Brata Penyepian*, sebagai pengendalian diri dan sosial dalam konteks kekinian?

Pada Nyepi 2010 ini, masyarakat Bali sedang menghadapi perhelatan politik lokal dan nasional. Secara lokal, masyarakat Bali akan menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lima kabupaten/kota. Secara nasional, masyarakat Bali sedang melihat sebuah pemandangan ketidakakuran lembaga legislatif dan eksekutif (presiden), terutama dalam kasus Bank Century. Semua perhelatan itu, menunjukkan sebuah permainan dari nafsu-nafsu kekuasaan, yang muaranya pada kesejahteraan rakyat masih layak untuk dipertanyakan.

Perhelatan politik lokal dan nasional tersebut, tidak lebih daripada pertarungan dunia *maya*, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Masyarakat diajak menonton tentang kegagahan anggota DPR untuk berargumentasi dan kepiawaian presiden untuk menjawab. Masyarakat juga diajak menonton gambar-gambar calon bupati/wali kota yang berbudaya atau yang lainnya, tetapi semua itu sama sekali berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Semua itu, sama sekali tidak ada

Secara teologis, masyarakat Hindu sebenarnya telah mendapatkan pelajaran tentang metode untuk mencari kebenaran. Bhagavad Gita II.63, Shri Krishna mengingatkan kepada penjagaan kestabilan *buddhi* (penalaran) untuk keselamatan diri. Pada ayatnya sebelumnya (II.62), Shri Krishna telah mengingatkan betapa penampakan indrawi harus senantiasa diwaspadai, karena bisa menimbulkan kekecewaan. Akan tetapi, alur sungai kebijaksanaan senantiasa mendapatkan tafsir dalam wadah kepentingan, sehingga secara sosial, Hindu terkadang tidak memunculkan aspek pembangunan kesadarannya.

Rsi Patanjali dalam mengajarkan metode yoga yang kontemplatif dalam penyelidikan tentang pembangunan kesadaran, mengajarkan sebuah kontemplasi (*dhyana*) baru dapat bergerak maju bila sepuluh bentuk pengendalian diri dapat dilaksanakan dengan sempurna. Salah satu bentuk pengendalian dirinya adalah *anresangsy* yaitu membersihkan kepentingan pribadi, termasuk golongan.

Memilah Kepentingan

Dalam perjalanan masyarakat ini, masyarakat telah banyak mendapatkan pengetahuan, bahkan idiologi. Pengetahuan, apalagi idiologi, dalam masyarakat tradisional adalah “turunan Tuhan” yang tidak pada tempatnya mendapatkan kritik. Pengetahuan tradisional diajarkan dengan kepatuhan yang bulat, tanpa kritik dan dialog. Jika suasana ini masih menggelincir pada masyarakat Bali modern, maka ketersesatan pada jalan pengetahuan –bahkan pada jalan kesucian- bisa menjadi nyata.

Pengetahuan *wariga* di Bali mengajarkan bahwa waktu tidak selalu terang. Dengan demikian, waktu mendapatkan pemilahan terang dan gelap. Secara mitologis, *wawaran* dipilah dengan *pakakalaan*, sehingga unsur-unsur rintangan (*kala*) dapat terdeteksi pada setiap *wawaran*. Pada tradisi penentuan *dewasa* didapatkan sebuah tradisi bahwa jika rintangannya terlalu besar maka penggunaan waktu tersebut mesti dihindari. Jadi, metode pemilahan dalam terang ada gelap, dan sebaliknya terjadi dengan

baik. Demikianlah Bhagawan Garga membangun pengetahuan dengan pemilahan terang dan gelap secara rinci dan teliti.

Metode Bhagawan Garga ini bisa menjadi cakrawala untuk membuka pembangunan kesadaran masyarakat Bali. Masyarakat Bali bisa belajar bahwa pada setiap terang ada sisi-sisi kegelapan. Bahkan pencerahan yang sempurna (*purnama*) senantiasa mendapatkan ancaman dari cengkeraman kegelapan (*rau*). Dengan pengetahuan seperti ini, pemilahan menjadi metode yang efektif. Secara tradisi, masyarakat Bali mengenal *pamahyuan* untuk menghilangkan sisi-sisi gelap tersebut. *Pamahyuan* dalam transformasi kesadaran adalah pembersihan pengetahuan dari tafsir-tafsir kepentingan, yang diawali dengan sebuah pemilahan.

Dengan metode ini, masyarakat Bali bisa bergerak menjadi masyarakat modern dengan mengambil langkah kritis pada setiap pengetahuan. Sebab, pengetahuan sering menjadi alat “rekayasa sosial” yang paling efektif. Tafsir ideologi, bahkan agama, juga mesti mendapatkan penelaahan kritis, sebab agama juga sering merupakan alat untuk melakukan “rekayasa sosial”. Penindasan dengan menggunakan dalil-dalil agama, seringkali terjadi. Pada pojok seperti itu, Bhagawan Garga berdiri dengan metode-metode kritisnya.

Bhagavad Gita II.67 menjelaskan, pikiran yang terjebak pada indrawi akan senantiasa terombang-ambing seperti perahu dalam samudra yang luas. Jika masyarakat ini tidak ingin terus terombang-ambing, mereka harus membuka tabir citra, dengan memilah kepentingan dan pengetahuan sejati. Sisi kepentingan, walaupun merupakan rekayasa kekuasaan, harus terus dibersihkan dari pengetahuan, apalagi dari agama. *Pamahyu* yang sering dipraktikkan dalam ritual mesti mendapatkan tafsir sebagai proses pembangunan kesadaran sosial, sehingga proses ini menjadi bagian dari pergerakan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

Dengan metode seperti itu, kekuasaan mestilah didudukkan pada posisi yang wajar, bukan dewa. Sisi-sisi gelapnya, seperti mafia dan yang lainnya, harus diakui, sehingga dapat dibersihkan.

Pengingkaran terhadap sisi-sisi gelap, apalagi dengan bentuk-bentuk kejahatan seperti yang terjadi pada kekuasaan tradisional, haruslah ditransformasi. Kekuasaan modern mestilah berakar pada kejujuran pengetahuan yang telah mengangkat peradaban ini.



sehingga jiwa utama (*atma*) bisa memancar. *Atma* adalah perwujudan Shiwa di dalam diri manusia. Jika jiwa utama telah memancar maka akan muncul kesadaran, untuk mengangkat derajat sang diri. Diri harus menjadi lebih mulia setelah mengalami pengalaman dunia, bukan sebaliknya. Jadi, jiwa utama harus terus terpancar untuk gerakan kehidupan yang menuju kemuliaan, sehingga gerak tenaga sakti (*pradhana*) benar-benar mengarah kepada *purusha* (ke tengah atau inti), bukan semakin jauh ke luar sampai *catus pata*, bahkan simpang siur kebingungan.



hubungannya dengan harga beras dan sayur mayur. Pasca drama tersebut, masyarakat kembali melihat keseharian mereka. Mereka yang bersalah atau benar, tetap saja melakonkan dramanya masing-masing, dengan segala untung dan ruginya.

Pada konteks tersebut, *catur brata penyepian* menjadi bermakna. Brata bermakna pengendalian diri. Pengendalian diri artinya tidak larut dalam iruk pikuk dunia. Manusia mesti melakukan kontemplasi (perenungan), untuk mendalami hakikat dari aktivitas manusia. Dengan kontemplasi seperti itu, masyarakat diajak untuk melihat dengan seksama mana yang disebut dengan kebenaran dan kepalsuan. Kebenaran adalah fakta yang tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kepalsuan adalah aktivitas seolah-olah benar, tetapi menutupi berbagai fakta yang bobrok.

Secara filosofis, umat Hindu senantiasa diajarkan untuk mengungkapkan tabir *maya*. Tubuh ini, merupakan *Panca Maya Kosa* yang penuh dengan keadaan seolah-olah. Gerakkan tubuh, kedipan mata bahkan lambaian tangan kemesraan hanyalah *maya* semata. Orang yang melakukan pendakian spiritual, mestilah mengungkap keadaan yang lebih dalam lagi. Keadaan tersebut adalah *cita* (motivasi), *buddhi* (kesadaran), *mahat* (realisasi diri) dan *ahamkara* (pencapaian diri). Bila semua itu telah terungkap, seseorang baru bisa mengungkapkan hakikat yang tertinggi, yaitu *purusha* (kebenaran) dan *pradhana* (gerakkan kebenaran atau keselamatan).

Maharsi Markendya menerjemahkan konsep ini di Bali sebagai *lingga-yoni*. *Lingga* adalah gunung sebagai sumber kesejateraan, sedangkan *yoni* adalah pantai sebagai tempat penyucian. Di tengah-tengah *lingga-yoni*, dibangun *kahuripan*, tempat kehidupan manusia. Semua konsep tersebut digambarkan dalam *Purana Batur Kalawasan*. Jadi, aliran kehidupan digerakan dalam arus *pradhana* menuju penyucian. Dengan demikian, hakikat *purusha* dan *pradhana* benar-benar mengangkat derajat kehidupan manusia, menuju kesucian, bukan sebaliknya.

Mpu Kuturan menata ini dalam bentuk yang lebih kecil pada setiap desa, sehingga semua aktivitas desa bergerak menuju

kesucian. Dari pura bergerak menuju masyarakat, selanjutnya *patirtan* (air suci) untuk kembali ke pura. Demikianlah lingkaran kehidupan *purusha* dan *pradhana* yang menginspirasi kehidupan desa di Bali. Melalui lingkaran kehidupan seperti ini, kehidupan spiritual dan sosial menjadi satu kesatuan. Ide-ide spiritual mengejawantah dalam kehidupan sosial.

Pada era feodal sampai modern ini, ide-ide spiritual seringkali hanya menjadi simbol. Pada era feodal, ide-ide spiritual “dipinjam” elite kekuasaan untuk meligitimasi bahwa kekuasaan juga suci. Padahal, kekuasaan hanya menjalankan gerakan “seolah-olah” pada level ini, sehingga ide-ide spiritual kemudian hanya berhenti pada simbol. Pada era modern, terjadi klasifikasi-klasifikasi yang memisahkan sakral dan sekuler, untuk membawa wilayah sekuler menuju kekotoran, sehingga kehidupan semakin terjerumus ke dalam lembah kekotoran.

Klasifikasi-klasifikasi seperti ini mulai terlihat sejak pedagang-pedagang Belanda, Cina dan Portugis memasuki Bali. Klasifikasi pertama yang terjadi di Bali adalah klasifikasi manusia atas *tri wangsa* dan *sudra*. Klasifikasi ini dilakukan para penguasa untuk membenarkan penjualan budak, sebab budak diambil dari kelompok *sudra* –yang menurut klasifikasinya memang kalangan budak. Pemerintahan Belanda merekonstruksi ulang hal ini pada Tahun 1912, untuk mendapatkan pekerja-pekerja sukarela, terutama untuk pembangunan jalan-jalan utama.

Pada era republik, eksploitasi manusia satu terhadap manusia lainnya, mulai dihentikan. Klasifikasi manusiapun mulai reda. Tetapi ambisi “penjualan” mulai merambah ke tanah, melalui klasifikasi tanah atas kawasan suci dan non-suci. Klasifikasi ini bertujuan untuk menjual tanah-tanah yang tidak termasuk kawasan suci. Pada masa ini, Parisada sebagai bagian yang bertanggungjawab terhadap klasifikasi seperti ini. Penjualan tanah ini, bahkan kemudian mulai merambah kawasan suci, sebab kawasan suci mulai dipersempit lagi jaraknya sampai batas *penyengker*. Gerak klasifikasi seperti ini jelas merupakan

rangkaian menuju pembodohan, kemiskinan atau penurunan derajat kehidupan lainnya.

Dengan kecenderungan seperti itu, *pradhana* (tenaga sakti) telah terarah kepada penurunan derajat kehidupan. Secara mitologi, gerakan ini seperti gerakan Dewi Uma yang mencari susu kehidupan, tetapi kemudian menjelma menjadi Durga yang menakutkan. Durga yang menakutkan hanya akan membawa kehancuran, sehingga Dewa Shiwa perlu turun ke dunia untuk mengembalikan wajah asli Sang Dewi. Beliau perlu turun untuk mencari Durga di *catus pata* (perempatan kebingungan), untuk diarahkan menuju arah kebenaran.

Demikianlah *maya* bermain memerosotkan kehidupan manusia.

Pada permainan seperti ini, kehidupan spiritual –bahkan kehidupan mulia, hanya permainan seolah-olah. Dengan demikian, agama dan realitas sosial sama sekali tidak berhubungan. Umat dengan bangganya melakukan upacara besar sambil mencari dana ke kafe remang-remang di wilayah desanya. Upacara yang sebenarnya merupakan puncak kebaikan, tidaklah hanya mendapatkan dukungan kebaikan, tetapi juga mendapatkan dukungan yang tidak baik. Kebaikan dan keburukan telah berlomba-lomba untuk mendukung upacara besar sebab itu hanya simbol, yang sama sekali tidak berhubungan dengan realitas sosial.

Realitas pada masyarakat bawah ini merupakan cerminan dari realitas pada lapisan atas (elite). Elite juga menyimpan permainan seolah-olah ini. Elite seringkali menunjukkan kedermawanan pada saat-saat Pemilu, tetapi itu sama sekali tidak menunjukkan sikap aslinya. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari mereka adalah koruptor-koruptor yang sedang berurusan dengan hukum.

Jadi, kedermawanan adalah penyembunyian dari dari sifat kerakusan yang meledak-ledak. Secara tidak sadar, gerakan “maya” ini benar-benar telah menjadikan Bali semakin angker – seperti Durga. Pada kondisi seperti itu, Shiwa perlu turun ke dunia untuk melakukan *panyupatan* (pembersihan).

Catur brata penyepian, adalah wadah untuk turunnya Dewa Shiwa. Sebab, dengan *brata*, badan akan menjadi terkendali

menjadi musuh bersama. Psikologi inilah yang terus berkembang, sehingga peristiwa 1965 yakni pembantaian terhadap saudara sendiri terjadi dengan ganasnya.

Keganasan ini sebenarnya telah terjadi antara abad ke-16 – 18 Masehi melalui perang saudara dan pengkhianatan yang berkepanjangan. Belanda kemudian menghentikan keganasan ini dengan penataan yang jelas agar Bali bisa menjadi tempat pelancongan. Tetapi perihnya peristiwa masa lalu masih membekas. Mereka kemudian menyalurkan ini dengan berbagai bentuk upacara *caru* yang mengorbankan binatang, sehingga suasana seolah-olah menang terus bisa digambarkan, meskipun hanya menang terhadap binatang yang tidak berdaya. Tradisi ini berasal dari tradisi sebelumnya, yang digunakan dalam rangka mobilisasi ke medan perang.

Tradisi kemenangan “seolah-olah” ini terus terjadi sampai saat ini. Pariwisata yang *glamour* sering dijadikan alasan kemenangan Bali. Tetapi pariwisata itu kenyataannya telah menempatkan masyarakat Bali sebagai pelayan yang merupakan kata ganti budak yang seolah-olah mendapatkan perlindungan hukum. Implikasinya meluas sampai pengiriman tenaga kerja di kapal pesiar, yang menempatkan mereka sebagai pekerja kelas menengah ke bawah. Pergerakan masyarakat Bali telah berbanding terbalik dengan pergerakan Bangsa Yahudi.

Bangsa Yahudi, pada awalnya adalah budak di Mesir, kemudian membebaskan diri menjadi petani di sekitar wilayah Palestina. Setelah tanah-tanah pertanian mereka dirampas karena perang, mereka mengembara menjadi pedagang. Pengembaraan ini menjadikan mereka penguasa dunia pada masa kini. Sedangkan masyarakat Bali pada awalnya adalah petani pada masa Rsi Markendya, selanjutnya menjadi budak bangsa sendiri, terus menjadi budak bangsa asing entah sampai kapan?

Jika masyarakat Bali terus hanya merayakan kemenangan “seolah-olah”, mereka akan terus menjadi bangsa yang kalah. Pada saat ini, demokrasi di segala bidang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengakses ilmu pengetahuan dan

Kuningan, Puncak Kemenangan di Medan Kekalahan

Setiap 210 hari, umat Hindu merayakan Hari Suci Kuningan. Kuningan adalah hari puncak kemenangan. Hari pemberian kehormatan (medali) dalam bentuk *tamiang* kepada Shri Purusha (Shiva) yang telah mengobarkan api kemenangan. Umat juga mengaturkan *tebog* sebagai simbol *yoni* kepada Shiva yang memiliki perwujudan *lingga*, agar dunia senantiasa harmonis, dan terus berkembang. Prosesi pemujaan ini diakhiri dengan mengaturkan *endong* (bekal) kepada Shiva sebagai *Tapeswara* (Dewa Pertapa) agar beliau melanjutkan tapanya di Mahameru untuk keselamatan dunia. Semua prosesi upacara ini hanya simbol-simbol yang patut dipertanyakan realitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah benar masyarakat Bali pernah menang? Bagaimanakah seharusnya masyarakat Bali mengimplementasikan prosesi upacara ini dalam kehidupan saat ini?

Sejarah Bali jarang sekali mencatat kemenangan penduduk lokal. Dialog yang mengedepankan persamaan pertamakali terjadi pada masa Rsi Merkendya. Orang Bali Aga yang masuk bersama maharsi ini bisa membaur dengan orang Bali Mula untuk membangun perekonomian bersama. Mereka membangun *pasuwakan* (subak) untuk membangun desa-desa yang makmur. Mereka memiliki satu orientasi yaitu Pura Besakih sebagai pura bersama.

Setelah Rsi Markendya tiada, desa-desa itu mulai kedatangan para bajak laut. Mereka merampok hasil bumi yang merupakan hasil kerja keras mereka. Para tetua desa kemudian berembung untuk mencari pelindung bagi pulau ini. Sebagian besar dari mereka menyepakati untuk berlindung kepada kerajaan yang besar. Sebagian kecil lainnya, menyangsikan pemecahan masalah ini karena kerajaan juga akan mengurangi hasil panen mereka

dengan mengambil pajak. Bahkan, para raja bisa saja mengambil anak gadis mereka, seperti yang terjadi pada negeri tetangga. Tetapi sebagian besar dari mereka menyepakati untuk mencari pelindung ke negara yang kuat.

Kekuasaan hakim (ke-Rsi-an/Kenabhan), kemudian beralih kepada kekuasaan para raja. Kekuasaan kerajaan ternyata tidak menimbulkan ketenangan. Pada awal-awal, perang terjadi antara

Dinasti Warmadewa dengan Ugrasena. Pasca kemenangan Warmadewa, dinasti Mpu Sendok mengancam Bali. Persaingan ini berakhir dengan damai, melalui perkawinan Mahendra Datta dari Dinasti Isyana (Mpu Sendok) dengan Udayana Warmadewa dari Dinasti Warmadewa yang asal-usulnya bisa ditelusuri di Kamboja.

Pasca kerajaan-kerajaan ini, Bali selalu terkait dengan kondisi di pusat kekuasaan utama (Jawa). Apabila terjadi perubahan dinasti

di Jawa, misalnya dari Kediri ke Singasari maka Bali juga mengalami pergolakan. Tentara Singasari pernah menyerang Bali pada sekitar abad ke-13 Masehi. Pergeseran dari Singasari-Kediri-Majapahit juga membawa implikasi konflik di Bali. Gajah Mada

menyerang Bali pada abad ke-14 Masehi, yang juga pasti menimbulkan korban.

Pemerintahan raja-raja ini membuat masyarakat Bali berada dalam pusaran yang tidak diputar sendiri. Mereka pusing karena permainan di pusat kekuasaan. Mereka terus menjadi masyarakat pinggiran, yang berperang selalu kalah. Pusat-pusat kekuasaan di Jawa, pernah mengalami kemenangan sehingga mereka sempat membawa budak-budak dari negara jajahan yang disebut sebagai golongan *jaba* (dari luar). Sementara orang Bali tidak pernah mengalami hal itu, sehingga untuk menggambarkan dirinya sebagai pemenang maka saudara sendiri kemudian disebut *Jaba* (golongan masyarakat budak dari luar).

Tradisi memiliki orang *jaba* sebenarnya adalah tradisi para Ksatrya dari India. Setelah para ksatrya ini memenangkan perang di negara tetangga, mereka biasanya membawa budak-budak. Budak-budak ini disebut dengan *sudra* (golongan masyarakat budak dari luar). Budak-budak dari luar ini tidak mendapatkan

perlindungan hukum. Mereka bisa diperlakukan sesuka hati. Mereka tidak boleh diajarkan Weda (pengetahuan dan teknologi). Jika mereka mendapatkan pelajaran seperti itu, mereka bisa balik menyerang negara tersebut. Dengan datangnya budak-budak tersebut maka masyarakat India kemudian menjadi empat kelas, yaitu elite ilmuwan (*brahmana*), elite prajurit dan administrasi pemerintahan (*ksatrya*), masyarakat biasa (*vaishya*) dan para budak (*sudra*).

Oleh karena itu, masyarakat biasa yang berasal dari dalam negeri sebenarnya disebut *vaishya*. Kata “biasa” sebenarnya berasal dari kata *vaishya* yang lama-lama menjadi “biasa”. Orang *vaishya* ini memiliki perlindungan hukum dan hak sebagai warga kerajaan, sementara orang *sudra* tidak memiliki perlindungan hukum dan hak sebagai warga kerajaan. Kerajaan Bali yang tak pernah menang dan membawa budak kemudian mengikuti pola ini sehingga seolah-olah pernah menang, dengan cara menyebut saudara sendiri sebagai *jaba*.

Pada masa pemerintahan Jaya Pangus pada abad ke-13 Masehi, masyarakat Pengotan yang cerdas menolak penggolongan sebagai *sudra*, sehingga Shri Aji Pangus mengeluarkan Prasasti Pengotan yang mengesahkan masyarakat setempat sebagai *vaishya*. Itu terlihat dari prasasti-prasasti Jaya Pangus yang telah dibukukan Pemprov Bali. Usaha-usaha untuk membentuk golongan *jaba* sehingga seolah-olah Raja Bali pernah menang perang dan membawa budak (*panjak tatadan*) terus dilakukan. Tetapi itu terus mendapatkan perlawanan sehingga kondisi Bali penuh dengan kekerasan. Perang antar saudara untuk menempatkan saudara sendiri yang kalah sebagai *jaba*, terus terjadi.

Perang saudara yang lama ini tidak menguntungkan elite Bali secara psikologis. Mereka (para elite) cenderung menjadi pragmatis. Mereka bersedia bersekutu dengan orang asing asalkan mendapatkan kesempatan untuk menindas bangsanya sendiri. Mereka pun menjadi lebih senang melihat orang asing maju daripada melihat bangsanya sendiri maju. Jika ada satu atau dua orang yang maju dalam wilayah desa maka mereka serentak

upacara dengan menombak hewan tersebut, mulai dilakukan sebatas simbol. Jro Mangku biasanya hanya menyentuh hewan korban tersebut, kemudian menyemblihnya dilakukan di tempat pemotongan agar lebih heginis. Semua itu dilakukan demi kepentingan pariwisata, sebab pariwisata tidak ingin melihat sesuatu yang terlalu *wild life* (kehidupan buas) meskipun pariwisata menyukai hal yang demikian. Pariwisata juga condong sangat rentan dengan berbagai isu, yang salah satunya menyayangi binatang. Karena itu, pencincangan seperti di masa lalu, sudah sangat dikurangi agar tampak rapi di depan pariwisata. Semua ini berlanjut pada masa republik, tetapi pertunjukkan kekuasaan yang memamerkan kekerasan kerap terjadi dengan bentuk-bentuk yang berbeda.

Parisada, sebagai lembaga tertinggi umat Hindu, juga banyak menyuarakan keheginisan ini, sehingga praktik-praktik kekerasan terhadap binatang mulai surut. Bahkan, teologi baru turut mempengaruhi perjalanan upacara ini, yaitu teologi kasih sayang. Pada tataran ekstrem, beberapa kalangan menyuarakan penggantian korban binatang dengan berbagai pengganti, tetapi gerakan ini belum menjadi dominan di Bali. Gerakan-gerakan kasih sayang ini, yang berlangsung dari sekitar Tahun 1960-an, tidak menyurutkan perilaku kekerasan di Bali. Bahkan pada Tahun 1965, Bali mengalami puncak kekerasan.

Menuju Perdamaian

Pada perjalanan sejarah, gerakan upacara *caru* semata tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan kekerasan yang signifikan. Upacara Eka Dasa Ludra pada Tahun 1960-an, tidak menyurutkan kekerasan pada Tahun 1965. Eka Dasa Ludra pada Tahun 1979, tidak menyurutkan teror Orba terhadap berbagai aktivitas demokrasi. Eka Bhuwana menjelang Tahun 2000, tidak menyurutkan Bom Kuta beberapa waktu sesudahnya. Bahkan Upacara Karipu Baya, tidak menghilangkan sama sekali bom di Kuta. Beberapa waktu sesudahnya, bom meledak lagi di Kuta. Kenyataan ini menunjukkan bahwa upacara saja ternyata tidak

teknologi. Kesempatan ini harus terus digunakan dengan baik. Pemerintah hendaknya memfasilitasi dengan membangun pendidikan bagi semua orang, seperti amanat UUD 1945. Dengan pendidikan yang baik, bangsa-bangsa lain terbukti bisa menjadi bangsa yang besar seperti Jepang misalnya. Sedangkan Indonesia yang senang mengeksploitasi kekayaan alam menjadi terus terdesak dengan berbagai krisis. Oleh karena itu, pendidikan bagi semua orang harus terus dibangun bangsa ini.

Pola pemiskinan di masa lalu dengan men"jaba"kan orang, harus menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Bali. Semua orang di masa kini, seharusnya mendapatkan akses yang sama pada segala bidang kehidupan. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjejala pada saat ini, bisa membangun feodalisme baru yang bisa lebih kejam dari kolonialisme itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat Bali mestinya bertekad menghentikan semua itu di segala tingkat kehidupan.

Inspirasi Kuningan yang bisa digunakan adalah bahwa masyarakat Bali mengaturkan *tebog* yang sebagai simbol *yonis* pada hari suci ini. *Tebog* merupakan lambang kerendahan hati. Dengan demikian, para leluhur masyarakat Bali memberikan pelajaran bahwa kemenangan sejati adalah kerendahan hati untuk menolong sesama. Kesombongan adalah kemenangan "seolah-olah". Oleh karena itu, spirit Wedanta yang mengakhiri segala bentuk dialog filsafat perlu mendapatkan pemaknaan yaitu bahwa manusia adalah *atman*, yang memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan pencerahan dan menjadi pencerah bagi sesamanya.

Lebur Gangsa, Reformasi “Kekerasan” ke Persaudaraan

Pemerintah Kabupaten Bangli menggelar upacara *Lebur Gangsa* pasca bentrokan massa. Pelaksanaan upacara tersebut dilaksanakan pada Kajeng Kliwon, Anggarkasih Tambir. Upacara ini dianggap sebagai akhir dari semua kekerasan yang terjadi, seperti halnya upacara Karipu Baya pasca Bom Kuta. Pasca upacara ini, masyarakat diharapkan saling memaafkan sehingga muncul kembali keharmonisan dalam masyarakat. *Lebur Gangsa* yang merupakan ritual besar yang melibatkan berbagai komponen diharapkan bisa menjadi central dari cita-cita perdamaian masyarakat. Apakah penyelesaian konflik seperti itu, bisa selesai sebatas melakukan upacara? Apakah ritual tersebut perlu ditindaklanjuti dengan usaha-usaha lainnya?

Ritual *caru* merupakan peninggalan Tantrayana yang dibawa ketika Singasari menyerang Bali pada sekitar abad ke-13 Masehi. Pada saat itu, Patih Singasari yang bernama Kebo Parud mengadakan ritual Tantrayana di sekitar Bedahulu, Gianyar, untuk menyatukan masyarakat Bali. Kebo Parud memanggil keturunan raja-raja Bali yang masih hidup, untuk menyatakan sumpah setia kepada Singasari. Pada pemanggilan tersebut, Kebo Parud mempertontonkan sebuah ritual Tantrayana, yaitu menginjak bangkai manusia dengan menari-nari di atasnya. Patung tersebut hingga kini masih ada di Pura Kebo Edan, Bedulu, Gianyar.

Kebo Parud juga memerintahkan raja Bali untuk mengadakan ritual pemujaan terhadap Dewi Durga yang disebut dengan Galungan-Kuningan sebagai hari kemenangan. Jika raja Bali tidak melakukan pemujaan terhadap Dewi Durga maka umurnya akan pendek. Itu artinya, Singasari akan kembali menyerang dan meluluhlantakkan Bali. Raja Jaya Kusunu menyanggupi

pelaksanaan ritual tersebut, dan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk merayakan Galungan dan Kuningan.

Pengalan sejarah ini menunjukkan bahwa ritual *caru* merupakan pertunjukkan “kekuasaan” setelah terjadinya peperangan. Pada pertunjukkan tersebut, sang pemenang mempertunjukkan kekuasaannya. Siapa saja yang berani melawan kekuasaan dalam usahanya menciptakan keharmonisan maka nasibnya akan sama dengan bangkai yang terinjak tersebut. Setelah korban manusia ditiadakan maka pertunjukkan tersebut digantikan dengan binatang, yang memiliki pemaknaan sama. Maknanya adalah, penentang kekuasaan -yang memegang amanat untuk menciptakan kedamaian- adalah mati dicincang seperti binatang korban pada upacara *caru*.

Pada masa-masa lalu, pencincangan hewan korban menjadi pertunjukkan di depan umum. Masyarakat biasanya dengan tertawa menguliti hewan korban untuk *caru* tersebut. Hal ini benar-benar sebuah pertunjukkan bagaimana keharmonisan akan benar-benar dijaga dengan berbagai tindak kekerasan bila perlu. Sang penguasapun di masa lalu, bahkan hingga kini, kerap berkata jika terus membangkang maka seseorang bisa menjadi *caru*. Kata-kata ini mengundang makna yang sepadan dari musuhnya, yaitu bahwa sang lawanpun siap menjadi *caru* untuk membela kebenaran. Semua itu menunjukkan bahwa *caru* berkonotasi dengan kekerasan.

Pada pertunjukkan kekerasan tersebut, pendeta mengundang berbagai bentuk *buta kala*, wajah-wajah kekerasan. Undangan ini menunjukkan bahwa pendeta siap mengundang wajah-wajah seram, untuk mendukung kekuasaan untuk menciptakan kedamaian. Hal ini menunjukkan sebuah teror dari otoritas keagamaan bahwa kekerasan untuk menciptakan keharmonisan adalah sah, untuk memuaskn wajah-wajah keseraman tersebut. Itulah kepentingan kekuasaan pada era tradisional, untuk melaksanakan berbagai upacara.

Pada masa kolonial, pencincangan binatang mulai dibersihkan. Pembunuhan hewan korban yang biasanya dilakukan pada bagian

berdasarkan asal-usul keluarga. Dalam hal itu, kekuasaan bercorak profesionalisme sesuai dengan konsep *varna* yang pada dasarnya memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat mengekspresikan dirinya.

Dalam pemerintahan seperti itu, potensi diri dikembangkan sehingga agama pun berkembang dari pemujaan leluhur yang berbasis klan ke pemujaan dewa yang berbasis pura-pura besar. Dengan begitu, kota-kota suci berkembang. Hal ini yang mempengaruhi pembangunan-pembangunan candi di Indonesia seperti Borobudur dan Prambanan.

Kebebasan individu di India yang memunculkan pemujaan terhadap dewa-dewa kurang berpengaruh kuat ke Indonesia, khususnya Bali. Bali masih kuat mempertahankan pemujaan terhadap leluhur sehingga basis keluarga besar menjadi sangat kuat melalui gerakan *wangsa* di Bali, tetapi pada masa modern ini, individualism merambah ke mana-mana.

Hal itu terjadi karena perubahan mata pencaharian dari pertanian yang berbasis komunal ke pariwisata yang berbasis kemampuan individu. Perubahan mata pencaharian ini merubah desa-desa menjadi kota. Perubahan ini pun menggerakkan keyakinan dari pemujaan yang berpusat kepada leluhur ke pemujaan dewa-dewa. Hal itu sudah mulai kelihatan di Bali, dengan berkembangnya perguruan-perguruan dari India seperti Sai Baba dan Hare Krishna yang keluar dari pemujaan leluhur.

Akan tetapi, apa pun juga perkembangan ini, Hindu mengajarkan pembangunan setiap manusia. Manusia Hindu diharapkan menjadi manusia mandiri, sebab jalan pembebasan adalah jalan mandiri. Tiada seorang guru sekali pun yang bisa mengantarkan manusia menuju pembebasan. Hanya usaha sendiri yang bisa menghasilkan hal itu. Hal inilah yang oleh Gandhi disebut dengan *sarvodaya*.

Dalam konteks kemasyarakatan, setiap orang harus bisa memberikan kontribusi. Karena itu, pendidikan yang merata bagi setiap orang adalah keharusan dalam generasi Hindu, termasuk juga kepada perempuan Hindu. Hal inilah yang mendorong

cukup. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit untuk menghentikan berbagai tindak kekerasan. Langkah-langkah kongkrit tersebut adalah rekonsiliasi sosial.

Rekonsiliasi sosial tersebut sebenarnya ada dalam proses upacara tersebut, yaitu sembahyang bersama. Oleh karena itu, nilai-nilai kekerasan dalam *caru* hendaknya bisa direformasi pada inti upacara seperti itu. Artinya, pada setiap upacara *caru*, proses menghubungkan diri dengan Sang Pencipta, hendaknya menjadi bagian utama. Sebab, pada proses seperti itulah, tumbuh sebuah kesadaran bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan. Weda -weda menyebutkannya sebagai *Brahma Putra* (putra Tuhan). Sebagai putra Tuhan maka setiap orang sesungguhnya adalah bersaudara. Penumbuhan makna seperti ini memang mengalami hambatan-sisa kepercayaan masa lalu yang berbasis kasta (klan). Tetapi, masyarakat Bali perlu melakukan proses pembangunan solidaritasnya, dengan mengesampingkan akar-akar perpecahan di masa lalu.

Berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, merupakan fakta sejarah. Tetapi fakta sejarah tidak selalu merupakan kebenaran di masa kini. Fakta sejarah tentu harus diuji pada tantangan kekinian. Pada masa kini, tantangan Bali adalah membangun persaudaraan. Karena itu, perbedaan-perbedaan yang ada sebagai fakta sejarah, mesti dikesampingkan. Masyarakat Bali harus berani membangun sejarah baru, yaitu sejarah berbasiskan kepada persaudaraan, kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Semua ini hanya akan tumbuh apabila ada komunikasi yang baik.

Komunikasi adalah salah satu hambatan pembangunan rekonsiliasi di Bali. Bahasa Bali, yang bertingkat-tingkat menyulitkan komunikannya menjadi akrab. Perkembangan belakangan, Bahasa Indonesia menjadi “jalan tengah” dari kebuntuan tersebut, tetapi ini masih diterima di kalangan perkotaan. Jalan tengah yang relatif mungkin adalah melakukan reformasi bahasa (Bali). Ide-ide seperti ini, memang sudah tampak pada media-media berbahasa Bali, tetapi dalam realitas masih ada berbagai ketidaksepahaman, antara generasi muda dengan generasi

tua. Di tengah-tengah kebuntuan ini, Bali perlu kembali pada sisa-sisa tradisi di desa pakraman. Desa pakraman sebenarnya adalah masyarakat egaliter yang membangun pola komunikasi yang akrab. Tetapi lembaga ini memang berjalan dalam perjalanan sejarah yang panjang, seperti Gangga di India yang melalui Devaprayag yang bening, terus mencapai daerah-daerah industri yang mengotorinya.

Caru juga mesti diletakkan pada makna pembangunan persaudaraan seperti itu. *Caru* hendaknya tidak berhenti sebatas ritual pesta-pesta pengorbanan binatang, tetapi sampai pada penghentian sifat-sifat kebinatangan. Penghentian sifat-sifat kebinatangan, tentu tidak mesti dilakukan dengan menyebut orang yang tidak tunduk sebagai “binatang” yang bisa dikorbankan, tetapi harus dipakai sebagai pembangunan kesadaran bersama, menuju kepada pencerahan. Sejarah membuktikan bahwa penggunaan kekerasan untuk menghentikan kekerasan, hanya akan menimbulkan luka-luka baru, bahkan bisa saja memperpanjang daftar kekerasan.



Epilog Menuju *Sarvodaya*

Wacana-wacana yang muncul dalam tulisan ini adalah wacana untuk membangun pemberdayaan masyarakat melalui spirit Hindu. Di dalamnya ada wacana pariwisata dan pembangunan pada umumnya. Satu garis lurus yang dapat diambil dari wacana-wacana ini adalah bahwa masyarakat harus mandiri melalui kakinya sendiri.

Harapan terhadap pemerintah, bahkan kepada raja yang mengaku dewa sekali pun ternyata telah terbukti tidak berhasil dalam perjalanan sejarah masyarakat Bali. Karena itu, tidak ada pilihan lain, Wedantasara menyatakan bahwa setiap manusia adalah *atman* karena itu kebangkitan bergantung kepada usaha setiap manusia, bukan usaha sekelompok penguasa.

Pesan itu mengalir pada sendi-sendi dasar kebudayaan Bali yang dijiwai agama Hindu. Karena fondasi kebudayaan Bali dibangun para rsi. Para rsi yang belum bertemu dengan kekuasaan raja, selalu berdasarkan kepada kemampuan sendiri atau pembangunan kekuatan rakyat, sebab kebudayaan para rsi itu sebenarnya adalah berasal dari pelariannya ke dalam hutan (*aranyaka*) dari masyarakat yang dihegomoni kuasa.

Akan tetapi kemudian, banyak kehidupan para rsi yang dicemari oleh ide-ide kuasa untuk kepentingan pribadi. Inilah yang disebut Pedanda Baka dalam kisah Tantri. Para rsi yang bermain-main dengan kuasa untuk keuntungan pribadi sangat rentan dengan penyimpangan dharma. Tetapi ada juga rsi yang berpolitik untuk kepentingan dharma seperti halnya Chanakya. Beliau berhasil meruntuhkan kekuasaan Magadha dan membangun dinasti baru yang disebut Maurya.

Dinasti Maurya banyak meniru ide-ide Monarkhi modern di mana raja hanya sebagai simbol, sedangkan pemerintahan dipegang perdana menteri yang disebut *amadya* yang berasal dari orang-orang yang ahli dalam pemerintahan, dengan tidak

- Stuart-Fox, David. J. 2002. *Pura Besakih: Temple, Religion and Society in Bali*. Leiden: KITLV.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Titib, I Made. 2004. *Purana, Sumber Ajaran Hindu Komprehensif*. Surabaya: Paramita.
- Titib, I Made. 2008. *Itihasa Ramayana & Mahabharata (Kajian Kritis Sumber Ajaran Hindu)*. Surabaya: Paramita.
- Vickers, Andrian. 2012. *Bali Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.



pemberdayaan setiap orang dalam masyarakat Hindu, termasuk perempuan.

Pariwisata memberikan ruang ini kepada masyarakat Bali, sebab pariwisata memerlukan banyak sekali pekerja-pekerja perempuan. Bahkan pekerja-pekerja perempuan lebih dominan dalam dunia pariwisata, mulai dari kantor depan sampai urusan cuci mencuci dan makanan. Hal ini menimbulkan berbagai perdebatan nilai dalam masyarakat.

Di dalam nilai masa lalu, perempuan adalah murid dari suaminya atau yang disebut *aguru laki* tetapi dengan pendidikan dan pengalaman perempuan yang semakin banyak, seringkali suami kalah dari perempuan, sehingga hubungan keluarga menjadi berubah. Perubahan-perubahan ini akan mendorong munculnya budaya baru, bahkan teologi baru di Bali.

Perkembangan yang seperti ini, akan lebih lagi mendorong individualism di Bali. Ke mana Bali setelah itu? Tempat-tempat berkumpul yang akrab seperti keluarga dan desa akan bergerak ke tempat-tempat berkumpul yang berjarak di tempat-tempat pertemuan formal. Senda gurau akan berubah menjadi formal. Apakah Bali yang ramah akan masih ada setelah itu?

Di tengah kecenderungan seperti itu, wacana-wacana ini muncul untuk memberikan spirit baru bagi kegalauan zaman. Spirit tentang dialog seperti dalam subak dan demokrasi seperti dalam desa pakraman menjadi inspirasi bagi pembangunan Bali modern.

Dialog dan demokrasi tradisional itu mungkin sudah tidak menunjukkan bentuk aslinya saat ini. Sebab hegemoni kerap sekali muncul. Tetapi nilai-nilai yang mendasari tumbuhnya subak dan desa pakraman adalah nilai-nilai dialog dalam kesetaraan walaupun kemudian feodalisme dan kapitalisme mendominasi keputusan-keputusan mereka kemudian.

Sebagai anak dari budaya ini, setiap orang wajib mengingkat kembali terhadap nilai-nilai luhur para leluhurnya. Karena itu, tulisan ini anggap saja sebagai pengingat dari perjalanan waktu yang panjang. Tetapi yakinlah tulisan ini tidak untuk

mengajak orang mengenang masa lalu yang indah, sebab sulit juga untuk menentukan mana masa lalu yang indah.

Tulisan-tulisan ini sebenarnya ingin mengajak untuk bermimpi tentang masa depan yang indah. Masa depan, hanya bisa dirajut dengan usaha yang sungguh-sungguh melalui kerja keras. Karena itu, ledakan-ledakan dalam tulisan ini, jangan dipandang sebagai hinaan, tetapi pandanglah sebagai cambuk untuk kemajuan bersama.

Sebagai bagian dari kebudayaan besar ini, tidak ada tempatnya untuk berkecil hati. Di tengah keping-keping penjajahan yang panjang, leluhur kita masih menyisakan sepotong peninggalan yang berharga yang akan mengangkat masyarakat ini ke puncak peradaban. Kita harus bangkit untuk membebaskan diri kita dari perbudakan dan kebodohan. Karena esensi dari diri kita adalah kekuatan yang luar biasa (*atman*).

Tidak ada satu pun agama di dunia yang mengajarkan bahwa umatnya adalah percikan dari Tuhan. Sebagian agama mengajarkan umatnya adalah hamba Tuhan, tetapi Hindu berani menyatakan bahwa setiap manusia adalah Tuhan. Pernyataan ini adalah pernyataan pembebasan bagi setiap orang.

Pernyataan ini menjelma menjadi tradisi tentang penghormatan terhadap setiap individu. Dalam perjalanan, ada berbagai hambatan dalam menjalankan tradisi ini, tetapi nilai ini kembali menjadi relevan dalam kehidupan manusia modern. Tulisan dalam buku ini mengangkat hal itu sebagai pijakan dalam membangun masa depan.

Semoga wacana-wacana ini bisa menjadi pegangan bagi pembangunan masyarakat Hindu modern.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastya, IB. 1982. *Kakawin Siwaratrikalpa karya Mpu Tanakung*. Denpasar: Wyasa Sanggraha.
- Cobuild, Collins. 1997. *English Distionary*. London: HarperCollinsPublisher.
- Gelebet, I Nyoman. 1994. *Kawasan Tanah Lot bukan untuk BNR*. Denpasar: Bali Post (publikasi 17 Januari 1994).
- Gandhi, MK. 1978. *Gandhi sebuah Otobiografi (penerjemah Gedong Bagoes Oka)*. Denpasar: Canti Sena.
- Goyal, SR. 1985. *Kautilya and Megasthenes*. New Delhi: Kusumanjali Prakashan.
- Hitchcock, Michael dan I Nyoman Darma Putra. 2007. *Tourism, Development and Terrorism in Bali*. England: ASHGATE.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Manuaba, A. 1993. *Lapangan Golf Si Maniak Air dan Pembawa Bencana Lingkungan*. Denpasar: Bali Post (publikasi 4 Desember 1993).
- Nardholt, Henk Schulte. 2006. *The Spell of Power, Sejarah Politik Bali 1650-1940*. Jakarta: KITLV Jakarta.
- Olson, Steve. 2002. *Mapping Human History*. Jakarta: Serambi.
- Prabhupada, Swami. 2006. *Bhagavad Gita menurut Aslinya. Indonesia*: Bhaktivedanta Book Trust.
- Picard, Michel. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya, Budaya Pariwisata*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Radakrishnan, S. 1994. *The Principal Upanisads*. New Delhi: HarperCollins Publisher India.
- Reuter, Thomas. 2005. *Custodians of the sacred mountains: budaya dan masyarakat di pegunungan Bali*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ridley, Matt. 2005. *GENOM Kisah Spisies Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santos, Arysio. 2010. *Atlantic, The Lost Continent Finally Found*. Jakarta: Ufuk Press.



Dr. I Gede Sutarya, SST.Par, M.Ag adalah Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Pernah menjadi Ketua Senat Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar 2016-2017. Tahun 2017 – 2019 ini adalah Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu, Pascasarjana, IHDN Denpasar. Studi awalnya adalah Diploma 4 Pariwisata, yang kemudian dilanjutkan pada S2 Brahma Widya IHDN Denpasar karena ingin mendalami pertemuan pariwisata dengan agama Hindu. Studi Doktor dilanjutkan pada bidang pariwisata untuk menemukan ranah-ranah agama yang bermain pada ranah pariwisata. Tulisan-tulisannya adalah kritik-kritik terhadap pembangunan, terutama pembangunan pariwisata yang dilakukan di media massa sejak tahun 1994. Kasus BNR pada tahun 1994, memompa pikiran-pikiran kritisnya terhadap pariwisata Bali. Setelah menjadi akademisi tahun 2009, penelitian-penelitiannya juga mengarah kepada studi-studi terhadap pariwisata Bali yang menggunakan sumber-sumber daya agama dan budaya. Studi-studi ini diharapkan bisa membangun telaah kritis terhadap pariwisata budaya yang dirancang di Bali. Pengetahuannya dalam agama, budaya dan pariwisata menjadi dasar bagi studi-studinya dalam bidang pariwisata berikutnya.

Catatan

Catatan